

DINAMIKA KERUKUNAN UMAT  
BERAGAMA DI TANA LUWU:  
PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪ'AH



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Doktor Dirasah Islamiyyah Konsentrasi Syariah/Hukum Islam  
pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Oleh

FIRMAN MUHAMMAD ARIF

NIM: 80100314044

**Promotor:**

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

**Kopromotor:**

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.

Dr. H. Kasjim Salenda, S.H., M.Th.I.

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR  
1439 H/2017 M

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Muhammad Arif  
NIM : 80100314044  
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 01 Februari 1977  
Program : Doktor  
Program Studi : Dirasah Islamiyah  
Konsentrasi : Syari'ah Hukum Islam  
Alamat : Jl. Bakau SMA IV Balandai, Bara, Palopo  
Judul : **Dinamika Kerukunan Umat Beragama di *Tana* Luwu  
Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah***

menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa disertasi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka disertasi atau gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 September 2017

Penyusun,

Firman Muhammad Arif  
NIM: 80100314044

## PENGESAHAN DISERTASI

Disertasi dengan judul *"Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah"*, yang disusun oleh Saudara Firman Muhammad Arif, NIM: 80100314044, telah diujikan dalam Sidang Ujian Disertasi Terbuka yang diselenggarakan pada Rabu, 9 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqā'dah 1438 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu Hukum Islam/Syariah.

### PROMOTOR:

1. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

### KOPROMOTOR:

1. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.
2. Dr. H. Kasjim Salenda, S.H., M.Th.I.

### PENGUJI:

1. Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, MA.
2. Dr. H. Nurman Said, MA.
3. Dr. H. Supardin, M.HI.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
5. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.
6. Dr. H. Kasjim Salenda, S.H., M.Th.I.

Makassar, 25 September 2017

Diketahui oleh:

Direktur Pascasarjana  
IAIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag.  
NIP. 19561231 198703 1 022

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء  
والمرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah, serta inayah Allah swt. dan ikhtiar serta arahan dan bimbingan yang ikhlas dari promotor/kopromotor dan penguji, penyusunan disertasi ini dapat diselesaikan sebagai tugas akhir pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penyelesaian disertasi ini tidak dapat terlaksana tanpa keterlibatan berbagai pihak. Karenanya, penghargaan yang tak terhingga dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Mardan, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., selaku Wakil Rektor II, dan Prof. Dra. Hj. St. Aisyah Kara, M.A., Ph.D., selaku Wakil Rektor III UIN Alauddin Makassar atas jasa dan jerih payahnya dalam mengatur, menyiapkan sarana dan prasarana belajar, sehingga dapat menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar ini.
2. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag., selaku Asdir I, dan Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Asdir II, Prof. Dr. Hj. Muliaty, M.Ag., selaku Asdir III Pascasarjana UIN Alauddin Makassar atas jasa-jasa beliau yang begitu besar dalam membina dan meningkatkan mutu Pascasarjana selama menimba ilmu pengetahuan.
3. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., selaku Promotor, Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag., selaku Kopromotor I dan Dr. H. Kasjim Salenda, S.H., M.Th.I., selaku kopromotor II, yang telah banyak meluangkan waktunya yang

sangat berharga dalam rangka memberikan bimbingan selama menyelesaikan disertasi ini.

4. Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, M.A., selaku Penguji Utama dan Dr. H. Nurman Said, M.A., selaku Penguji II dan Dr. H. Supardin M.HI., selaku Penguji III yang telah banyak memberikan masukan dan meluangkan waktunya yang berharga dalam rangka memberikan bimbingan selama menyelesaikan disertasi ini.
5. Para Guru Besar dan Dosen Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan kontribusi ilmiah sehingga membuka cakrawala berpikir dalam menghadapi berbagai persoalan.
6. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., (Rektor IAIN Palopo), Prof. Dr. H. Nihaya M., M. Hum. dan Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc., M.A. (mantan Ketua STAIN Palopo) yang banyak memberikan perhatian dan dorongan sehingga dapat menyelesaikan studi pada Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Direktur Pusat Bahasa UIN Alauddin Makassar yang dengan ikhlas bersama seluruh *team work*-nya memberikan bimbingan bahasa Arab dan bahasa Inggris sehingga persyaratan kelulusan dalam rangka penyelesaian studi ini dapat berjalan dengan baik.
8. Kepala Perpustakaan Pusat UIN Alauddin Makassar dan Kepala Perpustakaan IAIN Palopo beserta segenap stafnya, yang telah menyediakan literatur dan memberikan kemudahan untuk dapat memanfaatkan secara maksimal demi penyelesaian disertasi ini.
9. Kepala Bagian Administrasi dan karyawan Program Pascasarjana UIN Alauddin yang banyak membantu kelancaran studi.
10. Terkhusus kepada kedua orang tua ayahanda H.M. Arif Usman dan almarhumah ibu tercinta Hj. Mahfia Pawelloi, yang telah berhasil dan berjasa mengasuh, mendidik, menyayangi, dan mendoakan sejak kecil hingga sekarang dengan penuh ketulusan serta keikhlasan. Atas pengorbanan, serta restu keduanya menjadi sumber kesuksesan.

11. Istri tercinta Fauziah Amrah, S.E.I., yang telah memberikan motivasi dengan segala pengertian dan kesabarannya sehingga mampu menyelesaikan disertasi ini. Begitu pula putriku tercinta Zaimah Firman, yang senantiasa mendoakan, mendukung dan tabah dalam berbagai hal dengan penuh harapan agar dapat menyelesaikan studi S3 ini dalam waktu yang semestinya.
12. Dosen dan karyawan IAIN Palopo serta segenap sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam suka dan duka selama menjalani masa studi.

Menyadari masih banyak pihak yang terkait dalam penyelesaian disertasi ini sehingga belum sempat disebutkan namanya satu persatu. Maka dengan demikian, permohonan maaf diungkapkan sembari mendo'akan semoga Allah swt. memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Makassar, 20 September 2017  
Penulis,

**Firman Muhammad Arif**  
**NIM. 80100314044**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

Halaman	
JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI .....	ii
PERSETUJUAN DISERTASI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	v
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	viii
ABSTRAK .....	xv-xvii
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	14
C. Rumusan Masalah.....	18
D. Kajian Pustaka .....	18
E. Tujuan dan Kegunaan .....	23
 BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	 25
A. Sekilas tentang Terminologi Kerukunan Umat Beragama .....	25
B. Kerukunan Umat Beragama Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> .....	36
C. Tinjauan Mengenai Kerukunan Umat Beragama dalam Islam .....	42
1. Tinjauan dalam Alquran.....	42
2. Tinjauan dalam Sunnah Rasulullah.....	55
D. Peran Islam dalam Membina Kerukunan Umat Beragama .....	58
1. Masa Rasulullah .....	58
2. Masa Sahabat .....	71
3. Pola Kerukunan di Indonesia .....	78
E. Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Indonesia.....	89
1. Masa Orde Lama .....	89
2. Masa Orde Baru .....	93
3. Masa Orde Reformasi .....	104
F. Analisis Berbagai Kasus Intoleransi di Indonesia.....	110
G. Aktualisasi Pengembangan Nilai-nilai <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dalam Kerukunan Beragama.....	115
H. <i>Qawā'id Fiqhiyah</i> sebagai Landasan Perilaku Kerukunan Umat Beragama .....	129
I. Konstruksi Nilai Kebersamaan dalam Kerukunan Beragama.....	138
J. Kerangka Konseptual.....	149-150
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	 151
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	151
B. Pendekatan Penelitian.....	157
C. Sumber Data .....	159
D. Metode Pengumpulan Data .....	161



E. Instrumen Penelitian .....	162
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	163
G. Pengujian dan Keabsahan Data .....	164
<b>BAB IV DINAMIKA KERUKUNAN BERAGAMA DI TANA LUWU .....</b>	<b>165</b>
A. Realitas Kerukunan Umat Beragama di <i>Tana</i> Luwu.....	165
1. Realitas Kerukunan Beragama di Kab. Luwu .....	176
a. Konflik Padang Sappa .....	178
b. Perpindahan Agama & Pernikahan.....	181
c. Peliharaan Hewan Ternak dan Relasi Sosial .....	182
2. Realitas Kerukunan Beragama di Kota Palopo .....	185
a. Eksistensi Agama dan Kepercayaan selain dari Agama Resmi ....	187
b. Peternakan Hewan .....	189
c. Pernikahan dan Transformasi Agama.....	189
d. Pendirian Rumah Ibadah .....	192
3. Realitas Kerukunan Beragama di Kab. Luwu Utara .....	194
a. Selayang Pandang Konflik di Luwu Utara .....	197
b. Daerah Potensi Konflik Wilayah Kab. Luwu Utara .....	204
c. Konflik Baebunta-Sabbang.....	204
d. Konflik Banyuurip-Karangan .....	206
e. Konflik Kalotok-Pongko .....	207
f. Konflik Buangin-Dandang (1990-2012) .....	207
4. Realitas Kerukunan Beragama di Kab. Luwu Timur .....	209
a. Relasi Sosial Antarumat Beragama .....	213
b. Peliharaan Hewan Ternak.....	216
c. Realitas Benturan Kultural dalam Umat Lintas Agama .....	220
5. Analisis dari Realitas Kerukunan Umat Beragama di <i>Tana</i> Luwu .....	228
B. Penerapan Solusi Konflik dalam Realitas Kerukunan Umat Beragama di <i>Tana</i> Luwu .....	236
C. Implementasi Nilai-nilai <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> dalam Realitas Kerukunan Umat Beragama di <i>Tana</i> Luwu .....	241-258
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>259</b>
A. Kesimpulan .....	259
B. Implikasi Penelitian .....	262-263
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>264-277</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ی	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...	<i>fathah, alif, yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

#### 6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال

(*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)  
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*  
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
 النَّوْعُ : *al-nau'*  
 شَيْءٌ : *syai'un*  
 أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

## 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā’ marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta‘ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## ABSTRAK

Nama : Firman Muhammad Arif  
Nim : 80100314044  
Konsentrasi : Syariah dan Hukum Islam.  
Judul : Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu  
Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*.

---

Disertasi ini membahas mengenai “Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu: Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*” dengan fokus permasalahan: bagaimana realitas kerukunan umat beragama di Tana Luwu, kedua: bagaimana penerapan solusi terhadap potensi konflik dalam realitas kerukunan umat beragama di Tana Luwu dan ketiga: bagaimana penerapan nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* dalam realitas kerukunan umat beragama di Tana Luwu.

Penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif dan eksploratif dengan menggunakan multi pendekatan seperti teologis normatif, yuridis, historis, sosiologis, keamanan, dan kesejahteraan. Berbagai pendekatan tersebut berkemampuan menjelaskan kondisi dan dinamika kerukunan umat beragama, baik sebelum dimekarkan atau pasca pemekaran.

Realitas kerukunan beragama di Tana Luwu berjalan dengan berbagai dinamika yang terjadi didalamnya baik sebelum pemekaran atau pasca pemekaran, seperti adanya konflik, potensi konflik, upaya memulihkan keadaan yang semestinya sehingga terwujud kedamaian dan komitmen kebersamaan yang diwujudkan antar umat beragama. Kerukunan umat beragama berkaitan dengan internal, antar umat beragama dan umat dengan pemerintah. Realitas kerukunan umat beragama dengan berbagai dinamika didalamnya perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti personal, konsep agama serta pola penyebaran sehingga adanya konflik bisa dideteksi lebih dini. Hasil penelitian berpeluang terjadinya konflik realistis dan non-fisik dalam dinamika kerukunan yang bersumber dari faktor keagamaan atau sebaliknya. Faktor non keagamaan cenderung menjadi penyebab daripada faktor keagamaan sebagai pemicu intoleransi yang disebabkan perbedaan nilai sosial budaya yang mengusik toleransi umat beragama dan aksi intoleran. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik sehingga perlu diminimalisir dengan pengawasan berlapis dan upaya deteksi dini dengan pengadaan berbagai program yang dapat meningkatkan kesadaran umat dalam menjaga kerukunan. Adapun faktor keagamaan seperti propaganda penyiaran agama dengan modus tertentu, kekeliruan mengamalkan ajaran, dan penyimpangan fungsi bangunan meskipun tidak berdampak pada konflik fisik namun tetap merusak struktur keagamaan yang seharusnya dijaga. Menjaga sendi-sendi syara' perlu ditanamkan secara kokoh dengan ajakan kepada masyarakat untuk menggiatkan kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya protektif, responsif dan aspiratif.

Penerapan nilai-nilai dalam konsep *maqāsid al-syarī'ah* diarahkan pada aktualisasi dan konteks, bukan pada formalitas dan teks. Keberadaan umat Islam yang mayoritas dengan nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* diintegrasikan dengan eksistensi agama sebagai pemersatu yang membangun terobosan inovatif dan meminimalisir egoisme dengan berbagai kegiatan yang menonjolkan segi-segi persamaan, mentoleransi perbedaan serta kegiatan sosial yang melibatkan umat lintas agama.



## ABSTRACT

Nama : Firman Muhammad Arif  
N I M : 80100314044  
Title : The Dynamics of Religious Concord in *Tana* Luwu: Maqāṣid al-Syarī 'ah Perspective.

---

This dissertation discusses about "The Dynamics of Religious Concord in TanaLuwu: The Perspectives of Maqāṣid al-Syarī 'ah" that focus on the problems: how the reality of religious concord in Tana Luwu, second: how to apply the solutions to the potential conflicts in the reality of religious concord in TanaLuwu and the third: how to apply the values maqāṣid al-syari'ah 'ah values in the reality of religious concord in Tana Luwu.

The study was a field research that is descriptive and exploratory by using multiple approaches, such as the normative theological, juridical, historical, sociological, tranquility and prosperity. Various approaches are capable to explain the conditions and dynamics of religious concord. The reality of religious concord in Tana Luwu run with various dynamics that occur inside as ever conflict, the potential of conflict, efforts to restore the appropriate circumstances to realize peacefulness and the commitment of togetherness that embodied among religions. Religious concord relates to the internal, inter-religious and the religious with the government.

The reality of religious concord with the various dynamics inside need to consider the various aspects such as personal, religious concept and pattern of spread so that the conflict can be detected early. The results showed that realistic chance of conflict and non-physical in the dynamics of the religious concord that comes from the religious factor, or vice versa.

Non-religious factors are likely to be the cause rather than the religious factor as a trigger intolerance that caused differences in socio-cultural values that disturb religious tolerance and intolerant acts. This potential conflict that needs to be minimized by the layered surveillance and early detection efforts by procuring various programs to increase awareness religious in maintaining concord. The religious factors such as religious broadcasting propaganda with a specific mode, the mistake teachings of teaching and deviation function of building although has no impact on the physical conflict but still damage religious structure that should be safeguarded. Keeping joints Personality 'needs firmly implanted by supporting the public to encourage religious activities that are protective, responsive and aspirational.

Development of values in the maqāṣid al-syarī'ah concept aimed at actualization and contexts, not on formalities and text. The existence of Muslims are the majority of the maqāṣid al-syarī'ah 'ah values integrated with the existence of religion as a unifier that develop innovative breakthroughs and minimize egotism with a variety of activities that highlight the aspects of equality, to tolerate differences and social activities that involve interfaith community.

## تجريد البحث

الاسم : فرمان محمد عارف  
رقم القيد : 80100314044  
التخصص : الشريعة الاسلامية  
العنوان : ديناميكية الانسجام الديني – وجهة نظر مقاصد الشريعة

تبحث هذه الرسالة عن ديناميكية انسجام أمة الأديان – وجهة نظر مقاصد الشريعة مع التركيز في الأمور التالية: الأول، كيف واقع الانسجام الديني في أرض لووو. والثاني، كيف تطبيق حل امكانية الصراع في واقع الانسجام بين أمة الأديان. والثالث، وكيف تعزيز قيم مقاصد الشريعة في واقع الانسجام بين أمة الأديان التي حدثت في أرض لووو.

هذا الرسالة بحث ميداني وصفي وعميق مع استخدام المنهج الشرعي والمنهج القانوني والمنهج التاريخي والمنهج الاجتماعي ومنهج الأمن والرخاء. وتُعتبر هذه المناهج قادرة في بيان الأحوال و شرح ديناميكية الانسجام بين أمة الأديان قبل الانفصال وبعد الانفصال.

سار واقع الانسجام بين أمة الأديان في أرض لووو على ما مايرام، إما قبل الانفصال أو بعد الانفصال. ومن تلك الديناميكيات التي حدثت منها وجود الصراع والصراعات المحتملة وجهود انتعاش الحالة كما سبق من قبل حتى يتحقق الهدوء ويلتزم العمل الجماعي الذي يتجسد بين أمة الأديان. يتعلق الانسجام بين أمة الأديان داخل الأمة نفسها وبين أمة الأديان المختلفة و أمة الأديان مع الحكومة. نظر الباحث واقع أمة الأديان مع الديناميكيات المختلفة بما فيها الجوانب المختلفة منها الجانب الفردي وجانب مفهوم العقيدة حتى يمكن كشف وجود الصراع المحتمل في وقت مبكر. أظهرت نتائج البحث امكانيات الصراع إلى الصراع الواقعي وإلى الصراع غير الواقعي، أو إلى الصراع البدني وغير البدني التي حدثت هذه الامكانيات في انسجام أمة الأديان بسبب العوامل الدينية والعوامل غير الدينية وعكسها.

تميل العوامل غير الدينية أكثر هيمنة وسيطرة من العوامل الدينية كاطلاق عدم التسامح بسبب اختلاف القيم الاجتماعية والقيم الثقافية التي تدفع عدم التسامح بين أمة الأديان والميل إلى الصراع. تمكن هذه الحالة أن تؤدي إلى الصراع وتحتاج معالجة الحالة بالمراقبة الفعالة ويحتاج الكشف المبكر عن طريق اجراء البرامج التي تزيد وعي الأمة. وأما العوامل الدينية مثل دعاية انتشار الدين على النمط المعين والخطأ في ممارسة العقيدة وانحراف وظائف البناء رغم أن العوامل لا تؤثر إلى الصراع البدني لكن تخرب الأسس الدينية التي تجب حمايتها. تجب حماية مبادئ الشريعة بحث الناس على تكثيف الأنشطة الواقية والملمة.

لابد توجيه تدريب القيم في مفاهيم مقاصد الشريعة إلى الادراك والسياق لا إلى الشكليات والنص. وجود الدين كالموحد وانتشار القيم في مقاصد الشريعة يبني الاختراقات المبتكرة إلى تقليل الأنانية بالأنشطة التي تميل إلى عناصر المعادلة وتحمل الخلافات والأنشطة الاجتماعية التي تشرك المجتمع من مختلف الأديان

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Pemahaman makna dan peran agama terkadang menimbulkan perbedaan pada setiap orang. Dalam aspek ritual ibadah sebagian dimaknai dengan pengabdian kepada sesama makhluk dan lainnya memaknai sebagai perilaku baik, dan lainnya sebagai pengorbanan untuk suatu keyakinan.<sup>1</sup> Pengertian agama yang dapat diterima oleh semua penganut agama terasa sulit jika tidak dapat dikatakan mustahil. Maka tidak heran jika muncul beberapa ahli yang tidak tertarik mendefinisikannya karena dianggap sebagai kelihaian bersilat lidah. Kesulitan umum ada pada perbedaan cara memahami dan menerima arti agama itu sendiri.<sup>2</sup>

Kecenderungan yang berkembang merupakan peran kunci yang dimainkan oleh interaksi dinamis antara berbagai hukum infra-struktur dan supra-struktur. Kehidupan yang berkembang diperlukan modifikasi berkelanjutan memajukan dan mengenalkan semangat baru untuk melestarikan dan melindungi dinamika tahapan-tahapan peradaban yang lebih maju lagi. Tindakan melanggengkan status quo dalam hukum supra-struktur biasanya menggiring pada kemunduran.<sup>3</sup>

Islam mengatur semua aspek kehidupan pengikutnya, agama, sosial, politik, dan tanpa terkecuali karena Islam tidak pernah memberikan instruksi yang pasti dalam wilayah hukum yang berkemungkinan mengalami perubahan sesuai dengan persoalan yang berubah. Hukum-hukum infra-struktur secara

---

<sup>1</sup>Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual* (Cet. I; Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. viii

<sup>2</sup>Nurman Said, *Merawat Persaudaraan Sejati di atas Keberagaman Agama* (Cet. I; Makassar Alauddin Press, 2012), h. 1-2.

<sup>3</sup>Abdurrahman Abdulkadir Kurdi, *The Islamic State A Study in The Islamic Holy Constitution*, terj. Ilzanuddin Ma'mur dengan judul: *Tatanan Sosial Islam, Studi Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 79.

komprehensif ditentukan dan diatur seperti peribadatan keagamaan dan peraturan perorangan. Berbagai hukum supra-struktur dalam Islam hanya memberikan garis-garis besar yang mendasar karena selalu mengalami dinamika yang sesuai dengan persoalan yang berlaku sebagai jaminan kesinambungan yang diatur oleh sistem Islam untuk berubah terus menerus dan kesiapan menjawab keadaan.<sup>4</sup>

Jaminan hidup berkelanjutan tidak terbatas pada penganutnya namun meliputi kebebasan beragama bagi non-muslim. Sejarah menunjukkan bahwa ragam keyakinan tidak menghalangi untuk hidup berdampingan pada masa Rasulullah saw., sahabat dan dinasti-dinasti Islam. Interaksi sosial antara tokoh agama lainnya dilakukan dengan jalinan komunikasi yang baik dan penuh tanggung jawab. Umat Islam meyakini kebenaran yang dianutnya tetapi dilarang mengklaim kebenaran yang dianut karena mereka selalu menutup pendapatnya dengan kalimat hanya Allah-lah yang lebih tahu mana yang benar.<sup>5</sup>

Ciri dasar sistem politik Islam adalah persamaan, keadilan, kebebasan, nasionalisme muslim, dan status non-muslim dibawah sistem Islam.<sup>6</sup> Konsep keberagamaan dalam Alquran mengajarkan prinsip kebersamaan, saling menghargai dan menghormati dengan non muslim yang begitu jelas menunjukkan bahwa toleransi bukan ikut melaksanakan ibadah pemeluk agama lain. Hal ini ditegaskan Allah swt. dalam QS al-Isrā'/17: 73-75

وَأِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ خَلِيلًا  
(٧٣) وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (٧٤) إِذَا لَا أَذُقْنَاكَ ضِعْفَ  
الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٧٥)

<sup>4</sup>Abdurrahman Abdulkadir Kurdi, *The Islamic State A Study in The Islamic Holy Constitution*, h. 80.

<sup>5</sup>Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*, h. ix

<sup>6</sup>Abdurrahman Abdulkadir Kurdi, *The Islamic State A Study in The Islamic Holy Constitution*, h. 81.

Terjemahnya:

Sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah Kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap Kami; dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. Dan kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka, kalau terjadi demikian, benar-benarlah Kami akan rasakan kepadamu (siksaan) berlipat ganda di dunia ini dan begitu (pula siksaan) berlipat ganda sesudah mati, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongpun terhadap Kami.<sup>7</sup>

Dalam surah al-Isrā ayat 73-75 tersebut, Allah swt. menginformasikan dengan menguatkan hati Rasulullah saw. menetapkan perannya, menjaga kesucian dari berbagai keburukan dan tipu daya orang-orang yang berbuat jahat terhadapnya. Terdapat didalamnya pemahaman yang keliru mengenai konsep keberagamaan. Tawaran terhadap Rasulullah saw. untuk sekedar duduk-duduk bersama mereka, dan berjanji akan mengikuti dakwah Rasulullah saw. Namun Allah swt. membuka rahasia potensi buruk jika mengikuti kemauan pemeluk agama lain tersebut dalam ayat 73 tadi. Jika sudah menjadi sahabat, maka sulit menolak ajakan-ajakan selanjutnya yang mungkin menjerumuskan keyakinan.<sup>8</sup>

Konsep damai yang islami jauh dari bibit-bibit permusuhan dan dapat dipahami bahwa sikap toleransi dan saling menghargai merupakan seruan dasar agama Islam. Kaum muslimin bisa menjadi contoh bagi bangsa-bangsa dunia sejak dulu hingga kini dalam hal menjunjung tinggi sikap toleransi dan saling menghormati. Selama kaum non-muslim masih bersedia hidup bersama, memahami keadaan, masing-masing tidak membuat makar terhadap akidah muslimin serta menjaga stabilitas kehidupan sosial bernegara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Alquran al Karim* (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 435.

<sup>8</sup>Lihat, Abū al-Fida Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qursyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm* (Cet. II; Riyāḍ: Dār Ṭibā' li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999) [CD-ROM].

<sup>9</sup>Muhammad Ashri & Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian* (Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 186.

Emosi keagamaan dan mudah diprovokasi adalah aksi destruktif yang tidak terkendali dan semakin menggambarkan kejahatan umat lain atas umat sendiri. Pesan kearifan agama dari agamawan untuk mengendalikan seakan tak berdaya menghadapi kobaran emosi yang disemangati oleh tindakan pembelaan atas nama Tuhan. Maka tidak dipungkiri jika dalih simbol agama menjadi pengobar nafsu yang dapat merusak dan sulit dikendalikan apalagi dianggap sebagai sesuatu yang terpuji.<sup>10</sup>

Prinsip dasar beragama mengarahkan dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Maka agama tidak terbatas pada wilayah geografis dan tidak terbentuk dalam negara.<sup>11</sup> Sehingga Islam tidak hanya menjelaskan ragam kewajiban individual seperti membangun kepribadian yang islami, penyucian jiwa dan bimbingan rohani namun juga berperan dalam ketertiban bermasyarakat sebab Islam senantiasa dilandaskan untuk menuntun manusia kepada kebahagiaan yang hakiki.

Komunitas Islam masa Rasulullah saw. di Madinah, memperlihatkan nilai-nilai hukum Islam sehingga kebersamaan dengan masyarakat lain seperti Yahudi, sebagian kecil Nasrani dan penyembah berhala terjalin dengan baik. Pertentangan kaum Yahudi di Madinah dengan kaum musyrik di Makkah menjadikan kaum lain selalu merasa takut atas terbentuknya komunitas tersebut. Utusan Rasulullah saw. ke berbagai negara tetangga didasarkan pada semangat menyebarkan agama sebagaimana hal tersebut dilakukan untuk mencegah berbagai gangguan mereka terhadap masyarakat Islam sehingga menjadi besar dan kuat tanpa peperangan dan pertikaian.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis Lokalitas pluralisme dan Terorisme* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2012), h. 246

<sup>11</sup>Muhammad Saïd al-‘Asymāwi, *Uṣūl al-Syarī‘ah*, diterjemahkan oleh Lutfi Tomafi dengan judul: *Nalar Kritis Syari’ah* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 96-97.

<sup>12</sup>Muhammad Saïd al-‘Asymāwi, *Uṣūl al-Syarī‘ah*, h. 95-96

Keanekaragaman masyarakat Madinah dengan suku dan pemeluk agama yang berbeda disertai naskah Piagam Madinah yang dirancang oleh Rasulullah saw. ditemukan adanya keberagaman harmonis dengan jaminan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Larangan saling mengganggu antara kaum muslimin dan Yahudi. Jika terjadi pertikaian maka Nabi saw. akan bertindak sebagai hakim dan jika Madinah diserang dari luar maka kedua pihak wajib mempertahankannya bersama.<sup>13</sup>

Meskipun dalam perjanjian tersebut, ada pelanggaran yang dilakukan kaum Yahudi dari salah satu pasal piagam Madinah sehingga mereka diperangi dan dikalahkan namun tetap tidak ada pemaksaan agar mereka masuk Islam. Bahkan pada saat penaklukan Khaibar, kitab-kitab suci mereka diserahkan kembali dalam keadaan utuh.<sup>14</sup> Dalam hal ini keberagaman bukan berarti pengakuan terhadap kebenaran agama lain dan membuktikan tidak adanya penistaan atau penodaan terhadap agama.

Pondasi politik bagi konstitusi Islam di Madinah menjadikan Rasulullah saw. sebagai pemimpin agama dan kepala negara. Masyarakat terorganisir dengan baik disertai langkah politik Nabi saw. yang didasarkan sebagai pondasi berdirinya kekuatan politik dalam sejarah.<sup>15</sup> Hal tersebut menjadi inspirasi yang tidak ada habis-habisnya dan dijadikan referensi untuk memformulasikan prinsip-prinsip keteraturan masyarakat yang bercorak pluralistik.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Muhammad Ashri & Rapung Samuddin, *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*, h. 186

<sup>14</sup>Syamsuddin Radjab, *Syariat Islam dalam Negara Hukum* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. XX.

<sup>15</sup>Nurcholish Madjid, "Cita-cita Politik Kita" dalam Bosco Carvallo dan Dasrial (penyunting), *Aspirasi Umat Islam Indonesia* (Leppenas: Jakarta, 1983), h. 11.

<sup>16</sup>Syamsuddin Radjab, *Syariat Islam dalam Negara Hukum*, h. 28.



Realitas sejarah membuktikan adanya keleluasaan mendirikan berbagai gereja di bawah kekuasaan Islam. Tidak ada perbedaan seperti banyaknya pembangunan gereja pada masa pemerintahan Islam di Mesir. Para ahli kitab diberi kebebasan bekerja, mencari kehidupan dan memegang jabatan tertentu dalam pemerintahan.<sup>17</sup> Bukti sejarah yang tidak dapat diabaikan meski jarang diangkat, pada masa perang salib kaum muslimin menikmati keharmonisan di sebagian negeri Kristen. Sebagai contoh muslimin yang hidup di daratan Sicilia di bawah pemerintahan Raja Roger II dan Raja Frederik II.<sup>18</sup>

Nilai-nilai hukum Islam sebagai kebutuhan yang komprehensif memuat berbagai ajaran teologis dan keteraturan sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik, sejarah, budaya dan termasuk didalamnya kebebasan beragama.<sup>19</sup> Aneka pilihan keyakinan ikut mewarnai dunia menciptakan mozaik kehidupan yang indah dan khususnya di Indonesia. Perbedaan tidak lagi dipertentangkan tetapi konstruksi kebersamaan tetap terjaga sehingga masyarakat perlu memahami arti perdamaian dan kebersamaan.

Indonesia tidak menganut agama tertentu dalam penyelenggaraan negara, tetapi menjadi salah satu sumber nilai penting dalam kehidupan sosial bernegara. Ulama menjadi salah satu penyumbang yang tak terpisahkan dalam pembangunan yang dikenal dengan istilah “mitra pemerintah” untuk menangani

---

<sup>17</sup>Kaum muslimin banyak memberikan kebebasan kepada rakyat Spanyol untuk berpolitik seperti yang telah mereka berikan kepada rakyat Suriah dan Mesir. Serta adanya kebebasan dalam mengatur ekonomi dan gereja. Lihat, Yunus Ali al-Mudhar, *Toleransi Kaum Muslimin dan Musuh-musuhnya* (Cet. I; Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990), h. 73.

<sup>18</sup>Cara yang ditempuh dalam melaksanakan pemerintahan mengikuti cara-cara yang ditempuh penguasa dari kalangan muslim. Pembentukan Dewan *Mazālim* sebagai tempat pengaduan bagi orang-orang yang terzalimi diarahkan ke sana. Sikap objektif dan adil dalam memutuskan perkara kendati terhadap anaknya sendiri. Sangat memuliakan muslimin, membantu mereka mencegah dari gangguan orang-orang Perancis hingga kaum muslimin mencintainya. Lihat, Ibnu al-Asir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, Vol. VIII, h. 474.

<sup>19</sup>Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralism dan Politik; Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: SIPPESS, 1994), h. v

hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Seperti masalah makanan halal dan haram, negara tidak masuk dalam ranah fatwa. Standar dan ukuran kehalalan makanan diformulasikan para ulama dan negara hanya memberikan fasilitas.<sup>20</sup>

Masalah hak asasi manusia dalam bidang agama di Indonesia telah jelas dan tegas dalam UUD 1945 dalam pasal 29 ayat (1) dan (2).<sup>21</sup> Sedang jaminan kebebasan beragama diatur dalam Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945: “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.<sup>22</sup>

Selain itu dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak beragama adalah hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 29 senafas dengan Deklarasi Universal PBB tentang Hak Asasi Manusia kebebasan beragama dalam pasal 18.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup>Machasin, *Agama Sumber Nilai Penting dalam Bernegara*, disampaikan dalam pertemuan saat menerima kunjungan 20 delegasi dari Kementerian Wakaf, Pendidikan dan Kebudayaan, Majelis Ulama Afghanistan di Gedung Kementerian Agama 30 April 2015, diakses [www.kementerianagama.co.id](http://www.kementerianagama.co.id) pada tanggal 1 Mei 2015.

<sup>21</sup>Lihat, Musdah Mulia, *Islam & Hak Asasi Manusia, Konsep dan Implementasi* (Cet. II; Jakarta: Naufal Pustaka, 2011), h. 29

<sup>22</sup>Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*, Bab X Pasal 28 dan 29.

<sup>23</sup>Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*, Bab X Pasal 28 dan 29. Lihat, Shanti Rachmadsyah, *HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia*, artikel diambil dari klinik hukum via hukumonline.com diakses pada tanggal 16 Desember 2014.

<sup>24</sup>Musdah Mulia, *Problem Pengakuan Agama di Indonesia*, diambil dari [www.megawatiinstitute.org](http://www.megawatiinstitute.org) diakses pada tanggal 12 Mei 2015

Salah satu dari tiga hal pokok dalam UUD 1945 menurut Philips M. Haujon dari bukunya Nurul Qamar adalah jaminan terhadap adanya hak-hak dan kewajiban asasi manusia.<sup>25</sup> Sedang jaminan untuk melaksanakan agama bagi pemeluk-pemeluknya yang ada dalam UUD 1945 disertai dengan pengalaman sejarah bangsa yang menunjukkan bahwa tindakan mengabaikan ajaran agama akan membawa bencana.<sup>26</sup>

Sebagian kalangan ada yang menuding bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan seringkali diperparah dan dicerai dengan sejumlah kebijakan pemerintah. Kebijakan tersebut termasuk dalam kategori forum internum seperti penetapan Presiden RI tentang PNPS, UU Administrasi Kependudukan, SKB Menteri, adanya kemungkinan bahwa keberadaan regulasi tersebut melanggar hak asasi manusia karena adanya batasan bahkan larangan warga meyakini agama dan melakukan peribadatan.<sup>27</sup> Dalam kategori forum eksternum dicontohkan dengan kesulitan beribadah bagi agama tertentu dan pendirian rumah ibadah.

Kadaan bisa saja diperparah dengan minimnya penegakan hukum yang disertai penjatuhan hukuman kepada pelaku kekerasan dan aparat kerap memproses hukum secara maksimal kepada kelompok minoritas. Dalam segi akuntabilitas hukum, tidak adanya kepastian hukum dari pemerintah kepada korban atau tidak memulihkan hak-hak korban sebagaimana yang dialami. Intoleransi menjadi masalah serius dalam beberapa tahun terakhir dan The Wahid Institute yang mendorong pluralisme mendapatkan temuan adanya 121 kasus di

---

<sup>25</sup>Nurul Qamar, *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan* (Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), h. 23.

<sup>26</sup>Syamsuddin Radjab, *Syariat Islam dalam Negara Hukum*, h. XVII

<sup>27</sup>Jayadi Damanik, *Pemajuan Toleransi dan Akuntabilitas bagi Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Keyakinan, Belajar dari Pengalaman di Indonesia*, disampaikan dalam kegiatan diskusi di ruang Theatre dan Aula Perpustakaan Negara Jl. Salemba Raya 28 A Jakarta Pusat, diakses Indonesia.ucanews.com pada tanggal 9 Desember 2014.

tahun 2009. Meningkat menjadi 184 kasus di tahun 2010, meningkat lagi menjadi 267 kasus tahun 2011, dan diteruskan menjadi 274 kasus pada tahun 2012. Namun tahun 2013 menjadi sedikit yaitu 245 peristiwa tetapi kasusnya kian menyebar.<sup>28</sup>

Intoleransi dalam hidup beragama berada pada “tingkat serius” pada tahun 2012 dengan “tingkat peringatan merah” pada tahun sebelumnya dan kasus menunjukkan tidak adanya perbaikan. Berbagai kasus yang terbengkalai tentu perlu segera dicarikan solusinya karena kompleksitas masalah yang semestinya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Apalagi keberadaan warga negara sudah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya memeluk agama masing-masing serta beribadah menurut keyakinannya sebagaimana dalam Islam dengan konsep toleransi keberagamaan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Ancaman kekerasan, serangan, larangan mendirikan rumah ibadah, larangan kegiatan beragama serta pengrusakan adalah bentuk intoleransi.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan tahun 2005 yang menyatakan bahwa ajaran agama apapun yang dipengaruhi oleh pluralisme, liberalisme, sekularisme dan bentuk apapun menyerang Islam, harus dilarang. Pengaruh fatwa tersebut seakan telah memberikan lampu hijau kepada tokoh konservatif Islam manapun untuk berkampanye bagi penerapan Islam dan menyebarkan salafisme sebagai kebenaran satu-satunya kepada pengikutnya dengan merujuk kepada ajaran konservatif Islam yang memandang kaum moderat sebagai kafir.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ismira Lutfia Trisnadibrata & Elisabeth Oktofani, *Intoleransi Agama Masih Tinggi Menurut Kelompok*, diakses khabarsoutheastasia.com pada tanggal 20 Januari 2015.

<sup>29</sup>Lihat, Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya* (Cet. I; Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2014), h. 50.

Berikut dekrit Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tahun 2006 yang menyatakan bahwa rumah ibadah hanya boleh dibangun jika telah mendapatkan persetujuan dari 90 umat dan 60 warga setempat dari keyakinan berbeda di tempat yang dimaksudkan. Sepertinya dekrit terfokus pada pemecahan konflik dan masuk akal namun berdampak pada rekayasa sosial karena terbentuknya masyarakat yang tersegregasi (pemisahan suatu golongan dari yang lainnya, pengasingan, pengucilan).<sup>30</sup>

Potret sejarah berkenaan dengan diskriminasi dalam keberagamaan di Indonesia yaitu keberadaan Konghucu yang diakui sebagai agama resmi pasca reformasi dalam era pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid. Padahal dalam UU No. 5 Tahun 1969 sudah diakui ada 6 agama resmi di Indonesia termasuk didalamnya agama Konghucu. Keberadaan UU No. 5 Tahun 1969 sudah diperkuat dengan Penetapan Presiden RI No. 1 PNPS Tahun 1965 yang mengakui 6 agama dan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina.<sup>31</sup>

Namun kebijakan disertai aksi kontroversi dikeluarkan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1978 dengan menetapkan hanya 5 agama resmi dan tidak termasuk Konghucu. Diskriminasi tidak bisa terhindarkan dan berakibat pada administrasi kependudukan yang memaksa mereka masuk dalam salah satu dari 5 agama resmi di Indonesia. Momentum dilenyapkannya diskriminasi baru bisa terealisasi pada era pasca reformasi pemerintahan K.H Abdurrahman Wahid tahun 2001 yang menjadikan Imlek sebagai hari libur fakultatif untuk etnis Tionghoa dan mencabut Instruksi Presiden sebelumnya. Selanjutnya ditetapkan sebagai hari

---

<sup>30</sup>Ismira Lutfia Trisnadibrata & Elisabeth Oktofani, *Intoleransi Agama Masih Tinggi Menurut Kelompok*, diakses khabarsoutheastasia.com pada tanggal 20 Januari 2015.

<sup>31</sup>Musdah Mulia, *Problem Pengakuan Agama di Indonesia*, sumber [www.megawatiinstitute.org](http://www.megawatiinstitute.org) diakses tanggal 10 Mei 2015.

libur nasional dengan Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 2002 tentang Tahun Baru Imlek pada 9 April 2002 pada era Megawati.<sup>32</sup>

Kemungkinan intoleransi masih bisa terjadi dan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan *ḥifẓ al-dīn* tidak terealisasi. Intoleransi terjadi dengan berbagai hal seperti penodaan dan penistaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang sengaja memang memicu konflik sosial keberagamaan dengan menyebarkan isu SARA (Suku, Agama dan Ras). Seharusnya perangkat hukum yang ada memberikan perlindungan hukum yang maksimal sehingga intervensi terhadap kalangan minoritas bisa diminimalisir.

Dekonstruksi perlindungan terhadap agama berdampak pada kebebasan meraih hak-hak sebagai warga negara. Keberadaan minoritas dengan anak-anak yang terlahir dalam lingkungan tersebut kurang mendapat perhatian. Terutama kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena adanya kekhawatiran saat berinteraksi diluar lingkungannya kecuali jika dilakukan manipulasi dalam hal kependudukan.

Fenomena intoleransi yang terjadi dalam kehidupan beragama bukan hanya dengan sikap namun terjadi dengan perlakuan yang tidak manusiawi. Sebagai anti klimaks dalam intoleransi adalah terjadinya kesalahpahaman dalam menterjemahkan maksud dan tujuan dari hukum Islam yang biasa disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga tercetuslah beberapa aksi kekerasan baik yang sifatnya lokal, nasional maupun internasional. Sementara dari pihak lain menjadikan hal ini sebagai celah untuk menggugat Islam sebagai agama yang damai dan perdamaian (QS al-Anbiyā'/21 : 107). Dengan demikian perlu kiranya

---

<sup>32</sup>Musdah Mulia, *Potret Pengakuan Agama di Indonesia*, diambil [www.megawatiinstitute.org](http://www.megawatiinstitute.org) pada tanggal 10 Mei 2015. Lihat, Risa Firdaus, *Sejarah Agama Konghucu di Indonesia*, diambil [www.taoklp5.blogspot.com](http://www.taoklp5.blogspot.com) diakses pada tanggal 10 Mei 2015.

upaya sistematis dan sinergitas umat Islam untuk membangun tujuan hukum Islam yang sejalan dengan Alquran dan Sunnah.<sup>33</sup>

Sistem hukum saat ini seharusnya mampu menata terciptanya kehidupan beragama yang penuh kedamaian serta dapat menjelaskan kumpulan suatu aturan yang ditentukan oleh koherensi pengertian dari keberagamaan yang terdalam. Setiap sistem hukum merupakan kebutuhan *enterprise* yang bertujuan. Kebanyakan filsuf menganggap keadilan sebagai tujuan tertinggi dan berlaku bagi hukum samawi lainnya tetapi sayangnya hukum-hukum itu tidak dalam bentuk aslinya.<sup>34</sup>

Hukum Islam dengan aturan perilaku berbeda dengan sistem hukum kasuistik dimana preseden sangat dihargai dan diikuti oleh pengadilan-pengadilan. Yurisprudensi Islam telah memecahkan problematika (interpretasi dan aplikasi hukum) dengan menggunakan prinsip deduksi analogis. Akal tunduk kepada analogi yang menjaga keleluasaan hakim dalam batasan tertentu dan mempertahankan hukum yang ideal dan stabil. Sedang hukum darurat bertindak menjadi pelengkap yang mengakomodir perubahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Oleh karenanya stabilitas diraih dengan perubahan serta cara yang bisa diterima sehingga tetap relevan sepanjang zaman.<sup>35</sup>

Kasus intoleransi beragama seperti bom waktu dengan konflik terjadi antara masyarakat mayoritas dengan minoritas. Idealnya mayoritas mengayomi yang minoritas dan tidak arogan. Oleh karenanya pluralisme harus digalakkan dengan ideologi Pancasila dengan lima sila. Dominasi mayoritas atas minoritas

---

<sup>33</sup>Muhammad Yūsuf al-Qarāḍawī (l. 1926 M), *Zāhirah al-Guluww fi al-Takfīr* (Cet. III; al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1990), h. 21

<sup>34</sup>Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin dengan judul: *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), h. 213

<sup>35</sup>Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law*, h. 216.



dalam proses pembentukan kebijakan peraturan Bersama Menteri (PBM) 8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman kepala daerah dalam pengelolaan kerukunan, pembentukan forum kerukunan umat beragama dan pendirian sarana ibadah.<sup>36</sup>

Perumusan kebijakan biasanya mengikuti logika berpikir kalangan mayoritas dan mungkin berorientasi pada nilai praktis sehingga dikhawatirkan mengarah pada separatis multikulturalisme. Kondisi tersebut disertai dengan sikap pemerintah yang mengabaikan argumentasi rasional minoritas dan mendukung nilai praktis kelompok mayoritas karena adanya dukungan praktis terhadap kelompok mayoritas agama yang ada. Idealnya negara berperan sebagai lalu lintas pengatur yang diharapkan tidak berpihak meskipun tatanan sosial didominasi oleh kelompok mayoritas.<sup>37</sup>

Keberadaan Kementerian Agama di Indonesia patut menepis berbagai isu penting soal agama sebagai bagian dari perhatian pemerintah. Berbagai isu tersebut berkenaan posisi penganut agama di luar agama yang diakui pemerintah. Berbagai kasus seperti pendirian rumah ibadah yang menyalahi prosedur berakibat pada anarkisme dan disertai munculnya gerakan keagamaan baru yang semakin menunjukkan volume peningkatan yang meresahkan. Terlebih lagi diperparah dengan kekerasan umat beragama terutama pada kelompok mayoritas dan adanya penafsiran keagamaan sempit yang berakibat ancaman bagi agama lain dengan memiliki tafsir yang berbeda.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup>Muchlis Ary Hamdy, "Kebijakan Pengelolaan Keragaman Studi Kasus Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah dalam Pengelolaan Kerukunan Umat Beragama, Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Sarana Ibadah", *Disertasi* (Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2013).

<sup>37</sup>Rachmad Faisal Harahap, *Mahasiswa UGM Raih Doktor dengan Disertasi tentang Keragaman Beragama*, diakses okezone.com pada tanggal 17 Februari 2015.

<sup>38</sup>Lima isu penting soal keagamaan yang menjadi perhatian pemerintah yang diambil dari berbagai sumber. Dinukil dari Wawancara Eksklusif Wartawan TV One dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Palopo sebagai daerah yang pertama menerima Islam di Sulawesi Selatan dan masuk ke tanah Luwu sekitar tahun 1603 M.<sup>39</sup> Dengan topografi masyarakat yang beragam, baik secara agama, etnik dan tradisi, kemungkinan bisa saja mengalami konflik daripada masyarakat homogen. Namun kebersamaan yang terbina antara umat beragama menjadikan Palopo dengan daerah Luwu lainnya seperti Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur sebagai daerah yang aman dari isu-isu agama meskipun potensi munculnya konflik keberagamaan bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Pemahaman nilai-nilai keagamaan yang kemungkinan menjadi andalan dalam mengantisipasi berbagai potensi munculnya masalah.

Keadaan ini yang disorot oleh peneliti untuk melihat bagaimana pembinaan keberagamaan di Palopo dan sekitarnya di Tana Luwu sehingga terproteksi dari hal-hal yang mencurigakan. Dengan uraian inilah tersebut, maka penelitian ini akan mencoba mengkaji terminologi keberagamaan, makna dan cakupan, serta beragam pendekatan dalam hukum positif dan hukum Islam akan dikaji secara mendalam dari segi *maqāṣid al-syarī'ah*.

### ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Dinamika merupakan kata yang diambil dari bagian ilmu fisika berhubungan dengan barang-barang yang bergerak dan tenaga-tenaga yang menggerakkan; dinamika kelompok berarti gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dinamika pembangunan gerak yang penuh gairah dan penuh semangat dalam melaksanakan pembangunan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Lihat, Sarita Pawiloy, *Ringkasan Sejarah Luwu* (Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2002), h. 59.

<sup>40</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 355.

Adapun kehidupan umat beragama, kategorisasinya dibagi dalam hal ibadah ritual, pergaulan antar umat beragama dan kegiatan sosial. Kategori ketiga yaitu kegiatan sosial atau aktifitas sosial menjadi kategori yang ditekankan dalam tulisan ini, meskipun pergaulan antar umat beragama sedikit banyaknya akan tetap disinggung termasuk juga ibadah ritual. Kata keberagamaan berasal dari kata beragama yang berarti menganut atau memeluk agama tertentu, baik itu Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.<sup>41</sup> Adapun keberagamaan yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian berhubungan dengan melakukan kegiatan ibadah atau berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan agama tertentu.

Sedang kata perspektif yang dimaksud adalah sudut pandang, cara menggambarkan suatu benda, konsep atau nilai pada permukaannya sehingga terlihat secara komprehensif dengan berbagai dimensinya.<sup>42</sup> Perspektif yang dimaksudkan dalam hal ini gambaran dari sebuah konsep dan terwujud dalam kehidupan masyarakat sehingga sudut pandang yang berkenaan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* memang ada, terealisasi, mempunyai keterkaitan bahkan berdampak di masyarakat yang dapat disaksikan dengan indera dan dapat diterangkan dan dikaji secara ilmiah.

Adapun kata *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata yang itu *maqāṣid* (مَقَاصِد) dan *al-syarī'ah* (الشَّرِيعَةُ). Pengertian secara bahasa tentang *maqāṣid* (مَقَاصِد) adalah jamak atau plural dari *maqṣad* (مَقْصَد) yang berarti berbagai tujuan, tempat tujuan, atau tempat yang dijadikan tujuan. Sedang kata *al-qāṣdu* (الْقَصْدُ) dalam bahasa berarti pokok atau sumber kepada sesuatu tersebut dan dijadikan sebagai landasan dan pijakan. Terkadang diartikan dengan kata *al-tawakkulu*

---

<sup>41</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 17.

<sup>42</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 355.

(التَّوَكُّلُ) yang artinya berserah diri dan terkadang berarti sebagai jalan yang lurus (الطَّرِيقُ الْمُسْتَقِيمُ) dan jalan tengah.<sup>43</sup>

Adapun secara istilah terbagi dalam dua hal dan keduanya adalah *maqāṣid al-syārī'* (مَقَاصِدُ الشَّارِعِ) yang berarti tujuan, maksud dan kehendak dari hukum sedang yang kedua adalah *maqāṣid al-mukallaḥfīn* (مَقَاصِدُ الْمُكَلَّفِينَ) yang berarti maksud, tujuan dan kehendak *mukallaḥfīn* atau yang menjalankan perintah dan kewajiban. Berasal dari akar kata *qaṣada* (قَصَدَ) yang bermakna dan bertujuan meluruskan jalan dan yang dimaksudkan Allah swt. dalam firman-Nya dengan cara apapun yang dilakukan oleh Allah swt. dalam menunjukkan jalan yang lurus dan berdoa kepada-Nya disertai argumen dan bukti-bukti yang jelas.<sup>44</sup>

Adapun *maqāṣid al-syārī'ah* yang terdiri dari *maqāṣid* dan *syārī'ah*. Kata *maqāṣid* berasal dari kata dari *maqṣad* dengan akar kata yaitu *qaṣada* (قَصَدَ) yang berarti berbagai tujuan, tempat tujuan, atau tempat yang dijadikan tujuan. Sedang kata *al-qāṣdu* (الْقَصْدُ) dalam bahasa berarti pokok atau sumber kepada sesuatu tersebut dan dijadikan sebagai landasan dan pijakan.<sup>45</sup> Dengan kata lain, ada berbagi tujuan yang dimaksud dalam kata *maqāṣid* dan tujuan yang diinginkan tujuan tercapainya nilai dan norma yang dicita-citakan bukan tujuan tempat.

Sedang kota adalah daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tunggal dari berbagai lapisan masyarakat. Daerah

<sup>43</sup>Iyāḍ bin Nāmi al-Salāmī, *Maqāṣid al-Syārī'ah*, [CD-ROM] al-Akādīmīyyah al-Islāmīyyah al-Maḥḥad.

<sup>44</sup>Muḥammad bin Makrām bin Manẓūr al-Afriqīyyī al-Masriy, *Lisān al-'Arab* Juz II (Cet. I; Bairūt: Dār Ṣādir, t.th), h. 353.

<sup>45</sup>Muḥammad bin Makrām bin Manẓūr al-Afriqīyyī al-Masriy, *Lisān al-'Arab* Juz II, h. 353.

pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja di luar pertanian.<sup>46</sup>

No.	FOKUS PENELITIAN	DESKRIPSI PENELITIAN
1	Dinamika.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pergerakan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.</li> <li>2. Pasang surut yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat dengan cara pandang tertentu.</li> <li>3. Harmonisasi dan disharmonisasi yang terjadi dalam sebuah masyarakat.</li> </ol>
2	Kerukunan Umat Beragama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potret kehidupan umat beragama.</li> <li>2. Pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat.</li> <li>3. Keberagaman dalam ibadah ritual, pergaulan antar umat beragama serta aktifitas sosial.</li> </ol>
3	Perspektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudut pandang</li> <li>2. Cara menggambarkan suatu benda</li> <li>3. Merumuskan konsep atau nilai pada permukaannya sehingga terlihat secara komprehensif dengan berbagai dimensinya</li> <li>4. Realisasi sebuah konsep yang berkenaan dengannya, terealisasi, berkaitan dan berdampak dengan realitas masyarakat.</li> </ol>
4	<i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Maqāṣid</i> dari kata <i>maqṣad</i> yang berarti tujuan, rujukan atau tempat yang dijadikan tujuan.</li> <li>2. <i>al-Syarī'ah</i> yang berarti wahyu Allah swt. dan sabda Rasulullah saw.</li> <li>3. Seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilahiyyah yang mengatur tingkah laku batin (sistem kepercayaan/doktrinal) maupun tingkah laku kongkrit (legal-formal) yang individual dan kolektif.</li> <li>4. Syariah dalam arti sempit berkaitan dalam bidang ibadah, mu'amalah dan <i>'uqūbah</i>.</li> </ol>

<sup>46</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 815

### ***C. Rumusan Masalah***

Pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika kerukunan umat beragama di *Tana Luwu* perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Dari pokok masalah itu dirumuskan beberapa sub masalah yaitu:

1. Bagaimana realitas kerukunan umat beragama di *Tana Luwu* ?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap potensi konflik di *Tana Luwu* ?
3. Bagaimana penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam realitas kerukunan umat beragama di *Tana Luwu* ?

### ***D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu***

Dari berbagai penelusuran literatur maka oleh penulis hingga kini terdapat beberapa literatur yang membahas kerukunan hidup beragama. Namun konsep kerukunan hidup beragama dengan menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sumber terapan belum difokuskan, apalagi saat penelitian ini dikaitkan dengan lokasi yang akan menjadi objek penelitian. Namun dari beberapa upaya yang ditelusuri, telah ditemukan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan masalah kerukunan beragama.

Said Agil Husin al-Munawar, dalam bukunya *Fikih Hubungan Antar Agama* terlihat adanya usaha peletakan wacana hubungan antar agama dalam bingkai fikih sehingga masalah yang diangkat diletakkan dalam kajian fikih yang sifatnya konseptual dimana perwujudan kerukunan menjadi sebuah kewajiban setiap agama. Uraian dalam karya tersebut didominasi dengan pendekatan sosial, meskipun pendekatan tersebut merupakan alat bantu dalam kajian ilmu fikih dan

usul fikih.<sup>47</sup> Sedang penulis berusaha mengembangkan wacana kehidupan umat beragama yang dikonstruksi dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menyentuh hubungan antar umat, internal umat dan umat dengan pemerintah.

Adam Muhshi dengan judul *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas kebebasan beragama di Indonesia*. Pembahasan difokuskan secara khusus mengenai hak atas kebebasan beragama dan hak asasi manusia secara umum yang harus dihormati dan dilindungi pemenuhannya sehingga pembahasannya berakar pada perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia secara umum.<sup>48</sup> Sedangkan penulis dalam hal ini berusaha memposisikan wacana kerukunan umat beragama dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pengembangan varian pada *ḥifẓ al-daulah* atau *ḥifẓ al-ummah*.

Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy dalam karya yang berjudul *Hukum Antar Golongan, Interaksi Fikih Islam dengan Syariat Agama Lain*. Buku tersebut telah diterbitkan sejak tahun 1971 namun tetap menarik untuk dipelajari dan bisa dijadikan sebagai rujukan karena interaksi kalangan Muslim dengan non-Muslim telah terjadi dengan sangat intensif. Pembahasan dalam karya tersebut menguraikan hukum antara pemeluk agama Islam dengan hukum yang dianut pemeluk non Islam dengan menyertakan berbagai pendapat para pakar fikih dalam melihat kasus hukum yang terjadi sehingga pembahasannya terkesan tekstual.<sup>49</sup>

Faisal Ismail, dengan judul *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama, Konflik, Rekonsiliasi, dan Harmoni*. Penelitian tersebut menguraikan napak tilas

---

<sup>47</sup>Said Agil Husin al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. xxvi.

<sup>48</sup>Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2015), h. x

<sup>49</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Interaksi Fikih Islam dengan Syariat Agama Lain* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. ix



kerukunan dari Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Mengkaji konflik-konflik komunal yang selanjutnya menyeret simbol-simbol dan sensitivitas agama serta cara penanganan. Pisau analisis lebih banyak ditekankan pada aspek agamadan yuridis dari akar teologis tentang kerukunan, toleransi, dan perdamaian dalam Islam. Adapun aspek lainnya tidak secara tajam dibahas dan dianalisis seperti aspek sosiologis dan masalah lainnya seperti jiwa, akal, harta, dan keturunan.<sup>50</sup>

Rosmini dengan judul disertasi “Ekstremisme Keberagamaan dalam Perspektif Alquran”. Penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan murni dengan pendekatan ilmu tafsir dengan metode tematik. Pendekatan ilmu-ilmu lain disertakan sebagai penunjang untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif. Dalam penelitian tersebut hanya memberikan kontribusi pemetaan sikap dan perilaku ekstrem dalam beragama secara teoritis yang berbasis pada kajian Alquran dengan pencerahan pemikiran moderat berbasis Alquran sehingga secara empiris tidak menjadi fokus penulis dalam disertasi tersebut.<sup>51</sup>

Muin Razmal, yang menulis tentang “Konflik Sosial Studi Kasus Antara Masyarakat Rongkong dan Masyarakat Baebunta di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara”. Dalam penelitian tersebut menekankan faktor-faktor penyebab konflik sosial yang merupakan studi kasus terjadinya konflik horisontal masyarakat Baebunta dan Rongkong pada saat itu dengan menemukan akar persoalan dari rivalitas akibat kesenjangan ekonomi, sosial yang selanjutnya menyulut api pertikaian dan memungkinkan terjadinya konflik di daerah lain. Penanganan dilakukan lebih banyak menekankan aspek keamanan sehingga konflik antar etnis yang mempresentasikan Islam dan Kristen lebih mengarah

---

<sup>50</sup>Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama, Konflik-Rekonsiliasi-Harmoni* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

<sup>51</sup>Rosmini, “Ekstremisme Keberagamaan Perspektif Alquran”, *Disertasi* (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2015), h. XV

pada tinjauan kriminologis yang berhubungan dengan hukum pidana daripada menganalisis aspek masalah lainnya dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.<sup>52</sup>

Amri Rahman yang menulis disertasi dengan judul “Pluralisme dalam Perspektif Alquran”. Penelitian tersebut adalah penelitian kepustakaan yang tergolong kualitatif deskriptif yang bersifat pengembangan. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan ilmu tafsir dengan metode *maudū'i* tematik. Data dan informasi yang diperoleh melalui berbagai literatur yang dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Sedang teknik interpretasi yang dipakai diantaranya adalah tekstual, linguistik, sosio-historis, sistemik, teologis, kultural, logis dan teknik interpretasi ganda. Penelitian tersebut ulasannya terbatas dengan menunjukkan adanya beberapa ayat Alquran yang menjelaskan bagaimana seharusnya umat manusia merespon perbedaan dan keragaman agama sebagai realitas kehidupan umat manusia.<sup>53</sup>

Agus Suyadi Raharusun dengan judul “Komunikasi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Hadis”. Melakukan eksplorasi beberapa riwayat hadis yang berkenaan dengan judul tersebut sehingga analisis kandungan dan implementasi yang ada dijelaskan dengan konsep komunikasi antar umat beragama yang telah diamalkan Rasulullah saw. sebagai amal *nubuwwah* dan *tablīg al-risālah*. Dalam komunikasi dakwah, pesan Islam disampaikan secara persuasif baik verbal maupun non-verbal dengan penggunaan media yang disesuaikan dengan kemajuan modern. Komunikasi politik mengambil peran *imāmah al-ummah* melalui sinergi strategis dengan berbagai komponen. Bentuk komunikasi sosial dan budaya di tengah kemajemukan dengan melakukan

---

<sup>52</sup>Muin Razmal, *Konflik Sosial Studi Kasus Antara Masyarakat Rongkong dan Baebunta di Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara* (Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus, 2009).

<sup>53</sup>Amri Rahman, “Pluralisme dalam Perspektif Alquran”, *Disertasi* (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2013), h. ii

berbagai aktifitas yang santun dan berkeadaban serta menghindari konflik. Bentuk lainnya dengan bisnis dan aktifitas finansial yang mencerminkan nilai-nilai islami.<sup>54</sup>

Muchlis Nadjamuddin dalam disertasi yang berjudul *Umat dalam Wawasan Alquran: Kajian Sosiologis Historis*. Dalam penelitian tersebut memuat beragam rumusan Alquran tentang umat yang dikaitkan dengan sejarah dan perkembangan kehidupan sosial manusia. Penjelasaannya dengan upaya memahami berbagai makna ungkapan umat dengan variasinya dalam bentuk term umat atau yang semakna dengan tujuan mengetahui, merumuskan, menganalisis dan melakukan kritik terhadap pemikiran ahli tafsir dan sosiolog Islam mengenai umat sebagai sistem masyarakat Islam yang *Qur'āni*. Hasil menunjukkan bahwa dari 56 kali dari 25 surah dalam Alquran, berbagai penggunaan umat dengan ragam bentuk dan pengertiannya, terkandung beragam pengertian yang sesuai dengan konteks ayat yang berkenaan tentang umat dari sudut kebahasaan dan penggunaan ungkapan umat dalam persekutuan agamawi.<sup>55</sup>

Hasbullah Abdullah dengan judul *Interaksi Sosial dalam Perspektif Alquran*. Dijelaskan tentang konsepsi pemikiran suatu masyarakat yang diikat oleh interaksi-interaksi yang terus menerus dan secara alami. Baik dan buruknya sebuah masyarakat ditentukan dengan interaksi-interaksi yang terjadi. Sedang faktor yang menentukan baik dan buruknya terletak pada cara memenuhi kebutuhan dan merealisasikan segala keinginan. Berbagai term ayat Alquran memberikan solusi terbaik dengan landasan teologisnya yang memberikan ruang perdamaian dan kerukunan hidup antara muslim maupun muslim dengan non-

---

<sup>54</sup> Agus Suyadi Raharusun, “Komunikasi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Hadis”, *Disertasi* (Makassar: Program Pascasarjana, 2014), h. xiii.

<sup>55</sup> Muchlis Nadjamuddin, “Umat dalam Wawasan Alquran: Kajian Sosiologis Historis”, *Disertasi* (Makassar: Program Pascasarjana, 2011), h. xv-xvi.

muslim. Gambaran secara deskriptif yang disertai dengan fenomena dan solusi dalam Alquran serta analisis interaksi sosial dalam berbagai pendekatan sosiologis, filosofis, semantik dan tematik dengan analisis teks yang bersifat verbalistik, deskriptif, dan content analysis.<sup>56</sup>

### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian dilakukan bertujuan sebagai berikut: **Pertama**, mendeskripsikan dan menganalisis realitas kerukunan umat beragama di *Tana Luwu* dengan mengembangkan konsep yang didasarkan atas *al-ḍarūriyyāt al-khamsu* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dengan berbagai agama yang ada didalamnya. **Kedua**, mengimplementasikan solusi terhadap adanya potensi konflik yang terjadi dalam kerukunan umat beragama. **Ketiga**, adanya upaya membina nilai-nilai *maqāṣid* dalam realitas kerukunan beragama di *Tana Luwu*.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara:

##### **a. Kegunaan Ilmiah**

Diharapkan adanya inovasi (pemasukan, pengenalan hal-hal baru) terealisasinya nilai-nilai dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dan *ḥifẓ al-ummah* dalam kerukunan beragama yang berhubungan dengan teologi konstitusi yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan masih relevan sehingga menambah khasanah ilmiah dalam perspektif ilmu hukum, khususnya dalam hukum Islam.

---

<sup>56</sup>Hasbullah Abdullah, "Interaksi Sosial dalam Perspektif Alquran", *Tesis* (Makassar: Program PascaSarjana, 2004), h. viii.

b. Kegunaan Praktis

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan menggugah kesadaran spiritual kalangan pelaksana kekuasaan pembentukan suatu peraturan, pembinaan, dan pembangunan perundang-undangan, supaya lebih akomodatif terhadap pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah* yang bersumber dari berbagai lembaga keagamaan dan pelaksana pemerintahan.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### ***A. Sekilas tentang Terminologi Kerukunan Umat Beragama***

Ajaran universal mengenai kasih sayang, tolong menolong, saling mencintai, bersikap adil dengan sesama terdapat dalam ajaran agama apapun. Sebaliknya tindakan jahat yang destruktif, kemalasan, kebodohan, dan tindakan yang tidak manusiawi, jelas tidak ditolerir dalam substansi ajaran agama. Universalitas ajaran tersebut selanjutnya merekatkan terciptanya relasi dan kerukunan, baik kerukunan internal maupun antar umat beragama.

Agama berfungsi memupuk persatuan dan kebersamaan tanpa melihat perbedaan keyakinan, ras dan kebudayaan. Membentuk umat sebagai satu keluarga besar yang mewujudkan ketentraman, kedamaian dan keharmonisan. Landasan ajaran Islam didasarkan dengan kemudahan dan toleransi sehingga ketentuan ibadahpun dalam Islam, baik vertikal dan horisontal disesuaikan dengan kemampuan manusia dan tidak disertai sikap yang berlebihan. Sebagaimana sikap toleransi vertikal dari Allah swt. kepada hamba-Nya yang lupa dengan salah satu rukun shalat sehingga tidak perlu diulangi dari awal tetapi cukup dengan melakukan sujud sahwi.

Dalam kewajiban zakat terdapat kemudahan dan toleransi Allah swt. kepada umat-Nya dengan tidak memberlakukan pada semua harta. Cukup dengan ketentuan mengikat dan memudahkan seperti setahun sekali, tercapai nisab, dan nilai harta yang dikeluarkan zakatnyaapun juga tidak begitu banyak sehingga tidak berdampak dan berpengaruh pada harta dan pemilik harta tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Fālih bin Muḥammad al-Ṣagīr, *Al-Yusru wa al-Samāḥatu fi al-Islām* Juz I, dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM] al-islam.com, h. 30.

Timbulnya kekerasan dalam realitas kehidupan beragama menampilkan ketidakharmonisan dan kecurigaan satu sama lain. Oleh karena itu mewujudkan kerukunan umat beragama atau toleransi horizontal dari visi teologi atau akidah Islam harus dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam kehidupan beragama. Keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dan jalan terciptanya kerukunan secara internal umat beragama, antar umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah bukanlah sesuatu yang mustahil selama ada usaha konstruktif dan kolaborasi dari semua pihak.<sup>2</sup>

Terminologi tentang kerukunan berkaitan atau ilmu yang berhubungan dengan batasan atau definisi istilah. Kerukunan ialah perihal hidup rukun, damai dalam keragaman dan diiringi dengan perasaan bersatu hati atau dalam istilah lain yang dipenuhi dengan muatan makna “baik” dan “damai” yang intinya adalah hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran.<sup>3</sup>

Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan maka kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat. Ini artinya sesuatu yang ideal harus menjadi realitas dalam kehidupan manusia. Namun dengan melihat kenyataan yang ada tentu bukanlah sesuatu yang mudah untuk diwujudkan karena manusia senantiasa bergelut dengan arah yang berbeda, antara cita-cita dan yang tercipta, antara harapan dan kenyataan.

Sejarah kehidupan manusia generasi pertama dari keturunan Nabi Adam ‘alaihi al-salām yakni Qabil dan Habil yang terekam dalam Alquran dimana keduanya terlibat dalam konflik dan pertengkaran yang selanjutnya berakhir

---

<sup>2</sup>Abdullah bin Ibrāhīm al-Lāhidān, *Samāhatu al-Islām fi Mu’āmalat Gair al-Muslimīn*, Juz I, dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM], h. 7

<sup>3</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1323

dengan dibunuhnya sang adik Habil, tentunya mengindikasikan bahwa masyarakat generasi pertama dari keturunan Nabi Adam ‘*alaihi al-salām*’ bukanlah tipe masyarakat yang rukun.

Manusia ditakdirkan oleh Allah swt. sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial sesama manusia. Kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia mutlak diperlukan dan menjadi sebuah ketergantungan dalam hidup manusia, baik itu kebutuhan yang bersifat materil ataupun spiritual. Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja sama dan tolong menolong dengan sesama manusia dalam hal kebaikan sehingga dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berinteraksi dan berhubungan dengan siapa saja tanpa ada batas agama, ras, suku maupun bangsa.

Eksistensi manusia dalam kebersamaan dapat dipahami bahwa arti manusia bukan terletak pada *aku*-nya, tetapi pada *kita*-nya atau pada *kebersamaan*-nya. Kebersamaan bukan hanya diukur dalam bentuk kolektif saja tetapi jauh dari itu adalah kebersamaan manusia dalam memenuhi kebutuhannya secara timbal balik. Wujud manusia yang berbangsa-bangsa dan bergolongan merupakan sumbangan yang tak ternilai baginya dalam mempelajari dirinya sendiri sehingga melahirkan berbagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat seperti antropologi, sosiologi, sejarah, kebudayaan, bahasa, politik dan lain-lain.<sup>4</sup>

Salah satu agenda besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan membangun kesejahteraan hidup bersama seluruh warga negara dan umat beragama. Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan ke arah persatuan dan keutuhan serta kesejahteraan adalah masalah kerukunan nasional, termasuk didalamnya kerukunan antar agama dan

---

<sup>4</sup>Lihat, Said Aqil Husin al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 1-2



kerukunan hidup umat beragama. Persoalan bisa saja menjadi krusial karena serangkaian kondisi sosial yang menyuburkan konflik sehingga kebersamaan semakin terusik dan terganggu dalam membangun sebuah negara. Apalagi kebanggaan terhadap kerukunan yang selama ini dirasakan selama bertahun-tahun mengalami degradasi bahkan menimbulkan kecemasan terjadinya disintegrasi.

Keterkaitan Alquran dengan keberagaman terletak pada anjuran memanfaatkannya sebagai kekuatan dengan langkah awal pengenalan. Term *ukhuwah* atau persaudaraan merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dalam Alquran. Kata *ukhuwah* yang berarti persaudaraan disebutkan dalam Alquran sebanyak 52 kali yang berkaitan dengan persamaan keturunan, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>5</sup>

Esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang yang ditampilkan dalam bentuk perhatian, kepedulian, keakraban hubungan dan romantisme senasib sepenanggungan. Sedang kebersamaan dalam kalangan muslim disebut *ukhuwah islāmiyyah* (persaudaraan sesama muslim). Alquran dengan beberapa ayat didalamnya seperti Firman Allah swt. QS al-Hujurāt/49: 13 dijelaskan tentang hidup bermasyarakat yang berarti harus berdampingan dengan lainnya disertai konsekuensi menerima setiap kondisi yang terjadi di antara berbagai manusia yang ada di sekitar.

Tidak menutup kemungkinan orang yang ada di sekeliling kita terdapat orang yang berbeda agama. Kata *syu'ūban* dalam ayat lebih umum dari kata *qabāil* dan selanjutnya ada tingkatan lain seperti faksi, klan dan sebagainya. Dikatakan bahwa *syu'ūb* adalah orang non Arab, *qabāil* adalah orang Arab

---

<sup>5</sup>Azharuddin Sahil, *Indeks Alquran Panduan Mencari Ayat Alquran Berdasarkan Kata Dasarnya* (Cet. V; Bandung: Total Media, 1996).

sedang *asbāt* adalah Bani Israel. Sedang inti dari ayat tersebut merupakan langkah pengenalan untuk menjalin kekerabatan.<sup>6</sup>

Sebab turunnya ayat tersebut dijelaskan saat peristiwa penaklukan Makkah, saat Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Seseorang berkata, “Pantaskah budak hitam adzan di atas ka'bah ? “Jika Allah swt. membenci dia pasti Ia menggantinya”, sahut yang lain. Maka turunlah ayat tersebut. Menurut riwayat lain, ayat tersebut berkenaan dengan Abu Hind yang akan dikawinkan oleh Rasulullah dengan seorang wanita Bani Bayāḍah. Bani Bayāḍahpun berkata, “Wahai Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan puteri kami dengan bekas budak kami ?” Maka turunlah ayat tersebut.<sup>7</sup>

Idealnya sebuah kerukunan disertai sikap saling menghormati dengan komunikasi intensif secara manusiawi. Kerukunan beragama adalah sosialisasi damai yang selanjutnya berwujud toleransi. Kerukunan dan toleransi keduanya seolah-olah tidak ada perbedaan meskipun sebenarnya terdapat perbedaan namun saling memerlukan. Kerukunan mempertemukan unsur-unsur yang berbeda, sedang toleransi merupakan sikap atau refleksi dari kerukunan. Tanpa ada kerukunan, toleransi tidak pernah ada, sedangkan toleransi tidak pernah tercermin bila kerukunan belum terwujud. Seding sikap toleransi merupakan ciri bangsa Indonesia yang diterima sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia sendiri. Jadi toleransi dalam pergaulan bukan merupakan sesuatu yang dituntut oleh situasi.<sup>8</sup>

Terminologi toleransi dalam konteks kebahasaan Indonesia diartikan batas ukur penambahan dan pengurangan yang masih diperbolehkan;

---

<sup>6</sup> Abu al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kāsir al-Qursiy, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* (Cet. II; al-Mamlakah Saūdiyyah al-Arabiyyah: Dār Ṭibā' li al-Nasyri wa al-Tawzi', 1999), h. 87.

<sup>7</sup> Al-Wāḥidiy, *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān*, dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM].

<sup>8</sup> Said Aqil Husin al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, h. 12-13.

penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja dan kegiatan. Sedang kata toleran ialah bersikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Menoleransi dalam kata kerja berarti mendiamkan; membiarkan.<sup>9</sup>

Sedang dalam Bahasa Inggris, toleransi sumber asalnya dari *tolerance* yang berarti sikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan.<sup>10</sup> Dalam Bahasa Belanda yang berarti membolehkan, membiarkan yang pada prinsipnya tidak perlu terjadi. Jadi toleransi mengandung konsesi yang berarti pemberian yang hanya didasarkan kepada kemurahan hati dan kebaikan hati, dan bukan didasarkan kepada hak. Jadi toleransi berlaku karena adanya perbedaan prinsip dan menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri.<sup>11</sup>

Adapun dalam Bahasa Arab berasal dari kata dasar ialah سَمَحَ (*samaḥa*) dengan berbagai derivasinya (pengimbuhan afiks yang tidak bersifat infleksi pada dasar pembentukan kata) seperti السَّمَاحَةُ (*al-samāḥatu*) yang berarti sesuatu yang baik. Sedangkan *tasāmuh* berarti saling mengizinkan, saling memudahkan sebagai derivasi dari سَمَحَ (*samaḥa*) dengan beragam pengimbuhan afiks yang tidak bersifat infleksi pada bentuk dasar yang membentuk kata seperti السَّمَاحَةُ (*al-samāḥatu*) yang berarti sesuatu yang baik, تَسَامَحَ أَوْ تَسَاهَلَ (*tasāmaḥa aw tasāhala*) yang berarti saling membolehkan atau memperkenankan.<sup>12</sup>

<sup>9</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1722.

<sup>10</sup>David G. Gularnic, *Webster's World Dictionary of American Language* (New York: The World Publishing Company, 1959), h. 779.

<sup>11</sup>Said Aqil Husin al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, h. 13.

<sup>12</sup>Al-Fayrūz Abādi, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* [CD-ROM]. Lihat, Al-Jauhari, *Al-Ṣaḥḥāh fī al-Lughah* [CD-ROM].

Dalam kitab *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, kata *samāḥah* diartikan *suhūlah* berarti kemudahan.<sup>13</sup> Pemaknaan tersebut diperkuat dengan perkataan Ibnu Hajar al-‘Asqalāni yang mengartikan kata *al-samḥah* dan *al-sahlah* dalam makna yang sama serta dimaknai dalam suatu riwayat hadis yang berbunyi *aḥabbu al-dīn ilallāhi al-ḥanafīyah al-samḥah*.

Meskipun istilah *tasāmuh* dalam Alquran tidak ditemukan secara eksplisit, bila yang dimaksud adalah istilah toleransi dengan istilah teks arabnya. Namun jika yang dimaksud adalah sikap saling menghargai, menghormati keragaman budaya dan perbedaan kebebasan berekspresi termasuk dalam keyakinan maka Alquran secara nyata memberikan perhatian nyata terhadap toleransi. Ditemukan dalam ratusan ayat yang secara gamblang mendorong toleransi dan menolak intoleransi.<sup>14</sup>

Terminologi toleransi dalam Bahasa Arab disebut dengan *السَّمَاحَةُ* (*al-samāḥatu*) menurut Ibnu ‘Āsyūr al-Tūnīsī (1879-1973) ialah adanya kemudahan berinteraksi sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan komunitas manusia termasuk didalamnya ada perselisihan, potensi konflik bahkan pertengkaran.<sup>15</sup> Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah saw. dalam salah satu sabdanya: رَجَمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمَحًا إِذَا اقْتَضَى (artinya: Allah swt. mengasihi seseorang yang toleran jika dia menjual, toleran jika dia membeli, toleran jika dia memutuskan).<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakaria, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1979), h. 163

<sup>14</sup> Zuhairi Misrawi, *Membumikan Toleransi al-Qur'an; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme* (Jakarta: Moslem Moderate Society, 2010), h. 1

<sup>15</sup> Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr al-Tūnisiy, *Uṣūl al-Niẓām al-Ijtimā’iy fi al-Islām* (Qaṭar: Wizāratu al-Awqāf, t.th), h. 25

<sup>16</sup> Muḥammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr al-Tūnisiy, *Uṣūl al-Niẓām al-Ijtimā’iy fi al-Islām*, h. 27.

Sikap toleransi dianggap paling sempurna dengan adanya sikap yang menenangkan dan menentramkan jiwa atau hati serta lebih sadar dalam menerima petunjuk dan bimbingan. Sedang kalangan ulama menjadikan dan menempatkannya sebagai perilaku yang teragung dalam ajaran Islam karena tempat dan posisinya diantara kelalaian dan sikap berlebih-lebihan sehingga lebih patutnya sebagai sikap yang adil dan moderat.<sup>17</sup>

Pola toleransi dalam Islam dengan mengajarkan menolong siapapun, tetap menjalin hubungan kekerabatan kepada orang tua meskipun beda keyakinan atau saudara non muslim serta bolehnya memberi hadiah kepada non muslim. Hanya saja toleransi beragama dalam Islam bukan berarti sinkretisme atau saling melebur dalam keyakinan. Bukan pula saling bertukar keyakinan namun toleransi disini ialah dalam lingkup pengertian muamalah atau interaksi sosial yang disertakan dengan adanya batas-batas bersama yang boleh dan tidak boleh dilanggar.<sup>18</sup>

Dalam prinsip toleransi jelas terkandung pengertian adanya “pembolehan” terhadap perbedaan, kemajemukan, kebhinekaan, dan keberagaman dalam kehidupan masyarakat, umat dan bangsa. Prinsip toleransi adalah menolak dan tidak membenarkan sikap fanatik dan kefanatikan. Ajaran Islam “*lakum dīnukum waliyadīn*” (bagimu agamamu dan bagiku agamaku) sebagai landasan normatif merupakan langkah strategis menerapkan prinsip “*agree in disagreement*” dalam hubungan antar agama dan hubungan antarumat beragama.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Muhammad al-Ṭāhir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyūr al-Tūnisiy, *Uṣūl al-Niẓām al-Ijtima’iy fi al-Islām*, h. 27.

<sup>18</sup>Lihat, Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer, Menjawab 111 Masalah Aktual Hukum Islam di Zaman Kita* (Cet. I; Jakarta: Qaf Media Kreativa, 2016), h. 6-8.

<sup>19</sup>Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama, Konflik-Rekonsiliasi-Damai* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 6

Persoalan toleransi tetap hangat dikaji dengan adanya kasus Ahmadiyah dan Syi'ah di Indonesia yang menyadarkan berbagai pihak betapa tidak mudahnya menemukan makna kolektif tentang toleransi yang selanjutnya bisa diimplementasikan. Bermula dari toleransi itu apa yang kemudian bermuara pada bagaimana format toleransi yang tepat. Format yang berlaku tidak jauh dari lingkaran konseptualnya yang telah tersusun sehingga menarik untuk ditelusuri tentang bagaimana Islam dan Barat membentuk lingkaran konseptualnya.

Eksistensi Islam sebagai agama dengan penganutnya yang mayoritas tentu mempengaruhi struktur dan kultur toleransi di Indonesia. Adapun esensi toleransi terletak pada kemampuan semua pihak mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya. Secara eksplisit, kata toleransi tidak ditemukan dalam Alquran tetapi padanan kata tersebut yaitu *al-tasāmuḥ* dijumpai dalam tradisi prophetik Islam.

Kata tersebut sesuai dengan kata *al-tasāmuḥ* yang disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ<sup>20</sup>

Artinya:

Agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah agama yang berorientasi pada semangat mencari kebenaran secara toleran dan lapang.

Maka makna *al-samḥah* dalam konteks hadis tersebut mengandung afinitas linguistik dengan kata *al-tasāmuḥ* atau *samaḥa* yang merujuk pada toleransi. Hadis Nabi saw. seringkali dipakai dalam rujukan Islam untuk mendukung toleransi dengan agama-agama lain sehingga perlu dipahami dengan

---

<sup>20</sup>Abdu al-Raḥmān bin Abi Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi, *At-Taṣyīḥ Syarah al-Jāmi' al-Ṣaḥih* Juz I (Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1998), h. 202

benar dan tidak terjebak pada ketidaktahuan dan menjadi sasaran empuk propaganda pemikiran yang bisa saja merusak Islam.<sup>21</sup>

Konsep toleransi dalam Islam tidak dibentuk dari reaksi terhadap sejarah atau berdasarkan sejarah melainkan dibentuk oleh ajaran Islam itu tersendiri berupa firman Tuhan dalam Alquran dan sabda atau perilaku Rasulullah saw. Bahkan doktrin toleransi mengacu pada konsep *uṣūl furū'* (dasar dan cabang) yang telah menjadi mapan dan dipraktikkan zaman sahabat Rasulullah.

Berbeda dengan konsep toleransi Barat yang ditetapkan oleh institusi keagamaan yakni gereja dan fenomena tersebut terlihat dari usaha pendobrakan yang dilakukan tokoh-tokoh reformasi gereja dalam beberapa hal seperti superioritas Paus terhadap seluruh kekuasaan dunia dan krisis yang melanda Eropa ke permukaan dimana tidak terdapat ruang *furū'* dan terjadi saat penguasa melakukan *abuse of power*.<sup>22</sup>

Pemahaman tentang *tasāmuh* kontradiktif dengan *ta'aṣṣub* (fanatik) dan kemunculan istilah tersebut pada akhir abad 16 Masehi di Barat setelah adanya berbagai perang yang berkelanjutan di Eropa tengah. Maka di abad 17 Masehi, konsep toleransi menjadi obyek yang diperbincangkan sehingga tidak dipungkiri berdampak pada kebebasan berpikir dari kekuasaan gereja yang ada di Eropa tentang perkembangan konsep *tasāmuh*.<sup>23</sup>

Pemikiran tentang toleransi ala Barat bermuara dengan merebaknya krisis toleransi di Eropa antara pemeluk Katolik dan Protestan dimana keduanya saling

---

<sup>21</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Fatāwa Mu'āṣirah* Jilid II (Cet. III; Manṣūrah: Dār al-Wafā, 1994), h. 667.

<sup>22</sup>Muhammad Iswardani Chaniago, *Toleransi, Islam dan Barat*, diakses [www.eramuslim.com](http://www.eramuslim.com) pada tanggal 20 Oktober 2016.

<sup>23</sup>Bilāl Ṣafiyy al-Dīn, *Maḥūm al-Tasāmuh fi al-Islām wa Ṣilatuhu bi Maḥūm al-Wājib*, paper disampaikan saat Mukhtamar Toleransi Beragama dalam Syari'ah Islam pada 19-20 Rajab 1430 H di Damaskus Suriah, h. 3

melancarkan diskriminasi dan penindasan. Aroma politisasi di beberapa negara di Eropa seperti Inggris, Austria, Belanda dan Spanyol serta lainnya yang kerap kali mengeluarkan kebijakan yang merugikan Katolikisme dan begitupun sebaliknya.<sup>24</sup>

Keadaan seperti inilah yang melahirkan ide toleransi oleh John Locke dengan dijabarkannya tiga pikiran penting tentang toleransi sebagai berikut: hukuman untuk individu yang keluar dari sekte bukan hukuman fisik tetapi ekskomunikasi (pengasingan), tidak ada lagi monopoli kebenaran dan meniadakan saling mengkafirkan serta netralitas pemerintah yang menjadikan agama sebagai wilayah privat. Tiga doktrin tersebut yang selanjutnya membentuk doktrin toleransi di dunia Barat.<sup>25</sup>

Aspek historis tersebut menunjukkan bahwa doktrin toleransi dibentuk dari fakta sejarah dalam jangka waktu yang panjang hingga terbentuknya doktrin tersebut. Kemunculannya merupakan reaksi sejarah dan pemicunya adalah krisis toleransi karena adanya *abuse of power*. Berbeda dengan doktrin toleransi dalam Islam yang merupakan bagian integral dari warisan Islam.

Pemahaman toleransi yang berkembang dalam masyarakat Eropa memunculkan pembatasan hak, kewajiban dan hal-hal yang pantas. Perkembangan tersebut melahirkan pemahaman sekularisme di Barat yang diiringi dengan berbagai pernyataan yang diantaranya pemisahan agama dengan negara. Selanjutnya konsep toleransi dikembangkan dengan adanya kemampuan menghargai perbedaan yang berakibat pada adanya kemungkinan individu atau komunitas merajut hubungan yang berorientasi persamaan. Sehingga pemaknaan

---

<sup>24</sup>Muhammad Iswardani Chaniago, *Toleransi, Islam dan Barat*, diakses [www.eramuslim.com](http://www.eramuslim.com) pada tanggal 20 Oktober 2016.

<sup>25</sup>Muhammad Iswardani Chaniago, *Toleransi, Islam dan Barat*, diakses [www.eramuslim.com](http://www.eramuslim.com) pada tanggal 20 Oktober 2016.



tersebut dalam konsep *tasāmuh* tidak bisa diterima dari sumber aslinya namun tetap diterima demi keberlanjutan hidup dengan yang lainnya.<sup>26</sup>

Bentuk sosialisasi damai yang berwujud toleransi bersumber dari kerukunan. Secara pragmatis antara kerukunan dan toleransi tidak ada perbedaan meskipun sebenarnya terdapat perbedaan namun saling memerlukan. Kerukunan mempertemukan unsur-unsur yang berbeda, sedang toleransi merupakan sikap atau refleksi dari kerukunan. Tanpa ada kerukunan, toleransi tidak pernah ada, sedangkan toleransi tidak pernah tercermin bila kerukunan belum terwujud. Jadi toleransi dalam pergaulan bukan merupakan sesuatu yang dituntut oleh situasi.<sup>27</sup>

Toleransi merupakan istilah yang lahir dari Barat sebagai respon sejarah yang meliputi kondisi sosial, politis dan budaya yang khas dengan berbagai penyelewangan dan penindasan. Konsep toleransi sebagai bentuk sosialisasi damai dari kerukunan perlu dirujuk dari makna *samāḥah* yaitu mempermudah, memberi kemurahan dan keluasan namun tidak mutlak. Tidak merujuk dari *tolerance* dalam Inggris yang artinya menahan perasaan tanpa protes sehingga penggunaan tolak ukur Alquran dan sunnah tetap diprioritaskan sehingga tidak mutlak dipahami secara bebas.

### ***B. Kerukunan Umat Beragama Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah***

Menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama harus dilakukan pemerintah, tokoh agama, dan pemangku adat yang memiliki komitmen bersama dalam mencegah berbagai bentuk kerawanan sosial. Konteks kebhinekaan, keberagaman dan kebebasan beragama termuat dalam rumusan Pancasila dan

---

<sup>26</sup>Bilāl Ṣafiyy al-Dīn, *Maḥūm al-Tasāmuh fī al-Islām wa Ṣilatuhu bi Maḥūm al-Wājib*, paper disampaikan saat Muktamar Toleransi Beragama dalam Syari'ah Islam pada 19-20 Rajab 1430 H di Damaskus Suriah, h. 3

<sup>27</sup>Said Aqil Husin al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, h. 12-13.

UUD 1945 sebagai landasan beragama, berbangsa, dan bernegara. Sekalipun dengan landasan konstitusional tersebut, masih dijumpai kasus-kasus kekerasan dan konflik yang mengatasnamakan agama yang artinya ada ketidaksesuaian idealitas dengan realitas.<sup>28</sup>

Pluralisme keagamaan adalah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam pluralisme dan bagian dari pluralisme itu sendiri, baik secara pasif maupun aktif, tak terkecuali dalam hal keagamaan. Tantangan khusus yang dihadapi agama-agama dunia dewasa ini adalah pluralisme keagamaan jika tidak dipahami dengan benar dan arif akan menimbulkan dampak, bukan hanya konflik umat beragama tetapi juga konflik sosial dan disintegrasi bangsa.<sup>29</sup>

Peluang dari adanya pluralisme keagamaan dengan memupuk persaudaraan, dimana fungsi tersebut dibuktikan dengan fakta-fakta konkret dari zaman ke zaman. Peluang tersebut adalah fakta positifnya meskipun ada pula fakta negatifnya yaitu perpecahan antar manusia yang bersumber pada agama atau membawa atas nama agama sebagai perangkat pengikut dan bukan inti. Jadi peluangnya bukan hanya peluang baik namun ada pula peluang yang buruk.

Konkretisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kerukunan beragama dilakukan dengan konstruksi (penyusunan pola kerukunan), kohesi (kelekatan dan pembauran), dan implementasi (penerapan pola yang semestinya). Konkretisasi tersebut mengindikasikan eksistensi agama yang universal bagi seluruh umat manusia, dimana kepercayaan dan keyakinan merupakan sifat esensial setiap manusia.

---

<sup>28</sup>Suchadi Cholil (ed.), *Resonansi Dialog Agama dan Budaya* “Dari Kebebasan Beragama, Pendidikan Multikultural, sampai RUU Anti Pornografi” (Yogyakarta: Center for Religious & Cross-cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana UGM, 2008), h. 183.

<sup>29</sup>M. Zainuddin, *Pluralisme Agama sebagai sebuah Realitas*, diakses <http://zainuddin.lecturer.uin-malang.ac.id> pada tanggal 10 Oktober 2016.

Dalam artian tidak ada manusia manapun yang tidak mempunyai kepercayaan dan keyakinan. Sebagai bangsa pluralistik secara budaya, etnik, kesukuan dan dimensi agama menjelaskan bahwa peran agama akan sangat menentukan masa depannya. Ketergantungan sebuah negara akan diukur keberhasilannya membangun masyarakat yang semakin maju, adil dan makmur berlandaskan dasar sebuah negara.<sup>30</sup>

Syariat Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia atau *maqāṣid al-syarī'ah* mengintegrasikan aspek ilahi dan insani.<sup>31</sup> Kemaslahatan dalam *taklīf* Tuhan berwujud dalam bentuk hakiki dan majāzi. Bentuk hakiki yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas dan bentuk majazi yaitu sebab yang membawa kemaslahatan.<sup>32</sup>

Kemaslahatan dalam tujuan hukum Islam diterima secara universal yang diwujudkan dalam lima unsur pokok yaitu *ḥifẓu al-dīn* (agama), *ḥifẓu al-‘aql* (akal), *ḥifẓu al-nafs* (jiwa), *ḥifẓu al-nasab* (keturunan) dan *ḥifẓu al-māl* (harta).<sup>33</sup> Stratigrafi (susunan lapisan) dalam mewujudkan kemaslahatan dilandaskan pada tingkatan kebutuhan yang sesuai dengan tingkatan yang semestinya dari *darūriyat*, *ḥājīyat*, dan *taḥsiniyat*.<sup>34</sup>

---

<sup>30</sup>Thalhah & Achmad Mufid, *Fiqih Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci* (Cet. I; Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 216.

<sup>31</sup>La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syari’ah”, *Asy-Syirkah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*. Vol. 45 No. II, Juli – Desember 2011: IAIN Ambon, h. 1257.

<sup>32</sup>Husein Hāmid Hasan, *Nazariyyah al-Maṣlaḥah fi al-Fiqh al-Islāmi* (Miṣr: Dār al-Nahḍah al-‘Ilmiyyah, 1971), h. 5.

<sup>33</sup>Abū Ishāq al-Syāṭibi, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Syari’ah*, Jilid II (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 5.

<sup>34</sup>Muhammad Khalid Mas’ud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al-Syatibi’s Life and Thought*, diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad dengan judul: *Filsafat Hukum Islam tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi* (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1996), h. 245.

Kebutuhan *darūriyat* disebut kebutuhan primer dan jika tidak terpenuhi akan mengancam keselamatan manusia di dunia dan di akhirat yang semua perintah dan larangan syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Adapun *ḥājīyat*, tidak sampai mengancam namun manusia akan mengalami kesulitan dan *taḥsiniyat* dianggap sebagai kebutuhan pelengkap yang hanya berada pada tatanan kepatutan menurut adat istiadat dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak enak dipandang mata atau penyesuaian pada tuntunan norma dan akhlak.

Analogi tingkatan kemaslahatan ibarat lampu-lampu pengatur lalu lintas jalan raya dimana lampu merah disimbolkan sebagai tanda bahaya dan haram. Lampu kuning disimbolkan syubhat (antara halal dan haram) dan lampu hijau disimbolkan sebagai kewajiban dan membawa kemaslahatan.<sup>35</sup> Langkah penyesuaian zaman memunculkan pengembangan wacana dengan menambahkan *ḥifẓu al-ummah* (menjaga persatuan dan memelihara umat) sebagai pengikat dari lima tujuan hukum Islam yang sudah ada dan dikenal sebelumnya.<sup>36</sup>

Alquran dan sunnah yang hanya memaktubkan tata nilai sehingga alasan *ḥifẓu al-ummah* dijadikan sebagai perekat dari tujuan lainnya karena tujuan hukum Islam sebelumnya menekankan kepada manusia sebagai individu, kurang diimbangi dengan manusia sebagai anggota komunitas. Keberadaan *ḥifẓu al-ummah* membantu memahami kasus-kasus sosial, peperangan, pemberontakan dan lingkungan serta menumbuhkan kesadaran untuk menyatukan umat akibat

---

<sup>35</sup>Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 235.

<sup>36</sup>La Jamaa, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syari’ah”, *Asy-Syirkah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*. Vol. 45 No. II, Juli – Desember 2011: IAIN Ambon, h. 1265.

perbedaan pendapat yang tajam sehingga dapat dinetralisir dan setidaknya dikurangi.<sup>37</sup>

Secara tekstual *ḥifẓ al-ummah* diartikan dengan menjaga umat supaya aman dan terhindar dari rongrongan secara internal maupun eksternal. Apalagi pemberitaan dari media bahwa masalah kerukunan umat beragama seakan terus bermunculan sepanjang tahun. Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama saat ini menyatakan bahwa umat Islam Indonesia memiliki tanggung jawab lebih, menjaga bangsa dan negara Indonesia, termasuk aspek kerukunan bangsa sehingga *ḥifẓ al-ummah* secara otomatis datang lantaran Islam pemeluk mayoritas dan berperan vital merawat kelangsungan negara dengan berbagai konteksnya.<sup>38</sup>

Realitas maraknya ketidakakuran umat Islam di berbagai dunia bahkan di Indonesia perlu didorong dengan melontarkan wacana pemeliharaan persatuan atau *ḥifẓ al-ummah* sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang dianggap akan lebih berdaya guna dan berhasil guna jika telah menjadi salah satu unsurnya. Signifikansi pemeliharaan persatuan sebenarnya memiliki landasan normatif yaitu QS.al-Ḥujurāt (49): 10 dalam Alquran<sup>39</sup>.

Cita-cita mewujudkan kerukunan umat beragama belum sepenuhnya tuntas dengan adanya berbagai hal seperti munculnya berbagai aliran yang oleh orang tua dulu tidak terpikirkan akan muncul dan datang ke Indonesia sehingga banyak yang belum siap. Hal lainnya berupa perubahan dan dinamika sosial yang luar biasa dalam berbagai hal termasuk didalamnya dinamika beragama seperti

---

<sup>37</sup>Djazuli, *Hifzu al-Ummah; Tujuan Hukum Islam*, intisari dari penyampaian makalah pada Sidang Senat Terbuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 29 April 2009. Diakses arsip.badilag.net pada tanggal 10 Mei 2016.

<sup>38</sup>Teguh Firmansyah, *Umat Islam Memiliki Tanggung Jawab Menjaga Bangsa*, diakses <http://khazanah.republika.co.id> pada tanggal 01 Januari 2016.

<sup>39</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XV; Bandung: Mizan, 2004), h. 490-491.

militansi dan fanatisme atau dinamika negatif dengan kehadiran aliran-aliranbaru dalam keagamaan.<sup>40</sup>

Selanjutnya peningkatan kesenjangan dan kecemburuan ekonomi dari mayoritas masyarakat kepada sekelompok kecil masyarakat yang menguasai ekonomi sehingga memicu berbagai konflik yang berbaju agama. Realitas tersebut perlu disikapi dan ditindaki secara intensif oleh pemerintah untuk mewujudkan kerukunan umat beragama dengan membangun sikap toleransi dalam segala aspek kehidupan, mendorong pendidikan nilai-nilai secara maksimun, terarah, sistematis di rumah, sekolah, kantor dan masyarakat.

Keteladanan diberikan melalui pendidikan toleran para pemimpin dalam setiap aspek kehidupan. Mengintensifkan kerja sama dengan pemuka agama dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi disertai dengan penegakan hukum secara tegas namun adil dan bijak. Selanjutnya melakukan perbaikan ekonomi yang berkesinambungan dan mereduksi kesenjangan ekonomi untuk mengurangi kecemburuan sosial.<sup>41</sup>

Menjaga umat didefinisikan secara istilah sebagai suatu upaya membangun kesejahteraan umat. Kata sejahtera memiliki berbagai arti, istilah umumnya bahwa sejahtera menunjuk pada keadaan yang baik, baik saat dalam keadaan yang terkait dengan pandangan hidup yang makmur. Kata sejahtera menurut ekonomi terkait dengan pandangan hidup yang menjadi landasannya. Kapitalisme atau sosialisme yang mengukur kesejahteraan dengan capaian-capaian material, walaupun mereka berbeda tentang cara distribusinya. Sedang di

---

<sup>40</sup>Sodik Mujahid, *71 Tahun Indonesia Merdeka, Kerukunan Beragama Belum Terwujud*, diakses <http://nasional.harianterbit.com> pada tanggal 13 Agustus 2016.

<sup>41</sup>Sodik Mujahid, *71 Tahun Indonesia Merdeka, Kerukunan Beragama Belum Terwujud*, diakses <http://nasional.harianterbit.com> pada tanggal 13 Agustus 2016.

beberapa negara barat, istilah kesejahteraan umat/sosial menunjuk pada pelayanan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>42</sup>

Nilai-nilai kesejahteraan yang terkandung dalam Alquran merupakan tugas dan kewajiban manusia untuk menegakkan keadilan. Perintah untuk menegakkan keadilan, melindungi dan menyantuni yang lemah merupakan perintah. Maka dalam Alquran banyak sekali ditemukan term seperti *faqīr*, *masākīn*, *du'afā*, *mustad'afīn* dan seterusnya. Demikian juga perintah untuk zakat, infaq dan sedekah yang seterusnya banyak disebut sehingga orang islam yang tidak menunaikannya dianggap pendusta agama.

Pendefinisian kesejahteraan umat sebagai bagian dari *ḥifẓu al-ummah* yaitu saat seseorang dapat mewujudkan semua nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dengan adanya lima perlindungan seperti perlindungan kesucian agamanya, keselamatan dirinya, akalanya, kehormatannya, dan perlindungan hartanya atau hak ekonominya. Sedang untuk mewujudkan kesejahteraan umat dengan mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar.

### ***C. Tinjauan Mengenai Kerukunan Umat Beragama dalam Islam***

#### **1. Tinjauan dalam Alquran**

Perkembangan ajaran Islam tidak lekang oleh perubahan zaman dari waktu ke waktu dan hukum Islam yang ada didalamnya bisa diimplementasikan di setiap waktu dan tempat. Kesaksian mengenai kebenaran ajaran dan hukum Islam dilandaskan dari bimbingan dan petunjuk otoritas wahyu ketuhanan. Kesaksian mengenai kebenarannya bisa dibuktikan dengan adanya tulisan-tulisan dalam lembaran sejarah dan kesaksian mengenai kebenarannya dilihat juga dari

---

<sup>42</sup>Tim Penulis Naskah Konferensi Rajab 1432 H, *Hidup Sejahtera di bawah Naungan Khilafah. Membangun Kesejahteraan Umat*, (Medan: Hizbut Tahrir Indonesia), h. 19

realitas kehidupan sosial kemasyarakatan. Bahkan mendapat pembuktian bagi kalangan ahli hukum dari orang Islam sendiri dan juga dari non muslim.<sup>43</sup>

Dengan adanya kesaksian dan kebenaran wahyu dari Allah swt. menunjukkan bahwa hukum Islam dengan berbagai tujuannya tidak lain untuk kepentingan umatnya dan rahmat bagi semesta alam. Hal tersebut menunjukan bahwa kehadiran dan diutusnya Rasulullah saw. untuk menegakkan keadilannya di muka bumi, merealisasikan kemaslahatan hamba-hamba-Nya dalam kehidupan yang dijalani serta kehidupan setelah kematiannya. Karakteristik hukum Islam berlaku umum dan berkelanjutan tanpa campur tangan hukum-hukum langit sebelumnya.<sup>44</sup>

Syariat Islam adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan yang ditetapkan Allah atau hasil pemahaman atas dasar ketentuan untuk dijadikan pegangan oleh umat manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya.<sup>45</sup> Dalam pengertian fukaha, syariah ialah menetapkan norma-norma hukum untuk menata kehidupan manusia lainnya.<sup>46</sup>

Di antara hukum Islam ada yang bersifat stagnan dan fleksibel sehingga dapat dikontekstualisasikan serta disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan zaman yang biasanya dianggap sebagai hasil ijtihad dan interpretasi dimana keduanya bersifat relatif. Relativitas hukum Islam tergambar dalam paradigma teoritik hukum Islam yang sarat dengan nilai-nilai filosofis dalam

---

<sup>43</sup>Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Syārī'atu al-Islām Ṣāliḥah li al-Taṭbīq fi Kullī Zamānin wa Makānin* (Cet. V; al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1997), h. 11

<sup>44</sup>Ṣubḥi Maḥmaṣānī, *Falsafatu al-Tasyrī' fi al-Islām* (Cet. II; Ṣūriah: Dār al-Kasasyāf, 1952), h. 12

<sup>45</sup>Maḥmūd Syaltūt, *al-Islām 'Aqīdah wa Syārī'ah* (Miṣr: Dār al-Qalam, 1966), h. 12

<sup>46</sup>Muḥammad Fāruq al-Nabhān, *al-Madkhal li al-Tasyrī' al-Islāmiy* (Cet. II; Beirut: Dār al-Qalam, 1981), h. 11



perubahan-perubahan penalaran hukumnya. Bentuk perubahan hukum Islam tetap didasari oleh sebuah logika hukum bahwa hukum-hukum Allah pada dasarnya berintikan kebaikan dan rahmat karena hukum Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan fitrahnya (kesuciannya), agar selamat dan damai di jalan yang lurus.<sup>47</sup>

Hukum Islam tidak dapat ditandingi kesempurnaannya oleh hukum manapun karena merupakan hukum transedental dengan validitas tersendiri dan sama sekali berbeda dengan produk manusia. Hukum Islam didasarkan atas wahyu yang memiliki validitas abadi dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.<sup>48</sup> Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu masyarakat dalam sebuah warga negara maka tidak dapat dielakkan bahwa kehidupannya akan tersentuh dengan kehidupan bangsa lain yang disertai dengan berbagai ragam strata sosial, perbedaan suku atau etnis, ragam budaya dan bahkan ragam keyakinan atau agama.

Alquran hanya memaktubkan tata nilai sehingga Rasulullah saw. tidak menetapkan aturan secara rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan dan kualifikasi pemimpin umat karena dianggap berkaitan dengan ihwal kebijakan yang sifatnya politis baik langsung maupun tidak langsung. Selain itu dikutip beberapa pendapat ulama yang selanjutnya dimodifikasi dalam format *fiqh siyāṣah syar'iyah*.

Syariat Islam yang universal berlaku melewati batas nasional sesuatu negara. Pemberlakuannya untuk setiap muslim dan non muslim baik yang mendiami suatu negara Islam ataupun tidak. Meskipun tidak semua orang

---

<sup>47</sup>Achmad Musyahid Idrus, *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 9

<sup>48</sup>Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 59

menganut agama Islam dan tidak diterapkan syariat Islam terhadap mereka maka kondisi ini mengharuskan hanya diterapkan terhadap negeri yang berada di bawah kekuasaan Islam saja. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan pemberlakuan syariat Islam menjadi bersifat nasional walaupun prinsip dasarnya syariat Islam menjadi bersifat nasional. Dari aspek ilmiah tetap bersifat universal dan dipandang bersifat nasional jika dilihat dari aspek pemberlakuannya.<sup>49</sup>

Fenomena kemajemukan dalam masyarakat Islam merupakan kenyataan normatif, teologis maupun historis. Gambaran teologis mengenai pluralisme secara gamblang telah disebutkan dalam Firman Allah swt. QS al-Mā'idah: 48.

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

Bagi setiap umat, kami turunkan aturan dan jalan terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan seluruh manusia menjadi satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kalian dengan hal-hal yang telah diberikan kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam melaksanakan kebaikan. Hanya kepada Allah-lah kalian kembali, kemudian Dia akan memberitahumu tentang persoalan yang kalian perselisihkan.<sup>50</sup>

Dengan begitu gamblang ayat tersebut mengakui pluralisme (keberagaman). Setiap umat diberi kesempatan untuk memilih jalan terang yang diyakininya. Tidak perlu ada pemaksaan terhadap kelompok lain agar mengikutinya. Pluralisme ajaran tidak perlu dipersoalkan dan biarlah kelak di akhirat Allah yang menentukan mana yang benar. Adapun di dunia, umat mesti melihat perbedaan aturan (syari'at) tersebut secara positif.

Perbedaan adalah sarana untuk membuktikan mana yang terbaik dalam kompetisi hidup. Sebagai kaum muslimin yakin akan kebaikan Islam maka tentu

<sup>49</sup>Tengku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Interaksi Fiqh Islam dengan Syariat Agama Lain* (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 3

<sup>50</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 168. Lihat pula, Kementerian Wakaf Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya* (Saudi Arabia: Penerbit Mushaf al-Syarif, 1990) h. 168

idealnya mampu berpenampilan lebih baik dari agama lain. Di samping itu, kaum muslimin tidak akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan komunitas lainnya sehingga mempersoalkan perbedaan jelas tidak menguntungkan. Lain halnya jika yang dibicarakan adalah persamaan dan walaupun hanya ada satu kebenaran, paling tidak dalam pentas kehidupan dunia umat lintas agama semakin akrab dan hal tersebut sebagai modal dasar untuk kedamaian semesta.<sup>51</sup>

Realitas pluralisme dibuktikan pula dalam kehidupan Rasulullah saw. ketika berhijrah ke Madinah. Ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah saw. menganjurkan harmonisasi dan kerukunan, membenci kekerasan sekaligus kemunafikan. Tidak ada ajakan lain kecuali ajakan Alquran supaya menghormati dan menghargai keyakinan-keyakinan agama lain, mencari titik temu dan membagi saling keselamatan.<sup>52</sup>

Kata kerukunan ialah perihal hidup rukun, damai dalam keragaman dan diiringi dengan perasaan bersatu hati atau dalam istilah lain yang dipenuhi dengan muatan makna “baik” dan “damai” yang intinya adalah kebersamaan hidup dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran.<sup>53</sup> Bila pemaknaan tersebut dijadikan sebuah pegangan maka kerukunan adalah sesuatu yang ideal bagi masyarakat manusia.

Meninjau tentang proses kehidupan bermasyarakat, unsur agama senantiasa harus dikedepankan dan bukannya malah dikorbankan apalagi para pemeluknya tertimpa nama buruk. Perihal mengenai kerukunan umat beragama

---

<sup>51</sup>Abdul Djalil et. al., *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan kekuasaan* (Cet. II; Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2011), h. 4-5

<sup>52</sup>Muhammad ‘Aṭiyyah al-Abrasy, *‘Azamatu al-Islām al-Juz al-Šāni* (al-Qāhirah: Maktabah al-Usrah, 2002), h. 146

<sup>53</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1323

akan lengkap sempurna dalam Alquran jika dilihat dari dua segi: **pertama**, segi ajaran agama yang merupakan pangkal keharusan-keharusan, sedang **kedua** adalah sosial historis sebagai wujud dari berbagai kenyataan yang seharusnya bersinergi antara idealitas dan realitas.<sup>54</sup>

Realitas keragaman dalam sebuah negara laksana dua mata pisau yang sangat tajam, satu mata pisau dapat digunakan sebagai kekuatan dan yang lainnya sebagai alat yang dimanfaatkan untuk perpecahan. Keragaman dijadikan sebagai alat pemersatu untuk saling memahami sedangkan sisi negatifnya jika tidak bisa digunakan dengan baik, tentunya akan berdampak munculnya sebuah kehancuran.<sup>55</sup>

Adapun mengenai kerukunan umat beragama dalam Alquran tentu tidaklah sulit untuk membedah muatan didalamnya. Konsep mengenai kerukunan umat beragama dalam Islam berwujud dalam ajaran dan sifat keharusan-keharusan yang bisa dikaji dan dianalisis dari Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Wacana kerukunan dalam Alquran didapatkan kata kunci yaitu persaudaraan dan kebahagiaan hidup. Kerukunan sesama warga dilandaskan tanpa ada latar belakang perbedaan bangsa, suku, budaya, agama dan golongan. Kerukunan ialah perihal hidup dalam keragaman dengan perasaan bersatu hati atau kesepakatan yang didasarkan pada kasih sayang yang mencerminkan persatuan dan persaudaraan.<sup>56</sup>

Alquran sebagai wahyu Allah swt. dalam pandangan dan keyakinan umat Islam adalah sumber kebenaran dan mutlak benarnya. Meskipun demikian, kebenaran mutlak itu tidak akan tampak manakala Alquran tidak berinteraksi

---

<sup>54</sup>Nurcholis Madjid, *Kerukunan Umat Beragama Sebuah Tinjauan Normatif Islam* diakses via madinaonline.com pada tanggal 10 Mei 2016

<sup>55</sup>M. Quraish Shihab, *Dia Dimana-mana Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena* (Cet. XI; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 155

<sup>56</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1323

dengan realitas sosial atau dalam artian Alquran tersebut dibumikan dengan cara dibaca, dipahami dan diamalkan.<sup>57</sup>

Alquran mengakui masyarakat yang terdiri atas berbagai macam komunitas yang memiliki orientasi kehidupan tersendiri. Menerima kenyataan keragaman budaya dan agama serta memberikan toleransi kepada masing-masing komunitas dalam menjalankan ibadahnya. Sangat keliru jika Islam dianggap anti plural segi ideologis sehingga setiap muslim memahami secara mendalam etika pluralitas dalam Alquran yang mengeliminasi ketegangan, permusuhan dan konflik dengan agama-agama lain selama tidak saling memaksakan.<sup>58</sup>

*Ukhuwah* sebagai kata yang tepat untuk menjembatani hubungan antara manusia dan agama sebagai hubungan totalitas yang dijelaskan dalam Alquran yang asalnya dari kata *akh*, dalam bentuk tunggal ditemukan sebanyak 52 kali,<sup>59</sup> sedang bentuk jamaknya disebutkan 96 kali.<sup>60</sup>

Adapun makna kata *akh* dalam bentuk plural dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian. Diantaranya adalah saudara sekandung atau keturunan, saudara yang dijalin karena ikatan keluarga, saudara dalam artian sebangsa meskipun berbeda agama dan keyakinan, saudara semasyarakat dan saudara seagama. Selain itu ada persaudaraan yang dijelaskan Alquran secara substansi dan tidak secara tegas seperti saudara sekemanusiaan (*ukhuwah insāniyyah*) dalam QS al-

---

<sup>57</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1997), h. 10

<sup>58</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 173.

<sup>59</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2007), h. 640

<sup>60</sup>Muhammad Fu'ād 'Abdu al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (al-Qāhira: Dār al-Ḥadīṣ, 1996), h. 29-30

Hujurāt: 13 dan saudara seketundukan terhadap Allah dalam QS al-An'ām: 38 yang dikenal dengan istilah *ukhuwah islāmiyyah*.<sup>61</sup>

Sedang esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang yang ditampilkan dalam bentuk perhatian, kepedulian, hubungan yang akrab dan merasa senasib sepenanggungan. Sedang kebersamaan dalam kalangan muslim disebut dengan *ukhuwah islāmiyyah* (Persaudaraan sesama muslim). Hal ini disampaikan dalam Firman Allah swt. QS al-Hujurāt/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>62</sup>

Substansi ayat tersebut menjelaskan tentang hidup bermasyarakat yang berarti harus berdampingan dengan orang lain yang memiliki konsekuensi harus menerima setiap kondisi yang terjadi di antara berbagai manusia yang ada di sekitar. Tidak menutup kemungkinan orang yang ada di sekeliling kita terdapat orang yang berbeda agama. Kata *syu'ūban* dalam ayat lebih umum dari kata *qabā'il* dan selanjutnya ada tingkatan lain seperti faksi, klan dan sebagainya. Dikatakan bahwa *syu'ūb* adalah orang non Arab, *qabā'il* adalah orang Arab

<sup>61</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, h. 643

<sup>62</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 847. Lihat pula, Kementerian Wakaf Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya* (Saudi Arabia: Penerbit Mushaf al-Syarif, 1990) h. 847

sedang *asbāt* adalah Bani Israel. Sedang inti dari ayat tersebut merupakan langkah pengenalan untuk menjalin kekerabatan.<sup>63</sup>

Adapun sebab turun ayat tersebut ketika penaklukan kota Makkah, Bilal naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Seseorang berkata, “Pantaskah budak hitam adzan di atas ka'bah ? “Jika Allah swt. membenci dia pasti Ia menggantinya”, sahut yang lain. Maka turunlah ayat tersebut. Menurut riwayat lain, ayat tersebut berkenaan dengan Abu Hind yang akan dikawinkan oleh Rasulullah dengan seorang wanita Bani Bayadhah. Bani Bayadhahpun berkata, “Wahai Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan puterikami dengan bekas budak kami ?” Maka turunlah ayat tersebut.<sup>64</sup>

Adapun wacana kerukunan dalam Alquran disebutkan dalam Firman Allah swt. QS al-Māidah/5: 69 dan QS al-Baqarah/2:62.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, Shabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.<sup>65</sup>

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mu'min, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Shabiin dan siapa saja di antara mereka yang benar-benar

<sup>63</sup> Abu al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kasīr al-Qursiy, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* (Cet. II; al-Mamlakah al-Saūdiyyah al-'Arabiyyah: Dār Tībā' li al-Nasyri wa al-Tawzi', 1999), h. 87

<sup>64</sup> Al-Wāḥidiy, *Asbāb Nuzūl al-Qur'ān*, dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM].

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 172. Lihat pula, Kementerian Wakaf Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 172

beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh maka tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.<sup>66</sup>

Dua ayat tersebut seakan-akan membenarkan paham pluralisme dan redaksi didalamnya menyatakan bahwa dua ayat tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa Islam mengakui kebenaran agama-agama sebelumnya dan bahkan mereka memiliki kans yang sama untuk masuk dalam surga Allah swt. Sesungguhnya ayat tersebut tidak ada sama sekali tidak ada hubungannya dengan penganut agama lain pada saat ini. Sebab topik yang diperbincangkan dalam ayat tersebut berkenaan dengan umat agama-agama sebelum diutusnya Rasulullah saw.<sup>67</sup>

Adapun asas agama Islam menetapkan tidak ada paksaan dalam beragama karena agama itu kembali pada ketenangan dan kemauan seseorang. Kebanyakan umat masuk Islam karena berdasarkan kemauannya, kecintaannya dan pilihannya. Ekspansi perluasan wilayah Islam sering mengalami peperangan namun hal tersebut dilakukan hanya sebagai pembelaan terhadap Islam agar tidak terinjakinjak. Peperangan tidak didasarkan untuk memaksakan keyakinan namun karena akses-akses politik sebuah konsekuensi logis dari pendudukan.<sup>68</sup>

Pemaksaan keyakinan dilarang mutlak sekalipun telah berkuasa di suatu wilayah bahkan banyak agama dan kepercayaan yang ada sebelumnya diberi kebebasan untuk tetap menjalaninya dengan disertai perlindungan keyakinannya.<sup>69</sup> Larangan pemaksaan dalam beragama dijelaskan dalam Firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/3: 256.

---

<sup>66</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 20. Lihat pula, Kementerian Wakaf Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 20

<sup>67</sup>Abu al-Fidā Ismā'īl bin 'Umar bin Kasīr al-Qursyiy, *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* (Cet. II; al-Mamlakah al-Saūdiyyah al-'Arabiyyah: Dār Tiba li al-Nasyri wa al-Tawzi', 1999), h. 62

<sup>68</sup>Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 6

<sup>69</sup>Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, h. 6



لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ  
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>70</sup>

Perlu diketahui bahwa beberapa wilayah yang ditaklukkan ada yang dilakukan dengan damai dan tanpa kekerasan. Penduduk setempat masuk Islam karena mereka bergaul dengan kaum muslimin dan mengetahui hakikat agama. Milyaran orang di benua Asia seperti Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagai buktinya. Ajaran Islam dibawa dengan media perdagangan yang tentunya tidak membawa pedang.

Beberapa ayat dalam Alquran dengan salah satu fungsinya adalah *al-hakīm* (hakim yang adil atau obyektif), dan obyektifitas menggambarkan bahwa penganut agama lain selain Islam sebagai orang yang baik, toleran, berdamai dan bersahabat. Setiap ayat dari ayat-ayat Alquran, setiap hadis dari hadis-hadis Rasulullah saw. bertujuan untuk kebaikan manusia tanpa membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya kecuali dengan ukuran akhlak yang islami.<sup>71</sup>

Demikian pula dengan agama yang dianut belum ditumpangi pengaruh-pengaruh keduniaan yang sifatnya temporer seperti ekonomi politik dan sebagainya. Dengan demikian agama bukan sebagai penghalang untuk berbuat adil dan kemanusiaan. Kenyataan tentang hal tersebut diungkap dalam QS al-Mumtahanah: 8 sebagai berikut:

<sup>70</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 150. Lihat pula, Kementerian Wakaf Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 63

<sup>71</sup>Husain Mu'nis, *Dustūr Ummati al-Islām Dirāsatu Uṣūl al-Hukmi wa ṭabī'atihi wa Gāyatihi 'Inda al-Muslimīn* (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-Usrah, 1998), h. 51

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ ۖ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil.<sup>72</sup>

Berdasarkan ayat tersebut maka Alquran tidak menyebutkan agama sebagai faktor memusuhi Islam dan Alquran mengambil posisi tidak memukul rata terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berkelakuan buruk dan harus dikutuk. Ada pula dari kalangan mereka yang bersikap netral bahkan berbuat baik terhadap penganut agama lain khususnya kepada orang Islam.

Bentuk toleransi yang diajarkan dalam Alquran dengan menolong siapapun, tetap menjalin hubungan kekerabatan kepada orang tua meskipun beda keyakinan atau saudara non muslim serta bolehnya memberi hadiah kepada non muslim. Toleransi beragama dalam Islam bukan berarti sinkretisme atau saling melebur dalam keyakinan. Bukan pula saling bertukar keyakinan namun toleransi disini ialah dalam lingkup pengertian muamalah atau interaksi sosial yang disertakan dengan adanya batas-batas bersama yang boleh dan tidak boleh dilanggar.

Kehadiran Islam tidak hanya mempertahankan eksistensinya sebagai agama namun juga mengakui eksistensi agama-agama lain dan memberinya hak untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan menghormati pemeluk agama lain. Hal tersebut sesuai dengan salah satu *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) dengan memberikan perlindungan agama sebagai posisipertama dalam hierarki *maqāṣid al-syarī'ah* dengan memberikan wewenang menentukan

---

<sup>72</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 150

pilihannya dan diberikan kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut.

Sebagaimana Firman Allah dalam beberapa ayat Alquran seperti QS al-An'am/6:108 dan QS al-Baqarah/2: 256 serta QS al-Hajj/22: 40 sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

Terjemahnya:

Janganlah kalian mencela orang-orang yang tidak menyembah Allah (penganut agama lain).<sup>73</sup>

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Terjemahnya:

Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.<sup>74</sup>

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الصَّوَامِعُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar kecuali karena mereka berkata: "Tuhankami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang didalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong agama-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.<sup>75</sup>

Ayat ini dijadikan sebagian ulama seperti al-Qurṭubi sebagai argumentasi keharusan umat Islam memelihara tempat-tempat ibadah non muslim dengan memberikan kebebasan untuk menentukan pilihan keyakinan sebagai jalan yang dianggapnya baik. Kebhinekaan diakui dalam Alquran dan ditampung selama

<sup>73</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 518

<sup>74</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 63

<sup>75</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.

bercirikan kedamaian. Perdamaian dan kerukunan yang didambakan Islam bukanlah bersifat semu tetapi memberi rasa aman pada jiwa setiap insan.<sup>76</sup>

Sikap toleran yang disampaikan dalam beberapa ayat Alquran adalah sikap ideal yang harus digunakan dalam menyikapi perbedaan sedang tindakan mendebat dan meperuncing perbedaan tradisi adalah tindakan yang keliru. Maka kesadaran bertoleransi bagian penting dari reformasi Islam bukanlah gagasan Barat tapi konsep universal Alquran.<sup>77</sup>

## 2. Tinjauan dalam Sunnah Rasulullah

Dalam hadis Rasulullah saw. ternyata cukup banyak ditemukan hadis-hadis yang memberikan perhatian secara verbal tentang toleransi sebagai karakter ajaran Islam. Hal ini tentu menjadi pendorong yang kuat untuk menelusuri ajaran toleransi dalam Alquran sebab apa yang disampaikan dalam hadis merupakan manifestasi dari apa yang disampaikan dalam Alquran.

Meskipun dalam percakapan sehari-hari seolah-olah tidak ada perbedaan antara kerukunan dengan toleransi. Sebenarnya antara kedua kata tersebut ada perbedaan namun saling memerlukan. Kerukunan mempertemukan unsur-unsur yang berbeda, sedang toleransi merupakan sikap atau refleksi dari kerukunan. Tanpa kerukunan, toleransi tidak pernah ada, sedangkan toleransi tidak pernah tercermin bila kerukunan belum terwujud.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup>Muhammad 'Aṭiyyah al-Abrasy, *Aḥzām al-Islām* Juz II (al-Qāhirah: Maktabah al-Usrah, 2002), h. 48

<sup>77</sup>Sultan Abdulhameed, *The Qur'an and The Life of Excellence*, diterjemahkan oleh Aisyah dengan judul: *Al-Quran Menurut Hidupmu: Menyimak Ayat Suci untuk Perubahan Diri* (Cet. I; Jakarta: Zaman 2012), h. 403-404

<sup>78</sup>Said Agil Husin al-Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2003), h. 12

Didalam beberapa hadis Rasulullah saw. beliau bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ ؛ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ <sup>79</sup>

Artinya:

saya tidak diutus dari kalangan Yahudi dan Nasrani, tapi saya diutus oleh agama dan untuk orang-orang yang lurus dan terpuji.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي يَزِيدُ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ <sup>80</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi telah menceritakan kepada saya Yazid berkata; telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dāwud bin Al Huṣain dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbās, ia berkata; Ditanyakan kepada Rasulullah saw. "Manakah agama yang paling dicintai dan disukai oleh Allah?" maka Rasulullah saw. bersabda: "*Al-Ḥanīfiyyah As-Samḥah* (yang lurus lagi toleran)".

Hadis tersebut diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dan kitab Bukhari dalam bab iman, bab agama itu mudah. Didalam sahih Bukhari secara mu'allaq tidak disebutkan sanadnya karena tidak termasuk dalam kategori syarat-syarat hadis sahih menurut Imam Bukhari tetapi beliau menyebutkan sanadnya secara lengkap dalam al-Adab al-Mufrad dalam riwayat sahabat 'Abdullah bin 'Abbas dengan sanad yang hasan.<sup>81</sup> Sementara Nāṣiruddīn al-Albānī mengatakan bahwa hadis tersebut adalah berkedudukan sebagai *ḥasan li gairihi*.<sup>82</sup>

<sup>79</sup> Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānīy, *Fathu al-Bārī* (Cet. I; Madīnah al-Munawwarah: Dār al-Hadīs, 1996), h. 94

<sup>80</sup> Abū 'Abdullah Aḥmad bin Muḥammad al-Zuhli al-Syaibānī, Musnad al-Kabīr aw Musnad Aḥmad dalam *Maktabah al-Syāmilah* ver. 3.64 [CD-ROM], Shamela Company, hadis no. 2003

<sup>81</sup> Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalānīy, *Fathu al-Bārī* (Cet. I; Madīnah al-Munawwarah: Dār al-Hadīs, 1996), h. 94

<sup>82</sup> Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Ṣaḥih Adab al-Mufrad* (Cet. II; Beirūt: Dār al-Siddiq, 1412 H), h. 122

Berdasarkan hadis tersebut maka Islam sebagai agama yang toleran dari berbagai aspeknya, baik dari aspek akidah maupun syari'ah akan tetapi toleransi dalam Islam lebih dititikberatkan dalam wilayah muamalah. Dalam literatur hadis disebutkan dalam salah satu sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى<sup>83</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyāsy telah menceritakan kepada kami Abu Ghassān Muḥammad bin Muṭarrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muḥammad bin al-Munkadir dari Jābir bin 'Abdullah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan ketika memutuskan perkara".

Pernyataan Imam Bukhari dari kata *al-Samḥah*, diartikan dengan kata kemudahan yaitu pada bab kemudahan dan toleransi dalam jual beli.<sup>84</sup> Ibnu Ḥajar al-‘Asqalāni memberikan komentar mengenai hadis yang menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi luhur dengan meninggalkan kekikiran pada diri sendiri, serta tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka dan menerima maaf dari orang lain.<sup>85</sup>

Toleransi dalam Islam dititikberatkan dalam wilayah mu'amalah yang ajarannya mengatur segala macam hal, termasuk hidup bermasyarakat dan bertetangga yang bukan hanya bertumpu pada *maqāṣid al-syarī'ah* tetapi bertumpu kepada *wasāil*-nya, semisal *sadd al-zarī'ah* dan *fath al-zarī'ah* yang

<sup>83</sup> Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizā’bah al-Ju’fi, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥih, Bāb al-Buyu’* dalam *Maktabah al-Syāmīlah* ver. 3.64 [CD-ROM], Shamela Company, hadis no. 1934

<sup>84</sup> Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah bin Bardizā’bah al-Ju’fi, *al-Jāmi al-Ṣaḥih*, hadis no. 1934

<sup>85</sup> Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajar al-‘Asqalāniy, *Fathu al-Bāri* Jilid IV (Cet. I; al-Madīnah al-Munawwarah: Dār al-Hadīs, 1996), h. 207

ditempuh dalam pelaksanaannya. Kemestian dalam menyelenggarakan kebijakan dalam wilayah muamalah senantiasa memperhatikan nilai-nilai ulūhiyyah sekaligus realitas insāniyah.

Ulasan dari beberapa hadis yang sebelumnya dikemukakan tidak lain untuk menunjukkan bahwa toleransi dalam hadis mengarahkan transparansi atau keterbukaan dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan baik itu suku bangsa, perbedaan kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, bahasa serta agama atau yang lebih populer dengan istilah inklusivisme, pluralisme dan multikulturalisme.

#### ***D. Peran Islam dalam Membina Kerukunan Umat Beragama***

##### **1. Masa Rasulullah saw.**

Rasulullah saw. bermukim di Makkah selama 13 tahun dan melakukan dakwah sebelum hijrah ke Madinah.<sup>86</sup> Rasulullah saw. dengan beberapa kalangan sahabat meninggalkan Makkah karena tekanan dan penganiayaan. Kedatangan Rasulullah saw. di Madinah disambut dengan suka cita yang hangat dari masyarakat dengan harapan membawa perubahan.<sup>87</sup> Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw. mengajak kepada keesaan Tuhan dan kesempurnaan agama-agama samawi yang ada sebelumnya juga hadir sebagai penuntun dalam masalah sosial kemasyarakatan.<sup>88</sup>

Islam yang pertama kali turun di Makkah disertai dengan tuntunan wahyu hanya berkisar pada problem teologi yang sifatnya transendental yang

---

<sup>86</sup>Muhammad ‘Abdu al-Mālik bin Hisyām al-Mu’āfiri, *Mukhtaṣar Sīratu Ibnī Hisyām*, Juz I (Cet. IV; al-Qāhirah: Kementerian Wakaf Mesir, 2000), h. 289

<sup>87</sup>Husain Mu’nis, *Dustūr Ummati al-Islām Dirāsah fī Uṣul al-Ḥukmi wa Ṭabī’atihi wa Gāyatihi ‘Inda al-Muslimīn*, (al-Qāhirah: Maktabah al-Usrah, 1998), h. 81

<sup>88</sup>Sabri Samin, *Menguak Konsep dan Implementasi Ketatanegaraan dalam Islam, Fiqih Dusturi* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 56



berorientasi pada ajakan beriman kepada Allah, Malaikat, dan Rasulnya, kitab suci dan hari akhirat. Dakwah yang dijalankan Rasulullah saw. selama di Mekkah tidak berorientasi pada sosial kemasyarakatan. Adapun periode berikutnya, orientasinya selain teologi dan akhlak manusia juga menekankan problem sosial kemasyarakatan dan pembinaan kerukunan umat beragama.<sup>89</sup>

Berbagai langkah yang dilakukan Rasulullah saw. setelah berada di Madinah diantaranya menata persatuan umat Islam, menata bidang politik dan pemerintahan, menata persatuan warga bangsa Madinah, menanamkan kebebasan sikap toleransi dalam beragama dan membangun serta membina di bidang ekonomi dan perdagangan. Maka diantara langkah tersebut terlihat aspek sosial kemasyarakatan menjadi prioritas dalam membangun karakter umat.<sup>90</sup>

Sebagai ideologi dan gerakan politik, pluralisme pernah diteladankan Rasulullah saw. kepada Umar dan diteruskan kepada para khalifah. Ketika Rasulullah saw. di Madinah dan apa yang disampaikan kepada umatnya bukanlah upaya melegitimasi agama resmi negara saat itu dan bukan pula sebagai alat memaksa agar orang memeluk Islam seluruhnya. Prinsip universal keadilan ilahi dengan perbedaan latar belakang pendidikan, lingkungan sosial budaya dan kesempatan seseorang meniscayakan diferensiasi penerimaan konsep Tuhan dan agama.<sup>91</sup>

Masyarakat madani sebagai sebutan lain dari *civil society* yang diberi warna Islam dipahami sebagai negara yang mempunyai prinsip pluralis, toleransi dan *human right* termasuk didalamnya penataan kerukunan umat beragama

---

<sup>89</sup>Sabri Samin, *Menguak Konsep dan Implementasi Kctatanegaraan dalam Islam, Fiqih Dusturi*, h. 56

<sup>90</sup>Imām Abū al-Fidā Ismā'īl bin Kāsir, *al-Sīrah al-Nabawīyyah* Juz II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1976), dalam *Maktabah al-Syāmilah* ver. 3.64 [CD-ROM], Shamela Company.

<sup>91</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 173



bahkan demokrasi. Istilah madani terambil dari kata madinah yang artinya kota namun yang dimaksud disini adalah peradaban. Jadi masyarakat madani adalah masyarakat yang berperadaban.

Dengan kepemimpinan Rasulullah saw. yang memberikan contoh bagaimana konstruksi masyarakat multikultural di Madinah yang mana penduduk asli dinamakan Anshar sedang masyarakat atau sahabat yang hijrah bersama Rasulullah saw. disebut dengan Muhajirin dan terdapat pula golongan yang beragama Nasrani dan kelompok masyarakat Yahudi yang terdiri dari Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraizah.<sup>92</sup>

Sosial kemasyarakatan menjadi dominan dan wahyu yang diturunkan di Madinah berhubungan dengan perkembangan kemasyarakatan. Sehingga kerukunan umat beragama masa Rasulullah saw. terbangun dengan menampilkan sudut pandang sejarah sosial dan budaya Islam. Sebagai agama yang paling toleran terhadap agama lain yang seterusnya mampu membawa seseorang mengikuti ajaran Islam dan bertukar dari agama asal kepada ajaran Islam. Kerukunan beragama dalam Islam berkaitan dengan kerukunan internal beragama, antar umat beragama, umat beragama dengan pemerintah.

Dalam tataran normatif, Islam dan agama lain selalu mengajarkan perdamaian, kerukunan, dan kasih sayang. Misi semua agama adalah perdamaian yang semestinya dipandang sebagai nilai-nilai universal yang tak pernah hilang sepanjang masa. Nilai-nilai tersebut menjadi tolak ukur benar tidaknya pelaksanaan suatu agama. Hal yang perlu diperhatikan adalah kewaspadaan terjebak ke dalam interpretasi banyak orang yang memandang agama dari sisi

---

<sup>92</sup>Sāmi bin Abdullah al-Maglus, *Atlas Siratu Rasūlillah*, diterjemahkan Dewi Kourniasari et.al., *Atlas Perjalanan Nabi Muhammad* (Jakarta: al-Mahira, 2008), h. 174

legal-formalnya saja dan ritus keagamaannya semata dan bukan pada nilai-nilai substansinya.<sup>93</sup>

Adapun kerukunan internal umat beragama bukan hanya terbatas pada orang Arab saja melainkan untuk seluruh umat manusia dan menjadi rahmat bagi semesta alam. Dalam perkembangan agama Islam bisa diterima oleh masyarakat yang berbeda suku, bangsa dan budaya. Perbedaan pengetahuan dan pemahaman masing-masing suku dan bangsa mendorong munculnya beberapa aliran dalam agama. Perbedaan paham tersebut merupakan dinamika umat Islam sehingga Islam menjadi rahmat bagi semesta alam dan bukannya menjadi penyebab permusuhan dan perpecahan umat.

Adapun toleransi antar umat beragama dalam batasan mu'amalah yaitu hubungan kerja sama dalam hal kemanusiaan. Sedangkan dalam hal yang berkaitan dengan akidah dan ibadah maka Islam secara tegas melarangnya.<sup>94</sup> Adapun sikap toleransi antar umat beragama ditunjukkan melalui sikap saling menghargai ajaran masing-masing, tidak melecehkan simbol-simbol maupun kitab suci masing-masing agama dan tidak mengotori maupun merusak tempat ibadah agama lain serta menjaga ketertiban dan ketenangan kegiatan keagamaan.

Sedang persatuan dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah adalah kewajiban umat beragama patuh pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, selama peraturan tersebut sesuai dengan prinsip ajaran agama yang tetap menunjukkan cara-cara yang baik dan bijaksana. Keterkaitan agama dan negara menurut paradigma simbiotik yaitu hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan

---

<sup>93</sup> Abdul Djalil et. al., *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan kekuasaan*, h. 11

<sup>94</sup> Muhammad Yūsuf, *Nizām al-Hukmi fi al-Islām* (al-Qāhirah: Dār Kitāb al-‘Arabiyy, 1963), h. 50

negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya negara juga memerlukan agama karena dengan agama maka negara dapat berkembang dalam bimbingan dan moral spiritual.<sup>95</sup>

Problem yang mendominasi di tempat tersebut adalah problem kemasyarakatan disertai wahyu yang turun juga berhubungan dengan perkembangan kemasyarakatan. Penduduk di Madinah lebih heterogen daripada penduduk Mekah pada saat itu. Selain kaum muslimin dan etnis Quraisy juga ada kaum Yahudi dan Nasrani dan kabilah Yahudi yang heterogen. Perjanjian yang disepakati bersama diperlukan untuk menyatukan dan menyamakan persepsi masyarakat Madinah dalam menjalani hubungan sosial kemasyarakatan.<sup>96</sup>

Beragam usaha dilakukan untuk mewujudkan kerukunan umat dengan melakukan berbagai perjanjian yang dibentuk, baik sebelum maupun setelah menjadi nabi. Diantara perjanjian tersebut diantaranya adalah *ḥilfu al-fuḍūl*, *mīṣāq al-ẓulmī* (piagam kezaliman), perjanjian Aqabah I dan II, piagam Madinah, perjanjian dengan Yahudi di Madinah, perjanjian dengan Bani Damrah, perjanjian dengan Bani Juhainah, perjanjian dengan Bani Mudlij, perjanjian Baiat al-Ridwān, perjanjian Hudaibiyah, perundingan Khaibar, perjanjian dengan utusan dari Najran.<sup>97</sup>

Berbagai macam perjanjian yang dilakukan Rasulullah saw. menunjukkan bahwa beliau semasa hidupnya selalu memperhatikan terwujudnya kedamaian dan ketenteraman serta menjadikan bukti akan kepiawaian Rasulullah dalam

---

<sup>95</sup>Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001), h. 26

<sup>96</sup>Muhammad Soelhi (ed), *Demokrasi Madinah Model Demokrasi Cara Rasulullah* (Jakarta: Republika, 2003), h. 12

<sup>97</sup>Lihat, Ṣafīyū al-Dīn al-Mubārakfūrī, *al-Rahīq al-Makhtūm* (Qaṭar: Wizārah al-Syū'ūn al-Islāmiyyah, 2007), h. 350-359. Lihat, Humamuddin, *Perjanjian-perjanjian yang Diikuti Rasulullah Muḥammad Ṣallahu 'Alaihi wa Sallam*, diakses alexalhamd.blogspot.co.id pada tanggal 20 Mei 2016

berdiplomasi dan politisi handal pada masanya. Piagam Madinah dalam ulasan sejarah ketatanegaraan diakui oleh beberapa kalangan sebagai undang-undang negara dan Muhammad saw. sebagai pembuat undang-undang.<sup>98</sup>

Diantara pengakuan tersebut H.A.R Gibb dalam Muhammadanisme menamakan “Legislative Enactment (penetapan legislatif). George E. Kerk, menamakannya “act” (undang-undang) yang dikeluarkan Muhammad saw. sebagai lawgiver (pembuat undang-undang) dalam bukunya “A History of the Middle East”. Emile Dermenghem, dalam bukunya “The Life of Muhammad”, menyatakan bahwa Muhammad setelah berada di Madinah adalah seorang Nabi, seorang legislator, politisi dan seorang pahlawan. Piagam Madinah adalah charter (piagam yang mengakui hal-hal kekuasaan dan lain-lain).<sup>99</sup>

Inti dari piagam Madinah mengatur hubungan antara pemeluk Islam dan agama lainnya dengan mengetengahkan sikap kesabaran dan toleransi Islam terhadap penganut agama lainnya. Tercakup didalamnya nilai-nilai yang mendukung lahirnya pemerintah Islam pertama yang menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan sosial dan sikap toleransi beragama serta kesepakatan kerjasama yang semuanya kembali pada poin-poin yang senantiasa dijaga.<sup>100</sup>

Bahkan selama memerintah tidak pernah terjadi pemaksaan masyarakat non muslim untuk mengikuti agama penguasa sebab didalam piagam Madinah ditetapkan dasar-dasar toleransi demi terwujudnya perdamaian dan kerukunan. Keberadaan agama digunakan sebagai sumber utama kekuatan moral yang murni religius lebih diinginkan daripada formalisasi agama. Sedang sistem plural

---

<sup>98</sup>Lihat, Sabri Samin, *Menguak Konsep dan Implementasi Ketatanegaraan dalam Islam, Fiqih Dusturi*, h. 57

<sup>99</sup>Lihat, Sabri Samin, *Menguak Konsep dan Implementasi Ketatanegaraan dalam Islam, Fiqih Dusturi*, h. 57

<sup>100</sup>Mustafā al-Sibā'i, *al-Ṣirah an-Nabawīyyah Durūs wa 'Ibar* (Beirūt: Maktab Islāmi, t.th), h. 67-68

dengan fakta historis tersebut adalah aturan Tuhan yang tidak mungkin berubah, diubah, dilawan dan diingkari.<sup>101</sup>

Masa Islam di Madinah sebenarnya sudah dimulai dua tahun sebelum peristiwa hijrah. Berbagai riwayat tidak menafikannya dan tidak menunjukkan adanya perbedaan. Hal ini diketahui dua tahun sebelum Rasulullah berhijrah sudah ada komunikasi dengan pendatang dari Madinah yang menunaikan ibadah haji sebagaimana dilakukannya terhadap utusan-utusan Arab lainnya sebab mereka mendengar kabar gembira datangnya seorang rasul yang berasal dari Arab.<sup>102</sup>

Konstruksi kerukunan umat beragama yang berlangsung pada masa Rasulullah saw. terjalin dinamis dan relatif stabil. Dalam konteks Islam, sejak Rasulullah Muhammad hijrah ke Yastrib (yang kemudian diganti menjadi Madinah) telah ada persoalan pluralisme agama, yaitu terdapat kelompok ahli kitab, disamping komunitas orang-orang beriman dan musyrik atau kafir. Ciri keberagamaan di masa Rasulullah cenderung bersifat etis-pragmatis. Hal ini disebabkan karena figur sentral yang diyakini memiliki otoritas keagamaan yaitu pada diri Rasulullah Muhammad saw. maka jika umatnya menemukan persoalan lalu ditanyakan kepadanya dan langsung memperoleh jawaban berupa pendapat Rasulullah atau wahyu Alquran.<sup>103</sup>

Catatan sejarah mengenai Madinah sebelum menjadi tujuan hijrah Rasulullah telah dihuni umat Yahudi dan berbagai suku Arab seperti Aus dan Khazraj. Kedua suku tersebut dikenal sebagai suku yang sering berkonflik,

---

<sup>101</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 174

<sup>102</sup>Muhammad Izzat Darūzah, *Sīrat al-Rasūl Šuwar Muqtabasah min al-Qur'ān al-Karīm* Juz II (Beirūt: al-Maktabah al-'Ašriyyah, t.th), h. 4

<sup>103</sup>Komaruddin Hidayat & Muhammad Wahyudi Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 203

bertikai dan terlibat peperangan. Perang Ba'ats dan perang ad-Dark adalah contohnya. Pada saat berperang, suku Bani Qunaiqa biasanya bergabung dengan suku Khazraj, sedang Bani Nadhir dan Bani Quraidzah bergabung dengan suku Aus.

Rivalitas antara suku tersebut berujung pada keterlibatan keduanya dalam perang dan pertumpahan darah. Namun kemudian, Nabi saw. berhasil mempersatukan dalam wujud persaudaraan dan bergabung dengan sahabat Anshar lain dan menyambut kedatangan kaum Muhajirin yang datang dari Mekkah.

Kepiawaian Rasulullah saw. membina dan menciptakan kerukunan umat beragama, baik itu antar kelompok dan penganut agama dengan perjanjian yang dibuat dan semua pemeluk agama terikat dalam perjanjian sehingga pelanggaran yang muncul dianggap telah membuat front yang layak dilawan oleh negara. Islam dibawah kepemimpinan Rasulullah saw. pernah membangun mekanisme yang baik antar penganut agama di Madinah dengan penduduk yang majemuk, suku atau agama, suku Quraisy dan suku-suku Arab Islam yang datang dari wilayah-wilayah lain, suku-suku Arab Islam penduduk asli Madinah, suku-suku Yahudi penduduk Madinah, Qaynuqa', Bani Nadhir, dan suku Arab yang belum menerima Islam.<sup>104</sup>

Umat Nasrani pada masa Rasulullah saw. sudah tersebar di sebagian belahan dunia. Di Syam, hampir semua penduduknya adalah Nasrani dan di Maghrib atau Maroko, Mesir, Habasyah, Naubah, Jazirah, Maushil, Najran dan lain-lain meski tidak semuanya namun mayoritas penduduknya adalah Nasrani. Konstruksi mekanisme pada masa Rasulullah saw. khususnya kepada kaum Nasrani sudah terjalin.

---

<sup>104</sup>Will Dewrant, *History of Civilization*, diterjemahkan Muhammad Badrān dengan judul: *Qisṣatu al-Haḍārah al-Mujallad 13-14* (al-Qāhirah: Maktabah al-Ussrah, 2001), h. 47

Bukti jalinan tersebut saat Rasulullah saw. menulis surat kepada Raja Najasyi di Habasyah (Ethiopia) untuk menjadi seorang muslim dan rekam sejarah menunjukkan bahwa Raja Najasyi pada saat itu masuk Islam melalui Ja'far bin Abi Thalib r.a. Jalinan lainnya dengan adanya peperangan terhadap kaum Nasrani yang bermula dengan salah satu surat yang dibawa oleh Harits bin Umair ra. yang akan diberikan kepada Raja Busra yang Nasrani. Namun saat tiba di Mu'tah, Syarahbil bin Amr al-Gassani yang menjadi hakim kaisar telah membunuh utusan Rasulullah saw. dan kejadian tersebut adalah kesalahan besar sehingga Rasulullah saw. marah besar atas kejadian tersebut.<sup>105</sup>

Maka hal pokok yang ditekankan dalam Islam bagaimana syariat Islam bisa diterapkan dalam berbagai bentuk dan sistem kenegaraan karena syariat Islam sebagai penguasa dan yang harus diteladani.<sup>106</sup> Kesempurnaan syariat Islam dilihat dari semua dimensi dalam maknanya yang global untuk kemaslahatan umat Islam. Sehingga berbagai syarat berdirinya suatu negara yang meliputi adanya wilayah, adanya warga negara, konstitusi dan pengakuan sebagaimana yang dikemukakan para pemikir negara. Maka negara Madinah dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. yang menguasai seluruh semenanjung Arabia kekuasaan itu berlangsung terus.<sup>107</sup>

Dalam salah *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu perlindungan terhadap jiwa yang sifatnya individual dan selanjutnya dikembangkan dalam hal *ḥifẓ al ummah* (perlindungan terhadap umat atau bangsa) sifatnya komunitas sosial tentu menjadi hal penting supaya bisa menikmati kenyamanan dan ketenangan dalam

---

<sup>105</sup>Muḥammad bin Abdullah bin Yahyā bin Sayyid al-Nās, *'Uyūn al-Asar* Jilid I (Beirūt: Muassasah 'Izzu al-Dīn, 1986), h. 165

<sup>106</sup>Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fi Iṣlāhi al-Rā'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1988), h. 12

<sup>107</sup>Sabri Samin, *Menguak Konsep dan Implementasi Kctatanegaraan dalam Islam Fiqih Dusturi*, h. 32

hidup bermasyarakat. Bahkan perbedaan agama tidak menghalangi Rasulullah saw. untuk menghormati mereka. Apapun keyakinan seseorang terdapat satu persamaan, yaitu sebagai sesama ciptaan Allah swt. dan didalam sebuah riwayat disebutkan:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عُذْرٌ عَنْ شُعْبَةَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَقَالَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ فَقِيلَ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ أَلَيْسَتْ نَفْسًا<sup>108</sup>

Artinya:

Diceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah, diceritakan kepada kami Gundar dari Syu'bah dan diceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musannā dan Ibnu Basysyār keduanya mengatakan diceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, diceritakan kepada kami Syu'bah dari Amru bin Marrah, dari Ibnu Abi Laylā bahwasanya Qais bin Sa'ad dan Sahal bin Hunaif sedang berada di Qādisiyyah, tiba-tiba ada iringan jenazah melewati mereka, maka keduanya berdiri. Lalu dikatakan kepada keduanya: Jenazah itu adalah termasuk penduduk setempat (yakni orang kafir). Mereka berdua berkata: Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah dilewati iringan jenazah, lalu beliau berdiri. Ketika dikatakan: Jenazah itu Yahudi, Rasulullah saw. bersabda: Bukankah ia juga manusia.

Kata “manusia” dalam matan hadis diatas menunjukkan tidak ada lagi kata kami dan mereka. Sebab dari kalimat, “bukankah ia juga manusia” terbangun konsep hubungan manusia dan menghilangkan segala sekat yang biasanya mengatasi hubungan manusia dengan orang yang berbeda agama, budaya, sosial dan sebagainya. Sedangkan kalimat tersebut menjawab persoalan yang ada dengan mengembangkan sikap toleran dalam inti ajaran Islam.

Sedang dalam *maqāṣid al-syarī'ah* untuk *ḥifzu al-dīn* yang berarti memelihara agama dan bisa juga diartikan perlindungan dan kebebasan beragama pada masa Rasulullah dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sikap saling

<sup>108</sup> Abu Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM] hadis no. 1596



menghargai bahkan terhadap orang yang beragama lain sudah lama dicontohkan Nabi Muhammad saw. Pada 631 Masehi, Rasulullah didatangi delegasi umat Kristiani yang berjumlah 60 orang dari daerah Najran, mereka diterima di masjid Nabi dan diperkenankan beribadah sesuai dengan agamanya. Selama tiga hari terjadi dialog tentang “tabiat” Tuhan dan Isa as. dan dialog tersebut tidak melahirkan kesepahaman dan Muhammad saw. tidak memaksakan kehendaknya bahkan tetap menghormati ajaran Kristiani yang mereka yakini.<sup>109</sup>

Kendati ada perbedaan teologis, Rasulullah bersedia melakukan persetujuan damai antara lain berisikan bahwa warga Kristiani mendapat keamanan Allah dan Rasul-Nya baik bagi kehidupan mereka sehari-hari, agama dan harta kekayaan mereka. Tidak ada intervensi dalam agama dan peribadatan mereka dan tidak ada perubahan yang berkaitan dengan hak-hak mereka serta tidak adanya pengrusakan bagi rumah ibadah atau simbol keagamaan lainnya.

Sedang perbedaan hukum antara muslim dan non-muslim juga tidak ada. Adapun penegakan keadilan diberlakukan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan atau kesepakatan bersama. Perjanjian Najran menunjukkan kebesaran jiwa Nabi yang menyikapi perbedaan yang bersifat teologis, bahwa hanya Tuhan-lah yang berkehendak seseorang memeluk Islam atau tidak. Manusia tidak bisa memaksakan, sehingga bisa hidup secara damai meskipun dalam keberagaman.<sup>110</sup>

Perilaku Rasulullah saw. menjustifikasi semua bentuk ukhuwah dari *‘ubūdiyyah* (sesaudara karena sama-sama makhluk Tuhan), *insāniyah* (kemanusiaan), *waṭāniyah* (satu keturunan dan bangsa), dan *ukhuwah fī al-dīn al-*

---

<sup>109</sup>Abū Muḥammad ‘Abdu al-Mālik bin Hisyām al Māfiriy, *Mukhtaṣaru Ṣīratu Ibnu Hisyām*, Juz I (Qāhirah: Wizārah al-Awqāf al-Majlis A’lā li Syu’ūni al Islāmiyyah, 2000), h. 571

<sup>110</sup>Abū Muḥammad ‘Abdu al-Mālik bin Hisyām al Māfiriy, *Mukhtaṣaru Ṣīratu Ibnu Hisyām*, Juz I, h. 571

*Islām* (sesama agama Islam). Bahkan Rasulullah saw. tidak pandang bulu dalam memberi perhatian dan bantuan sekalipun kepada orang-orang non muslim dengan mengirim bantuan logistik kepada penduduk Mekah ketika terjadi paceklik supaya dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan termasuk didalamnya orang non Islam.<sup>111</sup>

Keluwesannya Rasulullah saw. dalam menerima perjanjian Hudaibiyah (gencatan senjata antara orang Islam dengan orang Quraisy) yang menerima beberapa syarat yang secara sepintas dianggap merugikan umat Islam. Di antaranya beliau rela menghapus “basmalah” diganti dengan “bismika allahumma” dan menghapus “Muhammad Rasulullah” yang diganti dengan “Muhammad bin Abdullah”.<sup>112</sup> Hal tersebut menunjukkan kebijakan Rasulullah saw. yang mendahulukan kepentingan bersama, memupus kepentingan pribadi dan juga golongan, demi kemaslahatan umat.

Hidup rukun yang dicontohkan Rasulullah saw. ialah upaya penyadaran umat melalui penyajian sejarah masyarakat Islam zaman Rasulullah. Upaya Rasulullah dalam memelihara dan menjaga toleransi dan kerukunan umat beragama yang dilandasi oleh ajaran agamanya, yaitu Islam. Nilai-nilai toleransi, kebersamaan, persamaan hak, kerukunan yang ada dalam sejarah peradaban Islam maupun yang terdapat dalam mauskrip-manuskrip Alquran dan Sunnah bukan hanya sekedar kaidah-kaidah filsafat maupun teori melainkan pendidikan praktis, nilai-nilai perilaku, dan realitas yang menjadi tuntutan bagi kehidupan manusia.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup>Yūsuf al-Qarḍāwī, *Gairu al-Muslimīn fī al-Mujtama’ al-Islāmī* (al-Qāhirah: Dār al-Garīb li al-Tibā’ah, 1397 H/1977 M), h. 47-48

<sup>112</sup>Muḥammad Saīd Ramaḍān al-Būṭi, *Fiqh al-Sīrah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1440 H/1980 M), h. 317

<sup>113</sup>Muḥammad ‘Aṭīyyah al-Abrasy, *‘Azamatu al-Islām* Juz I (al-Qāhirah: Maktabah al-Usrah, 2002), h. 189

Kewaspadaan yang perlu diantisipasi jika seorang penganut agama terpesona dengan simbol agamanya sendiri. Timbulnya antipati dan bahkan berkehendak membabat habis simbol agama lain. Selanjutnya yang terjadi kemudian, agama malah ribut dengan agama lain demi mempertahankan simbolnya sendiri. Bahkan tidak jarang penganut yang sekeyakinan atau masih satu rumpun dalam agama juga terlibat serius dalam pertikaian yang tidak kunjung selesai, contohnya Sunni-Syiah-Ahmadiyah.<sup>114</sup>

Dilihat dari sisi ilmu hukum maka syari'ah dalam Islam merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah dan wajib diikuti orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan akhlak baik dalam hubungannya kepada Allah dan dengan sesama manusia maupun dengan alam sekitarnya. Syari'ah bersifat fundamental dengan ruang lingkup yang lebih luas, sedangkan fikih bersifat instrumental dengan ruang lingkup terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Dengan kata lain *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan hukum Islam yang harus dicapai.<sup>115</sup>

Langkah bijaksana bagi setiap umat adalah belajar dari fakta sejarah, yaitu sejarah yang mendorong terwujudnya masyarakat plural dan integratif. Sedangkan agenda yang perlu dirumuskan oleh umat Islam dimanapun berada dan khususnya di Indonesia adalah mengubah pluralisme sebagai ideologi dalam kehidupan kongkret yang harus mampu menahan diri dari hasrat alami manusia yakni kehendak berkuasa sehingga mampu bersikap toleran terhadap pihak lain dan menghindari hegemoni dan dominasi politik.

Maka peran negara dituntut bersikap positif dalam memperlakukan agama yang bukan saja sebagai instrumen mobilisasi politik tetapi memberlakukannya

---

<sup>114</sup> Abdul Djalil et. all., *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan kekuasaan*, h. 11

<sup>115</sup> Husain Mu'nis, *Dustūr Ummati al-Islām* (al-Qāhirah: Dār al-Rasyād, 1998), h.9

sebagai sumber etika dalam interaksi, baik sesama penguasa maupun antara penguasa dengan rakyat.<sup>116</sup>

Persoalan biasanya terletak pada tataran praktis mengenai ukhuwah basyariyah (kemanusiaan) dan waṭāniyah (wawasan kebangsaan) bisa dilaksanakan. Kedua ukhuwah tersebut merambah pada hal-hal yang sifatnya politis seperti menjadikan non muslim sebagai pemimpin. Menurut al-Mawardi dan al-Farrā', mereka bisa diangkat menjadi *wazīr al-tanfīz* (eksekutif) dan bukan *wazīr al-tafwīd* (legislatif).<sup>117</sup>

Beberapa alasan yang dikemukakan sebagai berikut, pertama: *wazīr al-tafwīd* membuat undang-undang. Kedua, *wazīr al-tafwīd* mempunyai kekuasaan penuh. Ketiga, bisa mengendalikan tentara perang sendiri bahkan menentukan dan mengatur perang. Terakhir, eksistensi *wazīr al-tafwīd* (legislatif) bisa mendistribusikan harta di baitul mal (lembaga kas negara) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>118</sup> Beberapa pos-pos tersebut dianggap strategis yang sangat rawan andaikata dipegang oleh non muslim.

## 2. Masa Sahabat

Periode sahabat dimulai sejak wafatnya Rasulullah saw. pada 11 Hijriah sampai akhir abad pertama *hijri tasyri'iy* (kekuasaan perundang-undangan). Di antara mereka ada yang hidup sampai puluhan tahun dari abad pertama hijri seperti Anas bin Malik yang wafat 93 H. Disebut periode sahabat karena

<sup>116</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 174

<sup>117</sup>Abū Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1380 H/1960 M), h. 27; Abū Ya'lā Muḥammad bin Ḥusain al-Farrā', *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 32

<sup>118</sup>Abū Ya'lā Muḥammad bin Ḥusain al-Farrā', *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h. 32

kekuasaan perundang-undangan dimotori oleh tokoh sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi saw. dalam keadaan beriman.<sup>119</sup>

Pada masa pemerintahan Abu Bakar r.a. kekuasaan Islam tersebar di daerah-daerah di luar Jazirah Arab seperti Mesir, Syiria, Iran dan Irak. Perhatian besar kalangan sahabat tentang ihwal kepemimpinan disamping semangat menciptakan persatuan dan kesatuan dalam barisan kaum muslimin. Terbukti silang pendapat tentang penyelenggaraan jenazah Rasulullah saw. bisa diakhiri namun bukan perselisihan sebagaimana dituduhkan hingga proses berjalannya kepemimpinan berjalan semestinya.<sup>120</sup>

Di tengah perjalanan kekhalifahannya timbul aliran sesat dengan banyaknya orang yang mengaku sebagai nabi, terjadi pula pembangkangan terhadap ajaran Islam dengan banyaknya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dan murtad. Aksi dan tindakan dari beberapa oknum masyarakat tentu merusak tatanan kerukunan internal dan eksternal umat beragama pada masa kekhalifahannya.<sup>121</sup>

Pada mulanya Abu Bakar diberi gelar sebagai *khalīfatullah* (khalifah Allah) namun gelar tersebut ditolaknya dan lebih suka dengan gelar khalifah Rasulullah dan dari sinilah penggunaan gelar khalifah bagi pemimpin Islam bermula.<sup>122</sup> Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah pertama menimbulkan berbagai reaksi dari luar Madinah. Reaksi pemurtadan massal di Mekah dapat diredam berkat kedatangan ‘Utbah bin Usaid dan seruan Suhail bin ‘Ammar.

---

<sup>119</sup>Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 185

<sup>120</sup>Muhammad bin Ibrahim bin Sālih Aba al-Khail, *Tārikh al-Khulafā al-Rāsyidīn* (Cet. I; al-Mamlakah al-Sa’ūdiyyah ‘Arabiyyah: Dār al-Faḍīlah, 2009), h. 35

<sup>121</sup>Muhammad ‘Atiyah al-Abrasy, *Aḥzām al-Islām* Juz II (Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-Usrah, 2002), h. 91-92

<sup>122</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam* (Cet. V; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2004), h. 51

Sedangkan di wilayah lain terjadi pembelotan dan pemberontakan meskipun motifnya beragama seperti keluar dari Islam, enggan membayar zakat dan fanatisme kesukuan yang berakibat pada pengakuan sebagai nabi.<sup>123</sup>

Kondisi tersebut menjadikan Abu Bakar dihadapkan pada dua problem kebijakan sekaligus seperti kebijakan politis untuk mengatasi problem dalam negeri seperti pembangkangan tidak membayar zakat dan orang-orang murtad, yang jika tidak segera diatasi akan mengancam stabilitas keamanan dan politik di dalam negeri dan kebijakan politik luar negeri dengan menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks.

Menghadapi fenomena tersebut maka Abu Bakar sebagai pemimpin berencana menumpas pembangkangan tersebut. Adapun pendekatan keamanan adalah cara yang efektif untuk dilakukan dengan memerangi mereka meskipun rencana tersebut tidak semuanya bisa diterima oleh kaum muslimin. Adapun penyerangan terhadap orang-orang yang murtad dan yang mengaku-aku sebagai nabi disetujui, sedangkan penyerangan bagi kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat masih diperselisihkan. Menurut pihak yang anti penyerangan, komunitas yang tidak membayar zakat bukanlah kafir dan masih saudara sesama muslim. Adapun yang mendukung langkah penyerangan karena kewajiban zakat adalah bahagian tiang ajaran Islam dan yang menolaknya berarti meruntuhkan tiang agama.<sup>124</sup>

Langkah tersebut dilakukan Abu Bakar tidak lain untuk melindungi kehormatan agama dan semua tindakan yang melecehkan, menodai, menistakan dan menyesatkan ajaran Islam harus dikedepankan seperti pengakuan sebagai

---

<sup>123</sup>Muhammad bin Muhammad bin 'Abdul Wāhid al-Syaibāni, *al-Kāmil fī al-Tārīkh* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), h. 324

<sup>124</sup>Abu al-Fath Muhammad bin 'Abdul Karīm al-Syahrastāni, *al-Milāl wa al-Nihāl* (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 14

nabi serta mendapatkan legitimasi rakyat. Meskipun harus mengedepankan cara militer sekalipun namun tetap memperlakukan orang-orang yang ingkar dengan cara manusiawi, terutama jika mereka ada yang bertaubat dan bersedia kembali ke jalan Allah. Hal inilah yang dilakukan Abu Bakar dalam langkah kepemimpinannya dan didalam penyerbuan tetap diperlakukan secara manusiawi dan terutama bagi mereka yang bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Langkah tersebut diambil karena tujuan dari penyerangan bukanlah untuk menumpas melainkan untuk *shock therapy* sehingga mereka mau menyadari kesalahannya.<sup>125</sup>

Beberapa pasukan dikirimkan untuk menaklukkan kabilah-kabilah yang melakukan pemberontakan atau menolak membayar zakat serta menumpas berbagai gerakan yang menistakan agama dengan mengaku sebagai nabi seperti Musailamah, Thulaihah dan lainnya. Langkah kepemimpinan Abu Bakar r.a. menunjukkan pemimpin yang bertanggung jawab atas kesatuan akidah dan *ḥifzu al-dīn* (pemeliharaan ajaran agama). Keberhasilan mengembalikan kemurtadan massal bangsa Arab pasca meninggalnya Rasulullah saw. disadari kaum muslimin akan jasa Khalifah Abu Bakar r.a. dan adanya legitimasi rakyat.

Di masa akhir kepemimpinan Abu Bakar r.a. sempat menyelesaikan persoalan besar yang berpotensi menimbulkan konflik di kalangan umat yaitu soal pergantian kepemimpinan. Penunjukan kepada Umar dan terpilihnya yang dibaiat secara aklamasi oleh semua rakyat dan saat itu Abu Bakar masih hidup.<sup>126</sup> Prinsip musyawarah menjadi prinsip yang dilaksanakan di kalangan rakyat, pemerintah, Muhajirin dan Anshar. Prinsip musyawarah (konsultasi)

---

<sup>125</sup> Abu al-Abbās Aḥmad bin ‘Abdul Ḥalīm bin Taimiyah al-Hirrāni, *Minḥāj al-Sunnah al-Nabawiyyah* Jilid VI (Sūriah: Muassasah Qurṭuba, 1406 H), , h. 348

<sup>126</sup> Suyūṭi, *Tarīkh al-Khulafā* dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM] alwarraq.com

diadakan juga terhadap non muslim, orang-orang pribumi Persia mengenai pemerintahan di Irak atau Mesopotamia dan Mesir.<sup>127</sup>

Pengangkatan Umar bin Khattab r.a. melalui mekanisme lain namun dikategorikan sebagai cara yang disyariatkan juga yakni melalui metode *al-istikhlāf* atau *al-‘ahdu*, melalui penunjukan dari Khalifah sebelumnya. Umar-lah yang pertama kali menyematkan dirinya dengan gelar amirul mukminin setelah sebelumnya al-Mughirah bin Syu’bah memanggilnya dengan gelar tersebut adapula yang mengatakan bukanlah al-Mughirah yang pertama kali memanggil beliau tetapi orang lain.<sup>128</sup>

Saat Umar bin Khattab memegang amanah sebagai khalifah, sebuah kisah dari banyak keteladanan beliau tentang toleransi yaitu apabila Islam berjaya membebaskan Yerussalem dari Byzantium pada Februari 638 M. tiada kekerasan yang terjadi pada penaklukan tersebut dan singkat cerita penguasa Yerussalem pada saat itu Patriarch Sophorinus menyerahkan kunci bandar dengan begitu saja. Suatu hari Khalifah Umar dan Sophorinus memeriksa gereja tua bernama Holy Sepulchre. Saat tiba waktu shalat, beliau ditawarkan oleh Sophorinus untuk shalat di gereja dan Umar menolaknya. Umar menolak dengan berkata, “Jika saya shalat didalam maka orang Islam sesudah saya akan menganggap ini milik mereka hanya karena saya pernah shalat di tempat ini”. Maka Umar mengambil batu dan melemparkannya keluar gereja. Tempat dimana batu tersebut jatuh maka disitulah Umar melaksanakan shalat dan Umar memastikan bahwa gereja

---

<sup>127</sup>Sabri Samin, *Menguak Konsep dan Implementasi Ketatanegaraan dalam Islam Fiqih Dusturi*, h. 45-46

<sup>128</sup>Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik* (Cet. I; Jakarta: Gozian Press, 2013), h. 102



tersebut tidak akan diambil atau dirusak sampai kapanpun dan tetap terbuka untuk peribadatan bagi kaum Kristiani.<sup>129</sup>

Sikap Umar bin Khattab r.a. yang berhasil menaklukkan Yerusalem tidak pernah memaksa penduduk untuk memeluk agama Islam yang ada justru sebaliknya menjalin hubungan yang baik dengan membuat perjanjian yang memberikan perlindungan bagi agama dan umat Kristiani. Inti dari perjanjian tersebut memberi keamanan terhadap jiwa, harta dan rumah ibadah penduduk Aelia, rumah ibadah tidak akan dirusaki atau dikurangi begitupun dengan simbol-simbol keagamaan mereka akan dijaga.

Toleransi Umar diabadikan dalam perjanjian yang disebut *al-‘uhdah al-‘umariyyah* yang sama dengan piagam Madinah. Hak dan kewajiban non muslim mendapatkan jaminan dan diberikan perlindungan. Tidak heran jika Sophorinus sebagai balas jasa juga memberikan pernyataan jaminannya dengan tidak akan mendirikan gereja baru atau tempat ibadah baru dan akan menerima musafir muslim ke rumah orang Kristiani dengan diberi makan dan tempat tinggal selama tiga hari. Serta tidak mengucapkan selamat yang digunakan kaum muslimin dan tidak memasang salib di jalan-jalan atau pasar-pasar yang dimiliki kaum muslimin.<sup>130</sup>

Umar juga bersikap baik dengan orang-orang Yahudi dan membolehkan mereka tinggal di Yerusalem meskipun Patriarch Kristen tidak sepakat sehingga dengan cara kompromi dilakukan dan disepakati bahwa orang-orang Yahudi boleh tinggal tetapi tidak boleh bercampur dengan orang-orang Kristen. Setelah itu Umar melakukan kavling-kavling dan biasanya penguasa lebih besar yaitu di

---

<sup>129</sup> Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Tārīkh al-Ṭabari al-Umam wa al-Mulūk* Juz III dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM] alwarraq.com

<sup>130</sup> Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabari, *Tārīkh al-Ṭabari al-Umam wa al-Mulūk* Juz III dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM] alwarraq.com

pusat kota dan tempat berdirinya masjid al-Aqsa. Orang Kristen mendapat dua kavling karena tidak dapat dipersatukan dengan kavling Kristen Orthodox Yunani dan Aremenia. Yerussalem walaupun dikenal dengan kota suci bagi Yahudi dan Kristiani juga terdapat banyak mesjid.

Fenomena tersebut bertolak belakang dengan Madinah dan Mekkah, tidak akan ditemukan tempat ibadah selain mesjid. Hal ini disebabkan karena kebijakan Umar yang ingin menjadikan Mekkah-Madinah sebagai basis yang aman sehingga semua penganut Kristen dan non muslim diminta pindah dengancara terhormat serta diberikan kompensasi. Kompensasi dari kepindahan non-muslim tersebut adalah kavling dan wilayah yang berlipat ganda, seperti orang-orang Kristen Najran dipindahkan ke Irak dengan kompensasi tanah pertanian yang jauh lebih luas dan subur. Sehingga seluruh wilayah Hijaz menjadi kawasan kaum muslimin dan oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi menjadi kawasan seluruh Saudi Arabia.

Apa yang diajarkan oleh Umar bin Khaṭṭāb r.a.dengan Patriarch sejalan dengan cuplikan ayat dalam Alquran yang mengajarkan untuk tidak merobohkan rumah ibadah umat agama lain, sebagaimana yang dikutip dalam Firman Allah dalam QS al-Ḥajj/22: 40

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ  
هَدَمْتَ صَوَامِعُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ  
اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah Allah.” Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya

Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”<sup>131</sup>

Sikap toleransi Umar diteruskan oleh sahabat-sahabat lainnya seperti yang diajarkan dalam Islam. Kalangan sahabat yang mulia banyak yang mengaplikasikannya dalam pelbagai kehidupan seperti jual beli dan urusan niaga selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebagaimana yang dilakukan Abdurrahman bin Auf yang memulai usahanya pada hari pertama berada di Madinah yang berdagang di pasar Bani Qainuqa’ milik Yahudi (Sahih Bukhari, no. 3780), Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah yang sebagian persiapan walimahnyanya ditangani oleh orang Yahudi Bani Qainuqa (Sahih Muslim no. 5242) dan bahkan Rasulullah saw. pernah menggadaikan baju peranginya 30 sha’ gandum dengan orang Yahudi Bani Zafar bernama Abu Syahm. (Ibnu Hajar, Fath al-Bari, Jilid VII h. 461).

### **3. Pola Kerukunan dalam Keragaman Agama di Indonesia**

Keragaman ialah suatu kondisi pada kehidupan masyarakat dan keberagaman di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa serta pemerintah yang senantiasa mendorong keragaman menjadi kekuatan yang bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Keberagaman dapat dibentuk oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia dan tersebar di berbagai pulau dan daerah.

Keberagaman bisa saja menjadi tantangan karena orang yang mempunyai perbedaan bisa saja kehilangan kendali. Diantara keberagaman lainnya seperti keberagaman agama dan keyakinan yang diterima oleh bangsa Indonesia sebab sebelumnya masyarakat sudah mengenal suatu kepercayaan semacam animisme dan dinamisme. Agama Hindu dan Budha yang dibawa oleh bangsa India yang

---

<sup>131</sup>Kementerian Wakaf Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 518

sudah lama berdagang lalu disusul oleh pedagang Gujarat yang menyebarkan Islam. Kedatangan bangsa Eropa yang membawa agama Kristen dan Katolik serta Cina yang menganut agama Konghucu.<sup>132</sup>

Pemerintah ikut andil menghadapi persoalan dalam umat beragama senantiasa perlu selalu disosialisasikan. Hal tersebut tentu tidak bisa dipungkiri mengingat konflik antar umat beragama dan konflik internal umat beragama sewaktu-waktu bisa saja terjadi dan kenyataannya kejadian tersebut masih berlangsung hingga hari ini. Agenda-agenda kemanusiaan seharusnya dilakukan dengan kerjasama umat beragama seperti memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih dapat dilakukan sebaik-baiknya.<sup>133</sup>

Berbagai agenda kemanusiaan tentu tidak bisa dijalankan secara optimal jika masalah kerukunan umat beragama belum terselesaikan, baik internal maupun antar umat beragama. Fakta menjelaskan bahwa setiap agama mengajarkan kedamaian dan keselarasan hidup namun realitas menunjukkan pluralisme agama bisa memicu pemeluknya saling berbenturan dan bahkan terjadi konflik. Sebuah konflik bisa berdampak amat mendalam dan cenderung meluas dengan implikasi yang amat besar sehingga beresiko pada bidang sosial, politik maupun ekonomi yang besar pula.

Indonesia secara historis, politis dan sosiologis punya modal sangat kuat dalam menangani dan meredam konflik karena pemerintahan secara politis adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pemerintah melalui

---

<sup>132</sup>Mursyid Ali ed., *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), h.vii

<sup>133</sup>Jimly Assiddiqie, *Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Pasca Reformasi*, disampaikan pada Dialog Kebangsaan tentang Toleransi Beragama oleh Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno, Hotel Borobudur Jakarta, 13 Februari 2014

kekuatan negara berwujud aparat dan alat-alat negara yang menetapkan hukum, melaksanakan ketertiban dan keamanan, mengadakan perdamaian dan lainnya dalam rangka mewujudkan kepentingan warga negaranya yang beragam.<sup>134</sup>

Usaha membangun pemahaman yang lebih komprehensif terhadap makna pluralisme agama, penting untuk memahami tentang apa pengertian agama itu sendiri. Pemahaman terhadap pengertian agama akan menjadi sebuah rangkaian untuk membangun pengertian yang lebih utuh terhadap pluralisme agama. Meskipun agama telah dikenal dengan baik dan lekat dengan kehidupan manusia namun dalam kenyataannya tidak mudah merumuskan makna agama yang bisa diterima secara luas. Hal ini disebabkan karena agama selalu diterima dan dialami secara subjektif. Maka implikasi, definisi, pengertian dan pemahaman agama menjadi beragam dan tergantung kepada siapa yang mendefinisikannya.<sup>135</sup>

Wacana pluralisme secara umum tidak hanya muncul disebabkan oleh adanya kemajemukan masyarakat, adanya keanekaragaman dalam berbagai kehidupan serta struktur masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Lebih dari itu realitas keagamaan tersebut lebih penting adalah membangun pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Bahkan pluralisme merupakan keharusan bagi keselamatan umat manusia yang di antaranya dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan di antara kelompok di masyarakat.<sup>136</sup>

Enam agama di Indonesia, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budhayan Konghucumenjadi bukti pengakuan pluralisme agama sebagaimana

---

<sup>134</sup>A. Ubaidillah & Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), h. 18

<sup>135</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Islam dan Pluralisme, Akhlaq al-Qur'an Menyikapi Perbedaan* (Jakarta: Serambi, 2006), h. 20

<sup>136</sup>Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 31

yang tertuang dalam Penetapan Presiden RI Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang selanjutnya diperkuat dalam bentuk Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu adalah agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia. Meskipun Konghucu pada awalnya tidak diakui pada masa Orde Baru namun Inpres Suharto yaitu Inpres No. 14/1967 sudah dicabut pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keppres No. 6/2000.<sup>137</sup>

Adapun pemerintah dalam konteks tersebut diwakili oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian dan Kejaksaan karena keberadaan empat institusi tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi terkait untuk menjaga dan memelihara pluralisme tersebut dalam bingkai toleransi keragaman atau kerukunan umat beragama.

Definisi tentang kerukunan umat beragama dituangkan dalam PBM No. 9 dan 8 tahun 2006<sup>138</sup> adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dan pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan merawat kerukunan umat beragama adalah upaya

---

<sup>137</sup>Shadiq Kawu, dkk., *Spirit Konghucu Modal Sosial dalam Merenda Kebangsaan*, dengankata pengantar oleh Penerbit (Cet. I; Jakarta: Orbit Publishing, 2011), h. v

<sup>138</sup>Lihat Bab I Pasal 1 butir 1 dan 2, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat yang diterbitkan tanggal 21 Maret 2006.

bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama.<sup>139</sup>

Pembinaan agama menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sebagai institusi negara yang memang secara historis mempunyai wewenang di bidang tersebut. Arah pembinaan kehidupan keagamaan di Indonesia antara lain membangun kerukunan hidup antar dan intra umat beragama. Hal ini karena agama mempunyai kecenderungan untuk menyebarkan kebenaran yang diyakini pada umat manusia. Jika kecenderungan tidak diatur maka akan menjadikan masyarakat beragama saling berebut pengaruh yang pada gilirannya dapat menimbulkan konflik antar agama.<sup>140</sup>

Secara lebih terperinci, pluralisme merupakan keberadaan atau toleransi keberagaman, etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan dan sebagainya. Pluralisme semacam ini disebut sebagai pluralisme sosial. Untuk merealisasikan dan mendukung konsep tersebut, diperlukan adanya toleransi. Sebab toleransi tanpa adanya sikap pluralistik tidak akan menjamin tercapainya kerukunan umat beragama yang langgeng dan demikian juga sebaliknya.<sup>141</sup>

Sebagai negara yang kaya akan keberagaman, baik adat istiadat, suku, agama dan bahasa. Maka menjaga toleransi umat beragama termasuk poin terpenting untuk membangun persatuan dan kesatuan nasional. Harus diakui bahwa bangsa Indonesia dengan beragam agama dan kepercayaan belum

---

<sup>139</sup>Mursyid Ali, ed., *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), h. xiii

<sup>140</sup>Mursyid Ali, ed., *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*, h. xiii

<sup>141</sup>Musa Asy'arie, *Filsafat Islam tentang Kebudayaan* (Yogyakarta: LESFI, 1999), h. 130-131

sepenuhnya mampu menciptakan kehidupan yang rukun dan bahkan ada beberapa wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih merasakan ketidaknyamanan hidup di negerisendiri seperti konflik antar jamaah Islam dan Ahmadiyah di Cikeusik tahun 2011, Syiah di Sampang Madura tahun 2011, peristiwa Ketapang Jakarta tahun 1998, Gereja GKI Bogor tahun 2012.<sup>142</sup>

Sejarah kerukunan umat beragama di Indonesia mengalami pasang surut, mulai dari berdirinya Muhammadiyah tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama tahun 1926 walaupun tidak terasa aksi-aksi yang dilakukan dua golongan tersebut. Aksi yang paling aktual yang pernah terjadi adalah pembakaran pemukiman kelompok sesat Ahmadiyah di Parung, Bogor dan NTB. Kasus penyerangan ustad oleh LDII di Karanganyar, Solo. LDII telah menganggap para ustad telah mendiskreditkan golongan ini. Selain itu perang paderi, antara golongan putih dan adat. Adapun untuk intoleransi kerukunan antar umat beragama seperti kasus Ambon, Poso, dan pembakaran gereja di beberapa wilayah di Indonesia.<sup>143</sup>

Di tengah maraknya kasus konflik horizontal di Indonesia pada beberapa tahun terakhir maka beberapa potret dari realita kerukunan umat beragama bisa terwujud dan layak untuk diteladani. Dari beberapa yang patut diteladani seperti fenomena kehadiran 150 banser yang ikut mengamankan natal di Bantul pada tahun 2009, pecalang sebagai pasukan pengamanan adat umat Hindu di Bali yang ikut mengamankan pelaksanaan shalat id, seorang perempuan berkerudung yang memberikan uang kepada biksu Budha, adanya aksi komunitas tokoh dari berbagai agama yang ikut memperingati hari perdamaian antar umat beragama dan menolak kekerasan atas nama agama, pengurus masjid Istiqlal yang

---

<sup>142</sup>Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural* (Jakarta: Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010), h. 2

<sup>143</sup>Fajar Nugroho, "Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia", *Blog Fajar Nugroho*. <http://ajanknugroho.blogspot.co.id/2012/05/toleransi-dan-kerukunanantar-umat.html> (21 Mei 2016).



menjadikan halaman masjid sebagai lokasi parkir umat Kristen yang merayakan Natal di Gereja Katedral dan berbagai fenomena lainnya yang menunjukkan wujud dari kerukunan antar umat beragama.<sup>144</sup>

Dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam tetap tidak diperkenankan menunjukkan sikap diskriminasi satu sama lain. Pembangunan rumah ibadah tidak boleh semena-mena untuk menghindari konflik terbuka yang tidak perlu terjadi. Secara struktural, aturan pemerintah tertuang dalam SK Bersama Tiga Menteri meskipun wacana tersebut perlu ditinjau kembali karena dianggap diskriminatif, dimana semua agama memiliki kesempatan secara proporsional untuk mengembangkan agamanya, dan terdapat rambu-rambu bersama yang harus dipatuhi misalnya: tidak boleh menyebarkan agama pada orang yang sudah memeluk agama lain apalagi secara paksa.<sup>145</sup>

Konstruksi kerukunan intra dan antar umat beragama maka Kementerian Agama mengeluarkan berbagai kebijakan dengan mengeluarkan berbagai pedoman penyiaran agama, pemberian fasilitas bagi umat beragama untuk dialog dan kerjasama. Andil dan berperan mendirikan forum-forum beranggotakan tokoh-tokoh agama yang berfungsi sebagai jembatan antar umat beragama dengan pemerintah. Forum-forum itu adalah Majelis Ulama Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Perwalian Umat Budha Indonesia (WALUBI) serta Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN).<sup>146</sup> Berbagai wadah tersebut

---

<sup>144</sup>Irwan Khoiruddin, *Potret Wujud Indahnya Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, diakses brilio.net pada tanggal 25 Desember 2015.

<sup>145</sup>M. Alfian Alfian M, *Indonesia Fenomena Negara Multi-Agama*, Harmoni Vol. III , No. 12, 2004, h. 57

<sup>146</sup>Mursyid Ali, ed., *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), h. xiii

diakui secara formal dapat menjadi pelindung dan sekaligus tempat mengadu tentang berbagai masalah yang terkait dengan agama.

Pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama ditindaklanjuti dengan rancangan undang-undang perlindungan umat beragama sebagai tindak lanjut ragam munculnya konflik beragama yang berpotensi merusak kehidupan bangsa dan negara. Berbagai draf dari RUU Perlindungan Umat Beragama diantaranya syarat pendirian rumah ibadah, penyebarluasan, penyiaran dan perlindungan umat beragama yang mayoritas dan minoritas. Rancangan undang-undang tersebut bagian dari amanah konstitusi serta menggantikan UU No. 1 PNPS tahun 1965 yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>147</sup>

Kemajemukan agama di Indonesia suatu hal yang sensitif yang dapat menimbulkan ketidakrukunan dan pecahnya persatuan dan esatuan bangsa yang dapat mengakibatkan tidak berhasilnya pembangunan nasional. Kesadaran tentang pentingnya Tri Kerukunan hidup beragama harus benar-benar disadari dan manfaatnya dalam upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada hakikatnya terwujudnya kerukunan hidup beragama tergantung pada kerukunan hidup umat beragama Islam, karena mereka merupakan umat mayoritas yang akan menentukan kerukunan hidup beragama di Indonesia. Sekiranya kerukunan internal umat beragama Islam tidak terwujud berarti Tri Kerukunan akan sulit diwujudkan. Kalau kerukunan internal Islam tidak diwujudkan tentu akan berdampak pada hal-hal yang menyedihkan lebih-lebih ketidakrukunan tersebut disebabkan pada masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup>Fathiyyah Wardah, *Pemerintah Susun RUU Perlindungan Umat Beragama*, diakses voaindonesia.com pada tanggal 21 Mei 2016.

<sup>148</sup>Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa Butir-Butir Pemikiran* (Cet. II; Jakarta: Gunung Mulia, 2006), h. 83

Ketidakrukunan umat Islam akan digunakan oleh pihak-pihak tidak menghendaki berlangsungnya pembangunan nasional yang baik di dalam maupun luar negeri. Kewaspadaan umat Islam sangat diperlukan sebagai umat terbesar di Indonesia. Hal tersebut bisa terlihat dengan keberadaan Islam sebagai faktor penentu dalam urusan-urusan publik seperti potensi konflik yang rawan dengan pendirian rumah ibadah baru yang belum berizin sehingga stakeholder diminta untuk hati-hati memberi izin. Begitupun dengan penghargaan simbol kerukunan dengan berdampaknya rumah ibadah dan saling memuliakan hari besar agama.

Maka bentuk Tri Kerukunan yang disepakati adalah kerukunan internal, antar umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah. Ketiga bentuk kerukunan sangat peka dan sensitif untuk bisa dipecah. Namun kerukunan umat beragama itu sendiri sebenarnya tergantung dari kerukunan umat Islam sebagai agama dengan jumlah terbesar, rukun dan bersatu padu maka kerukunan hidup umat beragama dengan persatuandan kesatuan bangsa akan dapat terjamin.<sup>149</sup>

Bentuk kerukunan dalam bentuk Tri Kerukunan Umat Beragama diwujudkan dalam wadah musyawarah Antar Umat Beragama yang ada di tingkat pusat. Adapun untuk menjaga kelestarian kerukunan hidup umat beragama diperluas ke tingkat propinsi dan kabupaten sehingga peristiwa kerusuhan di daerah dapat diantisipasi sedini mungkin. Disamping wadah masyarakat antar umat beragama dibentuk pula wadah atas ormas-ormas agama yang sifatnya intern yang berdimensi sosial kemasyarakatan. Berbagai masalah yang terjadi dan berakibat pada kerusuhan kemungkinan disebabkan karena adanya ketidakadilan dan kemiskinan atau kesenjangan sosial.<sup>150</sup>

---

<sup>149</sup>Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa Butir-Butir Pemikiran*, h. 84

<sup>150</sup>Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa Butir-Butir Pemikiran*, h. 88

Dari enam agama tersebut telah berkembang sebelumnya agama-agama lainnya yang tidak resmi dan dipeluk sebagian kecil masyarakat bangsa Indonesia terutama daerah-daerah pedalaman. Agama-agama yang tidak resmi biasanya disebut dengan aliran kepercayaan yang tidak bersumber dari ajaran agama, tetapi bersumber dari keyakinan yang tumbuh dalam masyarakat setempat. Keragaman tersebut biasanya menimbulkan permasalahan dan terkadang memicu konflik antar agama. Kemajemukan masyarakat dalam hal agama adalah sumber kerawanan sosial apabila pembinaan kehidupan keagamaan tidak tertata dengan baik.

Negara Indonesia telah menjamin kehidupan agama bagi seluruh rakyatnya. Dasar negara Pancasila memberikan jaminan kebebasan beragama dengan sila yang pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa.” UUD 1945 juga menjamin kebebasan menjalankan agama dengan satu pasal khusus, yaitu pasal 29. Di samping itu, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” memberikan peluang leluasa bagi beragam agama yang ada untuk mengikuti dan melaksanakan ajaran agama di bawah satu kesatuan dasar Pancasila dan UUD 1945.

Sedang pelaksanaan Tri Kerukunan Beragama dikeluarkan dalam bentuk keputusan Menteri Agama yang menjabarkan aturan itu dengan lebih rinci, yaitu Keputusan Menteri Agama no. 70 tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama dan Keputusan Menteri Agama no. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga-lembaga Keagamaan di Indonesia. Tiap golongan beragama dapat mencurahkan perhatiannya terhadap pembinaan dan peningkatan kualitas warga golongannya masing-masing sekaligus kerukunan antar umat beragama akan terjaga jika aturan-aturan tersebut di atas dipatuhi.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup>Fajar Nugroho, “Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia”, *Blog Fajar Nugroho*. <http://ajanknugroho.blogspot.co.id/2012/05/toleransi-dan-kerukunanantar-umat.html> (21 Mei 2016).

Perlu diketahui bahwa tradisi hidup rukun antar sesama warga dan umat beragama sudah ada sebelum Indonesia lahir sebagai negara atau sudah ada sejak zaman kerajaan. Hidup rukun, damai dan saling menghargai antar teman, tetangga antar kampung dan kawan serta suku bangsa yang berbeda faham keagamaan sudah ada dan membudaya dan bahkan sudah menjadi bagian dari kearifan lokal sejak berabad-abad yang lalu. Contoh tradisi rukun antara penganut Hindu dan Budha sejak masa Kerajaan Sriwijaya tahun 629 Masehi.<sup>152</sup>

Upaya membina kerukunan hidup umat beragama senantiasa dilakukan pemerintah dilakukan dengan cara dialog, silaturahmi, konsultasi, pertemuan silaturahmi dan yang sejenisnya sehingga jajaran pimpinan umat beragama tidak saling curiga mencurigai dan masing-masing melaksanakan politik praktis yang berdampak pada perpecahan antar umat beragama. Hingga kini kerukunan umat beragama terus terbangun dengan baik.

Berdasarkan laporan Balitbang, Kementerian Agama pada April 2014 menyebutkan bahwa konflik antar agama menurun dan kualitas hidup beragama semakin baik. Jika potensi konflik mengecil atau menurun maka kualitas kerukunan kian baik. Secara umum, tingkat kesadaran akan pentingnya hidup rukun dan berdampingan antar pemeluk agama juga cukup baik. Peran pemerintah dalam membangun kebersamaan dilakukan dengan cara memelihara dan mengembangkan kehidupan yang harmoni dan biasanya pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kekeluargaan dan kesejahteraan sebagaimana yang pernah dilakukan Jusuf Kalla pada kesepakatan Malino I dan II.<sup>153</sup>

---

<sup>152</sup>Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama* (Cet. I; Jakarta: Saadah Cipta Mandiri, 2012), h. 10

<sup>153</sup>Redaksi Dewan Masjid Indonesia, *JK Meneguhkan Kerukunan Umat Beragama*, diakses <http://dmi.or.id/jk-meneguhkan-kerukunan-umat-beragama/> pada tanggal 30 Mei 2016.

Konstruksi kerukunan beragama tidak bisa dengan cara-cara yang dilandasi sikap primordial tapi dengan toleransi yang menggerakkan saling kesepahaman dan rasa pengertian antar umat beragama dan tidak bisa dipaksa dari satu pihak semata. Maka mewujudkan toleransi dalam kehidupan umat beragama tidak bisa datang dari satu pihak tapi hadir dari semua pihak dan itulah keadilan dalam konsep toleransi. Maka membangun sikap saling menghargai, menghormati dan menerima perbedaan salah satu kunci penting terbangunnya landasan dan bangunan yang kuat kerukunan dan toleransi antar umat beragama.

### ***E. Dinamika Kerukunan Umat Beragama di Indonesia***

#### **1. Masa Orde Lama**

Islam sebagai umat dengan jumlah umat terbesar tertuntut mewujudkan kerukunan dan kesatuan dalam internal umat Islam sehingga kerukunan beragama serta persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjamin. Ketegangan antar umat beragama di masa kolonial sudah terjadi khususnya Kristen dan Islam yang lebih dipicu oleh kegiatan penginjilan yang mendapat bantuan besar dari pemerintah penjajah, baik secara politis maupun finansial.

Sedang Orde Lama, ketegangan mencuat saat pembahasan UUD 1945 dalam sidang Konstituente hasil Pemilu 1955. Dalam pembukaan UUD 1945 ditetapkan tujuh kata yang bernuansa Islami yang oleh kaum Kristen dianggap sebagai upaya membentuk negara Islam dan akhirnya dihapus.<sup>154</sup> Secara praktis untuk mempertemukan perekat umat beragama masa Orde Lama seperti Islam, Kristen dan Katolik ternyata tidak mudah dan bahkan dapat dikatakan gagal. Hal

---

<sup>154</sup>Tujuh kata yang dihapus tersebut adalah “kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Lihat, Sudarta, *Konflik Islam Kristen, Menguak Akar Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia* (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1999), h. 10

ini disebabkan karena umat Islam, Kristen dan Katolik saling curiga mencurigai dan masing-masing melaksanakan politik praktis.<sup>155</sup>

Meskipun demikian bias ketegangan lebih terlihat antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam ketimbang Islam vs Kristen sejak awal kemerdekaan sampai dengan peristiwa pemberontakan G-30.S/PKI.<sup>156</sup> Perumusan Pancasila oleh kalangan pendiri NKRI sebagai ideologi dan dasar negara diyakini menjadi kunci keberhasilan Indonesia khususnya dalam membangun kerukunan umat beragama, antar suku dan antar budayanya serta menjadi contoh yang baik bagi dunia Islam dan bahkan dunia secara umum.<sup>157</sup>

Kesadaran terpeliharanya kerukunan umat beragama menjadi salah satu alasan sebagian besar umat Islam menerima Pancasila sebagai azas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apalagi nilai-nilai luhur dari agama terutama Islam dan budayanya telah terintegrasikan dalam kehidupan masyarakat. Setiap sila dari Pancasila mempunyai relasi yang kuat.

Masalah bangunan kebangsaan sudah terselesaikan ketika para wakil pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 bersepakat mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Daya ikat dan daya rekat nasionalisme dalam tatanan struktur dan kultur Indonesia semakin mantap ketika kemerdekaan tercapai pada tanggal 17 Agustus 1945. Makna “keragaman dalam kesatuan” dan “kesatuan dalam keragaman” mengakar secara kuat dalam kehidupan bangsa dan semakin

---

<sup>155</sup>Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa Butir-Butir Pemikiran*, h. 84

<sup>156</sup>Amos Sukanto, “Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik”, *Jurnal Teologi Indonesia* I/1 (Juli 2013), h. 25

<sup>157</sup>Hamdan Zoelva dkk., *Prosiding Kongres Pancasila IV Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia* (Yogyakarta: PSP UGM, 2012) h. 261

mendapatkan momentum historisnya ketika Pancasila tanggal 1 Juni 1945 diterima sebagai dasar falsafah negara.<sup>158</sup>

Relasi antara Islam dan Pancasila bisa dilihat dari totalitas makna tauhid yang terintegrasi dalam sila pertama, sedang penekanan sikap adil dalam ajaran Islam terintegrasi dalam sila kedua. Selanjutnya persatuan dan kesatuan antar manusia untuk mencegah dan meminimalisir mudharat terintegrasi dalam sila ketiga. Sedang serapan nilai-nilai Islam tentang kepemimpinan yang adil dan memperhatikan maslahat rakyat serta menjalankan roda pemerintahan dengan musyawarah dan dengar pendapat untuk kemufakatan tergambar dalam sila keempat. Adapun sila kelima yang bersinergi dengan kaidah fikih Islam bahwa kepemimpinan itu memperhatikan kemaslahatan rakyat yang berarti pemegang amanah wajib mengutamakan kesejahteraan rakyat.<sup>159</sup>

Dalam realitasnya masa Orde Lama diwarnai ketidakharmonisan umat beragama dengan pemerintah. Konflik yang terjadi berupa konflik vertikal yang didominasi antara masyarakat dengan pemerintah pusat. Pada masa tersebut kerap terjadi pemberontakan antara daerah dan pusat yang diantaranya pemberontakan DI/TII di berbagai wilayah Indonesia, Permesta di Maluku, PRRI di Sumatera, Abdul Aziz di Sulawesi dan lain-lainnya. Konflik yang terjadi masa tersebut disebabkan adanya motivasi politik dan ketidakpuasan dengan pemerintah pusat. Sedangkan konflik keagamaan tidak begitu mendominasi karena Orde Lama dianggap sebagai proses mengukuhkan keberadaan dan identitas Indonesia sebagai negara yang berdaulat setelah penjajahan.<sup>160</sup>

---

<sup>158</sup>Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama, Konflik-Rekonsiliasi-Damai* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 32

<sup>159</sup>Syamsul Hidayat, "Hubungan Pancasila dengan Nilai Ajaran Islam", *Majalah Tablig* (Rajab-Sya'ban 1433 H), h. 33

<sup>160</sup>Anis Matta, *Tiga Jenis Konflik di Indonesia*, diakses <http://nasional.sindonews.com> pada tanggal 21 Mei 2016.



Mengukuhkan kekuasaan sebuah pemerintah yang langgeng membutuhkan dua perangkat kerja. Pertama berupa tindakan kekerasan yang bersifat memaksa sedang kedua bersifat lunak dan membujuk. Perangkat keras yang memaksa dilaksanakan oleh lembaga-lembaga seperti hukum, militer, polisi, penjara. Sedangkan yang lunak dan membujuk dilancarkan dalam pranata kehidupan swasta seperti dalam kehidupan agama, pendidikan, kesenian, keluarga.<sup>161</sup>

Upayapemerintah Orde Lama membangun kerukunan nasional termasuk didalamnya kerukunan keagamaan dengan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan aslinya. Adapun kebijakan politik Demokrasi Terpimpin dan Nasakom dikembangkan meskipun dalam perjalanannya terjadi pertentangan. Kondisi kerukunan beragama secara umum dalam kondisi baik karena tradisi kerukunan sudah membudaya sejak lama. Namun penyimpangan norma sosial dan budaya dalam bentuk letupan-letupan konflik keagamaan tidak bisa dihindari sejak lama. Maka pemerintah Indonesia era kemerdekaan hingga reformasi dituntut tetap waspada dan terus berusaha agar kerukunan keagamaan tetap terpelihara dan konflik keagamaan dapat ditekan.<sup>162</sup>

Kebijakan pembinaan agama sejak era Orde Lama dilakukan secara sentralistis hingga sekarang. Kementerian Agama selaku penanggung jawab pembinaan kerukunan keagamaan telah menerbitkan regulasi dan mengembangkan konsep-konsep kebijakan yang bersifat normatif dan akademik. Dalam aspek regulasi, era Menteri Agama KH. Moh. Dahlan diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang

---

<sup>161</sup>Sukandi, ed., *Politik Kekerasan ORBA Akankah Terus Berlanjut ?* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1999), h. 27

<sup>162</sup>Haidlor Ali Ahmad, ed., *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama* (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), h. xiv

Pelaksanaan Tugas Aparatur Negara Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-pemeluknya.<sup>163</sup>

Masa Orde Lama dari tahun 1945-1968 tampak kepemimpinan Soekarno sangat erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia saat itu yang tertekan dengan penjajahan Belanda dan Jepang. Wujud berbagai hambatan adalah disintegrasi dan instabilitas sejak periode Orde Lama hingga berpuncak pada pemberontakan PKI tahun 1965 sehingga lahirlah Supersemar sebagai koreksi total terhadap budaya dan sistem politik pemerintah Orde Lama dimana mekanisme, fungsi dan struktur politik berlandaskan ideologi sosialisme komunisme.

Secara umum Indonesia sebagai negara multikultural yang dengan berbagai macam etnis, budaya dan agama kerap melahirkan konflik suku, agama, ras dan antar golongan ketika keadilan tidak mampu ditegakkan dan ketidakadilan juga yang mengakibatkan sering terjadinya konflik. Sedang kehidupan keagamaan pada masa Orde Lama awalnya berjalan mulus karena sejak tahun 1945-1968 tidak ada insiden yang berarti dalam hubungan antar umat beragama. Konflik yang terjadi masa tersebut lebih disebabkan oleh ketidakpuasan sekelompok masyarakat terhadap pemerintah yang berusaha pada usaha untuk memisahkan diri dari NKRI.

## 2. Masa Orde Baru

Berkenaan dengan pluralisme dan kenyataan dalam sebagian masyarakat masih menunjukkan pemahaman yang dangkal dan kurang sejati. Istilah pluralisme adalah barang harian dalam wacana nasional dan kenyataannya

---

<sup>163</sup>Haidlor Ali Ahmad, ed., *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama*, h. xv

menunjukkan bahwa pemahaman tentang pluralisme hanya sepintas saja dan tanpa makna yang mendalam dan tidak berakar dalam ajaran kebenaran. Pluralisme pada hakikatnya tidak hanya menerima dan mengakui kenyataan masyarakat yang bersifat majemuk tapi yang lebih mendasar harus disertai dengan sikap tulus menerima kenyataan yang bernilai positif dan rahmat Tuhan kepada manusia.<sup>164</sup>

Persoalan dalam prinsip pluralisme dipastikan berkaitan dengan prinsip toleransi dan adanya indikasi bahwa masyarakat memahaminya hanya sepintas saja sehingga toleransi menjadi seperti tidak lebih daripada persoalan prosedural, persoalan tatacara pergaulan yang baik antara kelompok yang berbeda padahal persoalan toleransi adalah persoalan prinsip yang tidak sekedar prosedur. Pemahaman tentang pluralisme sebagai pertalian kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.<sup>165</sup>

Konsep kerukunan antar umat beragama pernah dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintahan Orde Baru dengan melibatkan semua tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Selama masa Orde Baru, relatif tidak ada konflik antar pemeluk agama yang berbeda sehingga orang mengira bahwa itu adalah keberhasilan dalam menerapkan konsep kerukunan. Namun setelah kejadian di Ambon, Aceh, Kupang dan berbagai daerah lainnya dengan model kerusuhan dan tindakan kekerasan berbau agama maka konsep kerukunan tersebut dipertanyakan.

Berbagai praduga bermunculan bahwa keberhasilan dalam menerapkan kerukunan masa Orde Baru sejalan dengan kebijakan politis penguasa pada saat

---

<sup>164</sup>Nurcholis Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat Kolom-Kolom di Tabloid Tekad* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999), h. 62

<sup>165</sup>Nurcholis Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat Kolom-Kolom di Tabloid Tekad*, h. 63

itu yakni stabilitas nasional demi berlangsungnya proses pembangunan nasional yang lebih menekankan pada pendekatan keamanan dan sama halnya pendekatan tersebut digunakan dalam pelaksanaan kerukunan antar umat beragama. Sehingga kerukunan yang ada bukan hanya bungkus formal dari kenyataan pluralitas agama di tanah air tetapi harus menjadi motivator bagi terbentuknya kesadaran beragama dan berteologi di Indonesia. Sebab jika tidak maka konflik antar umat beragama tidak bisa terhindarkan dan sewaktu-waktu akan selalu meledak yang tentunya akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan negara baik politis, ekonomi dan sosial budaya.<sup>166</sup>

Pada pemerintahan Orde Baru, perkembangan sejarah kebangsaan diwarnai sejumlah konflik yang bernuansa SARA. Mengungkit-ungkit persoalan SARA adalah barang haram yang masuk kategori subversif yang dinilai pemerintah akan menjadi sumber perpecahan dan disintegrasi bangsa. Rezim Orde Baru berhasil membangun penyeragaman dalam segala bidang kehidupan sehingga tampak menjadi bangsa yang aman, tenang tetapi tanpa kehidupan yang sejati.<sup>167</sup>

Pemberlakuan Pancasila sebagai azas tunggal dan menafikan eksistensi golongan-golongan dalam masyarakat dengan keberagamannya dinilai sebagai bentuk politisasi negara atas masyarakat. Ambisi pemerintah Orde Baru yang menyeimbangkan kekuatan politik minoritas non-muslim dengan kekuatan Islam dinilai sebagai upaya menciptakan ekuilibrium semu yang secara tidak langsung menekan posisi umat Islam yang mayoritas.<sup>168</sup>

---

<sup>166</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 175

<sup>167</sup>Surya Perkasa, *Toleransi Keberagaman Semu*, diakses metronews.com pada tanggal 1 Juni 2016.

<sup>168</sup>Surya Perkasa, *Toleransi Keberagaman Semu*, diakses metronews.com pada tanggal 1 Juni 2016.

Dari aspek kebijakan normatif, Menteri Agama Mukti Ali sebagai motor penggerak kerukunan keagamaan mengedepankan konsep *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan). Setiap umat beragama hendaknya menerima adanya orang lain yang berbeda agama. Selanjutnya di era Menteri Agama Alamsyah Ratuperwiranegara diterbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri yang kemudian diperkuat dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia. Masa Menteri Agama Tarmizi Taher diterbitkan Surat Keputusan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Umat Beragama.<sup>169</sup>

Kebijakan kerukunan umat beragama masa Ratuperwiranegara dikenal dengan konsep kebijakan trilogi kerukunan dan Menteri Agama selanjutnya Munawir Sjadzali dilanjutkan dengan istilah Tiga Kondisi Ideal. Sedang di era Menteri Agama Tarmizi Taher, Kementerian Agama lebih memfokuskan pada kebijakan pengembangan Bingkai Teologi Kerukunan yang intinya mengedepankan perlunya titik temu konsep ajaran semua agama yang bisa dijadikan landasan kerukunan antar umat beragama yang selanjutnya dikembangkan oleh pengganti-penggantinya Malik Fajar, Tolhah Hasan, Said Aqil Husin al Munawar dan yang sekarang.<sup>170</sup>

Meskipun berbagai kebijakan dikeluarkan namun pendekatan keamanan yang cenderung dikedepankan sehingga Orde Baru di zaman Soeharto diyakini kerukunan umat beragama kerap terusik karena konflik yang terjadi jenisnya adalah konflik horizontal yang lebih didominasi oleh persoalan-persoalan yang

---

<sup>169</sup>Haidlor Ali Ahmad, ed., *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama*, h. xv

<sup>170</sup>Lihat, Atho' Mudzhar, "Memelihara Kerukunan Umat Beragama: Jalan Landai atau Mendaki." Dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (ed), *Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, 2011), h. 19-38

berbau Suku, Agama, Ras antar Golongan yang biasa disebut SARA. Pada era Orde Baru kerukunan umat beragama dengan pemerintah dirasakan masih kurang mantap, sebagai akibat semakin memanasnya suhu politik, terutama menjelang Pemilu tahun 1977.<sup>171</sup>

Demi terjalinnya kerukunan antar umat beragama menjadi etika dalam pergaulan kehidupan beragama, maka harus dihindari penggunaan standar ganda. Orang-orang Kristen ataupun Islam misalnya selalu menerapkan standar-standar yang berbeda untuk dirinya; biasanya standar yang ditunjukkan bersifat ideal dan normatif. Sedangkan terhadap agama lain, mereka memakai standar yang lebih bersifat realistik dan historis. Penggunaan standar ganda inilah yang memunculkan prasangka-prasangka teologis yang selanjutnya memperkeruh suasana hubungan antar umat beragama.

Ada tidaknya keselamatan dalam agama lain seringkali ditentukan oleh pandangan mengenai standar ganda masing-masing. Keyakinan bahwa agama sendiri yang paling benar karena berasal dari Tuhan sedangkan agama lain hanyalah konstruksi manusia merupakan contoh dari penggunaan standar ganda tersebut. Dalam realitasnya, standar ganda biasa dipakai untuk menghakimi agama lain dalam derajat keabsahan teologis di bawah agamanya sendiri. Melalui standar ganda inilah terjadinya perang dan klaim-klaim kebenaran rawan menjadi pemicu timbulnya konflik.<sup>172</sup>

Biasanya yang tampak di permukaan berkaitan dengan konflik antar umat beragama bisa diakibatkan kesenjangan ekonomi, perbedaan kepentingan politik, ataupun perbedaan etnis. Akhirnya konsep kebenaran dan kebaikan yang berakar

---

<sup>171</sup> Anis Matta, *Tiga Jenis Konflik di Indonesia*, diakses <http://nasional.sindonews.com> pada tanggal 21 Mei 2016.

<sup>172</sup> Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 176

dari ideologi politik atau Tuhan sering menjadi alasan pembenaran atas penindasan kemanusiaan. Hal ini juga bisa berdampak pada kepentingan pembangunan dan ekonomi atas nama kepentingan umum dan sering menjadi pembenaran atas tindak kekerasan. Demi terciptanya hubungan eksternal agama-agama perlu dilakukan dialog antar agama.<sup>173</sup>

Terkait dengan hubungan internal umat beragama khususnya umat Islam merasakan kebebasannya untuk berdakwah sangat dibatasi, harus meminta izin dahulu kepada aparat keamanan. Di pihak lain pemerintah memandang pembatasan kebebasan dakwah perlu dilakukan, demi terciptanya ketertiban dan keamanan yang mantap. Mengingat kenyataan masih banyak para juru dakwah yang menyalahgunakan dakwah untuk kepentingan politik praktis yang mendiskreditkan pemerintah dan pihak lain (Departemen Agama, Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama).

Keberagaman pada masa Orde Baru dianggap sebagai slogan dan cenderung dimatikan sehingga politik keberagaman yang ditampilkan kala itu adalah penyeragaman. Masalah SARA tidak banyak muncul di permukaan dan bukan berarti masyarakat Indonesia kala itu sangat toleran dan jauh lebih pengertian ketimbang pasca reformasi namun politik keberagaman yang dijalankan adalah penyeragaman. Hal ini bisa dilihat dari cara rezim Orde Baru yang menggunakan cara kekerasan dalam menangani dan meredam potensi konflik bermuatan SARA dengan alasan demi stabilitas nasional.<sup>174</sup>

Kekuatan rezim Orde Baru kala itu menekan gerakan Islam selama lebih dari tiga dekade dalam realitasnya tidak melemahkan semangat gerakan Islam

---

<sup>173</sup>Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, h. 176

<sup>174</sup>Lihat, Muhammad A.S Hikam, "Membedah Kekerasan-Kerusuhan Sosial dan Arus Bawah: "Pisau" Politik, " dalam Sukandi A.K., *Politik Kekerasan Orde Baru Akankah Terus Berlanjut ?* (Cet. I; Bandung: Pustaka Mizan, 1999), h. 103

untuk kembali bangkit dan memperjuangkan aspirasi Islam secara luas. Momentum masa transisi yang tidak menentu telah menjadikan gerakan Islam semakin menemukan awal kebangkitannya di tengah perubahan politik kekuasaan.<sup>175</sup>

Gerakan tersebut disebut dengan gerakan revivalisme Islam yang mulai tumbuh sejak awal 1980-an. Ekspresi revivalisme berbentuk dengan meningkatnya gairah kesantunan di tengah masyarakat. Sebagai sebuah gerakan, munculnya revivalisme Islam ditandai dengan lahir dan berkembangnya gerakan dakwah kampus yang dimotori kalangan mahasiswa di perguruan tinggi umum dengan metode “*usrah*” merupakan cikal bakal lahirnya tiga gerakan Islam baru yang menonjol yakni, Tarbiyah (yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera), Hizbut Tahrir Indonesia dan Dakwah Salafi.<sup>176</sup>

Sikap Orde Baru yang memperlakukan umat Islam bagaikan anak tiri seakan melambungkan kekecewaan umat Islam. Di antara kekecewaan tersebut yakni ditolaknya rehabilitasi nama Masyumi supaya kembali menjalankan aktifitas politiknya, NU yang mengharapkan konsesi-konsesi politik dalam kekuasaan justru kecewa karena dari personalia Kabinet Pertama Orde Baru hanya sebagian satu posisi sebagai Menteri Agama serta konsolidasi kekuasaan Orde Baru dengan upaya rekayasa politik menggabungkan partai-partai Islam dalam Partai Persatuan Pembangunan, sedang Partai Katolik dan Partai Kristen Indonesia disatukan dalam Partai Demokrasi Indonesia dan adanya Golkar.<sup>177</sup>

---

<sup>175</sup>M. Imdaduddin Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 74

<sup>176</sup>M. Imdaduddin Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, h. 75

<sup>177</sup>Budi Agustono, *Hubungan Islam dan Orde Baru*, diakses <http://waspadamedan.com> pada tanggal 4 Juni 2016.



Berbagai struktur politik yang dirancang, dilaksanakan dan dipertahankan oleh Orde Baru lebih dari tiga dasawarsa tak pelak lagi di satu pihak telah tercapai sebagian target yang diinginkan tetapi di pihak lain menghasilkan berbagai paradoks. Meskipun struktur tersebut telah sukses dalam menopang bekerjanya sebuah format politik yang dibuat untuk menjaga stabilitas dan keamanan, ia juga mengakibatkan terjadinya proses-proses dislokasi, marginalisasi, dan alienasi politik yang semakin luas dalam masyarakat khususnya pada lapisan bawah.<sup>178</sup>

Berbagai kerusuhan yang terjadi di tanah air pada masa tersebut menampilkan konflik antar ras dan agama dan wawasan pluralitas menjadi sangat langka dalam masyarakat Orde Baru. Kerusuhan yang berakibat tidak terwujudnya kerukunan umat beragama tidak dianggap semata-mata atau berpusat pada soal kebencian sebuah kelompok agama, etnisitas, atau ras. Gejala SARA dianggap hanya hadir di permukaan dan apa yang tergerak di bawah permukaan ialah kesenjangan ekonomi, konspirasi dalang atau oposisi politik terhadap penguasa.<sup>179</sup>

Perlu disoroti tajam dalam umat beragama masa Orde Baru adalah wacana minoritas, khususnya keturunan Cina di Indonesia. Kerusuhan anti-Cina sampai ketegangan sosial atau konflik terbuka di publik hampir selalu dikaitkan dan diarahkan pada masalah SARA. Minoritas berdasarkan etnik atau agama mudah dijadikan perantara untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan mereka sehingga rentan menjadi korban dan tidak mampu balas dendam. Sedang usaha

---

<sup>178</sup>Lihat, Muhammad A.S Hikam, "Membedah Kekerasan-Kerusuhan Sosial dan Arus Bawah: "Pisau" Politik, " dalam Sukandi A.K., *Politik Kekerasan Orde Baru Akankah Terus Berlanjut ?*, h. 104

<sup>179</sup>Lihat, Ariel Heryanto, "Wacana Kekerasan Rasial: "Pisau" Teori Wacana " dalam Sukandi A.K., *Politik Kekerasan Orde Baru Akankah Terus Berlanjut ?* (Cet. I; Bandung: Pustaka Mizan, 1999), h. 114

memerangi kekerasan rasialis atau religius tidak cukup berhasil tanpa disertai perlawanan wacana yang mendukung terbentuknya rasialisme dan fanatisme keagamaan.<sup>180</sup>

Sepanjang sejarah konflik horizontal yang pernah terjadi tidak pernah pernah bermula dan berawal dari agama sebagai pemicunya. Seperti kasus Poso, Aceh, Sampit dan Maluku bukan merupakan konflik agama namun konflik kepentingan yang kemudian dibungkus dan dikemas dengan agama. Kasus Poso bisa jadi dipicu oleh masalah kecil antara dua warga yang kebetulan berbeda agama akan tetapi secara hukum tidak pernah diusut tuntas sehingga problemnya menjadi rumit dan liar.<sup>181</sup>

Kerukunan hidup umat beragama di masa-masa terakhir Orde Baru mencapai titik jenuh dan jelas kelihatan dalam bentuk berbagai kerusuhan sosial yang dikemas dan dipicu oleh perbedaan agama atau mungkin lebih tepat agama dipakai secara keliru oleh beberapa orang tertentu untuk memenuhi ambisi politik. Menjelang Pemilu 1997 berbagai kerusuhan merebak dan gedung-gedung gereja dirusak. Meskipun pernyataan pemerintah saat itu bahwa kesenjangan ekonomilah penyebabnya namun tidak dapat disangkal bahwa nuansa-nuansa keagamaan juga terdapat didalamnya. Malapetaka terjadi bukan saja karena umat beragama tidak memahami agama orang lain tetapi juga karena ketidakmampuan memahami dan mengerti agamanya sendiri.<sup>182</sup>

Pemerintah Orde Baru melalui Kementerian Agama tidak dinafikan aktifitasnya yang gencar melakukan kampanye kerukunan umat beragama dan bahkan dipamerkan kepada dunia luar sebagai negara yang para penganut

---

<sup>180</sup>Lihat, Ariel Heryanto, "Wacana Kekerasan Rasial: "Pisau" Teori Wacana " dalam Sukandi A.K., *Politik Kekerasan Orde Baru Akankah Terus Berlanjut ?*, h. 119

<sup>181</sup>Fauzan Azima, *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, diakses <https://fauzanazima25071995.wordpress.com> pada tanggal 4 Juni 2016.

<sup>182</sup>Yewangoe, *Agama dan Kerukunan* (Cet. IV; Jakarta: Gunung Mulia, 2009), h. 44

agamanya hidup rukun satu sama lain karena keampuhan dan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara. Meskipun kesadaran muncul selanjutnya bahwa konstruksi kerukunan ditampilkan dengan konsep yang amat rapuh dan barangkali tujuannya bukan kerukunan di antara umat beragama melainkan tercapainya maksud-maksud politik bagi Orde Baru saat itu. Apalagi Indonesia yang religius-pluralistik sudah sejak dulu tercemar dengan pelbagai kepentingan-kepentingan politik dari berbagai pihak. Tentu saja yang diinginkan dari kerukunan antar umat beragama adalah kerukunan yang dibangun dengan pergaulan suasana pergaulan yang wajar dalam masyarakat bukan sesuatu yang ditentukan dan diatur oleh kepentingan berbagai pihak.<sup>183</sup>

Dalam hukum Islam seperti yang diakui dalam fikih siyasah dengan pembahasan tentang kekuasaan dan apabila disederhanakan maka fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan hukum ekonomi. Dilihat dari sisi hubungan maka fikih siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpin sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional. Beberapa kaidah fikih di bidang fikih siyasah yang dianggap penting dan berhubungan dalam hal ini diantaranya adalah sebagai berikut:

<sup>184</sup> تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

(Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan).

Kaidah ini secara umum berkenaan pentingnya ketegasan seorang pemimpin yang pemerintahannya harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat

---

<sup>183</sup>Emanuel Gerrit Singgih, *Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia* (Jakarta: Gubung Mulia, 1999), h. 58

<sup>184</sup>Imam Tājuddīn ‘Abdu al-Wahāb al-Subki, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; Beirut:Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1991 M), h. 134

bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau kepentingan sepihak dari keluarganya atau kelompoknya. Kaidah ini dipertegas dan dikuatkan oleh surah an-Nisā ayat 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>185</sup>

Beragam contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut dimana setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan dan dinilai serta dievaluasi kemajuannya. Sedang kebijakan yang harus mendatangkan mafsadah dan memudaratkan rakyat, itulah yang seharusnya disingkirkan dan di jauhi. Dalam berbagai upaya pembangunan misalnya, membuat irigasi untuk petani, membuat lapangan kerja yang padat karya, melindungi hutan lindung, menjaga lingkungan, mengangkat pegawai-pegawai yang amanah dan professional dan lain sebagainya.<sup>186</sup>

Sebuah kaidah yang menyatakan sebagai berikut;

لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا<sup>187</sup>

(Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita).

<sup>185</sup>Kementerian Wakaf Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya* (Saudi Arabia: Penerbit Mushaf al-Syarif, 1990), h. 128

<sup>186</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 147-148

<sup>187</sup>Abd al-Qādir ‘Audah, *al-Islām wa Auḍā’unā al-Siyāsah* (tt.: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1951), h. 196

Kaidah tersebut berhubungan tentang penegasan adanya hak dan kewajiban di antara sesama warga negara dilandasi oleh moral *ukhuwah waʿaniyah* meskipun ada perbedaan kulit, bahasa dan budaya serta kekayaannya.<sup>188</sup> Ulama biasanya menggunakan kaidah tersebut dalam konteks hubungan antar warga negara muslim dan *zimmi* yang berkedudukan sama dihadapan penguasa dan hukum.<sup>189</sup> Untuk realitasnya di Indonesia antara orang yang berkeyakinan Islam dengan yang bukan beragama Islam atau non muslim. Kebijakan pemerintah Orde Baru dalam mewujudkan kerukunan nasional termasuk didalamnya kerukunan umat beragama adalah kerukunan semu.

Demi terciptanya hubungan yang baik antar agama diperlukan dialog antar umat beragama sedangkan untuk internal agama diperlukan reinterpretasi pesan-pesan agama yang lebih menyentuh kemanusiaan yang universal dan tentunya peran para tokoh agama dalam agama masing-masing mesti lebih dikedepankan dalam membina dan membimbing umatnya masing-masing.

### 3. Masa Reformasi

Pemerintahan di Indonesia memasuki babak baru dalam sejarahnya pasca pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang disebut dengan Orde Reformasi di tahun 1998. Pemerintahan di masa tersebut ditandai dengan liberalisasi politik dan terbukanya kran demokrasi yang kian membaik. Praktik demokrasi yang setengah hati di bawah rezim otoritarian, semakin dikokohkan

---

<sup>188</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 153

<sup>189</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 153

dengan berbagai elemen penopangnya yang salah satunya semakin kuatnya peran kekuatan masyarakat sipil.<sup>190</sup>

Untuk menopang terwujudnya demokrasi diperlukan kekuatan pemerintah, kompetensi dalam sektor swasta dan pemberdayaan masyarakat sipil. Ketiga pilar tersebut harus komplementatif karena ketiadaan salah satunya akan mengganggu keseluruhan sistem yang berjalan. Pemerintah yang kuat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta yang kompeten dapat menciptakan lapangan kerja dan berperan sebagai ladang tumbuhnya investasi dalam negara sehingga demokrasi dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sedang pemberdayaan masyarakat sipil senantiasa mendinamisasi perubahan jalannya pemerintah dan sektor swasta yang baik.<sup>191</sup>

Upaya membangun, mempertahankan dan merawat kerukunan umat beragama dianggap tidak mudah dan merupakan pekerjaan besar yang dijalankan Kementerian Agama sejak kelahirannya hingga sekarang. Masalah utama yang belakangan terjadi dan dihadapi bangsa Indonesia antara lain masih adanya gejala ketidakserasian kehidupan sebagian masyarakat. Baik dalam hubungan internal beragama atau antar umat beragama dengan adanya gejala kecenderungan fanatisme mazhab, aliran, ajaran atau kelompok dan belum optimalnya penerapan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan pendirian rumah ibadah.<sup>192</sup>

---

<sup>190</sup>Lihat, Akmal Salim Ruhana, "Peran dan Hubungan LSM dengan Pemerintah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia," dalam Haidlor Ali Ahmad ed., *Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi* (Cet. I; Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), h. 1

<sup>191</sup>Lihat, Akmal Salim Ruhana, "Peran dan Hubungan LSM dengan Pemerintah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia," dalam Haidlor Ali Ahmad ed., *Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi*, h. 2

<sup>192</sup>Jiffy F Kawung, "Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama" (Makalah disajikan dalam Sosialisasi Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara di Aula Kemenag Kota Tomohon, Tomohon 1 Desember 2010), h. 3

Era reformasi telah memberi angin segar terbentuknya harmoni kerukunan umat beragama pada awal Orde Reformasi di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid khususnya untuk warga Tionghoa di Indonesia. Masyarakat Tionghoa merasakan kebebasan untuk merayakan Imlek atau tahun baru China yang sebelumnya pada masa Orde Baru dibelenggu dan dilarang selama hampir 33 tahun lamanya. Warga Tionghoa di era reformasi sudah bisa mementaskan seluruh kebudayaannya di muka umumdengan didukung kebijakan pemerintah yang ditandai dengan dicabutnya Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat China yang isinya melarang pementasan kebudayaan Tionghoa. Kebudayaan Tionghoa mulai menggeliat dengan kebijakan Menteri Agama tanggal 19 Januari 2001 yaitu Keputusan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penetapan Hari Raya Imlek sebagai Hari Libur Nasional Fakultatif.<sup>193</sup>

Kementerian Agama di bawah Said Agil Husein al Munawar tahun 2002 mencanangkan tahun rekonsiliasi nasional, termasuk kerukunan antar umat beragama. Dalam penerapan secara fisik, dibentuk sebuah forum kerukunan antarumat beragama di seluruh Indonesia. Sedangkan secara moral keberadaan forum tersebut dengan merangkul semua umat beragama khususnya di daerah-daerah dari tingkat kecamatan sampai propinsi. Hal ini dilakukan karena selama itu banyak pegawai Kementerian Agama yang terlibat dalam konflik antarumat beragama, baik langsung atau tidak langsung. Sehingga dengan adanya forum tersebut dituntut dukungan dan peran aktif dalam melaksanakan forum dan

---

<sup>193</sup>Eko Huda Setyawan, *Sukarno, Gus Dur dan Imlek*, diakses <http://news.liputan6.com/> pada tanggal 10Juni 2016.

bersikap netral dalam menghadapi setiap konflik yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.<sup>194</sup>

Masa Menteri Agama Maftuh Basuni dilahirkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Hidup Umat Beragama, Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.<sup>195</sup> Keberadaan FKUB diuji peran strategisnya dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan persatuan nasional, khususnya dalam implementasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, dengan tiga lingkungan strategis yang saling terkait dan saling dicermati yaitu pertama tentang landasan hukum bagi pemeliharaan kerukunan umat beragama, kedua mengenai kebijakan pemerintah dan sejumlah masalah dalam implementasinya dan ketiga dukungan sistem masyarakat dan partisipasinya. Ketiga hal tersebut saling mengkondisikan dan menunjang upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama yang pada gilirannya merupakan elemen penting bagi pemeliharaan kerukunan dan persatuan nasional.

Tahun 2006 disahkan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan dalam pasal 64 menyatakan bahwa kartu tanda penduduk memuat 18 informasi, termasuk informasi tentang agama yang dianut oleh orang yang bersangkutan. Namun jika sesuatu alasan informasi keagamaan tidak tersedia maka orang tersebut tetap diberikan kartu tanda penduduk dan berhak memperoleh pelayanan hak-hak sipilnya sesuai dengan prinsip kedudukan di depan hukum.

---

<sup>194</sup>Nunung Setiyani, *Menag: 2002 Tahun Rekonsiliasi Kerukunan Beragama*, pada acara dialog Kerukunan Umat Beragama di Studio SCTV dengan Menteri Agama Said Agil Husein al Munawar pada tanggal 31 Desember 2001.

<sup>195</sup>Haidlor Ali Ahmad, ed., *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama*, h. xv.



Adapun pengaturan tentang kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama dianggap sudah solid yang dilandasi penyantumannya dalam UUD 1945, selanjutnya disusul dengan penerbitan berbagai UU baru, ratifikasi konvenan internasional, bahkan dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Biasanya berbagai persoalan muncul di permukaan dalam tiga hal: pertama sosialisasi peraturan perundangan kepadasegenap lapisan masyarakat tanpa terkecuali jajaran pemerintah, dan kedua mengenai bagaimana penjabaran peraturan perundangan tersebut dalam kebijakan pemerintah termasuk problema implementasinya, dan ketiga bagaimana dukungan sistem sosial Indonesia dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Kebijakan dasar pemerintah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dengan pemberdayaan umat beragama dan pemberian rambu-rambu bagi upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama. Kebijakan strategis yang diambil dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, selanjutnya diberikan amanah kepada pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat membentuk FKUB sebagai mitra pemerintah serta memberikan rambu-rambu kepada pemerintah daerah dalam proses pemberian izin mendirikan bangunan sebagai rumah ibadah selain sebagai simbol keberadaan masyarakat pengguna rumah ibadah juga berdampak pada masyarakat sekitar dalam interaksi antar umat beragama.

Ciri sistem sosial Indonesia diuntungkan dengan adanya majelis-majelis agama di tingkat pusat bahkan ada di daerah sebagian majelis tersebut tidak dapat mengklaim mewakili seluruh lapisan umat beragama yang dipimpinnya karena banyaknya varian umat. Dalam Islam yang diwakili MUI terdapat lebih 93 ormas Islam tingkat pusat. Kalangan Kristen Protestan yang diwakili PGI

dengan 324 denominasi, hanya sekitar 83 denominasi yang bergabung dengan PGI. Sedang Hindu diwakili PHDI, Budha diwakili dengan WALUBI dan Konghucu dengan Matakin, sedikit banyak juga memiliki varian-varian didalamnya.<sup>196</sup>

Adapun era Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin aktif memperkuat sendikerukunan umat beragama dengan regulasi melalui RUU Perlindungan Umat Beragama. Adapun konsolidasi yang dilakukan dengan menghimpun masukan dari tokoh agama dan pihak yang terkait untuk regulasi RUU Perlindungan Umat Beragama. Ada lima isu utama dalam RUU PUB sebagai berikut; pertama, penyikapan terhadap masyarakat yang menganut paham keagamaan di luar dari enam agama resmi. Kedua, terkait dengan penyiaran agama, ketiga mengenai pendirian rumah ibadah yang kerap memicu pro dan kontra, keempat tentang kewenangan justifikasi suatu paham keagamaan serta tolak ukur mekanisme suatu paham dianggap menyimpang atau tidak dan terakhir terkait dengan penguatan institusi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang mendorong agar pemuka umat memberi kontribusi lebih dalam merawat kerukunan.<sup>197</sup>

Dengan berbagai kebijakan pemerintah hingga sekarang seperti mengeluarkan dan menguatkan regulasi, pembentukan wadah atau forum komunikasi serta senantiasa melakukan konsolidasi telah menunjukkan bahwa kekuatan agama dapat menjadi konstruktif jika diamalkan dengan baik dan agama juga bisa menjadi faktor destruktif, menghancurkan peradaban seperti

---

<sup>196</sup>Atho Mudzar, *Lingkungan dan Peran Strategis FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Persatuan Nasional*, makalah disajikan dalam acara Fasilitas Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan FKUB Propinsi dan Kabupaten Kota diselenggarakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri tanggal 3-4 September 2013 di Hotel Jayakarta, Jakarta.

<sup>197</sup>Achmad Syalaby, *Menag: Kekosongan Regulasi Jadi Celah Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, diakses <http://khazanah.republika.co.id/> pada tanggal 1 Juni 2016.

yang pernah terjadi di belahan dunia. Tingkat kerukunan diukur dengan menggunakan indikator tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama antarumat beragama.

#### ***F. Analisis Berbagai Kasus Intoleransi di Indonesia***

Secara umum penilaian tentang kerukunan umat beragama di Indonesia terkesan baik dan masalah yang muncul adalah hal yang wajar terjadi karena gesekan intra dan antar umat beragama pasti tidak bisa dielakkan sebagai konsekuensi hidup berdampingan. Kebiasaan telah ada untuk hidup berdampingan dengan warga beda agama bahkan dalam satu keluarga bisa berbeda keyakinan.

Rakyat Indonesia dikenal sudah sangat toleran bahkan bisa menjadi model toleransi yang bagus bagi negara lain. Dalam kerangka tersebut rakyat Indonesia tanpa melihat suku, agama, ras dan etnis (SARA) mendapatkan kebebasan dan kemerdekaannya sehingga mendapatkan kesempatan untuk memakmurkan sumber daya alamnya disertai kreatifitas, inovasi, kerja keras dan perjuangan. Perjuangan untuk melaksanakan amanah Allah yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan.<sup>198</sup>

Meskipun penduduk dengan mayoritas Islam, namun semua perayaan keagamaan dalam setiap agama dengan hari besar semua agama dijadikan hari libur nasional. Justru hari Minggu sebagai hari libur bagi saudara kita yang beragama Nasrani bisa beribadah dengan tenang dan sebaliknya di Arab Saudi menetapkan hari Jumat sebagai hari libur dan hari minggu tetap sebagai hari kerja. Adapun di Amerika Serikat sebagai negara kampium demokrasi, Idul Fitri

---

<sup>198</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Cet. III; Jakarta: Prenada Media, 2010), h. 129

bukan sebagai hari libur nasional dan Minggu satu-satunya libur yang diakui oleh hukum yang berlaku umum. Demikian pula di Inggris, Perancis, Jerman padahal jumlah umat Islam di negara tersebut perkembangannya cukup signifikan. Sedang di Swiss ada larangan pembangunan menara masjid, di Perancis terdapat larangan memakai burqa (semacam cadar yang dianggap bukan ajaran Islam tapi budaya bangsa Arab).

Sebagai negara yang mengakui keberadaan banyak agama maka kesetaraan dalam hubungan antar agama menjadi soal penting yang tidak bisa dipandang sebelah mata sebab isu tentang kesetaraan dalam hubungan antar umat beragama dalam masyarakat plural mendapatkan perhatian lebih agar keragaman tidak menjadi bensin pemompa konflik di masyarakat. Ketika keragaman agama dengan segudang perbedaan didalamnya tidak mampu diposisikan sebagai anugerah dan memunculkan kesalahpahaman bersama dalam kalangan penganut agama maka masa depan negara ini akan berada pada titik nadir kehancuran.<sup>199</sup>

Hari Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama yang dilakukan Kemenag pada 2015 lalu menunjukkan rata-rata mencapai 75,64 yang masuk kategori tinggi dengan tingkat kerukunan diukur dengan tiga indikator, yaitu: toleransi, kesetaraan dan kerjasama antar umat beragama.<sup>200</sup> Kasus intoleransi lebih banyak berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan, baik kartu keluarga, kartu tanda penduduk, pendirian rumah ibadah dan konflik horizontal di kalangan masyarakat dengan penolakan terhadap aliran keagamaan. Meskipun

---

<sup>199</sup> Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antar Umat* (Jakarta: Penerbit Kompas, 2002), h. 5. Lihat pula, Azyumardi Azra, *Kerukunan, Kekerasan dan Terorisme*, diakses <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/> pada tanggal 28 Februari 2016.

<sup>200</sup> Haidlor Ali Ahmad ed., *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, h.

rerata nasional kerukunan berkategori tinggi tetap menyisakan berbagai catatan dengan sejumlah kasus di beberapa daerah.

Pasca reformasi sepanjang tahun 2004-2005 perdebatan mengenai kasus pendirian rumah ibadah semakin meningkat frekuensinya. Beberapa artikel di media massa mengkritisi SKB No. 1/1969 tentang pendirian rumah ibadah, khususnya dari kalangan non muslim yang menuntut pencabutan SKB tersebut. SKB No. 1/1969 ditetapkan pada tanggal 13 September 1969 dan ditandatangani oleh Menteri Agama KH. Moh. Dahlan dan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud saat itu. Adapun kebijakan reformasi dengan penggantinya PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006 merupakan penegasan dari SKB No. 1/BER/MDN-MAG/1969.

Subtansi dalam PBM bukanlah doktrin agama melainkan lalu lintas para warga negara pemeluk suatu agama ketika berinteraksi dengan WNI lainnya dan memeluk agama berbeda. Beribadat tidak sama dengan mendirikan rumah ibadah meskipun keduanya saling berhubungan. PBM menjelaskan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tiga hal: (1) Kerukunan Umat Beragama, (2) Pemberdayaan FKUB dan (3) Pendirian rumah ibadah. Ketiga poin tersebut sering menjadi problem keagamaan antar umat beragama.

Konflik horizontal antara Muslim dengan Kristiani di beberapa tempat, pengrusakan rumah ibadah (Gereja) merupakan contoh nyata yang sering kali terjadi dalam kehidupan beragama. PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 ini adalah landasan hukum bagi umat beragama, jika terjadi konflik di lapangan. Namun beberapa pasal didalamnya masih menjadi perdebatan dan akar konflik, seperti syarat pendirian rumah ibadah disertai daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah, paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah dan dukungan masyarakat setempat paling sedikit

60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa. Syarat tersebut harus diperkuat oleh rekomendasi resmi Kepala Kemenag dan FKUB Kab/Kota.<sup>201</sup>

Keberadaan PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 dianggap telah mengakomodir beberapa persoalan agama dan diperkuat dengan landasan hukum. Namun kelemahan PBM terkesan belum kuat untuk mengatur kehidupan beragama dan keagamaan yang seharusnya diperlukan landasan hukum setingkat undang-undang sehingga penyelesaiannya bisa lebih baik. Memahami persoalan rumah ibadah dilihat dari perspektif agama merupakan hal yang positif karena semakin banyak rumah ibadah didirikan maka nilai-nilai agama yang disiarkan para pemuka agama diterima dengan baik oleh para umat.<sup>202</sup>

Namun dalam perspektif sosiologis, masyarakat memiliki pandangan tersendiri yang berbeda lantaran cara pandang yang dibangun berdasarkan kepentingan, latar belakang, atau pemahaman agama yang belum tentu benar sesuai dengan esensi-esensi ajaran agama tersebut. Maka dengan kenyataan tersebut sehingga PBM No. 8 dan 9 Tahun 2006 sebagai regulasi untuk mengatur dan menengahi kesalahpahaman yang ada dalam masyarakat terkait pendirian rumah ibadah. Regulasi dalam PBM No. 8 dan 9 memang memiliki keterbatasan karena lebih menekankan peran Pemda setempat untuk menangani persoalan bahkan mengakomodir masalah sebagai upaya solusi kedua belah pihak. Tentunya secara ideal Kementerian Agama tetap harus berupaya mengupayakan dialog persuasif.<sup>203</sup>

---

<sup>201</sup>Ismail Zubir, *Kebijakan Reformasi tentang Pengembangan Kerukunan Umat Beragama (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah)*, diakses via kompasiana.com pada tanggal 12 Juni 2016.

<sup>202</sup>Humas Kementerian Agama RI, *Menag, PBM Lahir untuk Mengatur Pendirian Rumah Ibadah*, diakses <http://www.kemenag.go.id/> pada tanggal 10 Februari 2016.

<sup>203</sup>Humas Kementerian Agama RI, *Menag, PBM Lahir untuk Mengatur Pendirian Rumah Ibadah*, diakses <http://www.kemenag.go.id/> pada tanggal 10 Februari 2016.

Dalam fikih siyasah pembagian kekuasaan sudah ada sejak zaman kekhalifahan dan terus berkembang sehingga muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam satu negara. Keberadaan lembaga kekuasaan bersifat eksekutif (*al-hai'ah al-tanfīziyyah*), ada lembaga legislatif atau *ahl al-ḥilli wa al-'aqdi* (*al-hai'ah al-tasyrī'iyyah*) dan lembaga yudikatif (*al-hai'ah al-qaḍā'iyyah*) bahkan ada lembaga pengawasan (*al-hai'ah al-murāqabah*).<sup>204</sup> Maka Kementerian Agama dalam hal ini berkedudukan sebagai legislatif karena mengeluarkan kebijakan sedang Pemda berkedudukan sebagai eksekutif yang melaksanakan karena regulasi menunjukkan posisi keterlibatannya. Adapun Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berkedudukan sebagai lembaga pengawasan yang senantiasamenjaga dan merawat kerukunan umat beragamadalam balutan harmoni.

#### <sup>205</sup> *الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة*

(Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) daripada kekuasaan yang umum).

Maksud dari kaidah tersebut adalah keberadaan lembaga-lembaga khusus lebih kuat kekuasaannya daripada lembaga umum. Maka dalam ini, keberadaan Kementerian Agama RI lebih kuat kedudukannya sebagai lembaga negara yang berkompeten mengeluarkan regulasi dan kebijakan sebagai petunjuk teknis di lapangan sedang Pemerintah Daerah punya keterlibatan dengan kewenangan yang dibatasi oleh regulasi yang ada.

Adapun jika sesuatu keputusan atau regulasi yang baik sudah diambil oleh pengambil kebijakan tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi kewenangan pemerintah

<sup>204</sup>Lihat, Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 150

<sup>205</sup> Asyuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.

setempat adalah melakukan apa yang dapat dilaksanakan dalam kebijakan yang sudah diambil maka itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.<sup>206</sup>

Kementerian Agama dipandang sebagai lembaga negara dan negara sebagai wilayah tempat berlangsungnya tindakan kolektif dan pembuatan keputusan kolektif. Biasanya yang dimaksud dengan negara adalah lembaga-lembaga politik yang wilayah geografisnya disertai dengan sistem pemerintahan yang relatif koheren (bersangkut paut) dan meliputi seluruh wilayah.<sup>207</sup>

### ***G. Aktualisasi Pengembangan Nilai-nilai Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Kerukunan Umat Beragama***

Syariat Islam adalah pedoman hidup seluruh umat manusia yang datangnya dari Allah swt.dengan tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia serta diturunkannya untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dalam lingkup usul fikih disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. Term syariat dengan makna yang luas meliputi akidah, fikih, akhlak dan segala aspek ajaran Islam.<sup>208</sup> Adapun secara terbatas dipahami dalam makna fikih yang identik dengan hukum Islam.<sup>209</sup>

*Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan bahasan keilmuan yang senantiasa menjadi topik yang hangat yang biasa didefinisikan dengan tujuan hukum Islam dan lahir

<sup>206</sup> Abd al-Qādir, *al-Islām wa Auḍāunā al-Siyāsiyah* (tt.: Dār al-Kitāb al-‘Arabiy, 1951), h. 196

<sup>207</sup> Thalhan & Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci: Jawaban Islam atas Permasalahan Lingkungan dan Global Warning* (Cet. I; Yogyakarta: Total Media, 2008), h.134

<sup>208</sup> Abbās Ḥusni Muḥammad, *al-Fiqh al-Islāmiy: Āfāquhu wa Taṭawwuruḥu* (Makkah: Rābiṭah al-‘Ālām al-Islāmiy, 1402 H), h. 7-8

<sup>209</sup> Abbās Maḥmūd Syaṭṭūt, *al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī’ah* (t.t.: Dār al-Qalam, t.th.), h. 2



dari kajian usul fikih dalam melakukan istinbāṭ hukum. Gagasan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai sebuah nilai, prinsip dan paradigma telah dikenal jauh ketika awal-awal Islam bahkan ada yang mengidentifikasi bahwa pemikiran *maqāṣidi* sudah ada sejak masa Rasulullah saw.<sup>210</sup>

Bagi kalangan “penjaga ortodoksi” Syafi’iyyah munculnya term baru seperti *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan sesuatu yang asing kala itu karena bukan tradisi Syafi’i. Adapun term tersebut diperkenalkan oleh al-Syāṭibi (w. 790/1388 H), seorang ulama fikih dari Andalusia Spanyol *mujaddid* abad ke-8 H/14 M dan sebelumnya term tersebut telah digunakan oleh al-Juwaini dan al-Ghazali.<sup>211</sup>

Adapun dalam perkembangannya secara konseptual, pola pikir *maqāṣid al-syarī'ah* yang disusun secara sistematis oleh al-Syāṭibi sebagai peletak perumusan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pemikiran fikih yang diformulasi secara metodologis oleh al-Syāṭibi dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah solusi terbaik meminimalisir perdebatan dalam fikih yang berdampak pengkotakan umat muslim yang justru kontra produktif upaya menyatukan umat muslim.<sup>212</sup>

Secara etimologi *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*. Memahami pengertian *maqāṣid* sebaiknya ditentukan melalui identitas kata *maqāṣid* dari berbagai sumber pemakaiannya dalam Bahasa Arab dan mengetahui asal kata tersebut serta keterkaitannya dengan makna hukum. Kata *maqāṣid* berasal dari tiga huruf asli Bahasa Arab yaitu *qaf* (ق), *ṣa* (ص) dan *da* (د). Dalam ilmu sharaf bersumber dari kata kerja *قَصَدَ – يَقْصُدُ – قَصْدًا* yang mempunyai ragam makna seperti menuju suatu arah, bertujuan, bermaksud, adil, konsisten, tidak melampaui batas, sederhana, memecahkan, menyusun,

<sup>210</sup> Abu Ishāq al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* Juz I (Beirūt: Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2003 M/1423 H), h. 5

<sup>211</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Cet. IV; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), h. xv

<sup>212</sup> Abu Ishāq al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* Juz I, h. 5

memperindah, menghendaki.<sup>213</sup> Sedang menurut Imam Mawardi, makna-makna tersebut semuanya terdapat dalam Alquran.<sup>214</sup>

Adapun kata *qaṣada* قَصَدَ disebutkan dalam salah satu ayat Alquran yaitu Firman Allah dalam QS al-Nahl/16: 9

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ .....

Terjemahnya:

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus.....<sup>215</sup>

Sebagaimana yang dinukil dari pendapat Ibnu Abbas yang dimaksud dalam hal ini keterangan mengenai petunjuk dan kesesatan. Sedang pendapat Mujahid jalan kebenaran bagi Allah.<sup>216</sup> Diartikan dengan lurusnya sebuah jalan dengan adanya hak Allah untuk menerangkan jalan lurus tersebut dan mengajak dalam jalan lurus disertai dengan bukti-bukti dan argumen yang jelas.<sup>217</sup>

Adapun kata *al-syari'ah* diartikan jalan menuju sumber air.<sup>218</sup> Dengan definisi kata syari'ah sebagai perintah dan larangan Tuhan yang berhubungan dengan tingkah laku kehidupan manusia atau jalan yang ditetapkan Allah swt. yang membuat manusia terarah hidupnya sehingga bisa menjalani hidup sesuai dengan ketentuan Allah di dunia dan akhirat. Term syariat sendiri memiliki konotasi makna yang luas dan maknanya tidak terbatas pada fikih tetapi juga dimaknai dalam cakupan akidah, akhlak dan segala aspek ajaran Islam.

<sup>213</sup>Ibnu Manẓūr al-Afriqiyyah-Miṣriyyah, *Lisān al-'Arab*, Juz V (Beirūt:Dār al-Fikr, 1972), h. 3642. Lihat, al-Fayumi, *al-Miṣbah al-Munīr* Juz II (Beirūt:Dār al-Nadwah, 1990), h. 504. Lihat, Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwar Kamus Arab – Indonesia* (Cet. XXV; Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 1123

<sup>214</sup>Muḥammad Amīn Suḥayli, *Qāidah Dar'u al-Mafāsīd Awlā min Jalbi al-Maṣāliḥ Dirāsah Tahfiliyyah* (Miṣr: Dār al-Salām, 2010), h. 64

<sup>215</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 111

<sup>216</sup>Sa'di Abu Ḥabīb, *Al-Qāmūs al-Fiqhiy*, Juz I dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM]. Shamela.ws (Cet. II; Sūriah: Dār al-Fikr, 1993), h. 165.

<sup>217</sup>Ibnu Manẓūr al-Afriqiyyah al-Miṣriyyah, *Lisān al-Arab*, Juz III (Beirūt:Dār al-Fikr, 1972), h. 353

<sup>218</sup>Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah menurut Asy-Syatibi* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h. 60

Ketegasan mengenai makna syariat identik dengan kandungan Alquran dan sunnah.<sup>219</sup> Dengan demikian ruang lingkup syariat mengandung segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.<sup>220</sup>

Adanya penjelasan makna *maqāṣid al-syarī'ah* sebelumnya maka bisa diartikan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan segala ketentuan Allah swt. yang disyariatkan kepada umat manusia. Secara terminologis, makna *maqāṣid al-syarī'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Kalangan ulama sebelum Abu Ishāq asy-Syāṭibi, belum ditemukan definisi yang kongkret dan komprehensif tentang *maqāṣid al-syarī'ah* dan cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya.<sup>221</sup>

Akar dari *maqāṣid al-syarī'ah* digagas oleh Imam al-Haramain al-Juwaini sebagai embrio lahirnya disiplin ilmu baru, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kajian usul fikih yang secara implisit sebenarnya sudah ada pada masa Rasulullah saw. dan orang yang memperkenalkan konstruksi pemikiran dalam pengambilan suatu hukum berdasarkan tingkat kemaslahatannya dengan kategori *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt* dan *taḥsiniyyāt*. Selanjutnya dikembangkan oleh al-Ghazali yang memahami *maqāṣid al-syarī'ah* berkaitan dengan pembahasan *masālik al-munāsabah* yang terdapat dalam *masālik al-ta'īl*.<sup>222</sup>

<sup>219</sup>Abbās Ḥusni Muḥammad, *al-Fiqh al-Islāmiy: Āfāquhu wa Taṭawwuruḥu* (Makkah: Rabitah al-‘Ālām al-Islāmiy, 1402 H), h. 7-8

<sup>220</sup>Sa’ūd ibn Sa’d ‘Alī Duraib, *al-Tanzīm al-Qaḍā’i fī al-Mamlakah al-‘Arabiyyah* (Riyāḍ: Maṭābi’ al-Ḥanīfah li al-Ubsit, 1973), h. 23

<sup>221</sup>Abd al-Raḥmān Ibrāhīm al-Kīlāni, *Qawā’id al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibi ‘Araḍan wa Dirāsatan wa Tahlilan*, (Sūriah: Dār al-Fikr, 2000), h. 45

<sup>222</sup>Ghilman Nursidin, “Konstruksi Pemikiran Maqasid al-Syari’ah Imam al-Haramain al-Juwaini: Kajian Sosio-Historis” *Tesis*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), h. 5

Istilah *maqāṣid al-syarī'ah* dipopulerkan Abu Ishāq Asy-Syāṭibi dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* yang cenderung tergerus ke dalam makna bahasa dengan mengungkapkan berbagai padanan maknanya.<sup>223</sup> Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnāwi mengartikannya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqandi menyetarakan dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazali, al-Āmidī, dan Ibnu al-Ḥajīb mendefinisikannya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat atau kerusakan.<sup>224</sup> Variasi mengenai definisi tersebut menunjukkan keterkaitan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dengan hikmah, 'illat, tujuan atau niat dan kemaslahatan.<sup>225</sup>

Akhir abad ke-20 berbagai ulama kontemporer memperkokoh pilar kajian *maqāṣid* dan memperkaya dimensi pembahasannya seperti Syaikh Ṭāhir bin 'Asyūr yang menulis buku dengan judul *maqāṣid al-syarī'ah al-islāmiyyah*, dan Syaikh Allāl al-Fāsi dengan judul buku *maqāṣid al-syarī'ah al-islāmiyyah wa Makārimuhā*.<sup>226</sup>

Ketika kata *maqāṣid* dinisbatkan dengan kata *al-syarī'ah* maka yang segera terlintas dalam benak pikiran adalah tujuan-tujuan hukum syara' (fikih) baik itu sebagai teori penggalan hukum maupun contoh penerapan hukum berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Menurut Abd al-Majid al-Najjar, seharusnya wilayah *maqāṣid al-syarī'ah* menyentuh apa saja yang dapat dikatakan sebagai

<sup>223</sup>Abdu al-Raḥmān Ibrāhīm al-Kilānī, *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibi 'Araḍan wa Dirāsatan wa Taḥfīlan*, h. 45

<sup>224</sup>Umar bin Ṣālih bin 'Umar, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda al-Imām al-'Izz bin 'Abd al-Salām* (Beirūt: Dār al-Nafāis li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2003), h. 88

<sup>225</sup>Umar bin Ṣālih bin 'Umar, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda al-Imām al-'Izz bin 'Abd al-Salām*, h. 91-95. 98, 106. Dalam hal ini dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara hikmah, 'illat dan niat dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Semuanya adalah satu inti dengan banyak nama yang digunakan secara bergantian. Ketika seseorang berbicara tentang hikmah, 'illat, niat dan kemaslahatan, maka sesungguhnya sedang membiicarakkan *maqāṣid al-syarī'ah*.

<sup>226</sup>Ghilman Nursidin, "Konstruksi Pemikiran Maqasid al-Syari'ah Imam al-Haramain al-Juwaini: Kajian Sosio-Historis" *Tesis*, (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), h. 5

perintah dan larangan Tuhan, baik dalam tingkah laku, manusia maupun dalam akidah dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan manusia. Setiap perintah Tuhan tentu memiliki tujuan yang menuntut untuk direalisasikan misalnya merealisasikan ketenangan jiwa di dunia sebelum mendapatkan kenikmatan surgawi di akhirat.<sup>227</sup>

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi tema penting dalam wacana Islam kontemporer yang awalnya merupakan bahagian dari *uṣūl al-fiqh* dan kini menjadi disiplin ilmu independen dan diajarkan di berbagai institusi pengajian tinggi. Memahami konsep *maqāṣid al-syarī'ah* harus berpegang pada kaedah-kaedahnya yang selanjutnya menghasilkan berbagai manfaatnya.<sup>228</sup> Kalangan ulama klasik dalam mengungkapkan *maqāṣid al-syarī'ah* masih berpijak pada lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sehingga perlu adanya penekanan dalam proses pengembangan lima prinsip tersebut dengan mengungkapkannya dalam wacana kontemporer sesuai dengan tuntutan zaman.

Lima hal pokok dalam *maqāṣid al-syarī'ah* bersifat hierarkis, yakni kemaslahatan yang berkaitan dengan agama didahulukan dari pada empat kemaslahatan lainnya. Adapun *maqāṣid al-syarī'ah* dengan lima pokok yang hirarkis berorientasi pada perubahan pola pikir dan menekankan kepada manusia sebagai individu yang kurang diimbangi dengan manusia sebagai anggota komunitas. Perkembangan zaman menggiring pergeseran paradigma *maqāṣid al-*

---

<sup>227</sup>Abd al-Majīd al-Najjār, *Maqāṣid al-Syarī'ah bi Ab'ād al-Jadīdah* (Tūnis: Dār al-Gharb al-Islāmiy, 2012), h. 15

<sup>228</sup>Jasser Auda, *Maqasid Syariah as a Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, diterjemahkan oleh Marwan Bukhari bin A. Hamid dengan judul: *Memahami Maqasid Syariah Peranan Maqasid dalam Pembaharuan Islam Kontemporeri* (Cet. I; Malaysia: PTS Islamika SDN. BHD, 2014), h. 2

*syarī'ah* yang lama ke teori *maqāṣid al-syarī'ah* dengan pola baru pada penekanan didalamnya.

Jika konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang lama menekankan *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian) maka teori *maqāṣid al-syarī'ah* menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *rights* (hak-hak). Sehingga *ḥifẓ al-ummah* dikembangkan dari salah satu lima hierarkis tersebut yang membantu memahami berbagai konflik sosial, kerusuhan, demonstrasi, peperangan, pemberontakan dan lingkungan serta menumbuhkan kesadaran untuk menyatukan umat akibat perbedaan pendapat yang tajam sehingga dapat dinetralisir dan setidaknya dikurangi.<sup>229</sup>

Pemikiran hukum Islam terkait dengan perubahan sosial memunculkan dua teori; **teori keabadian**, dimana hukum Islam tidak mungkin bisa berubah dan dirubah sehingga tidak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Peran akal manusia hanya memahami doktrin teks-teks hukum. **Teori adaptabilitas** dengan keluwesan hukum Islam yang diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga bisa dirubah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia yang terikat dan dipahami dengan latar belakang sosio kultural yang mengelilinginya sehingga peran akal dapat memahami perputaran hukum.<sup>230</sup>

Kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi teori adaptabilitas adalah prinsip masalah yang merupakan tujuan hukum Islam itu sendiri. Dianggap sebagai nilai fundamental bagi keberlangsungan hukum Islam dalam konteks perubahan sosial yang mampu merespon setiap perubahan sosial dimana

---

<sup>229</sup>Djazuli, *Hifzu al-Ummah; Tujuan Hukum Islam*, intisari dari penyampaian makalah pada Sidang Senat Terbuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 29 April 2009. Diakses arsip.badilag.net pada tanggal 10 Mei 2016.

<sup>230</sup>Yahyā Muḥammad, *Nazariyyah al-Tūfī wa Tarjīhi al-Maṣlahah 'alā al-Naṣ*, diakses [www.fahmaldin.com](http://www.fahmaldin.com) pada tanggal 1 Januari 2017.

masalah adalah merupakan dasar hukum yang mandiri dengan kehujjahannya tidak bergantung pada nash tetapi pada akal semata. Pertimbangan untuk menentukan kemaslahatan diukur dengan akal berdasar petunjuk nash atau cukup dengan akal tanpa petunjuk nash dengan konsekuensi ada kontradiksi.<sup>231</sup>

Penggunaan kembali konsep kunci seluruh pemikiran hukum Islam, *maṣālih al-‘āmmah* (atau memperhatikan kepentingan umum) maka keluwesan teori kaku dari usul fikih dirumuskan dengan *maqāṣid al-syarī’ah* (tujuan hukum Islam) dan didalam rumusannya dirinci ke dalam tiga varian yang disebut *al-kullīyyāt al-syarī’iyyah: ḍarūriyyāt, ḥājiyyāt dan taḥsiniyyāt*.<sup>232</sup>

Medan perjuangan yang maha luas terletak dalam *ḥājiyyāt* dan *taḥsiniyyāt* dalam rangka merealisasikan dan mengembangkan *ḍarūriyyāt al-khamsu* utamanya yang berhubungan dengan interaksi dengan penganut lintas agama. Rumusan al-Syāṭibi diharapkan menolong verifikasi mana yang *uṣūl* dan *furu’* yang diagendakan dalam fikih kerukunan umat beragama atau fikih hubungan antar agama.

Adapun *ḥifzu al-ummah* bagian dari keluwesan tersebut yang diartikan menjaga dan merawat umat supaya stabil, aman dan terhindar dari rongrongan baik itu secara internal maupun eksternal. Menurut pemberitaan yang bersumber dari republika, bahwa masalah kerukunan umat beragama seakan terus bermunculan sepanjang 2015. Adapun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa umat Islam di Indonesia memiliki tanggung jawab lebih, menjaga bangsa dan negara Indonesia, termasuk dalam aspek kerukunan nasional.

Tanggung jawab *ḥifzu al-ummah* atau menjaga persatuan umat secara otomatis datang lantaran Islam merupakan pemeluk mayoritas sehingga berperan

<sup>231</sup>Yahyā Muḥammad, *Nazariyyah al-Ṭūfi wa Tarjīhi al-Maṣlahah ‘alā al-Naṣ*

<sup>232</sup>Abu Ishāq al-Syāṭibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah* Juz I, h. 15



vital merawat kelangsungan kehidupan negara. Bahkan dalam berbagai konteks, baik itu politik, ekonomi, sosial dan pendidikan, umat Islam harus memaknai agama sebagai tugas untuk menjaga dan memelihara kerukunan nasional termasuk kerukunan umat beragama.<sup>233</sup>

Menjaga umat didefinisikan secara istilah sebagai suatu upaya membangun kesejahteraan umat. Kata sejahtera memiliki berbagai arti, dengan istilah umumnya bahwa kata sejahtera menunjuk pada keadaan yang baik, baik saat orang-orang dalam keadaan terkait dengan pandangan hidup yang makmur. Kata sejahtera menurut ekonomi terkait dengan pandangan hidup yang menjadi landasannya. Kapitalisme atau sosialisme mengukur kesejahteraan dengan capaian-capaian material, walaupun mereka berbeda tentang cara distribusinya. Sedang di beberapa negara barat, istilah kesejahteraan umat/sosial menunjuk pada pelayanan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>234</sup>

Nilai kesejahteraan yang terkandung dalam Alquran merupakan tugas dan kewajiban manusia untuk menegakkan keadilan. Kesejahteraan sosial terkait dengan sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu dan kelompok mencapai tingkat kehidupan, kesejahteraan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan yang setara dengan individu sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.<sup>235</sup>

Redaksi Alquran untuk menegakkan keadilan, melindungi dan menyantuni yang lemah merupakan perintah. Maka dalam Alquran banyak sekali

---

<sup>233</sup>Teguh Firmansyah, *Umat Islam Memiliki Tanggung Jawab Menjaga Bangsa*, diakses <http://khazanah.republika.co.id> pada tanggal 01 Januari 2016.

<sup>234</sup>Tim Penulis Naskah Konferensi Rajab 1432 H, *Hidup Sejahtera di bawah Naungan Khilafah. Membangun Kesejahteraan Umat*, (Medan: Hizbut Tahrir Indonesia), h. 19

<sup>235</sup>Aḥmad Zaki Badawi, *Mu'jam Muṣṭalāḥāt al-'Ulūm al-Ijtīmā'īyah* (Beirut: Maktabah Libnān, New Impression, 1982), h. 339



ditemukan term seperti *faqīr*, *masākīn*, *du'afā*, *mustaḍ'afīn* dan seterusnya. Demikian juga perintah untuk zakat, infaq dan sedekah yang seterusnya banyak disebut sehingga orang islam yang tidak menunaikannya dianggap pendusta agama.

Sekilas terlihat *maqāṣid al-syarī'ah* berorientasi pada *maṣālih al-'āmmah* (kemaslahatan umum atau manusia) secara global namun sebenarnya secara totalitas meliputi aturan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia bersifat umum sehingga didalamnya ada dimensi ilahi dan dimensi insani. Dimensi ilahi meliputi nilai-nilai ketuhanan bersumber dari Tuhan dan bernilai ibadah. Adapun dimensi insaninya ialah nilai kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Selaras dengan perkembangan zaman sehingga konsep *maqāṣid al-syarī'ah* diperluas seperti pemeliharaan persatuan dan pemeliharaan lingkungan karena kedua hal tersebut sangat penting dalam kehidupan manusia dengan skala makro.

Kemaslahatan yang diwujudkan terbagi dalam tingkatan kebutuhan seperti *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer, mesti), *ḥājīyyāt* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan) dan *taḥsiniyyāt* (kebutuhan tersier).<sup>236</sup> Kebutuhan *ḍarūriyyāt* adalah kebutuhan yang harus ada sehingga disebut primer dan jika tingkat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka keselamatan manusia akan terancam. Semua perintah dan larangan bermuara pada pemeliharaan lima unsur pokok.<sup>237</sup>

Untuk memelihara yang bersifat *ḍarūriyyāt* perlu diperhatikan dua hal penting. Dalam hubungan tersebut adalah: (1) pembinaan terhadap usaha-usaha yang dapat memelihara “perwujudan hal-hal yang bersifat *ḍarūriyyāt* diatas dan

---

<sup>236</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 208

<sup>237</sup> Satria Efendi M.Zain, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h. 235

(2) pertahanan dari usaha-usaha yang dapat mengakibatkan “penghilangan hal-hal yang bersifat *darūriyyāt*.

Dalam memelihara akal misalnya kebijakan mewajibkan masyarakat untuk belajar merupakan usaha *min jānib al-wujūd*. Sedangkan melarang masyarakat untuk menyalahgunakan obat (yang dapat menurunkan minta dan prestasi belajar) merupakan usaha *min jānib al-‘adam*. Dalam usaha kekinian barangkali mirip dengan istilah perekayasan masyarakat (*social engineering*) atau dengan istilah lainnya pengendalian masyarakat (*social control*).

Kebutuhan *ḥajiyāt* ialah kebutuhan sekunder dimana bila tidak diwujudkan tidak akan mengancam keselamatan tetapi manusia akan mengalami kesulitan. Tentu dengan adanya *rukḥṣah* (keringanan) merupakan bukti kepedulian Islam terhadap kebutuhan *ḥajiyāt*.<sup>238</sup> *Rukḥṣah* bermakna keringanan dan kelonggaran yang berdasarkan dalil dengan menyalahi dalil yang ada karena adanya uzur atau halangan sehingga tidak menyulitkan dan memberatkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum syari’ah tidak mengabaikan dimensi insani dan cenderung manusiawi dengan tidak lepas dari landasan filosofis imani.<sup>239</sup>

Adapun kebutuhan *taḥsiniyyāt* (estetika) ialah kebutuhan pelengkap dengan mengambil apa yang sesuai dengan adat atau kebiasaan dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang bijaksana.<sup>240</sup> Dengan tiga bentuk kebutuhan dalam *maqāṣid al-syarī’ah* semuanya didasarkan dengan wahyu dengan pendekatan tertentu yang menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī’ah* mengandung dimensi ilahi yang ditetapkan dengan mengeksplorasi ayat-ayat dan

---

<sup>238</sup> Abū Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī’ah*, h. 10

<sup>239</sup> Hamka Haq, *Syariat Islam Wacana dan Pencerapannya* (Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003), h. 33

<sup>240</sup> Abū Ishāq Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī’ah* Jilid II, h. 10-11

hadis-hadis Nabi saw. Di sisi lain *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki dimensi insani (kemanusiaan) karena dalam memahami teks digunakan nalar rasio manusia.

Pada hakekatnya *maqāṣid al-syarī'ah* didasarkan dengan wahyu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Perumusan *maqāṣid al-syarī'ah* pada awalnya bertumpu pada lima *maṣlaḥah* hidup manusia: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang disesuaikan dengan konteks zamannya. *Maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.<sup>241</sup>

Kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* seharusnya dapat dieksplorasi orang yang mau sungguh-sungguh menggunakan daya pikir atau intelektual sehingga dalam perkembangan masa sekarang ini maka wacana pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah* bisa bertambah. Keberadaan *maqāṣid al-syarī'ah* bisa menjadi solusi dari berbagai problematika yang tidak diatur oleh wahyu, baik secara tekstual maupun kontekstual. Selaras dengan perkembangan zaman maka kemajuan bukan hanya berdampak positif namun juga berdampak negatif sehingga upaya mengeksplorasi wahyu dan mengembangkan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi sebuah keniscayaan yang mesti dilakukan.<sup>242</sup>

Kenyataan ketidakharmonisan umat di berbagai daerah di tanah air bahkan di belahan dunia memotivasi sebagian pemikir muslim untuk mencetuskan wacana menjaga persatuan atau *ḥifzu al-ummah*. Fenomena yang ada masa penjajahan, umat Islam bersatu mengalahkan musuh namun setelah terusirnya dan kalahnya musuh malah umat malah bertikai. Pemeliharaan persatuan pada dasarnya mempunyai landasan normatif dalam ayat Alquran dan

---

<sup>241</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 345

<sup>242</sup> Majda al-Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 10

hadis Nabi. Adapun gagasan menjadikan *ḥifẓ al-ummah* berdaya guna dan berhasil guna jika telah menjadi bagian penting dari salah satu *maqāṣid al-syarī'ah*.

Maka wacana mengaktualisasikan pemeliharaan umat atau *ḥifẓ al-ummah* sebagai *maqāṣid al-syarī'ah* tidak lain untuk merespon perkembangan kehidupan modern apalagi mayoritas penduduk di tanah air beragama Islam. Adapun Pancasila sebagai falsafah dalam kehidupan berbangsa jugalah lambang negara dengan salah satu silanya yaitu persatuan Indonesia berkaitan dengan nilai-nilai ajaran Islam yaitu perdamaian, kesetaraan, kerjasama dan saling menghargai menjadi kunci mewujudkan harmonisasi agama dan budaya di Indonesia.

Pancasila disadari sebagai produk buatan manusia (duniawi) dan bukan produk samawi namun sila-sila yang ada dalam Pancasila merefleksikan pesan-pesan utama dalam ajaran Islam dan bahkan semua agama yaitu kemaslahatan umum, yang dalam Islam disebut dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Totalitas makna tauhid direfleksikan dalam sila pertama sebagai wujud garansi pemeliharaan dan penjagaan eksistensi agama sehingga asas penyelenggaraan negara didasarkan petunjuk *Ketuhanan yang Maha Esa* wajib dijalankan, dihargai dan dihormati.<sup>243</sup>

Adapun peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam pembinaan kerukunan hidup umat beragama tentunya menunjukkan signifikansi untuk menata kehidupan beragama dengan kewajiban negara memberikan perlindungan dan pelayanan seluruh umat beragama dengan segala kebutuhannya. Oleh karena itu, Kementerian Agama punya otoritas memberikan pengakuan terhadap suatu komunitas sebagai pemeluk agama atau kepercayaan.<sup>244</sup>

---

<sup>243</sup>Prawoto Mangkosasmito, *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 33-35

<sup>244</sup>Lihat, Titik Suwariyanti, ed., *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007).

Pengakuan secara administratif negara berkewajiban memberi pelayanan seperti pendidikan, kartu tanda penduduk, pernikahan dan sebagainya. Agama dijadikan ranah formal sehingga legalitas menjadi perlu. Persepsi tentang gangguan dan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan dianggap masih mendominasi terhadap Syiah dan Ahmadiyah. Tidak adanya sanksi tegas yang memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan bagi Syiah dan Ahmadiyah serta kelompok minoritas keagamaan lainnya.

Berbagai hal yang dibahas tersebut merupakan realisasi dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam sudut pandang sebuah sistem yang menjaga keterbukaan, pembaruan, realisme dan fleksibilitas hukum Islam. Selanjutnya validitas ijtihad dengan perangkat usul fikih juga *qawā'id uṣūl* ditentukan pada level tujuannya yaitu level merealisasikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai bidang ilmu yang lahir dari rahim usul fikih. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pendekatan holistik yang membatasi dirinya pada hadis atau hukum tertentu tapi juga merujuk pada prinsip umum dan landasan bersama.

Keberadaan penganut lintas agama dalam sebuah wilayah menunjukkan bahwa eksistensi agama yang dianutnya jelas diuji untuk bereksperimentasi, berdialog dengan kenyataan di lapangan yang kemungkinan bisa saja melabrak dogma agama lain atau realitas yang timpang. Pertimbangan *maṣlaḥah al-'āmmah* (kepentingan umum) harus menjadi pertimbangan terdepan dalam proses membangun fikih hubungan antar agama dan proses pengambilan keputusan hukum agar kepentingan tetap terjaga maka diperlukan kepekaan sosial.<sup>245</sup> Sebab adanya kemungkinan beberapa hal dalam proses bermasyarakat perlu dipertanyakan keabsahannya.

---

<sup>245</sup>Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Cet. IV; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004), h. xlix

Rumusan Islam tentang kehidupan sebagai sebuah amanah yang digunakan untuk kebaikan yaitu pencapaian *sa'ādatu al-dārain* (kesejahteraan dunia dan akhirat) maka kebutuhan spiritual jelas menjadi tujuan utama karena sifatnya permanen sedangkan manusia secara bersama dihadapkan dengan kenyataan bahwa ia harus tunduk dengan hukum-hukum yang mengikat kehidupan dunianya saat ini. Kehidupan dunia yang temporer dan maya berhubungan secara integratif dan kausatif dengan kebahagiaan ukhrawi yang kekal dan hakiki. Meskipun kontradiktif sebetulnya tidaklah aneh karena akhirat menyediakan satu-satunya jalan bagi pencapaian kehidupan dunia.

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya menjadi referensi *'ubūdiyyah* namun juga dalam *mu'āmalah* (interaksi sosial) dan *jināyah* utamanya yang berhubungan dengan fikih hubungan antar agama sehingga masyarakat secara dinamis, mau atau tidak akan terseret dengan arus perubahan namun tidak berbenturan dan bersinergi dengan nilai-nilai dari *maqāṣid al-syarī'ah*.

#### ***H. Qawā'id Fiqhiyyah sebagai Landasan Perilaku Kerukunan Umat Beragama***

Qawā'id fiqhiyyah berfungsi dan berperan penting dalam mengetahui dan menyelesaikan berbagai masalah aktual yang masih perlu diselesaikan hukumnya dalam Alquran dan hadis khususnya dalam masalah transaksi keuangan syariah kontemporer, kerukunan umat beragama, dan lain-lainnya.

Abdul Wahāb Khallāf merincikan hukum-hukum bidang muamalah dalam artian luas yang diantaranya adalah hukum ketatanegaraan dan hukum antar bangsa<sup>246</sup> yang keduanya bisa dimasukkan sebagai landasan berperilaku dalam konteks kerukunan umat beragama. Hukum ketatanegaraan adalah berbagai

---

<sup>246</sup>Lihat, Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), h. 32 & 33. Lihat juga, Kementerian Agama RI, *Ilmu Fikih* (Jakarta: DIPERTA, 1983), h. 1 & 2

ketentuan yang berhubungan dengan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatur hubungan penguasa dengan rakyat. Sedang hukum antar bangsa (internasional) yaitu tata cara pergaulan dengan non-muslim yang berada di negara Islam.

Oleh karenanya maka *qawā'id fiqhiyyah* bisa dijadikan sebagai landasan umum dalam perilaku sosial dan kerukunan umat beragama yang memberikan panduan bagi masyarakat untuk melakukan interaksi dengan sesamanya. Pemahaman terhadap *qawā'id fiqhiyyah* mutlak diperlukan untuk melakukan ijtihad atau pembaharuan pemikiran. Sejak abad 2 Hijriyah telah dirintis peletakan *qawā'id fiqhiyyah* oleh ulama dan fuqaha melalui karya-karya mereka yang sampai kini bisa diimplementasikan dalam kehidupan modern.<sup>247</sup>

Dari keempat mazhab fikih dalam Islam tersusun *qawā'id fiqhiyyah* dalam jumlah yang banyak, sebagiannya ada yang sama atau serupa, sehingga susah untuk diketahui jumlahnya secara pasti. Kaidah fikih menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih, dan lebih arif dalam menerapkan fikih dalam waktu, keadaan dan adat kebiasaan yang berlainan.<sup>248</sup> Selain itu akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk didalamnya kerukunan umat beragama dan lebih mudah di dalam memberi solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dengan tetap berpegang teguh kepada kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan hikmah yang terkandung di dalam fikih.<sup>249</sup>

---

<sup>247</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Dimasyq: Dār al-Qalam, 1986), h. 246

<sup>248</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), h. v

<sup>249</sup> Ahmad bin Muḥammad al-Zarqā, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Dimasqiy: Dār al-'Ilmi, 1938), h. 165

Cabang-cabang fikih berkembang sesuai dengan perkembangan hidup manusia dan perkembangan masyarakat yang dasar-dasarnya mengikuti firman Allah dalam Alquran dan penjelasan Rasulullah saw. dalam hadis-hadisnya. Semua masalah aktual yang tidak ditemukan dalilnya dalam Alquran dan hadis diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip Alquran dan hadis yang antara lain dengan menggunakan *qawā'id fihiyyah*.

Kaidah-kaidah fikih bersifat universal (*kulli*) dan dapat diaplikasikan kepada seluruh *juz'i*-nya (bagiannya) dimana hukum *juz'i* tersebut dapat diidentifikasi dari padanya.<sup>250</sup> Dengan lapangan fikih yang amat luas dan mencakup berbagai hukum *furū'* maka perlu adanya kristalisasi berupa kaidah-kaidah *kulli* yang menjadi beberapa kelompok dan tiap-tiap kelompok merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Dengan berpegang teguh pada kaidah-kaidah fikih maka kalangan mujtahid merasa lebih mudah mengetahui hukum bagi suatu masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah.<sup>251</sup>

Kaidah fikih adalah bagian dari ilmu fikih yang memiliki hubungan erat dengan Alquran, hadis, akidah dan akhlak. Baik kaidah-kaidah usul fikih maupun kaidah-kaidah fikih bisa disebut metodologi hukum Islam. Hanya saja kaidah-kaidah usul fikih sering digunakan di dalam *takhrīj aḥkām*, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Sedangkan kaidah-kaidah fikih sering digunakan dalam *taṭbīq al-aḥkām*, yaitu penerapan hukum atas kasus-kasus yang timbul di dalam kehidupan manusia termasuk didalamnya kerukunan beragama. Tidak heran jika kekhalifahan Turki Usmani antara tahun 1869-1878 mengeluarkan undang-undang disebut *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah* yang merupakan

---

<sup>250</sup> Al-Ṭahānawī, *al-Talwīḥ 'alā al-Tauḍīḥ* (Miṣr: Maṭba'ah Sya'n al-Ḥurriyyah, t.th.), Juz 1, h. 20.

<sup>251</sup> Syarif Hidayatullah, *Qawā'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer: Mu'amalat-Maliyah Islamiyyah-Mu'asirah* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012) h. 10.



penerapan hukum Islam dengan 99 kaidah fikih di bidang muamalat dengan 1851 pasal.<sup>252</sup>

Kaidah-kaidah yang sudah mapan, sudah dikritisi oleh ulama dan diuji serta diukur dengan banyak ayat dan hadis Nabi terutama tentang kesesuaiannya dan substansinya. Apabila kaidah-kaidah fikih tersebut bertentangan dengan banyak ayat Alquran ataupun hadis yang bersifat dalil kulli maka tidak akan menjadi dalil mapan. Maka penggunaan dalil-dalil fikih yang sudah mapan pada hakikatnya merujuk kepada Alquran dan hadis yang setidaknya kepada semangat Alquran dan kearifan Alquran dan hadis juga.<sup>253</sup>

Kaidah-kaidah fikih khusus di berbagai bidang seperti ibadah *mahḍah*, *al-ahwāl al-syakḥṣiyyah* (hukum-hukum keluarga), muamalah atau transaksi, jinayah, siyasah dan peradilan atau hukum acara bisa dijadikan sebagai landasan umum dalam kehidupan bermasyarakat<sup>254</sup> termasuk didalamnya kerukunan umat beragama. Kaidah khusus di bidang hukum keluarga terbukti jumlah ayatnya menempati urutan kedua setelah ibadah *mahḍah*, yang artinya memberi tuntunan untuk pembinaan pribadi muslim kemudian beralih kepada pembinaan keluarga muslim sebagai unsur terkecil dalam pembinaan masyarakat dan komunitas muslim.<sup>255</sup> Hukum keluarga meliputi pernikahan, waris, wasiat, wakaf dan hibah di kalangan keluarga.

Adapun di bidang fikih selain ibadah *mahḍah* dan hukum keluarga, ruang ijtihad menjadi sangat luas dan materi-materi fikih sebagai hasil ijtihad menjadi

---

<sup>252</sup> Ali Haidar, *Durar al-Hukkām, Syarah Majallah al-Ahkām* (Cet. I; Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991).

<sup>253</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 6.

<sup>254</sup> Asyuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 132.

<sup>255</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 122.

sangat banyak yang hanya menentukan garis-garis besarnya saja yang tercermin dalam dalil-dalil kulli (bersifat umum), *maqāṣid syarī'ah* (tujuan hukum), semangat ajaran dan kaidah-kaidah kulliyyah. Usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa tentu beragam dan banyak sekali. Dalam transaksi saja para ulama menyebut tidak kurang dari 25 macam.<sup>256</sup>

Terhimpun tidak kurang dari 99 kaidah yang termuat dalam *Majallah al-Aḥkām al'Adliyyah*. Kaidah-kaidah tersebut menjadi acuan dan menjadi jiwa dari 1851 pasal tentang transaksi yang tercantum dalam *Majallah al-Aḥkām al'Adliyyah* yang dihimpun oleh ulama-ulama Turki zaman kekhalifahan Turki Usmani.<sup>257</sup> Transaksi tersebut meliputi jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*muḍārabah, musyārahah*), ganti rugi, perwakilan, dan lain-lain kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan mudarat, tipuan, judi dan riba.

Fikih jinayah dalam hukum Islam membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya; membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Dalam fikih jinayah dibicarakan upaya-upaya preventif (pencegahan), rehabilitatif (pemulihan), edukatif, serta upaya-upaya represif (menekan, menindas) dalam menanggulangi kejahatan disertai dengan teori-teori tentang hukuman yang dalam hal ini dimuat dalam kaidah-kaidah khusus di bidang jinayah. Teori-teori dalam fikih jinayah selalu dikaitkan dengan menarik kemaslahatan dan menarik kemafsadatan. Fikih jinayah dengan berbagai

---

<sup>256</sup>Mustafā Aḥmad al-Zarqā, *al-Fiqh al-Islām fi Ṣaubihī al-Jadīd* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1965), h. 30.

<sup>257</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 129.

kaidahnya berposisi sebagai *sadd al-zarī'ah* yaitu menutup jalan dari perbuatan mafsadah.<sup>258</sup>

Sebagaimana ungkapan yang menyatakan untuk menghindari hukuman had karena ada syubhat. Syubhat dapat menggugurkan sanksi had dengan berbagai alasan seperti syubhat yang berhubungan dengan pelaku karena sebab salah sangkaan, syubhat yang terkait dengan perbedaan pendapat para ulama dan syubhat yang berhubungan dengan tempat seperti berhubungan dengan isteri yang sedang haid.<sup>259</sup>

Sedang fikih siyasah dalam hukum Islam yang objek pembahasannya berhubungan dengan kekuasaan. Fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, hukum ekonomi dan termasuk didalamnya kebijakan merawat kerukunan umat beragama. Jika dilihat dari perspektif sosiologis maka bahasannya meliputi hubungan antara rakyat dan pemimpin sebagai penguasa dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara atau berhubungan dalam kebijakan-kebijakan politis baik nasional maupun internasional.<sup>260</sup>

Di antara kaidah tersebut ada yang menyatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.<sup>261</sup> Berbagai contoh berhubungan dengan kaidah tersebut yang mana setiap kebijakan yang mengandung nilai maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang seharusnya direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai serta

---

<sup>258</sup> Jaih Mubarak & Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2008), h. 10.

<sup>259</sup> Abd al-Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināiy al-Islāmi Muqāranah bi al-Qānūn al-Waḍ'ī* (Cet. III; al-Qāhirah: Maktabah al-'Urūbah, 1963), h. 212.

<sup>260</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 148.

<sup>261</sup> Imām Tājuddīn 'Abd al-Wahāb al-Subki, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 137.

dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang mendatangkan kerusakan, tentu harus disingkirkan dan di jauhi. Seperti kebijakan mendirikan rumah ibadah sebagai langkah preventif mengantisipasi merebaknya konflik antar umat beragama yang biasanya dipicu karena lokasinya di tengah komunitas yang kebanyakan menganut agama lain.

Hambatan yang cukup berat untuk mewujudkan ke arah persatuan dan keutuhan serta kesejahteraan adalah masalah kerukunan nasional, termasuk didalamnya kerukunan antar agama dan kerukunan internal umat beragama. Persoalan menjadi krusial dengan serangkaian kondisi sosial yang menyuburkan konflik sehingga kebersamaan semakin terusik dan terganggu dalam membangun sebuah negara. Apalagi kebanggaan terhadap kerukunan yang selama ini dirasakan selama bertahun-tahun mengalami degradasi bahkan menimbulkan kecemasan terjadinya disintegrasi.

Berkenaan dengan fungsi dan peranan serta urgensi *qawā'id fiqhiyyah* dapat membantu seseorang dalam mengetahui hukum berbagai masalah kehidupan yang makin kompleks khususnya dalam konteks kerukunan umat beragama dan tidak memerlukan waktu yang panjang. Penulis terdorong menjadikan *qawā'id fiqhiyyah* sebagai salah satu teori yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengannya sehingga dibatasi pembahasannya sebagai landasan berperilaku dan penerapannya dalam kerukunan umat beragama.

*Qawā'id fiqhiyyah* dalam pengertiannya adalah kata majemuk dengan dua kata, yaitu *qawā'id* dan *fiqhiyyah*. Kata *qawā'id* bentuk jamak dari *qā'idah* yang secara etimologi diartikan sebagai dasar-dasar (fondasi) sesuatu, baik yang bersifat kongkret, inderawi seperti fondasi rumah maupun bersifat abstrak, non-

materi dan non-inderawi seperti *uṣūluddīn* (dasar-dasar agama).<sup>262</sup> Kaidah yang bersifat materi terdapat dalam Alquran yaitu QS al-Baqarah/2: 127 dan QS al-Nahl/16: 26 sebagai berikut:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

Terjemahannya:

Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan dasar-dasar (fondasi) Baitullah bersama Ismail.<sup>263</sup>

.....فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ

Terjemahannya:

.....maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya.<sup>264</sup>

Sedangkan pengertian *fiqhiyyah* diambil dari kata *fiqh* yang berarti pengetahuan, pemahaman, mengetahui kebaikan dan keburukan dalam memahaminya atau memahami maksud pembicara dan perkataannya.<sup>265</sup> Sedangkan pengertian fikih secara istilah berkisar pada hukum-hukum *amaly* (praktis) yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Kata *fiqhiyyah* diambil dari kata *fiqh* yang ditambah *ya'nisbah* yang berfungsi sebagai penjenisan atau penyadaran. Secara etimologi, makna *fiqh* lebih dekat dengan makna ilmu.

Sedangkan pengertian *qawā'id fiqhiyyah* dalam istilah hukum Islam menurut al-Taftazāny yaitu suatu hukum yang bersifat universal yang dapat diaplikasikan kepada seluruh *juz'ī*-nya (bagiannya) agar dapat diidentifikasi hukum-hukum bagian tersebut darinya.<sup>266</sup> Definisi tersebut sama dengan definisi

<sup>262</sup>Muḥammad bin Abi Bakar al-Rāzi, *Mukhtār al-Ṣaḥḥāh* (Miṣr: Dār al-Naḥḍah, t.th.), h. 544. Lihat juga, al-Rāgib al-‘Aṣfāhāni, *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur’ān* (Miṣr: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabi, 1961), h. 409.

<sup>263</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 87

<sup>264</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 267

<sup>265</sup>Ibnu Manzūr, *Lisan al-‘Arab* (t.t. : Dār al-Ma’ārif, t.th.), Jilid IV, h. 3450. Lihat pula, ‘Ali Muḥammad al-Jurjāni, *al-Ta’rīfāt* (Miṣr: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabi wa Aulāduhu, 1938), h. 147.

<sup>266</sup>Al-Taftazāny, *al-Talwīh ‘alā al-Tauḍīh* (Miṣr: Maṭba’ah al-Sya’n al-Hurriyyah, t.th.), Jilid I, h. 20

yang dikemukakan al-Kafawi al-Hanafi dan al-Jurjany hanya bedanya menggunakan kata *qadiyyah* (proposisi).<sup>267</sup>

Adapun al-Ḥamawy mendefinisikan *qawā'id fiqhiyyah* bersifat *aglābiyyah* (mayoritas) sebagai hukum mayoritas dan bukan hukum universal yang dapat diaplikasikan kepada mayoritas bagiannya agar hukum-hukumnya dapat diketahui.<sup>268</sup> Penyebutannya yang bersifat *aglābiyyah* (mayoritas) karena memang seluruh *qawā'id fiqhiyyah* mempunyai pengecualian sehingga penyebutan universal terhadap *qawā'id kulliyah* kurang tepat.<sup>269</sup> Adapun yang menyebut *qawā'id fiqhiyyah* sebagai proposisi, hukum atau perkara tentunya mempunyai tujuan dan maksud tertentu yang memandang bahwa *qawā'id fiqhiyyah* adalah aturan-aturan yang menampung perbuatan-perbuatan mukallaf.<sup>270</sup>

*Qawā'id fiqhiyyah* menjadi landasan untuk memelihara dan menghimpun berbagai masalah yang sama, juga sebagai barometer dalam mengidentifikasi berbagai hukum yang masuk dalam ruang lingkupnya. Keberadaan *qawā'id fiqhiyyah* dianggap mampu mengkaji maksud-maksud syarak secara umum maupun khusus juga sebagai parameter dalam mengidentifikasi rahasia-rahasia hukum dan hikmah-hikmahnya.<sup>271</sup>

<sup>267</sup> Abu al-Baqā' al-Kafawy, *al-Kulliyāt* (Dimasyq: Mansyūrāt Wizārah al-Šaqāfah wa al-Irsyād al-Qaumiyy, 1974), h. 48

<sup>268</sup> Aḥmad bin Muḥammad al-Ḥamawy, *Gamzu 'Uyūn al-Baṣāir Syarh al-Asybah wa al-Nazāir* (t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H), Jilid I, h. 22.

<sup>269</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 12, 13.

<sup>270</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 13.

<sup>271</sup> Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*, h. 33.

### ***I. Konstruksi Nilai Kebersamaan dalam Kerukunan Umat Beragama***

Nilai dipandang berharga oleh orang dan komunitas serta dijadikan acuan tindakan maupun mengartikan orientasi hidup. Idealnya sebuah nilai dengan ditumbuhkan, dibatinkan, dan dihayati sebagai jagat makna hidup dan diwacanakan serta dihayati dalam jagat simbol. Dalam menyikapi nilai tergantung dari tipe masyarakatnya, baik kolektif atau individualistik.

Masyarakat kolektif direkatkan dan dihidupi oleh nilai-nilai kebersamaan yang dominan, sebagaimana disimpulkan Weber dalam kutipan Hasyim Aidid bahwa masyarakat kolektif menggambarkan masyarakat modern sedang menuju produktifitas yang efisien, birokrasi, serta berkembangnya pemikiran-pemikiran *rational-ilmiah*.<sup>272</sup> Sementara masyarakat individualistik lebih dihidupi oleh nilai-nilai otonomi pribadi dan kebebasan kreatif individu, dimana individu dihargai karena keunikannya dan harkatnya sebagai pribadi.<sup>273</sup>

Perubahan masyarakat kolektif menjadi masyarakat individualis bukan hanya ditandai dengan merosotnya nilai kebersamaan menjadi egois individual tetapi disebabkan oleh faktor-faktor material seperti perubahan ekonomi misalnya dari pertanian menjadi ekonomi perkebunan ekspor, atau dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi kapitalis global yang menjadikan kebersamaan terpecah belah.<sup>274</sup>

Mewujudkan kerukunan umat beragama, baik itu internal, eksternal, dan hubungan pemerintah dengan umat beragama diperlukan pengembangan internalisasi nilai kebersamaan pada umat beragama di Tana Luwu dan di Indonesia secara umum. Keberadaan individu sebagai unsur terkecil dalam

---

<sup>272</sup>Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial* (Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 12.

<sup>273</sup>Hendar Putranto dan Mudji Sutrisno (ed), *Teori-Teori Kebudayaan* (Cet. V; Yogyakarta: 2009), h. 67-68.

<sup>274</sup>Hendar Putranto dan Mudji Sutrisno (eds.), *Teori-Teori Kebudayaan*, h. 69.

sebuah sistem tatanan masyarakat, yang mana dalam tatanan tersebut dari berbagai individu yang berdiri dan tidak mustahil ada yang berlatar belakang suku, budaya dan keyakinan yang berbeda-beda.

Sifat heterogenitas tidak terhenti pada aspek latar belakang suku, budaya dan agama tetapi pada hakikatnya bahwa dalam fitrahnya manusia diciptakan dalam segala keberbedaan. Berbeda warna kulit, kebangsaan dan terlebih lagi sifat, karakter, pola pikir, serta visi dan misi atau tujuan hidup masing-masing individu. Ketika perbedaan visi antar individu dalam masyarakat maka akan timbul sebuah benturan yang kemudian selanjutnya disebut sebagai konflik. Ketika konflik yang terjadi bukan menjadi nilai positif yang dihasilkan dalam sebuah tatanan masyarakat maka lahirlah kesepakatan-kesepakatan yang merujuk sebuah tata aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat guna menuju nilai yang lebih tinggi yaitu kejayaan atau peradaban sebagai tujuan bersama.<sup>275</sup>

Seseorang yang mengedepankan egosentris daripada kebersamaan dan tidak memperdulikan lagi norma-norma yang menjadi sendi dalam tata aturan hidup bermasyarakat maka akan berlaku hukum bersama misalnya pengucilan. Bukan hanya faktor egoisme semata sifat ini muncul namun adanya kemungkinan dari indikasi pergeseran pola pikir atau paradigma individu misalnya kemunculan tipe-tipe yang mengajarkan metode-metode eksploitatif, pemaksaan, penindasan bahkan penjajahan terhadap individu meskipun dikemas dengan bujukan namun sebenarnya ada upaya menodai kerukunan beragama.

Berbagai tindakan destruktif (negatif) yang bisa menodai, merusak ketenangan dan kerukunan umat beragama hanya akan meredupkan statusnya sebagai makhluk sosial yang seharusnya saling membantu serta peduli dengan

---

<sup>275</sup>Hendar Putranto dan Mudji Sutrisno (eds.), *Teori-Teori Kebudayaan*, h. 70



umat lintas agama dan keyakinan. Jika sifat ini mewabah pada setiap anggota masyarakat maka dalam menyongsong tujuan bersama yaitu masyarakat yang berperadaban akan mengalami hambatan karena visi masyarakatnya berjalan secara parsial.

Sebagian contoh tersebut tentunya melemahkan semangat kebersamaan sehingga kekuatan masyarakat terbilang rapuh dan sangat dimungkinkan akan keniscayaan sebuah bencana kehancuran dari akibat konflik dalam sistem masyarakat tersebut. Namun bagaimanapun berbagai hambatan yang menodai kerukunan dapat diminimalisir dan dihilangkan. Maka tawaran utama dalam Islam dengan meluruskan pemahaman paradigma yang keliru yang selanjutnya secara berkala dibangun dalam sebuah bingkai kebersamaan menjalankan tata aturan yang disepakati. Islam mengajarkan arti pentingnya nilai kebersamaan sebagai etos kerja, toleransi, musyawarah, menghargai perbedaan dan membangun kepedulian terhadap sesama.

Konsep yang terkandung dalam *maqāṣid al-syarī'ah* bukan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat individual tapi juga bersinergi dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, kemajemukan dan nilai demokrasi. Pengembangan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi tiga yaitu; kontribusi dalam perumusan legalitas hukum, urgensi penerapannya dan pembagian *maqāṣid* menjadi *al-‘āmmah* dan *al-khāṣṣah* menjadikan dan mempertegas universalitas syari'at Islam yang selalu sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>276</sup>

Perumusan kerangka epistemologis *maqāṣid* yang berlandaskan fitrah, toleransi (*al-samāḥah*), persamaan (*al-musāwāh*) dan kebebasan (*al-ḥurriyyah*) bukan saja mencirikan persaudaraan atau *ukhuwwah insāniyyah, islāmiyyah* dan *waṭaniyyah* sebagai kualitas ketaatan terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya tetapi

---

<sup>276</sup>Safriadi, "Kontribusi Ibnu 'Āsyūr dalam Kajian Maqāṣid al-Syarī'ah", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume XIII No. 2, (Februari 2014) h. 82.

juga menjadi salah satu kekuatan perekat sosial untuk memperkokoh kebersamaan.

Membangun kebersamaan bukanlah hal yang mudah dan lebih sulit lagi merawat dan memeliharanya agar tetap ada sepanjang masa. Eksistensi kebersamaan internal dalam ajaran Islam dikuatkan dalam konsep shalat berjamaah dan ibadah haji karena keduanya sangat kental dengan nilai kebersamaan. Kedua ibadah tersebut kental dengan nilai kebersamaan menjadi modal untuk membangun dan menjaga tali persaudaraan dalam umat Islam.

Sedang kebersamaan antar sesama manusia baik dengan adanya perbedaan suku, etnis dan agama ditumbuh-kembangkan dengan relasi, interaksi dan komunikasi. Meskipun dalam sejarahnya hingga sekarang fenomena kebersamaan seringkali terganggu oleh godaan-godaan kepentingan yang dapat merusak keutuhan komunikasi dan bahkan mengundang sikap dan perilaku yang berseberangan. Dalam artian, kepentingan sesaat dan sudah pasti menyesatkan namun kepentingan yang mengideologikan kebersamaan sudah pasti bermakna membawa kemaslahatan.

Konstruksi kolektifitas (kebersamaan) seharusnya dibentuk dalam kalangan remaja, pemuda dan mahasiswa, maupun masyarakat pada umumnya dimana nilai kebersamaan dewasa ini terasa kurang. Terbukti dari tindakan segala sesuatu karena ingin mengunggulkan diri mereka, kelompok mereka, organisasi mereka dan lain sebagainya. Membangun pola pikir (*mind set*) remaja agar mempunyai keinginan untuk bersama-sama dalam kebaikan perlu dorongan dari berbagai pihak, dalam keluarga, lingkungan sekolah, maupun didikan lingkungan masyarakat.<sup>277</sup>

---

<sup>277</sup> Andar Ismail, *Selamat Berkerabat – 33 Renungan tentang Kebersamaan* (Cet. II; Jakarta: Gunung Mulia, 2010), h. 10.

Kebersamaan pemuda diposisikan sebagai agen pengontrol dan perubahan. Penyatuan ide, pikiran, gagasan, dan kebersamaan langkah melakukan perubahan untuk masyarakat, bangsa dan negara maka suatu perubahan akan terlihat atau terpampang dengan jelas dari buah tangan atau karya pemuda/mahasiswa. Adapun kolektifitas dalam masyarakat terpatrit melalui nilai-nilai yang tertanam dalam pribadi-pribadi masyarakat yang diantaranya gotong royong, musyawarah mufakat, senasib sepenanggungan, ramah tamah dan lain-lain.

Konsep kebersamaan ideal dalam ajaran Islam seharusnya didialogkan dengan realitas kekinian dan hal tersebut tidak lain untuk menciptakan konsep kehidupan yang dinamis, humanis, yang tetap mengakomodir kemaslahatan umum.<sup>278</sup> Kebersamaan vertikal atau *ukhuwwah billah* dan kebersamaan horizontal (antar sesama) harus disinergikan dan tidak lagi bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Membangun kebersamaan tentu dengan mereduksi konflik dan kerusuhan dengan memperkuat pemahaman bahwa berkurangnya konflik dan kerusuhan hanya dapat terwujud bilamana masyarakat secara keseluruhan memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), tumbuhnya budaya taat dan patuh terhadap hukum serta pelaksanaan hukum yang benar-benar tepat.

Kebhinekaan, kemajemukan dan situasi plural masyarakat Indonesia, baik dari segi etnis maupun kultural adalah kekayaan tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Kebersamaan kolektif menjadi kekuatan untuk membangun dan

---

<sup>278</sup>Muhammad al-Tāhir Ibnu ‘Asyūr, *Maqāsid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah* (Tunisia: Maktabah al-Istiqāmah, 1366 H), h. 3.

mewujudkan kemajuan sebuah negara dan merealisasikan kesejahteraan masyarakat.<sup>279</sup>

Pentingnya profesionalitas dan tanggung jawab para penegak hukum sebagai kunci penanggulangan konflik bernuansa SARA. Hal tersebut akan tercipta bila tokoh-tokoh masyarakat dan agama terjun berpartisipasi aktif penyebaran pemahaman HAM yang komprehensif. Kebersamaan sering dinodai dengan faktor non hukum seperti ekonomi dan politik yang banyak menjadi konflik sosial termasuk yang bernuansa SARA dan mengusik kerukunan beragama.<sup>280</sup>

Kebersamaan adalah terwujudnya terpeliharanya keteraturan yang bukan karena ancaman kekuatan, tetapi melalui pemantapan norma-norma yang diterima oleh orang banyak sebagai tuntunan tingkah laku yang benar. Dengan penegakan hukum yang mantap, tegas, termasuk perlindungan HAM maka masyarakat dan umat beragama bergerak ke arah optimis seperti yang ditegaskan Max Weber (1864-1920) yang dikutip oleh Stewart.<sup>281</sup>

Pemikiran Weber cenderung memberi penekanan berlebihan pada landasan ekonomi pada ketidakadilan dan mempresentasikan polarisasi sederhana masyarakat dalam dua kelas yaitu yang berkepemilikan dan yang tidak berkepemilikan. Hasil akhirnya yang berpotensi memicu konflik adalah rendahnya tingkat mobilitas sosial.<sup>282</sup> Weber menyimpulkan bahwa masyarakat modern sedang menuju kepada produktifitas yang efisien, birokrasi dan berkembangnya pemikiran-pemikiran rasional-ilmiah. Situasi masyarakat yang

---

<sup>279</sup>Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial* (Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 2-3.

<sup>280</sup>Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial*, h. 10.

<sup>281</sup>Elbert W. Stewart, *Sociology The Human Science* (New York: McGraw Hill Book Company, 1978), h. 25.

<sup>282</sup>Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial*, h. 95.

produktif hanya akan tercapai bila kerusuhan dan konflik sosial penuh kekerasan dapat dihindari dan bilaterjadi dapat dihadapi dengan penanganan yang tuntas dan mantap.

Konstruksi kebersamaan dihubungkan dengan teori Parsons yang dikenal dengan teori fungsionalis, teori konsensus atau teori sistem sosial yang selanjutnya dikembangkan menjadi *action theory*. Semua sistem bergerak dengan memiliki persyaratan adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pola nilai-nilai bersama. Parsons menciptakan empat kebutuhan fungsional yang dapat dirangkaikan dengan seluruh sistem yang hidup adalah *latent pattern-maintenance* (L), *integration* (I), *goal attainment* (G), dan *adaptation* (A).<sup>283</sup>

*Pattern maintenance* menunjuk bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma. *Integration* dengan adanya koordinasi serta kesesuaian bagian-bagian dari sistem sehingga seluruhnya fungsional. Masalah penentuan tujuan sistem dan penetapan prioritas di antara tujuan-tujuan itu tergantung pada prasyarat *goal attainment*. *Adaptation* menunjuk pada kemampuan sistem yang menjamin apa yang dibutuhkannya dari lingkungan serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut ke dalam seluruh sistem. Keempat kesamaan tersebut ditemukan dalam seluruh sistem, apakah itu sistem biologis, sosial, psikologis yang menegaskan skema sistem empat fungsi tersebut tertanam kukuh di dalam setiap sistem hidup.<sup>284</sup>

Dalam pemikiran Coser, manusia bukan sukma bebas yang dapat melakukan segala keinginannya melainkan dihambat oleh lembaga-lembaga sosial di mana mereka berada. Orang dihambat oleh struktur sosial yang membatasi kebebasan dan kreatifitas dan tugas sosiologi untuk mengamati

---

<sup>283</sup>Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial*, h. 97-100.

<sup>284</sup>Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial*, h. 101.

kendala-kendala sosial tersebut. Sumbangan Coser kepada orientasi fungsionalisme ialah mendeskripsikan bagaimana struktur-struktur sosial merupakan produk konflik dan bagaimana mereka dipertahankan konflik. Proposisinya sebagian besar berkisar di seputar intensitas dan fungsi konflik bagi lembaga-lembaga sosial.<sup>285</sup>

Dahrendorf menyatakan bahwa segala sesuatu yang dapat dianalisa dengan fungsionalisme struktural pada satu harmoni, dapat pula dianalisa dengan teori konflik pada sisi satunya. Ketegasannya ke masa depan bukan hanya persoalan-persoalan konkret tetapi juga perlu penjelasan menyangkut keterpaksaan, konflik, dan perubahan.<sup>286</sup> Kekayaan, status ekonomi, dan status sosial walau bukan merupakan determinan kelas, demikian menurut istilah yang dipergunakan benar-benar dapat mempengaruhi intensitas rivalitas. Dengan kata lain bahwa komunitas yang menikmati status ekonomi relatif tinggi memiliki kemungkinan rendah terlibat dalam konflik yang keras dengan struktur kekuasaan daripada mereka yang terbuang dari status sosial, ekonomi dan kekuasaan.<sup>287</sup>

Prinsip ajaran Islam yang santun, sejuk dan damai serta ditegaskan bahwa brutalisme, anarkisme, kebingungan, perusakan dan kekerasan yang dilakukan sekelompok muslim fundamentalis-radikalis yang mengatasnamakan Islam sebenarnya sangat bertentangan dengan watak dasar, visi, dan misi damai Islam

---

<sup>285</sup>Margareth M. Poloma, *Contemporary Sociological Theory*, diterjemahkan oleh Tim Penterjemah Yasogama dengan judul: *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Rajawali, 1979), h. 114. Lihat, Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial*, h. 109.

<sup>286</sup>Jonathan H. Turner, *The Structure of Sociological Theory*, Fifth Edition (California: Wadsworth Publishing Company, 1991), h. 203. Lihat, Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial*, h. 111 & 115.

<sup>287</sup>Margareth M. Poloma, *Contemporary Sociological Theory*, h. 139. Lihat, Hasyim Aidid, *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial*, h. 115.

itu sendiri. Hal tersebut justru memperburuk citra Islam yang mengajarkan nilai-nilai kemaslahatan, kebaikan, keselamatan, kedamaian, dan perdamaian.<sup>288</sup>

Deteksi dini potensi konflik dan konstruksi kebersamaan kolektif umat beragama dirasa perlu membuka referensi otoritatif guna mengetahui arti toleransi agar mempunyai pemahaman yang benar dan sama. Atas dasar pemahaman yang sama maka silang pendapat tidak akan ada dan tidak perlu ada. Dalam kamus yang berskala otoritatif dan berstandar internasional, kata toleransi diartikan:

- a. *A fair, objective, and permissive attitude toward whose opinions, practices, race, religion, nationality, etc., differ from one's own; freedom from bigotry.* (Sikap adil, objektif, permisif terhadap pendapat, praktik, ras dan agama, dan kebangsaan berbeda dari dirinya sendiri; bebas dari kefanatikan).
- b. *A fair, objective, and permissive attitude towards opinions and practices that differ from one's own.*<sup>289</sup> (Sikap adil, objektif, dan permisif terhadap praktik yang berbeda dari miliknya sendiri).

Prinsip sepakat untuk tidak sepakat merupakan prinsip dasar Islam yang menghormati kebebasan beragama dan sangat menghargai serta menjunjung tinggi sikap toleran terhadap komunitas-komunitas agama non-Islam. Sikap tidak toleran, aksi intoleransi, sikap fanatik dan manifestasinya adalah perbuatan yang tercela karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dan bertentangan pula dengan asas-asas hukum, demokrasi dan HAM.

Ketimpangan dari nilai kebersamaan ditandai dengan adanya konflik yang menjadi hambatan dan mengandung daya rusak yang tinggi, dari segi ideologis,

---

<sup>288</sup>Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama – Konflik, Rekonsiliasi, dan Damai* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 3.

<sup>289</sup>*The Random House Dictionary of the English Language*, Second Edition (New York: Random House, inc., 1987), h. 1992.

sosial, ekonomi sampai pertahanan keamanan. Justru itu maka keadaan *chaos* perlu dicari akar permasalahannya karena masyarakat dan umat beragama memerlukan daya integrasi yang kokoh menghadapi arus globalisasi.<sup>290</sup>

Membangun kebersamaan dalam perspektif *maṣlaḥah* antar dan internal umat beragama diperlukan upaya merawat konstitusionalisme, pluralisme, dan multikulturalisme. Relasi pemerintah dan umat beragama dengan keberadaan Kemenag hanya sebatas membangun dan membina kerukunan antarumat beragama agar tidak terjadi ketegangan, pertikaian, konflik, dan bentrokan antarumat beragama. Hal itu tampak nyata dengan kebijakan awal sejak berdirinya Republik Indonesia dengan memperhatikan jumlah penduduk berdasarkan komposisi agama. Namun tidak berarti negara bersikap diskriminatif terhadap agama lain di luar enam agama tersebut.<sup>291</sup>

Agama lokal atau kepercayaan lokal tetap disikapi secara toleran dan membiarkan penghayat kepercayaan mempraktikkan ajaran agama dan kepercayaannya sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 seperti agama Kaharingan (Kalimantan Tengah), kepercayaan Ammatoa di Bulukumba, Tolotang di Sidrap dan lainnya yang tetap mendapat tempat yang semestinya. Tanggung jawab yang diamanatkan negara kepada Kemenag dengan melakukan pembinaan kerukunan antarumat beragama.

Perlu ditegaskan bahwa Kemenag tidak mengurus, apalagi mencampuri masalah-masalah internal suatu agama seperti masalah ibadah dan pembinaan internal keimanan dan keberagaman suatu komunitas agama. Kebersamaan antarumat beragama dipandang karena agama sifatnya lahiriah dan transendental

---

<sup>290</sup>Muin Razmal, *Konflik Sosial Studi Kasus Antara Masyarakat Rongkong dan Masyarakat Bacbunta Kabupaten Luwu Utara* (Cet. I; Palopo: Lembaga Penerbitan STAIN Palopo, 2009), h. 1.

<sup>291</sup>Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama – Konflik, Rekonsiliasi, dan Damai*, h. 104.



yang tidak mungkin dan tidak boleh dicampuri dan diintervensi oleh tangan-tangan manusia atau kekuasaan dunia (negara).<sup>292</sup>

Dalam hubungan tersebut, misi dan tugas Kemenag dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan kondisi dan situasi yang kondusif bagi terciptanya kerukunan antarumat beragama.
- b. Membina kerukunan dengan kebersamaan kolektif antarumat beragama yang lebih harmonis dan lebih toleran ke depan.
- c. Mencegah terjadinya pertikaian, konflik, dan bentrokan antarumat beragama karena dampaknya menimbulkan disharmoni sosial yang berakibat buruk pada *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nafs* bahkan pada *ḥifẓ al-dīn* dan mengarah kepada mafsadah yang berkepanjangan.
- d. Menjadi mediator jika terjadi konflik, pertentangan, dan bentrokan yang diselesaikan dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan.
- e. Menabur dan menyebar wawasan multikulturalisme, pluralisme, dan inklusivisme yang sejalan dengan prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>293</sup>

Oleh karena itu, multikulturalisme perlu terus dipupuk, dirawat, dan dilestarikan agar terus tumbuh dan berkembang dengan baik dan kuat. Kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan lima *maṣlaḥah* didalamnya dikemas dengan *ḥifẓ al-daulah* yang selanjutnya ditunjang dengan berbagai perangkat aturan konstitusional. Keterlibatan negara sangat dibutuhkan dalam menata hubungan

---

<sup>292</sup>Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama – Konflik, Rekonsiliasi, dan Damai*, h. 104-105.

<sup>293</sup>Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama – Konflik, Rekonsiliasi, dan Damai*, h. 106.

antarumat beragama karena isu agama menjadi peka dan momentum stabilitas nasional yang dinamis dan perlu terus dipelihara dan dipertahankan.<sup>294</sup>

Tinjauan doktrinal-teologis dari perspektif Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha tentang kerukunan antarumat beragama merujuk pada kitab sucinya masing-masing dan dikaitkan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia (Pancasila).<sup>295</sup> Keenam agama dan tentunya juga agama lain sama-sama mengajarkan perlunya membangun kebersamaan dan kerukunan karena itulah sendi-sendi persatuan dan pilar-pilar kesatuan bangsa, baik masa kini, esok, dan masa depan.

Tugas negara sesuai dengan visi dan misinya-menumbuhkembangkan dan membina hubungan antarumat beragama agar menjadi lebih baik dan harmonis. Dengan kata lain sebatas melakukan pembinaan membangun kebersamaan sehingga tercipta toleransi dan harmoni antar komunitas agama di seluruh wilayah tanah air.

### ***J. Kerangka Konseptual***

Dalam penelitian ini konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dijadikan sebagai *grand theory* dengan penekanan pada *al-ḍarūriyyat al-khamsu* (hal-hal yang primer) dan *ḥifzu al-ummah* (perlindungan umat), sedang *middle range theory* adalah *qawā'id fiqhiyyah*, sedang *applied theory* yang dipergunakan adalah teori kebersamaan.

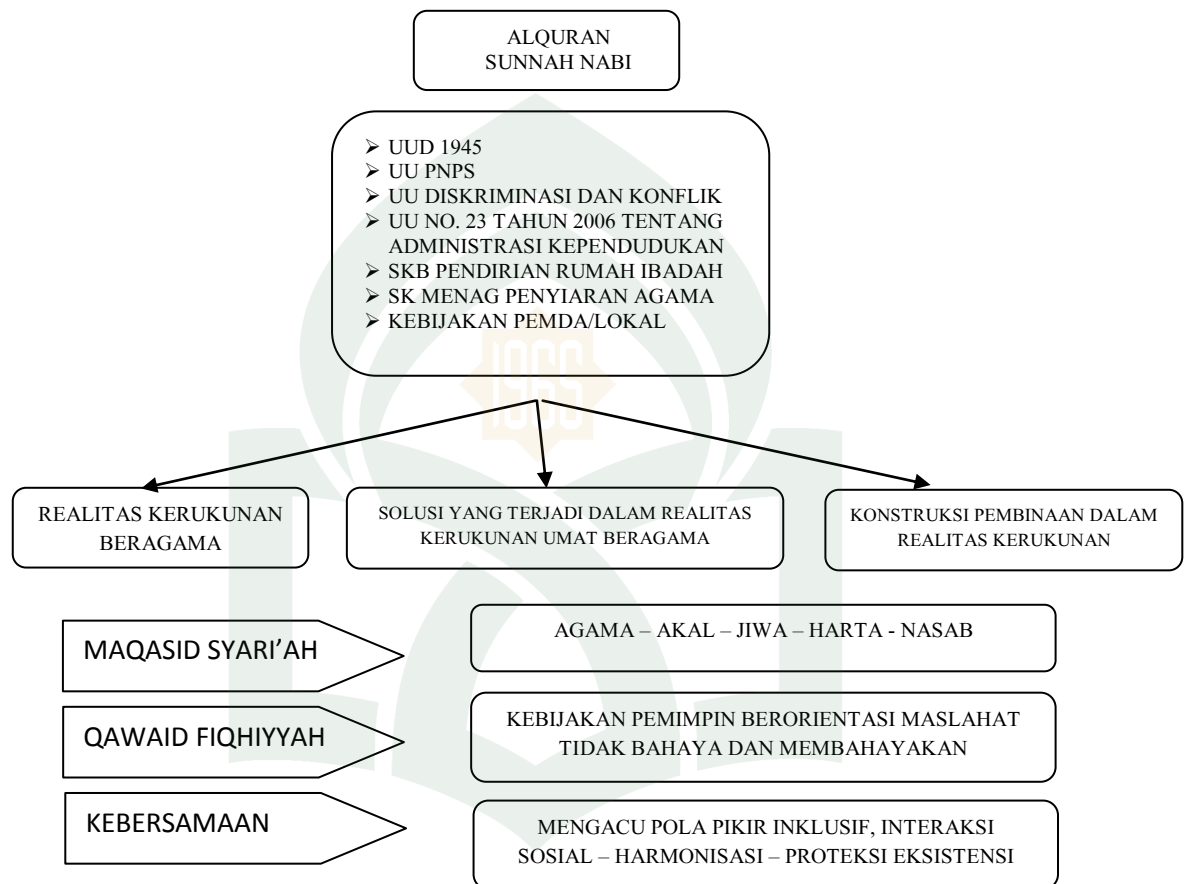
Dalam penerapan berbagai konsep diatas maka alur pikir yang dijadikan acuan oleh penulis selanjutnya ditegaskan dengan membangun dan menerapkan *maqāṣid al-syarī'ah* yang difokuskan dengan menegaskan aspek *al-ḍarūriyyāt al-*

---

<sup>294</sup> Alamsjah Ratu Perwiranegara, "Peranan Departemen Agama dalam 50 tahun Indonesia Merdeka", dalam Tim Penulis, *50 Tahun Departemen Agama* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1996), h. 94.

<sup>295</sup> Lihat, Musthofa, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1997).

*khamshu, qawā'id fiqhiyyah* dengan cabang yang berkenaan dengannya serta nilai kebersamaan dalam kerukunan umat beragama. Berikut alur pikir dalam skema yang digambarkan:



### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### *A. Jenis dan Lokasi Penelitian*

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi gabungan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, analisis data bersifat induktif serta hasil penelitian kualitatif yang menekankan makna daripada generalisasi.<sup>1</sup>

Sejalan dengan ini maka penelitian ini mendeskripsikan dinamika kerukunan umat beragama di Tana Luwu dengan kajian fokus di bidang penelitian hukum normatif dengan yang terdapat dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat beragama dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>2</sup>

Penelitian ini pada prinsipnya suatu kegiatan kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Suatu penelitian ini lebih berorientasi pada metode kualitatif dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan khusus dari suatu jenis metode tertentu, latar belakang pemikiran dan asumsi-asumsi yang terdapat di belakang sebuah metode penelitian tertentu.

Penelitian bermula dari adanya keraguan atau keingintahuan dari seorang peneliti terhadap suatu masalah yang ada atau yang dialami. Pada mulanya permasalahan adalah kesenjangan antara yang seharusnya dengan realitas di

---

<sup>1</sup>Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*(Cet. VI; Bandung: Alfabet, 2009), h. 8-9.

<sup>2</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 52.

lapangan atau senyatanya, antara cita-cita hukum dengan senyatanya, antara teori dengan pelaksanannya.<sup>3</sup>

Oleh karena itu penelitian adalah sarana pokok untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan sebaik-baiknya.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian ini merupakan penelitian dengan spesifikasi secara deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti dan secermat mungkin tentang sebuah dinamika kerukunan beragama dengan keadaannya atau gejala-gejala lainnya karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan dinamika kerukunan umat beragama di Tana Luwu dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Pemaparan secara kualitatif dimaksudkan agar dapat menggambarkan lebih jelas realitas di masyarakat Tana Luwu dengan apa yang terjadi termasuk didalamnya yang berkaitan dengan potensi konflik, konflik, rekonsiliasi dan kebersamaan dalam balutan harmoni yang dijaga dan dirawat oleh pemerintah dan mitranya.

Tempat penelitian diadakan di Tana Luwu, baik sebelum pemekaran atau pasca pemekaran. Dimana sejarah Tana Luwu sudah berawal jauh sebelum

---

<sup>3</sup>Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34.

<sup>4</sup>Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 25

pemerintahan Hindia Belanda bermula. Luwu adalah sebuah kerajaan yang mewilayahi Tana Toraja, (Makale, Rantepao di Sulawesi Selatan), Kolaka di Sulawesi Tenggara, dan Poso di Sulawesi Tengah.

Pada masa proklamasi kemerdekaan RI otomatis kerajaan Luwu berintegrasi masuk dalam wilayah NKRI yang ditandai dengan pernyataan Raja Luwu saat itu Andi Djemma yang menyatakan bahwa Kerajaan Luwu adalah bagian dari wilayah NKRI dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 34/1952 tentang pembubaran daerah Sulawesi Selatan bentukan Belanda dan Jepang termasuk daerah yang berstatus kerajaan.

Peraturan Pemerintah No. 56/1951 tentang Pembentukan Gabungan Sulawesi Selatan dengan tujuh daerah swatantra yang diantaranya seluruh Luwu dan Tana Toraja dengan pusat pemerintahan di Palopo. Beberapa tahun kemudian berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 4/1957 yang menjadikan Luwu sebagai daerah swatantra dan terpisah dari Tana Toraja. Daerah swatantra Luwu diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 3/1957 yang meliputi Kawedanaan Palopo, Masamba, dan Malili.

Selanjutnya 1 Maret 1960 dikeluarkan PP Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Propinsi Administratif Sulawesi Selatan yang mempunyai 23 Daerah Tingkat II, salah satunya Dati II Luwu dengan 16 distrik berdasarkan SK Gubernur Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 1100/1961. Distrik dengan jumlah 16 di Dati II Luwu sebagai berikut: Wara, Larompong, Suli, Bajo, Bupon, Bastem, Walenrang (Batusitanduk), Limbong, Sabbang, Malangke, Masamba, Bone-Bone, Wotu, Mangkutana, Malili, Nuha.

Perubahan distrik menjadi kecamatan dengan SK Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara No. 2067/1961 tanggal 18 Desember 1961. Maka secara administratif, Dati II Luwu terdiri dari satu Kota Administratif, tiga Pembantu

Bupati, 21 Kecamatan Definitif, 13 Kecamatan Perwakilan, 408 Desa Definitif, 52 Desa Persiapan dan Kelurahan dengan luas wilayah 17.791,43 km<sup>2</sup>. Setelah dilakukan penyempurnaan karena tidak sesuai lagi dengan keadaan dilapangan maka total luas wilayah Kabupaten Luwu adalah 17.695,23 km<sup>2</sup> dengan 21 Kecamatan Definitif, 13 Kecamatan Perwakilan.<sup>5</sup>

Semenjak bergulirnya reformasi di seluruh wilayah NKRI maka sejarah Tana Luwu yang dikenal dengan La Galigo atau Sawerigading tahun 1999 dikeluarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan mengubah mekanisme pemerintahan yang mengarah pada otonomi daerah. Selanjutnya Februari tahun 1999 terbentuknya dua Dati yaitu Luwu dan Luwu Utara, selanjutnya Palopo sebagai kota otonom pada 10 April 2002. Berikutnya Luwu Timur terbentuk dari pemekaran Luwu Utara pada 25 Februari 2003.<sup>6</sup>

Luwu yang terletak di sebelah utara Sulawesi Selatan dimekarkan menjadi Kabupaten Luwu dengan ibukota Belopa. Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Palopo. Pusat pemerintahan Kab. Luwu yang awalnya di Palopo dipindahkan ke Belopa sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005 dan diresmikan menjadi ibukota sejak 13 Februari 2006.<sup>7</sup>

Kota Palopo adalah kota yang memiliki 7 dimensi dan point pertama dalam 7 dimensi tersebut sebagai Kota Religi dan yang kedua adalah Kota Pendidikan, seperti halnya daerah lain yang mengutamakan pembangunan

---

<sup>5</sup>Lihat, Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel Nomor : SK.164/IV/1994 tanggal 4 April 1994 tentang luas wilayah provinsi, kabupaten/ kotamadya dan kecamatan di daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Luwu dalam Angka 2016 – Luwu in Figure 2016*, (Luwu: BPS Luwu Regency, 2016), h. 3.

<sup>7</sup>[id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Luwu](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Luwu) diakses pada tanggal 10 Oktober 2015

pendidikan sebagai salah satu sarana dalam meningkatkan sumber daya manusia. Prioritas Palopo dalam membangun pendidikan terlihat dari berdirinya 5 akademi dan 9 perguruan tinggi.<sup>8</sup>

Jumlah penduduk Kota Palopo pada akhir tahun 2011 adalah 149.418 jiwa, sedang akhir tahun 2012 adalah 152.703, dan akhir tahun 2013 adalah 160.819 jiwa. Sedangkan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam yang selanjutnya diikuti Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Hindu.<sup>9</sup> Adapun organisasi masyarakat yang terdaftar di Dinas Kesatuan Bangsa Palopo adalah 137, organisasi politik berjumlah 12, yayasan berjumlah 42 dan Lembaga Swadaya Masyarakat berjumlah 34.<sup>10</sup>

Selanjutnya Luwu Utara yang dibentuk berdasarkan UU No. 13 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Luwu Utara dengan 12 kecamatan dengan 169 desa dan 4 kelurahan. Dalam beberapa wilayah geografisnya Kecamatan Seko adalah terluas dari kecamatan lainnya yaitu 28,11% dari total wilayah Luwu Utara dan terletak paling jauh. Menyusul Rampi dengan 20,87% dan paling sempit adalah Malangke Barat. Jumlah penduduknya menurut Badan Pusat Statistik dalam tahun 2015 adalah 302.687 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama, maka Islam sebagai pemeluk mayoritas selanjutnya Protestan, Katolik dan Hindu. Rampi dan Seko sebagai kecamatan dengan wilayah mayoritas Kristen serta banyaknya jumlah gereja di daerah tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup>Badan Pusat Statistik, *Palopo Dalam Angka Tahun 2006* (Palopo: BPS Kota Palopo, 2006), h. 67

<sup>9</sup>Badan Pusat Statistik, *Palopo Dalam Angka Tahun 2013* (Palopo: BPS Kota Palopo, 2013), h. 73-84

<sup>10</sup>Badan Pusat Statistik, *Palopo Dalam Angka Tahun 2014* (Palopo: BPS Kota Palopo, 2014), h.

<sup>11</sup>Dokumentasi data dari Kementerian Agama Luwu Utara. tahun 2015.



Situasi di Luwu Utara sempat diwarnai beragam konflik dan bentrokan, sepanjang sejarah Luwu Utara maka konflik di Kec. Bone-Bone yang terbesar karena berimbas pada mengungsinya penduduk ke tempat lebih aman, terbakarnya sejumlah rumah tokoh masyarakat, bangunan, rumah warga, kandang ternak dan lumbung padi. Rentetan kejadian konflik bukanlah hal yang asing, perbatasan Desa Pandak dan Rompu, Dusun Mappadeceng dan Thobulu, Desa Bala dan Salu Lemo, Karangan dan Kopi-kopi diwarnai pertikaian. Konflik tersebut bukan akibat agama melainkan pertikaian antar pemuda akibat berbagai gejala fenomena patologi sosial sehingga pemerintahan masa Arifin Djunaidi seakan tanpa solusi karena pertikaian berulang terjadi.<sup>12</sup>

Adapun Luwu Timur sebagai wilayah pemekaran dari Luwu Utara dengan disahkan UU Nomor 7 Tahun 2003 pada tanggal 25 Februari 2003 dan Malili sebagai ibukota dari Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone. Memiliki luas wilayah 6.944,98 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 11 kecamatan yakni Malili, Angkona, Tomoni, Tomoni Timur, Kalaena, Towuti, Nuha, Wasuponda, Wotu, Burau dan Mangkutana.<sup>13</sup>

Dijadikansebagaiunit penempatan transmigrasi yang berasal dari beberapa daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTB, Bali, Ambon, Poso, maupun Timor Timur. Bentuk masyarakat yang majemuk dan beragam hampir seluruh suku besar dan agama ada didalamnya dan sepiantas penghargaan satu sama lain terlihat dengan suasana kondusif. Persatuandan kebersamaan

---

<sup>12</sup>Isa Ansari, Pejabat di Kel. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, *Wawancara dan Dokumentasi*, Bone-Bone, 11 Desember 2015.

<sup>13</sup>Dokumentasi Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Timur, diakses [luwutimurkab.bps.go.id](http://luwutimurkab.bps.go.id)

senantiasa dipertahankan karena kerukunan umat beragama menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>14</sup>

### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pada prinsipnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris dengan menggunakan multi-disipliner. Dalam operasionalnya digunakan beberapa pendekatan: teologis-normatif, yuridis-normatif, konstitusional, historis, sosiologis, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Berbagai pendekatan yang tersebut dianggap relevan untuk mendapatkan data yang komprehensif. Penerapannya digunakan dengan secara terpadu dan interaktif berdasarkan dimensi yang diteliti.

#### **a. Pendekatan Teologis-Normatif**

Digunakan sebagai langkah untuk mengetahui pemahaman keagamaan narasumber atau informan dan konfigurasi implementasi pemahaman teologisnya. Aspek ini dianggap penting untuk dijadikan pendorong memotivasi kesadaran terhadap kehidupan hidup umat beragama. Adapun pendekatan teologis-dogmatis yaitu pendekatan dengan memahami agama secara harfiah dengan upaya menggunakan kerangka imu ketuhanan tidak banyak digunakan kecuali untuk internal umat beragama saja yang didasarkan pada struktur kandungan Alquran dan hadis.

#### **b. Pendekatan Yuridis-Normatif**

Pendekatan ini menggunakan kaidah-kaidah dalam aspek hukum Islam disertai dengan kajian yang berhubungan dengan berbagai produk perundang-undangan yang dikembangkan berdasarkan konstitusi UUD 1945.

---

<sup>14</sup>Hasanuddin Bengngareng, Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, Desa Puncak Indah Malili, 5 April 2016.

c. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini digunakan sebagai penghubung antara dinamika kehidupan masyarakat yang akan diteliti dengan respon hukum Islam terhadap dinamika tersebut, sehingga tujuan hukum Islam tetap eksis di tengah-tengah kehidupan umat beragama. Berbagai peristiwa yang terjadi dan mengusik kerukunan umat beragama, baik itu internal dan eksternal termasuk didalamnya hubungan umat beragama dengan pemerintah seintensif mungkin dieksplorasi dengan cermat dari adanya potensi konflik, adanya konflik, konflik yang berujung bencana, rekonsiliasi dan kebersamaan dengan harmoni yang ideal. Termasuk didalamnya anggota komunitas dengan mengacu pada norma sosial sebagai patokan perilaku yang dipandang baik dalam umat beragama, dianggap benar atau mungkin dianggap baik tapi ternyata keliru akibat ketidakpahaman mengenai ajaran dogma internal ajaran agama sehingga perlu adanya pelurusan dan meminimalisir adanya pengrusakan atau penodaan terhadap ajaran agama.

d. Pendekatan Historis

Digunakan untuk menganalisis sejarah berbagai komunitas umat beragama yang hidup di wilayah tertentu beserta respon komunitas tersebut dengan mengamati dinamika kerukunan umat beragama dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah*.

e. Pendekatan kesejahteraan

Pendekatan kesejahteraan muncul semenjak tahun 1950-an dan 70-an dan masih populer hingga sekarang. Bertujuan untuk menjawab kebutuhan praktis misalnya dengan penyediaan bantuan makanan, perbaikan taraf kehidupan, perbaikan gizi, promosi keluarga berencana. Pendekatan ini dikategorikan dengan

pendekatan yang sifatnya *top down* atau dari tingkat pemimpin kepada warganya.

f. Pendekatan keamanan

Sebagai kesemestaan daya upaya seluruh masyarakat sebagai satu sistem mengamankan wilayah demi kelangsungan hidup. Angkatan bersenjata dalam hal ini Polri dan TNI menjadi inti dalam penegakan keamanan yang tercermin dalam kondisi daya tangkal yang dilandasi kesadaran bela negara dengan memelihara stabilitas dan menangkal segala bentuk ancaman.<sup>15</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian berhubungan dengan sumber subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian kualitatif maka posisi narasumber sangat penting, bukan hanya sekedar memberi respon melainkan sebagai pemilik informasi.

Cara kerja dari penelitian ini dengan mengutip data kualitatif yang bersumber dari berbagai literatur baik yang sifatnya primer atau sekunder. Informan sebagai sumber data dan aktor yang ikut berkontribusi berhasil tidaknya suatu penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Sedang jenis sumber data dalam penelitian ini diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Narasumber (Informan), yaitu orang yang berkemampuan memberikan informasi mengenai sesuatu yang akan digali sedalam-dalamnya. Adanya kemungkinan informan menyembunyikan informasi penting yang dimiliki maka peneliti semestinya lihai memainkan peran dalam mengeksplorasi data

---

<sup>15</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 133.

dengan cara membangun keakraban, kepercayaan, dan kerjasama dengan konsistensi daya kritis dan analitis. Pengumpulan data dari informan dilakukan dengan wawancara mendalam yang sifatnya menggali sedalam-dalamnya (eksplorasi) informasi dari kalangan informan. Dari beberapa informan yakni adalah ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan NU di semua wilayah yang ada di Tanah Luwu seperti Drs. H. Nurdin di Luwu Utara, Drs. H. Ardias Bara di Luwu Timur, Prof. Dr. H.M Said Mahmud Lc. MA di Palopo, KH. Suardi Ismail di Luwu Timur. Termasuk didalamnya informan dari kalangan pembina muallaf di beberapa wilayah Luwu Raya dan juga dari kalangan muallaf yang memberikan informasi tentang kerukunan beragama sebelum dan setelah adanya transformasi keyakinan atau agama.

- b. Peristiwa atau aktifitas, informasi seperti ini didapatkan dengan pengamatan terhadap aktifitas yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Tempat atau lokasi, data dan informasi yang didapatkan dengan menggali secara langsung dari sumber lokasinya, baik itu tempat atau lingkungannya.
- d. Dokumen, bahan tertulis atau semacam benda yang berkaitan dengan peristiwa atau aktifitas tertentu. Bentuk dokumen tertulis berupa arsip, database, berbagai benda peninggalan, surat-surat yang berhubungan dengan suatu peristiwa.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Imam Suprayogo & Thobroni, *Methodologi Penelitian Sosial Agama* (Cet. XIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 20

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Adapun proses penelitian dilakukan dengan tiga tahapan. Pertama, tahap persiapan. Aktivitas ini dianggap pokok dalam melakukan studi pendahuluan atau penjajakan lapangan terhadap latar penelitian, penelusuran berbagai komunitas yang akan menjadi objek penelitian, literatur dan dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian serta konfirmasi personal dengan calon narasumber. Penelitian ini sudah termasuk didalamnya aktivitas penyusunan rancangan yang berhubungan dengan penetapan permasalahan, kajian kepustakaan, kesesuaian fokus dengan signifikansi penelitian, rancangan teknik, instrumentasi data, dan prosedur analisis data. Tahapan ini pada akhirnya berakhir pada pemenuhan syarat ilmiah, yaitu seminar rancangan penelitian sebagai syarat legal-administratif berupa izin penelitian.

Kedua, terkait dengan operasional. Dalam tahap ini, peneliti “memotret” latar penelitian yang menjadi fokus penelitian dengan adanya kesesuaian perangkat metodologi pengumpulan data. Pengumpulan dan analisis data dalam tahap ini dilakukan dengan cara bersamaan,<sup>17</sup> kemudian dilanjutkan dengan konsultasi dengan promotor dan kopromotor. Langkah ini dilakukan dengan memanfaatkan waktu secara efektif dan proses kerja yang lebih efisien.

Ketiga, penyusunan laporan. Dalam proses penulisan laporan sesekali dilakukan cek ulang terhadap data yang didapatkan di lapangan dan variabel yang dinilai konklusinya belum kokoh, baik data yang bersumber dari kepustakaan maupun data yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara.

---

<sup>17</sup>Penelitian semacam ini adalah proses analisis data yang berlangsung dengan tahap demi tahap dan dilakukan secara bersamaan dalam proses penelitian, biasanya disebut dengan strategi maju bertahap. Lihat, Ali Formen Yudha, h. 114.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Fungsi penelitian adalah mendapatkan kebenaran dan sesungguhnya kebenaran itu memang ada. Hanya saja kebenaran yang dimaksud bukanlah kebenaran secara religius dan metafisis melainkan kebenaran dari segi epistemologis yang artinya kebenaran yang harus dilihat dari epistemologi.

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, *episteme* yang artinya pengetahuan dan *logos* artinya diskursus atau teori. Dalam bahasa Indonesia berarti teori atau diskursus yang mengenai pengetahuan yang berkaitan dengan hakikat, sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan.<sup>18</sup> Pentingnya teori kebenaran karena hal tersebut berkaitan dengan kehidupan kognitif setiap orang. Kehidupan kognitif seseorang merupakan perjuangan yang terus menerus mendapatkan kebenaran. Meskipun pikiranlah yang pada akhirnya merupakan alat untuk mengidentifikasi kebenaran.<sup>19</sup>

Dengan adanya pengumpulan data dalam penelitian ini tentunya diharapkan adanya kebenaran yang sifatnya berhubungan dengan teori dan diskursus yang semestinya. Dalam pengumpulan data, maka teknik yang digunakan adalah:

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang berkenaan dengan pembinaan dan pengembangan kehidupan umat beragama pada wilayah yang dijadikan sebagai lingkup penelitian.
2. Wawancara, dengan melakukan komunikasi dengan menggunakan pola tanya jawab dengan seseorang, baik kepada tokoh masyarakat, pemuka agama, pejabat tertentu yang kiranya diperlukan untuk dimintai keterangan dan pendapatnya mengenai pembahasan dalam penelitian yang

---

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 20

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, h. 21-22

dilakukan.<sup>20</sup> Berbagai pertanyaan difokuskan untuk mengeksplorasi kedalaman informasi, yang dilakukan tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penelitian.<sup>21</sup>

3. Dokumentasi, yaitu dengan melakukan penelusuran data yang berkenaan dengan berbagai hal atau variabel berupa arsip, catatan, buku-buku, surat kabar, surat-surat penting, majalah dan lain sebagainya.<sup>22</sup> Dokumen wujudnya bersifat pribadi, resmi yang terbagi atas internal dan eksternal.

#### ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Setelah data terkumpul maka tindakan selanjutnya dengan upaya pengolahan. Dalam pengolahan data, langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

- a. Editing, dilakukan guna mempelajari atau meneliti kembali berkas-berkas, berbagai catatan atau data yang terkumpul dan jika sudah lengkap maka diproses lebih lanjut.
- b. Kategorisasi, sebagai upaya memilah-memilih setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.<sup>23</sup>
- c. Tabulasi, penyajian data dalam bentuk tabel dengan menggunakan rumus tertentu.

---

<sup>20</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1384.

<sup>21</sup>Sutopo, "Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif", dalam Masykuri Bakri, eds., *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 128.

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bineka Cipta, 1997), 115.

<sup>23</sup>M. Djunaidi & Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: Ruzz Media, 2012), h. 291.



- d. Sedang analisis data yang sudah diolah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan terhadap data yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada dengan didasarkan hukum positif dan hukum Islam.

#### ***G. Pengujian dan Keabsahan Data***

Penekanan pada uji validitas dan reliabilitas. Data yang valid adalah “data yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Sedang reliabilitas berkenaan dengan konsistensi dan stabilitas data atau temuan, maka bila ada peneliti lain mengulangi atau mereplikasi dalam penelitian obyek yang sama dengan metode yang sama maka akan menghasilkan data yang sama. Sedang kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang terbentuk. sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Uji validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif meliputi uji: validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas, dan obyektifitas.

## BAB IV

### DINAMIKA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI TANA LUWU

#### *A. Realitas Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu*

Harmonisasi sosial dan kerukunan umat beragama sudah sepatutnya dijaga sebab semua agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian. Walaupun demikian, sejarah menceritakan bahwa sejak awal masuknya Islam pun, konflik bernuansa agama sudah mengemuka. Bahkan sejarah politik Islam, sejak zaman Khulafā al-Rāsyidīn hingga era global kini selalu saja ada konflik keagamaan dengan eskalasi yang berbeda-beda.

Esensi Islam sebagai sebuah sistem menguntungkan semua pihak termasuk mereka yang bukan muslim di Tana Luwu. Salah satu yang menarik perhatian pada masa awal perkembangan Islam di Tana Luwu ialah kemampuannya menggabungkan sosial politik ke berbagai wilayah di Tana Luwu yang pada waktu itu merupakan kerajaan tertua, terluas dan terbesar di Sulawesi Selatan. Bahkan kerajaan Luwu adalah kerajaan sepuh di antara beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan karena asal usul raja-raja berasal dari Luwu.<sup>1</sup>

Delapan belas tahun pasca pemekaran Tana Luwu, tidak dipungkiri bahwa realitas kerukunan beragama mengalami dinamika dengan perubahan tata hidup dalam masyarakat.<sup>2</sup> Konsep pluralisme agama yang seharusnya memperoleh perhatian secara mendalam adalah hubungan sosial karena relasi internal dan antarumat umat beragama diwarnai dinamika, ketegangan, dan

---

<sup>1</sup>Said Mahmud, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Palopo, Guru Besar IAIN Palopo dan Mantan Ketua STAIN Palopo, *Wawancara*, Palopo, 10 Juni 2016.

<sup>2</sup>Syarifuddin Daud, Ketua Majelis Ulama Indonesia Palopo, Ketua Yayasan Masjid Agung Palopo, Pembina Pesantren Datuk Sulaiman Palopo dan Mantan Ketua STAIN Palopo, *Wawancara*, Palopo, 1 Juni 2016.

bahkan konflik.<sup>3</sup> Wujud keharmonisan yang ditandai dengan kebebasan menjalankan ibadah diiringi dengan peningkatan kewaspadaan dari berbagai hal yang dapat mengusik tatanan hidup kerukunan umat beragama.<sup>4</sup>

Asumsi adanya potensi ancaman bahkan kemungkinan terjadinya konflik fisik dan non-fisik diantisipasi dengan berbagai usaha preventif sehingga tindakan amoral tidak terjadi.<sup>5</sup> Menurut mayoritas ulama, pengrusakan rumah ibadah dan penyebaran agama kepada yang telah meyakini satu agama dianggap sebagai hal yang sangat sensitif, begitu pula penodaan terhadap agama apapun yang menuntut peran pemerintah menjalankan tugas pengamanan sehingga tidak terpengaruh oleh spekulasi yang bernada provokatif.

Kemajemukan Tana Luwu dengan mayoritas Islam disusul Kristen dan Hindu, umat beragama menjalankan ibadah dalam balutan harmoni. Meskipun demikian, dalam catatan sejarah Tana Luwu, konflik sosial bernuansa SARA pernah terjadi pada tahun 1994,<sup>6</sup> dan tidak dipungkiri bahwa pada tenggang tahun 1998 hingga 2002, Luwu Utara tercatat mengalami konflik dengan frekuensi yang cukup tinggi dan berskala cukup besar, mulai dari kerusuhan antar pemuda maupun pertikaian antar desa dengan aroma isu etnis dan agama.<sup>7</sup>

Dari berbagai analisis yang telah dilakukan bahwa konflik di Tana Luwu tidak secara langsung melibatkan sentimen keagamaan. Agama tampaknya

---

<sup>3</sup>Ardias Bara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur dan Guru Yayasan Pendidikan Sorowako, *Wawancara*, Malili, 6 April 2016.

<sup>4</sup>Abdul Pirol, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragam Kota Palopo, Rektor IAIN Palopo dan Tokoh Agama dan Masyarakat, *Wawancara*, Palopo, 20 Desember 2016.

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik, Kabupaten Luwu dalam Angka 2016 – Luwu in Figure 2016, *Dokumentasi*, Palopo, 10 Juni 2016.

<sup>6</sup>Hurriyah Said, Pembina Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Palopo, Dosen Purna Bakti IAIN Palopo, *Wawancara*, Palopo, 16 Desember 2016.

<sup>7</sup>Syarifuddin Daud, Ketua Majelis Ulama Indonesia Palopo, Ketua Yayasan Masjid Agung Palopo, Pembina Pesantren Datuk Sulaiman Palopo dan Mantan Ketua STAIN Palopo, *Wawancara*, Palopo, 1 Juni 2016.

bukanlah merupakan faktor utama yang melahirkan sikap radikal, salah satunya kesenjangan dan kekecewaan terhadap sistem ekonomi yang dianggap gagal memberi kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Eksistensi forum lintas agama beserta ormas keagamaan lainnya patut diapresiasi karena perannya selama beberapa tahun terakhir mampu menjaga hubungan beragama secara komprehensif, baik dengan kerukunan pasif, struktural maupun kultural. Pandangan agama yang berbeda tidak berarti harus berbeda. Gema toleransi dan multikulturalis pada saat ini menjadi tonggak kerukunan umat beragama di Tana Luwu.

Berbagai pihak dengan kompetensinya, memiliki kemampuan memproteksi berbagai potensi ancaman dan berbagai hal yang mencurigakan serta efektifitas jalinan komunikasi antar umat beragama yang terus digalakkan.<sup>8</sup> Aktualisasi empat pilar kebangsaan digalakkan dalam format Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI yang menyatakan bahwa beribadah merupakan hak tiap individu yang dilindungi negara. Nilai-nilai kewaspadaan tetap dijunjung dengan tidak memberikan ruang gerak dan tempat kepada kelompok radikal sebagai bagian dari deteksi dini.<sup>9</sup>

Kemampuan membendung kompleksitas pengaruh paham radikal, eksklusif, sentimen keagamaan, sentimen kedaerahan dan eksistensi komunitas diproteksi dengan semangat kebangsaan. Mempertahankan dan merawat relasi dan kerukunan antar umat beragama didukung dengan jalinan komunikasi yang baik antar semua lembaga, baik horisontal maupun vertikal, ditunjang dengan

---

<sup>8</sup>Said Mahmud, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palopo, Guru Besar IAIN Palopo, Pembina Pesantren Datuk Sulaiman Palopo, *Wawancara*, Palopo, 10 Juni 2016.

<sup>9</sup>Hasanuddin Bengngareng, Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, Malili, 5 April 2016.

kerjasama dan tindakan yang lebih profesional sebagai antisipasi dari berbagai potensi gangguan kantibmas di tengah masyarakat.<sup>10</sup>

Kondisi dan situasi yang kondusif harus senantiasa terpelihara. Menjaga keharmonisan adalah salah satu prioritas demi menangkai berbagai kemungkinan yang dapat merusak sendi-sendi kerukunan. Melalui penyelenggaraan kegiatan seminar, kemah bakti dan penanaman pohon dapat mewarnai eksistensi kerukunan umat beragama meskipun dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana namun dapat mempererat dan menangkai berbagai persepsi negatif tentang kerukunan. Hal demikianlah yang dapat menjadi salah satu unsur kepatutan eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai forum perekat dan pemersatu umat beragama.<sup>11</sup>

Dianalisis dari *ḥifẓ al-dīn* dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu memelihara agama. Ditafsirkan secara bebas sebagai konsep kebebasan dalam beribadah dimana keberadaan agama berjasa memberikan panduan nilai bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Tana Luwu dengan mayoritas Islam diajarkan pentingnya menjaga kerukunan dalam berbagai forum dan jika tidak dilakukan antisipasi maka akan menjadi target kalangan oknum yang merusak keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuannya tidak lain adalah memecah kesatuan Islam, persatuan dan ketahanan bangsa dan lambat laun akan menghambat pembangunan.<sup>12</sup>

Pemekaran Tana Luwu menjadi Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur memiliki struktur masyarakat yang majemuk. Hal tersebut memberikan warna positif pada sistem nilai budaya bangsa apabila terwujud dalam bentuk

---

<sup>10</sup>Lihat, Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 dan 29

<sup>11</sup>Ardias Bara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur dan Guru Yayasan Pendidikan Sorowako, *Wawancara*, Malili, 6 April 2016.

<sup>12</sup>Hasanuddin Bengngareng, Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, Malili, 5 April 2016.

interaksi yang saling melengkapi, di sisi lain menjadi sumber konflik jika tidak dipahami dengan baik. Penyelenggaraan berbagai kegiatan positif yang disponsori pemerintah setempat dinilai tepat dalam membina mental spiritual, menanamkan semangat kerukunan sekaligus sebagai upaya menumbuhkan-kembangkan kualitas hidup.<sup>13</sup>

Tana Luwu mempresentasikan wilayah dengan keragaman etnis, suku dan agama yang disertai kehidupan sosial dan budaya yang dinamis. Eksistensi Islam sudah lama berkembang jauh sebelum pemekaran Tana Luwu yang kini meliputi Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Adapun sebelum adanya Islam maka keadaan masyarakat kala itu menganut animisme.<sup>14</sup>

Setelah sepuluh abad lebih berdiri, kerajaan Luwu menerima agama Islam sekitar abad ke-15 atau tahun 1593. Sebagai kerajaan pertama yang menerima Islam di Sulawesi Selatan yang dibawa oleh Datuk Sulaiman, Datuk Ri'bandang, dan Datuk Ri'Tiro yang tiba di Pabaresseng (Lapandoso), Bua, dengan peristiwa mistik hingga berlanjut dengan pengislaman Maddika Bua Tandipau sebagai pemimpin wilayah kala itu beserta dengan tokoh adat lainnya.<sup>15</sup>

Dalam lontarak Luwu dan Wajo, tiga datuk yang tiba di Sulawesi Selatan terlebih dahulu mengislamkan Kerajaan Luwu. Datuk Sulaiman atau dikenal Datuk Patimang merupakan nama salah satu desa di Luwu yang mayoritas didiami etnis Bugis Luwu dianggap berperan menyiarkan Islam di Tana Luwu. Proses pengislaman memiliki karakteristik tersendiri dengan dialog panjang dari

---

<sup>13</sup>Suardi Ismail, Ketua Komisi Fatwa MUI Luwu Timur, Anggota FKUB Lutim dan Anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, Malili, 7 April 2016.

<sup>14</sup>Said Mahmud, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palopo, Guru Besar IAIN Palopo, Pembina Pesantren Datuk Sulaiman Palopo, *Wawancara*, Palopo, 10 Juni 2016.

<sup>15</sup>Syaifuddin Kaddiraja, Maddika Bua, Tokoh Adat dan Mantan Calon Walikota Palopo, *Wawancara*, Palopo, 12 Juni 2016. Lihat pula, Anton Andi Pangerang, Andi Djemma - Tahta Bagi Republik (Jakarta: Yayasan Binausaha dan Profesi BENUA, 2002), h. 10

ketiga datuk pembawa risalah kenabian yang berakhir dengan pemahaman baik mengenai ajaran Islam sehingga Datu Luwu sebagai penguasa kerajaan mengucapkan kalimat syahadat pada 15 Ramadhan 1013 Hijriah atau 4 Februari 1603 Masehi (dua tahun sebelum Kerajaan Gowa diislamkan).<sup>16</sup>

Penyebaran Islam ditempuh dengan jalan damai dan tercermin saat berada di suatu kampung yang mayoritas penduduknya yang gemar minuman keras. Datuk Sulaiman tidak secara langsung melarang namun memberikan pemahaman tentang bahaya minuman tersebut, dengan bahasa yang lembut meminta kepada warga secara bertahap mengikhtiarkan perubahan. Melalui penghayatan secara akal yang membuktikan suatu saat keislaman akan membangkitkan daya perubahan dalam tubuh penganutnya.

Penyebaran Islam yang selanjutnya melalui konversi massal tidak lepas dari berkat usaha guru spiritual tersebut yang mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun cara lain yang ditempuh untuk menerapkan ajaran Islam dengan media penyampaian dari rumah ke rumah penduduk atau tempat lain yang telah ditentukan. Setiap wilayah dibentuk kelompok pengajian dengan cara lisan karena misi dakwah yang diusung Datuk Sulaiman sebagai upaya merebut hati penduduk yang masih kuat pada kepercayaan lama, bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa adalah Dewa ta SewwaE.<sup>17</sup>

Prinsip tidak diperkenankannya paksaan dalam menyebarkan keyakinan dan merangkul masyarakat setempat dengan pendekatan persuasif cukup membuktikan bahwa platform kebersamaan semakin mendapat dukungan. Status penyebar agama Islam sebagai pendatang membuahkan hasil karena

---

<sup>16</sup>Ansar, Pensiunan Staff Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) Makassar, *Dokumentasi & Wawancara*, Makassar, 6 Mei 2016.

<sup>17</sup>Syarifuddin Daud, Ketua Majelis Ulama Indonesia Palopo, Ketua Yayasan Masjid Agung Palopo dan Pembina Pesantren Datuk Sulaiman Palopo, *Wawancara*, Palopo, 1 Juni 2016.

menawarkan sistem alternatif yang tercermin dalam berbagai konsep kehidupan yang semula tidak pernah dikenal di Tana Luwu dan gilirannya memberikan warna yang cukup khas sebagai Islam yang akomodatif dan inklusif.

Prinsip toleransi beragama, kebebasan beribadah, penghargaan terhadap warisan budaya komunitas lain, penghargaan kepada hak-hak sah pribadi-pribadi, sikap yang lebih positif terhadap ilmu pengetahuan dan cara hidup yang lebih bersih dari takhayul dan seterusnya semakin menggambarkan watak Islam inklusif. Kebersamaan sampai sekarang masih bisa disaksikan secara nyata sebagai kelanjutan pluralisme yang harmonis.<sup>18</sup>

Bukti mengenai Islam sudah cukup lama adalah kokohnya masjid tua sebagai masjid peninggalan Kerajaan Luwu dan hingga kini masih ada dan berfungsi. Masjid tersebut didirikan oleh Dato Payung Luwu XVI tahun 1604. Memiliki luas 15 m<sup>2</sup> dan disebut Tua karena usianya yang sudah tua. Kata Palopo berasal dari bahasa Bugis dan Luwu yang memiliki dua arti, yaitu: penganan yang terbuat dari campuran nasi ketan dan air gula; dan memasukkan pasak dalam lubang tiang bangunan yang maknanya memiliki relasi dalam proses pembangunannya.<sup>19</sup>

Islam dianut pada awal abad XVII, mendahului kerajaan Bugis lainnya dan Makassar di pesisir selatan, dan setelah kepindahannya dari ibukota pra-Islam di Pattimang, Malangke terutama terkonsentrasi di Palopo, menjadi salah satu grup etnik dengan identitas Islam yang kuat setelah Aceh, Melayu di

---

<sup>18</sup>Said Mahmud, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palopo, Guru Besar IAIN Palopo, Pembina Pesantren Datuk Sulaiman Palopo, *Wawancara*, Palopo, 10 Juni 2016.

<sup>19</sup>Muin Razmal, Pengurus Masjid Alauddin Palopo, Dosen Purna Bakti IAIN Palopo, Peneliti Konflik Sosial antara Masyarakat Rongkong Baeunta Luwu Utara, *Wawancara dan Dokumentasi*, Palopo, 1 Oktober 2016.



Sumatera dan Semenanjung, orang Sunda di Jawa Barat dan orang Banjar di Kalimantan Selatan.<sup>20</sup>

Keberadaan Islam di Palopo menjadi bagian integral dan esensial dari kebudayaan dan pandangan hidup orang Bugis. Namun pada saat yang sama, warisan lama tetap terpelihara dengan baik. Sedang masuknya Kristiani diiringi semangat kolonialisasi Belanda sejak awal abad XIX dengan berdirinya bangunan gereja, sekolah, rumah sakit yang bergaya Eropa semakin memperkaya kebudayaan Luwu dan entitas Palopo.<sup>21</sup>

Pada masa pemerintahan Indonesia, kerajaan Luwu berintegrasi dengan NKRI yang menandai berakhirnya kekuasaan politik Kedatuan Luwu dan hanya dijadikan simbol budaya. Total luas Luwu sebelum pemekaran adalah 17.695,23 km<sup>2</sup> dengan 21 Kecamatan Definitif, 13 Kecamatan Perwakilan.<sup>22</sup> Selanjutnya tahun 1999, mekanisme pemerintahan mengarah ke otonomi dengan terbentuknya Luwu dan Luwu Utara tahun 1999, Palopo beralih sebagai kota otonom tahun 2002, berikut menyusul Luwu Timur yang dimekarkan dari Luwu Utara pada tahun 2003.<sup>23</sup>

Sejak tahun 1986, Palopo sebagai ibukota Luwu dan berstatus kota administratif. Selanjutnya menjadi kota tahun 2002 sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 yang menjadi daerah otonom dan terpisah dari

---

<sup>20</sup>Akil AS, Pustakawan Badan Arsip Daerah dan Penulis Luwu Dimensi Sejarah, Budaya dan Kepercayaan, *Dokumentasi*, Palopo, 12 Oktober 2016.

<sup>21</sup>M. Irfan Mahmud, Penulis “Kota Kuno Palopo, Dimensi Fisik, Sosial dan Kosmologi”, *Dokumentasi dan Arsip Daerah*, Palopo, 12 Oktober 2016.

<sup>22</sup>Lihat, Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel Nomor : SK.164/IV/1994 tanggal 4 April 1994 tentang luas wilayah provinsi, kabupaten/ kotamadya dan kecamatan di daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

<sup>23</sup>Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Luwu dalam Angka 2016 – Luwu in Figure 2016*, (Luwu: BPS Luwu Regency, 2016), h. 3

induknya. Berdasarkan Perda Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2005 dilaksanakan pemekaran wilayah menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan.<sup>24</sup>

Perkembangan dinamika terjadi dalam segala bidang dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Bahkan dalam bidang ekonomi di Palopo tahun 2013 mencapai 8,8 % merupakan pertumbuhan cukup tinggi dan tetap menjadi harapan dari warganya atas kesejahteraan yang lebih baik. Pemekaran Luwu Utara dan Palopo terwujud pada masa Kamrul Kasim yang menjabat Bupati Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2003.

Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari Palopo ke Belopa, pada tahun 2006 seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi ibu kota sejak 13 Februari 2006. Periode 2004-2009 Luwu dipimpin oleh Bupati Basmin Mattayang kemudian dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan terpilihnya Andi Mudzakkar sebagai bupati terpilih periode 2009-2014 dan sekarang masuk periode kedua.<sup>25</sup>

Luwu Utara dibentuk 20 April 1999 dengan ketetapan UU RI No. 13 Tahun 1999 dengan batas Saluampak Kec. Sabbang sampai dengan batas propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 19 kecamatan termasuk Burau, Tomoni, Mangkutana, Malili dan Nuha yang berdekatan dengan daerah perbatasan. Pada tahun 2003, di usia keempat Luwu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Luwu Timur yang disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2003 dengan luas wilayah 6.944,98 km<sup>2</sup> dengan berbagai kecamatan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Badan Pusat Statistik, Palopo dalam Angka, Tahun 2014.

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik, Luwu dalam Angka, Tahun 2000.

<sup>26</sup> Badan Pusat Statistik, Luwu Utara dalam Angka, Tahun 2004.

Tana Luwu sebelum dimekarkan dalam berbagai daerah otonom dikenal sebagai daerah terluas di Sulawesi Selatan. Bahkan Kerajaan Luwu jauh sebelum adanya NKRI adalah kerajaan tertua, terbesar dan terluas di Sulawesi Selatan yang meliputi Tana Luwu, Tana Toraja, Kolaka dan Poso. Walaupun sering dikategorikan sebagai suku Bugis tetapi orang-orang Luwu sendiri menyatakan bahwa mereka bukan Bugis tetapi suku Luwu dengan suku bangsa yang besar dan terdiri dari 12 anak suku.<sup>27</sup>

Adapun 12 anak suku tersebut adalah To Ware, To Raya, To Rongkong, To Seko, To Rampi, To Sassa, To Wotu, To Pamona, To Bela, To Mengkoka, To Bajo, To Luwu dengan bahasa dan dialek yang berbeda.<sup>28</sup> Keberadaan Palopo di Sulawesi Selatan sebelumnya adalah ibukota Luwu namun Kab. Luwu sekarang ini sudah dimekarkan dengan Belopa<sup>29</sup> sebagai ibukota dan Palopo menjadi wilayah tersendiri sebagai kota administratif. Sedangkan Masamba yang dulunya sebagai kecamatan kini menjadi ibukota dari Luwu Utara dan Malili sebagai ibukota Luwu Timur.<sup>30</sup>

Mayoritas penduduk di Tana Luwu beragama Islam yang selanjutnya diikuti dengan Protestan, Katolik, Hindu dan agama lainnya. Adapun pemeluk Islam pada umumnya dari penduduk suku Luwu, sedangkan Kristen umumnya dianut dari suku Tana Toraja, suku Kalekaju, Rampi, Pamona, Padoe, Karunsi'e baik sebagai transmigran maupun yang sudah lama menetap di wilayah Luwu.

---

<sup>27</sup>Syarifuddin Daud, Ketua Majelis Ulama Indonesia Palopo, Ketua Yayasan Masjid Agung Palopo dan Pembina Pesantren Datuk Sulaiman Palopo, *Wawancara*, Palopo, 1 Juni 2016.

<sup>28</sup>Syaifuddin Kaddiraja, Maddika Bua, Tokoh Adat dan Mantan Calon Walikota Palopo, *Wawancara*, Palopo, 12 Juni 2016.

<sup>29</sup>Badan Pusat Statistik, Luwu dalam Angka, Tahun 2000.

<sup>30</sup>Badan Pusat Statistik, Luwu dalam Angka, Tahun 2000.

Adapun yang beragama Hindu pada umumnya dianut dari suku Bali sebagai komunitas yang bertransmigrasi semenjak pemerintahan Orde Baru.<sup>31</sup>

Realitas kerukunan di Tana Luwu selanjutnya dibahas dalam ruang lingkup tersendiri dengan menganalisa berbagai indikator yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan baik potensi konflik yang sifatnya fisik atau non-fisik, realistis atau tidak realistis, aspek kesetaraan, kerjasama, dan toleransi yang berkaitan trilogi kerukunan: pemeluk internal umat beragama, antar umat beragama serta hubungan umat beragama dengan pemerintah.

Realitas kerukunan dan relasi lintas umat beragama dibahas dengan penekanan pasca pemekaran dan sekilas disinggung sebelum pemekaran. Sebelum dimekarkan memiliki luas wilayah 17.695,23 km<sup>2</sup> dengan 21 Kecamatan Definitif, 13 Kecamatan Perwakilan. Terjadinya pemekaran sebagai dampak bergulirnya reformasi dan terobosan yang mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.

Pemekaran dilakukan untuk meningkatkan upaya pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga efektifitas penyelenggaraan dan pengelolaan pembangunan terwujud. Pada umumnya pemekaran tentu juga penghapusan dan penggabungan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, keamanan, dan keterlibatan pemerintah. Upaya percepatan pertumbuhan kehidupan masyarakat, akselerasi pelaksanaan pembangunan ekonomi, ekselerasi pengelolaan potensi daerah, dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

---

<sup>31</sup>Suardi Ismail, Ketua Komisi Fatwa MUI Luwu Timur, Anggota FKUB Luwu Timur dan Anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Luwu Timur, Wawancara, Malili, 7 April 2016.

## 1. Realitas Kerukunan Umat Beragama di Kab. Luwu

Tepat 1 Maret 1960 dikeluarkan PP Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pembentukan Propinsi Administratif Sulawesi Selatan dengan 23 Daerah Tingkat II, salah satunya Luwu terbagi dalam 16 distrik berdasarkan SK Gubernur Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 1100/1961 sebagai berikut: Wara, Larompong, Suli, Bajo, Bupon, Bastem, Walenrang (Batusitanduk), Limbong, Sabbang, Malangke, Masamba, Bone-Bone, Wotu, Mangkutana, Malili, Nuha.<sup>32</sup>

Sebelum dimekarkan, Palopo merupakan pusat pemerintahan Luwu. Namun seiring pemekaran Tana Luwu maka terjadi reformasi ke arah otonomisasi yang dilandasi UU No. 22 Tahun 1999. Pusat pemerintahan Luwu dipindahkan ke Belopa tahun 2006 diperkuat dengan ketetapan Peraturan Pemerintah RI No. 80 Tahun 2005 dan resmi sebagai ibukota sejak 13 Februari 2006, yang terdiri dari 22 kecamatan dan 227 desa/kelurahan.<sup>33</sup>

Islam dianut mayoritas penduduk Kab. Luwu yang dibuktikan dengan data 752 masjid, 80 musala yang tersebar di 22 kecamatan. Sementara penganut Kristiani dan Katolik menempati posisi berikutnya dengan 195 gereja di Kab. Luwu. Lamasi Timur, dan Bastem Utara merupakan lokasi dengan penganut Kristiani terbanyak. Adapun Bastem memiliki fasilitas rumah ibadah sebanyak 20 gereja dan masjid berjumlah 9 unit dalam statistik 2015.<sup>34</sup>

Berikut data penduduk Luwu tahun 2015 berdasarkan agama di Kab. Luwu:

---

<sup>32</sup>Surat Keputusan Gubernur KDH Tk.I Sul-Sel Nomor : SK.164/IV/1994 tanggal [4 April 1994](#) tentang luas wilayah provinsi, kabupaten/ kotamadya dan kecamatan di daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

<sup>33</sup>Badan Pusat Statistik, Kabupaten Luwu dalam Angka 2016 Luwu in Figure 2016, *Dokumentasi*, Belopa, 15 Mei 2016.

<sup>34</sup>Badan Pusat Statistik, Kabupaten Luwu dalam Angka 2016 Luwu in Figure 2016, *Dokumentasi*, h. 150.

No.	Kecamatan	Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha
1	Larompong	22656	0	11	0	0
2	Larompong Selatan	17513	9	205	1	0
3	Suli	20774	72	121	0	0
4	Suli Barat	9908	0	1	0	0
5	Belopa	16775	11	47	0	0
6	Belopa Barat	16410	21	74	0	0
7	Bajo	15615	55	113	0	0
8	Bajo Barat	9595	0	108	1	0
9	Latimojong	5557	28	515	0	0
10	Bastem	7734	0	187	0	0
11	Kamanre	11816	17	103	0	0
12	Ponrang	22269	2.065	3870	0	0
13	Bupon	14526	0	393	0	0
14	Bua	29517	193	1445	9	0
15	Walenrang	14861	414	5023	0	0
16	Walenrang Barat	3641	726	5702	0	0
17	Walenrang Utara	19124	263	1023	0	0
18	Walenrang Timur	11220	249	6542	0	0
19	Lamasi	16578	459	4889	0	0
20	Lamasi Timur	5803	301	7300	0	0
21	Ponrang Selatan	21447	0	2255	0	0
22	Bastem Utara	5319	0	7046	0	0

Kemajemukan Luwu dengan berbagai suku, budaya, agama, dan golongan sangat rawan akan gesekan-gesekan sosial, yang apabila tidak dikelola dengan

baik akan mudah menjadi kobaran api dan mempengaruhi integrasi nasional. Beragam hal dapat menjadi pemicunya seperti persoalan klasik, perkelahian massal dan kecemburuan sosial. Berikut realitas kehidupan umat beragama di Kab. Luwu:

a. Konflik Padang Sappa

Dalam perjalanan sejarah Luwu, salah satu wilayah yang pernah dilanda konflik sosial yaitu Padang Sappa yang terjadi sejak 1994 dan 2002 (masa pemerintahan Kamrul Kasim). Konflik lainnya terjadi seperti dikelurahan Sabbangparu, Wara Utara, Cimpu di Suli, Battang di Telluwanua dan Belopa pada tahun 2002. Kerusuhan yang terjadi terkait dengan kasus-kasus konflik yang terjadi sebelumnya dan selanjutnya diperparah oleh kasus sengketa tanah yang menimbulkan korban jiwa.<sup>35</sup>

Padang Sappa kini berkembang menjadi beberapa desa. Desa Padang Sappa sendiri berdiri sejak tahun 1970 (sebelum pemekaran Tana Luwu) lalu mengalami pemekaran pada tahun 1984, sehingga Padang Kamburi, Buntu Batu, dan Buntu Karya menjadi satu dengan nama desa Buntu Karya. Tahun 1991/1992 Padang Sappa dimekarkan lagi yang membentuk wilayah Padang Subur menjadi desa dan tahun 2003 berubah menjadi kelurahan dan kemudian menjadi desa Padang Sappa yang sekarang.<sup>36</sup>

Wilayah Padang Sappa dapat dikatakan multi etnis. Masyarakat didalamnya membentuk semacam klasifikasi “penduduk asli” dan “pendatang”. Sekitar tahun 1950-an etnis Toraja masuk sebagai pendatang di Padang Sappa. Hal tersebut berlangsung hingga tahun 1970-an. pada saat itu banyak penduduk

---

<sup>35</sup>Abdul Pirol, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragam Kota Palopo, Rektor IAIN Palopo dan Tokoh Agama dan Masyarakat, *Wawancara*, Palopo, 20 Desember 2016.

<sup>36</sup>Buttu Emba, Tokoh Masyarakat dan Kepala Desa Tumale di Larompong Selatan, *Wawancara*, Larompong Selatan, 10 Februari 2016.

asli memiliki lahan sawah atau kebun yang luas. Relasi sosial terjalin dengan baik antara penduduk asli dan pendatang sebab ikatan rasa saling membutuhkan. penduduk asli membutuhkan etnik Toraja untuk mengolah lahan pertanian dan perkebunan dan penduduk pendatang membutuhkan penduduk asli karena dorongan masalah ekonomi.

Penduduk asli sebagai pemilik lahan berangsur-angsur menjual tanah mereka kepada para pendatang. Semakin luasnya kepemilikan lahan diikuti dengan semakin banyaknya berdatangan etnik Toraja yang secara otomatis membawa budaya mereka masuk ke wilayah Padang Sappa. Budaya yang dibawa masuk selanjutnya diadaptasi dalam kehidupan keseharian, seperti beternak dan mengkonsumsi babi dalam melaksanakan upacara keagamaan mereka, berjudi, sabung ayam, dan kebiasaan “minum ballo” (minuman keras) sebagai pelengkap dalam upacara adat atau saat sesama suku Toraja berkumpul.

Budaya minum ballo akhirnya menjadi identitas tersendiri dalam komunitas Kristen. Selanjutnya diperparah dengan kebiasaan para pemudanya memalak orang dan kendaraan yang lewat, rawan pencurian, perkelahian sehingga membawa dampak yang luas dalam kehidupan sosial. Sementara komunitas masyarakat Islam terusik, resah, dan terganggu dengan keadaan tersebut yang memicu konflik budaya dan berpengaruh dalam kehidupan sosial yang selanjutnya berujung pada benturan fisik.

Dalam laporan penelitian Hurriyah Said,<sup>37</sup> yang berjudul “Kerusuhan di Padang Sappa: Penyebab dan akibat serta penanggulannya” mengemukakan bahwa akar permasalahan di Padang Sappa disebabkan adanya kecemburuan sosial yang mengarah pada terjadinya deviasi sosial di antara penduduk asli dan pendatang. Lebih jauh deviasi sosial tersebut berkembang menjadi kecurigaan

---

<sup>37</sup>Hurriyah Said, Pembina Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Palopo, Dosen Purna Bakti IAIN Palopo, *Wawancara*, Palopo, 16 Desember 2016.



antara penduduk asli dan pendatang. Diawali persoalan kemiskinan dan pengangguran, kesenjangan pendapatan antara penduduk keduanya.

Tingkat kesejahteraan pendatang lebih menonjol dibanding penduduk asli. Perbedaan status ekonomi tersebut dipertajam dengan sikap-sikap warga pendatang yang mempertontonkan harta benda secara berlebihan sehingga mengundang rasa cemburu. Keadaan ini diperparah dengan perkelahian pemuda dan maraknya patologi sosial saat itu.<sup>38</sup>

Konflik pernah pula terjadi pada 1 Agustus 2001 yang disebabkan oleh kebiasaan buruk para pemuda setempat yang seringkali mengganggu kegiatan kalangan pedagang di pasar Sappa. Andi Syair Massiwa (tokoh masyarakat) akhirnya menjadi korban karena usahanya menghentikan aksi sekelompok anak muda yang mabuk malah dibalas dengan pengeroyokan hingga korban tewas. Kejadian tersebut menyulut kemarahan massa hingga terjadi pertikaian dan kerusuhan horisontal yang mengakibatkan sedikitnya 9 orang tewas dan 73 rumah warga mengalami kerusakan.<sup>39</sup>

Setidaknya terdapat faktor-faktor yang mengakselerasi terjadinya konflik dan kerusuhan social, diantaranya adalah ketidakpastian penegakan hukum, ketidakmampuan menuntaskan perdagangan miras, dan buruknya pelayanan atas kasus-kasus kriminal yang menjadi kontributor memicu konflik. Faktor lainnya seperti ketidaksiapan aparat berkaitan dengan dana pemeliharaan keamanan dan ketertiban, rapuhnya hubungan SARA dengan kecenderungan hidup berkelompok atas dasar etnis, ras dan golongan diiringi dengan tersumbatnya komunikasi yang lebih memprioritaskan solidaritas etnik. Demikian pula kesenjangan sosial dan

---

<sup>38</sup>Abdul Pirol, Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragam Kota Palopo, Rektor IAIN Palopo dan Tokoh Agama dan Masyarakat, *Wawancara*, Palopo, 20 Desember 2016.

<sup>39</sup>Hurriyah Said, Pembina Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Palopo, Dosen Purna Bakti IAIN Palopo, *Wawancara*, Palopo, 16 Desember 2016.

ekonomi yang menunjukkan rivalitas sehingga ada kelompok yang merasa terpinggirkan.

b. Perpindahan Agama dan Pernikahan

Lamasi adalah sebuah kecamatan di Kab. Luwu yang merupakan wilayah *enklave*. Letak kota Palopo menjadi pemisah antara Kecamatan Walmas (Walenrang Lamasi) dengan Belopa sebagai ibukota Kab. Luwu. Kecamatan Lamasi terdiri dari beberapa desa diantaranya Salu Jambu, Setiarejo, Kondo, Wiwitan, Bosso, Mamara, Salutubu, Salulino, Siteba dan Lamasi Timur terdiri dari Seriti, Pelalan, To'lemo dan Salupao. Masyarakat Lamasi adalah masyarakat heterogen. Suku imigran yang telah lama mendiami tempat ini seperti suku Bugis, Toraja dan Jawa. Suku Luwu sebagai suku pribumi bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun.

Menelusuri Kec. Lamasi Timur khususnya desa Seriti dan Pelalan, kedua desa ini berjarak tidak jauh satu sama lain. Meskipun dua desa yang berbeda, namun corak kehidupan masyarakatnya hampir sama. Penduduk aslinya masih terikat hubungan kekerabatan satu sama lain. Mayoritas penduduknya beragama Kristen yang dibawa masuk oleh pendatang Toraja. Kedua desa ini dipimpin oleh kepala desa yang beragama Kristen. Segala aspek yang sarat dengan aroma Islam sulit mengalami perkembangan di desa ini. Kegiatan-kegiatan sosial keislaman jarang diadakan, akibatnya kehidupan keislaman masyarakatnya bersifat stagnan.

Keadaan masyarakat desa yang majemuk menjadikan pergaulan antar masyarakatnya semakin luas yang selanjutnya berakibat pada pergeseran nilai yang lebih dinamis dan kompleks. Contohnya pemeluk Islam di desa Seriti lebih berani untuk memilih pendamping hidup non muslim dan diwujudkan dalam pernikahan.

Bentuk pernikahan tersebut terbagi dalam dua kasus keadaan antara lain:

Kasus I: pernikahan laki-laki non muslim – wanita muslim.

Kasus II: pernikahan laki-laki muslim – wanita non muslim.

Cara umum yang mereka tempuh adalah salah satu dari calon pengantin baik laki-laki atau perempuannya mengalah mengikuti agama pasangannya. Misalnya calon pengantin wanita non Islam berpindah agama memeluk Islam, atau calon pengantin pria non Islam berpindah ke agama Islam, dan setelah menikah dan mendapatkan surat nikah dari KUA, mereka akan kembali pada agama yang semula. Pernikahan seperti ini lumrah terjadi bahkan dianggap sebagai salah satu langkah politis yang umum dilakukan untuk dapat mempengaruhi penganut Islam maupun agama tertentu agar lepas dari keyakinan dan agamanya, mulai cara-cara halus, bujuk rayu, tekanan ekonomi dan intimidasi.

Realitas kehidupan masyarakat yang menjalani pernikahan beda agama sarat dengan upaya misi yang bermuara pada pemurtadan. Begitu juga cara-cara yang dikemas dengan jargon agama tertentu yang tampak jelas melalui bantuan pihak keluarga besar pasangan beda agama yang mapan secara ekonomi yang terus memberikan bantuan sandang, pangan dan iming-iming kesejahteraan. Bantuan yang sepatutnya dihargai dengan ucapan terima kasih, justru mengandung maksud terselubung dibaliknya. Penyaluran bantuan terindikasi adanya upaya-upaya yang mengarah pada pendangkalan akidah bagi pihak Islam yang kurang mampu secara ekonomi.<sup>40</sup>

#### c. Peliharaan Hewan Babi-Anjing dan Relasi Sosial

Kehidupan mayoritas penganut Kristen umumnya sangat familiar dengan hewan anjing dan babi. Pada satu rumah biasanya memiliki 2–3 atau lebih hewan peliharaan anjing. Bagi mereka, fungsi keberadaan anjing bukan sebatas untuk

---

<sup>40</sup>Yarit Hamidi, Anggota Pengurus LDII, Tokoh Masyarakat dan Guru Pengawas Sekolah di Lamasi Timur, *Wawancara*, Pelalan-Lamasi Timur, 10 Mei 2016.

keamanan namun lebih daripada itu dapat menunjukkan kelas kasta seseorang, bahkan lebih pada dorongan kebiasaan mereka menyantap daging babi dan anjing.

Seperti di salah satu desa di Kec. Lamasi, yakni Salutubu yang hanya terdiri dari 3 Kepala Keluarga yang beragama Islam dan lainnya beragama Kristen. Gonggongan dan banyaknya anjing yang berkeliaran di desa tersebut merupakan pemandangan yang tidak aneh sebab hampir semua masyarakat etnik Toraja yang bermukim di desa ini memelihara anjing. Anjing-anjing tersebut tidak divaksin dan dilepas begitu saja bahkan seringkali masuk dalam rumah warga muslim atau buang kotoran di area sekitar rumah masyarakat muslim. Lingkungan tempat tinggal mereka bisa saja menjadi daerah endemis penyakit anjing gila (rabies). Nuraeni (47), salah seorang masyarakat muslim menceritakan bahwa salah seorang muslimah meninggal akibat gigitan anjing yang sebelumnya menderita rabies dalam waktu lama. Kasus gigitan anjing terhadap warga muslim di desa ini dalam rentan waktu 5 tahun belakangan.<sup>41</sup>

Begitu pula pada perayaan hari besar keagamaan warga non-Islam, ataupun perayaan lainnya, kebiasaan saling mengundang tetap berjalan harmonis antar umat beragama. Masyarakat yang berbeda agamapun turut membantu, seperti pada rambu solo' (tradisi kematian) dan rambu tuka' (hajatan pernikahan, kelahiran) masyarakat Kristen, warga muslim akan menghadiri perayaan tersebut, namun warga muslim biasanya hanya menyantap makanan dan minuman produksi pabrik (makanan kemasan) misalnya buah-buahan, permen, teh dan air putih kemasan yang dihidangkan pemilik hajatan. Sedangkan hidangan-hidangan berat seperti kue basah, masakan olahan daging biasanya pemilik hajatan membungkus makanan tersebut untuk dibawa pulang ke rumah

---

<sup>41</sup>Yarit Hamidi, Anggota Pengurus LDII, Tokoh Masyarakat dan Guru Pengawas Sekolah di Lamasi Timur, *Wawancara*, Pelalan-Lamasi Timur, 10 Mei 2016.

masing-masing dengan alasan akan disantap bersama di rumah walaupun pada akhirnya makanan tersebut dibuang atau dijadikan makanan hewan ternak, sebab ada kekhawatiran makanan olahan tangan tersebut mengandung unsur haram.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Fungsi agama belum sepenuhnya ideal sebagai faktor pemersatu yang mendorong kebersamaan yang menjadi basis produktivitas masyarakat dan belum signifikan akibat potensi konflik komunal yang sewaktu-waktu terjadi. Hal tersebut diakibatkan norma global dan penetrasi nilai sehingga identitas masyarakat Luwu kurang eksis. Sedangkan tantangannya perlu komitmen keberpihakan mitra pemerintah memelihara soliditas kerukunan beragama bagi tokoh lintas agama yang menjadikannya fungsional mendorong persatuan dan kesatuan. Konsep kerukunan beragama dalam tataran *top down* cukup baik namun dalam tataran *bottom up* potensi konflik sulit untuk diantisipasi secara maksimal karena kerjasama dan kesetaraan sebagai indikatornya belum sepenuhnya ideal. Soliditas tokoh lintas agama akan memberikan kontribusi terwujudnya harmoni dalam umat beragama bukan hanya terkait dengan keagamaan tapi juga masalah sosial, budaya bahkan politik.”<sup>42</sup>

Penyelenggaraan temu remaja dan pemuda hampir tiap tahun diadakan guna mempererat silaturahmi dengan menginisiasi ajaran Islam melalui kegiatan-kegiatan positif dan ajakan dalam meningkatkan kualitas ibadah. penekanan kesadaran para pemuda dalam memahami arti pentingnya kesalehan individual (ritual) dan kesalehan sosial. Kesalehan individual lebih menekankan arti ibadah ritual, kewajiban hamba pada Tuhan yang bisa diukur secara formal. Berbeda dengan kesalehan sosial dan kolektif yang merujuk pada perilaku dan kepedulian nilai-nilai islami yang bersifat sosial sehingga nilai dari kesalehan sosial penuh dengan muatan multi fungsi dari *tazhīb*, *ta’dīb* dan *tadrīb* yang bisa diterapkan dalam kerukunan umat beragama.

Dilihat dari relasi sosial, eksistensi forum kerukunan antar pemuda dari segi *hājiyyāt* diperlukan untuk meminimalisir konflik antar pemuda melalui

---

<sup>42</sup>Rusdi Hasyim, Sekretaris FKUB Kab. Luwu, Belopa, *Wawancara*, Belopa, 21 Agustus 2016.

pendekatan edukatif yang dapat memacu perkembangan potensi masyarakat secara maksimal yang bertitik tolak dari permasalahan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai sebuah kebutuhan melalui proses pembelajaran.<sup>43</sup> Sebagai contohnya, fakta wanita non muslimah memakai jilbab nusantara atau hijab artistik dan bukan jilbab dogmatis dengan alasan mempresentasikan diri sebagai individu yang mampu berbaur dalam kegiatan lintas agama apalagi urusan pakaian terlalu kecil untuk dinisbatkan pada agama.<sup>44</sup>

Soliditas umat beragama dan relasi sosial terjalin dengan baik meskipun kadang-kadang muncul terjadi konflik seperti konflik antar desa, antar pemuda dan tidak menyentuh masalah keagamaan. Eksistensi Forum Kerukunan Umat Beragama adalah memelihara persatuan nasional, khususnya mengimplementasikan PBM (Pembahasan Bersama Menteri) tahun 2006. Implementasi kerukunan beragama salah satunya dengan memberikan rambu-rambu tentang pemeliharaan kerukunan.

## 2. Realitas Kerukunan Umat Beragama di Kota Palopo

Kota Palopo terbagi dalam sembilan kecamatan yang meliputi Wara, Wara Utara, Wara Selatan, Telluwanua, Wara Timur, Wara Barat, Sendana, Mungkajang, dan Bara. Ada beberapa kecamatan tersebut yang penduduknya mayoritas beragama Islam, adapula yang pada satu kecamatan penduduknya separuh beragama Islam dan separuhnya beragama non-Islam. Artinya pada

---

<sup>43</sup>Nasaruddin bin A, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kab. Luwu, Palopo, *Wawancara*, Palopo, 20 Agustus 2016.

<sup>44</sup>Husain, Imam Desa Pelalan dan Pembina Muallaf Kec. Lamasi Timur, *Wawancara*, Lamasi, 10 Mei 2016.

kecamatan tersebut, jumlah pemeluk Islam dan non-Islam tidak menunjukkan perbedaan jumlah yang signifikan.<sup>45</sup>

Selain enam agama yang diakui resmi oleh negara, terdapat kepercayaan lain yang dianut masyarakat Palopo. Berdasarkan data arsip dinas kependudukan Kota Palopo terdapat 44 orang yang menganut aliran kepercayaan lain tersebut, yang tersebar pada sejumlah kecamatan seperti Wara sebanyak 11 orang, Wara Selatan sebanyak 29 orang, Wara Timur sebanyak 3 orang dan di Bara sejumlah 1 orang. Dalam dokumentasi dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Palopo tahun 2015 dijelaskan bahwa kepercayaan lain tersebut muncul akibat adanya perpindahan penduduk dari luar.<sup>46</sup>

Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan agama yang dihitung hingga September 2015.

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Lain	Jumlah
1	Wara	33150	6921	1006	145	222	10	11	41465
2	Wara Utara	19122	5766	1024	66	150	9	0	26137
3	Wara Selatan	15100	566	56	14	4	0	29	15769
4	Telluwana	13890	3268	226	0	1	9	0	17394
5	Wara Timur	42923	829	133	63	63	0	3	44017
6	Wara Barat	7765	5720	326	20	4	0	0	13835
7	Sendana	7739	192	66	0	0	1	0	7998
8	Mungkajang	8745	1145	106	15	0	0	0	10011
9	Bara	27168	4388	654	127	1	0	1	32339
Jumlah		175602	28795	3597	450	445	29	44	208965

<sup>45</sup>Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, Dokumentasi September Tahun 2015

<sup>46</sup>Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, Tahun 2015.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penganut Islam, Kristen dan Hindu dapat hidup berdampingan, bahkan penganut kepercayaan lainpun dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Adapun agama lain yang dimaksud pada tabel tersebut adalah Baha'i.<sup>47</sup>

a. Eksistensi Agama dan Kepercayaan selain dari Agama Resmi

Masuknya ajaran Baha'i di Palopo tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Eksistensi keyakinan tersebut diakui dan mendapat pelayanan administrasi kependudukan dari pemerintah setempat berlandaskan regulasi dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, meskipun keberadaannya tidak diterima oleh sebagian masyarakat setempat.<sup>48</sup> Keberadaan Baha'i teridentifikasi sejak pemerintahan Tendriajeng sebagai walikota Palopo, meskipun ada dugaan bahwa keberadaan komunitas Baha'i telah lama bermukim di Tana Luwu.

Menyikapi keberadaan Baha'i ini, maka kebijakan pemerintah masa itu menganjurkan agar komunitas tersebut dimasukkan dalam Islam untuk kepentingan yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan sebelum adanya regulasi yang baru, namun pihak yang berkeyakinan Baha'i tetap pada pendiriannya sebagai kepercayaan yang otonom dan tidak diintegrasikan dalam Islam sehingga menimbulkan respon negatif dari masyarakat Islam, apalagi kegiatan ritual ibadah Baha'i mengusik ketenangan sekitarnya.<sup>49</sup>

Keadaan tersebut tentu menimbulkan potensi konflik yang umumnya berlatar belakang perbedaan. Faktanya muncul perbedaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari realitas kerukunan. Perbedaan tersebut mengarah kepada

---

<sup>47</sup>Mansur, Kabag Pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palopo, Tokoh Masyarakat dan Pengurus Masjid Syuhada Palopo, *Wawancara & Dokumentasi*, Palopo, 1 Juni 2016.

<sup>48</sup>Said Mahmud, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palopo dan Guru Besar IAIN Palopo, *Wawancara*, Palopo, 10 Juni 2016.

<sup>49</sup>Said Mahmud, Ketua FKUB Kota Palopo, Guru Besar IAIN Palopo dan Mudir Ma'had Aly IAIN Palopo, *Wawancara*, Palopo, 10 Juni 2016.



potensi konflik yang sewaktu-waktu menimbulkan persoalan. Perbedaan tersebut disikapi dengan langkah antisipatif akibat sikap intoleran dengan pertimbangan nalar *zari'ah* dan langkah preventif, maka oleh pemerintah Kota Palopo disarankan untuk melakukan *taqiyah*.

Sikap *taqiyah* adalah menyembunyikan identitas keagamaan dengan tidak bertindak atau bersikap transparan dalam kegiatan ritual. Kebijakan tersebut ditempuh pemerintah dengan rekomendasi tokoh umat Islam dan kesepakatan tokoh agama lain yang hingga kini masih diterapkan dan diberlakukan hingga sekarang. Konflik tersebut awalnya menjadi persoalan namun kemudian dapat ditindaki secara arif dan bijaksana.<sup>50</sup>

Kerukunan umat beragama terjalin baik dengan indikator kesetaraan, kerjasama, dan toleransi. Sekilas balutan harmoni yang terbangun dalam kerukunan internal dan antar umat beragama tidak lepas dari peran pemuka lintas agama yang memprioritaskan komitmen kebersamaan sehingga potensi konflik dalam kerukunan umat beragama bisa diminimalisir dan diredam secara maksimal. Islam sebagai mayoritas di Palopo tidak menunjukkan arogansinya dan bersikap toleran dalam menyikapi keberagaman keyakinan.<sup>51</sup>

Pemuka dan tokoh lintas agama lebih mengedepankan pendekatan edukatif-produktif daripada reaktif-represif. Pendekatan edukatif-produktif lebih memudahkan upaya memulihkan ketegangan dan munculnya kesadaran akan dampak buruk bagi fisik, mental dan jelasnya akan berusaha menghindarkannya. Adapun pendekatan reaktif-represif cenderung fokus

---

<sup>50</sup>Syarifuddin Daud, Ketua Majelis Ulama Indonesia Palopo, Ketua Yayasan Masjid Agung Palopo, Pembina Pesantren Datuk Sulaiman Palopo dan Mantan Ketua STAIN Palopo, *Wawancara*, Palopo, 1 Juni 2016.

<sup>51</sup>Lambang Mandi Tandi Pare, Ketua Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Tana Luwu dan Sekretaris Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Palopo, *Wawancara*, Palopo, 4 November 2015.

menghukum pelaku saja. Adapun pendekatan lain yang dilakukan pemerintah dengan langkah keamanan dan kesejahteraan.<sup>52</sup>

b. Peliharaan Hewan Ternak

Dengan jumlah penganut non-muslim di Palopo sebanyak 33.805 jiwa dan penganut muslim 175.602 jiwa<sup>53</sup> tidak dipungkiri adanya hewan babi yang ditenakkan. Lokasi peternakan tersebut berada di Mancani dan sempat menjadi masalah pada beberapa tahun silam sebab mengusik ketenangan ibadah umat Islam. Lokasi peliharaan babi tersambung dengan aliran sungai bahkan berdekatan dengan mesjid. Suara-suara babi dan aroma kotorannya menyengat indra penciuman masyarakat sekitarnya.

Atas dasar rekomendasi tokoh masyarakat dan agama setempat dan pendekatan persuasif, pemerintah terlibat langsung menangani masalah tersebut. Pihak pemerintah setempat mengambil tindakan kebijakan dengan memindahkan lokasi peternakan. Kebijakan tersebut ditempuh demi kemaslahatan bersama.<sup>54</sup>

c. Pernikahan dan Transformasi Agama

Masyarakat Palopo datang dari berbagai suku. Bukan hanya suku Luwu asli melainkan suku Bugis maupun Toraja juga bermukim di Palopo. Secara umum mayoritas suku Toraja menganut agama Kristen dan Katolik. Beberapa kasus yang terjadi diantaranya ada yang berpindah agama dengan alasan tertentu, baik dengan cara pernikahan, hidayah atau lainnya. Pernikahan beda agama adalah hal yang lumrah terjadi walaupun dalam beberapa tahun terakhir, trend kawin campur mulai tereduksi secara berangsur-angsur.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup>Yahya Boong, Anggota Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Kota Palopo, *Wawancara*, Palopo, 31 Oktober 2015.

<sup>53</sup>Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo, Tahun 2015.

<sup>54</sup>Said Mahmud (68 tahun), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palopo, Guru Besar dan Mudir Ma'had Aly IAIN Palopo, *Wawancara*, Palopo, 10 Juni 2016.

<sup>55</sup>Said Mahmud, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palopo dan Guru Besar IAIN Palopo, *Wawancara*, Palopo, 10 Juni 2016.

Pada dasarnya hukum pernikahan beda agama di Indonesia tidak diatur secara resmi. Hukum di Indonesia menyerahkan tata cara pernikahan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Jika dipahami lebih mendalam, pernikahan beda agama bukan terletak pada peraturan hukumnya melainkan boleh tidaknya agama yang dianut kedua mempelai menikahkan pasangan beda agama.<sup>56</sup>

Namun pada realitasnya masih dijumpai pelaku nikah beda agama yang melangsungkan pernikahan di sekitar Tana Luwu. Pelakunya berasal dari luar Palopo tetapi diselenggarakan di Palopo. Realitas tersebut terjadi karena ajaran Katolik membolehkan umatnya nikah beda agama dengan syarat bahwa pihak mempelai non Katolik harus tunduk dengan hukum pernikahan Katolik. Sebagaimana yang dijabarkan bahwa pernikahan dalam Katolik tidak ada kata cerai yang artinya menikah sekali seumur hidup dan selamanya serta membiarkan pasangannya untuk tetap memiliki keyakinan.<sup>57</sup>

Secara prosedur dan yuridis, tata cara pernikahan diserahkan kepada agama dan keyakinan masing-masing dan harus mengikuti regulasi yang berlaku maka kasus nikah beda agama masih ada kemungkinan terjadi. Pemerintah yang diwakili Kantor Catatan Sipil tidak melayani pernikahan beda agama dan tidak akan dicatat oleh petugas jika tidak disertai pengesahan secara agama.<sup>58</sup>

Hal ini berarti KUA tidak menerbitkan surat nikah apabila tidak disertai keterangan dari pemuka agama. Namun pada kenyataan surat nikah tetap dapat diterbitkan untuk pasangan beda agama sebab ada pemuka agama yang

---

<sup>56</sup>Syarifuddin Daud, Ketua Majelis Ulama Indonesia Palopo, Ketua Yayasan Masjid Agung Palopo dan Pembina Datuk Sulaiman Palopo, *Wawancara*, Palopo, 1 Juni 2016. Lihat, Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya.

<sup>57</sup>Sujadi Agustinus, Anggota Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat PAKEM Palopo unsur Katholik dan Guru SMK Palopo, *Wawancara*, Palopo, 21 Mei 2016.

<sup>58</sup>Syarifuddin Daud, Ketua Majelis Ulama Indonesia Palopo, Ketua Yayasan Masjid Agung Palopo dan Pembina Datuk Sulaiman Palopo, *Wawancara*, Palopo, 1 Juni 2016.

memberikan keterangan fiktif untuk melegalkan proses pernikahan. Artinya pernikahan dianggap sah secara tertulis dan formal walaupun pada praktiknya mereka menjalankan keyakinan masing-masing.<sup>59</sup>

Penganut yang berpindah agama baik Kristen ke Islam atau sebaliknya patut disikapi serius. Pernyataan dan keinginannya berpindah agama harus diverifikasi, diperiksa dan dianalisis lebih dalam untuk meminimalisir permainan agama demi memuluskan keinginan menikah. Pernikahan dengan pola tersebut kadang terjadi di masyarakat sebagai upaya mempertahankan kuantitas umat agama masing-masing dan penambahan populasi melalui regenerasi yang dilahirkan. Modus pernikahan seperti ini dianggap ampuh mengeluarkan seseorang dari keyakinan awalnya. Untuk Kota Palopo khususnya, pelaku nikah beda agama yang telah bercerai bahkan nyatanya kembali pada keyakinannya semula.<sup>60</sup>

Dalam Islam konstruksi pernikahan satu keyakinan terus dibina secara intensif oleh Majelis Ulama Islam, NU, Muhammadiyah melalui media dakwah dan edukasi produktif yang tidak lain untuk menjaga kemaslahatan agama dan kemaslahatan keturunan yang tentunya akan berdampak bagi perkembangan generasi muda jika dilahirkan dari keluarga yang berbeda keyakinan.<sup>61</sup> Kasus semacam ini senantiasa ditegaskan ormas Islam dalam berbagai forum seperti pengajian, khutbah bahkan dengan aksi dakwah via media sosial.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>Mesak Sule, Anggota Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat PAKEM Palopo unsur Protestan dan Tokoh Masyarakat Palopo, *Wawancara*, Palopo, 23 Mei 2016.

<sup>60</sup>Benny Wijaya, Anggota Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat PAKEM Palopo dan Tokoh Agama, *Wawancara*, Palopo, 25 Mei 2016.

<sup>61</sup>Abdul Rauf, Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Palopo, *Wawancara*, Palopo, 25 Mei 2016.

<sup>62</sup>Andi Siwaru, Dewan Pengurus Daerah Wahdah Islamiyah Wilayah Kota Palopo, *Wawancara*, Palopo, 13 Mei 2016.

#### d. Pendirian Rumah Ibadah

Awal pemekaran Kota Palopo salah satu konflik yang pernah terjadi adalah penyimpangan pembangunan rumah ibadah. Sebagian dari beberapa rumah ibadah di Tana Luwu masih ada yang belum memiliki sertifikat tanah bahkan ada IMB-nya tidak sesuai dengan aturan yang ada sehingga berpotensi menimbulkan konflik horizontal. Keberadaan beberapa tokoh jemaat GPIL yang terlibat dalam kasus tersebut dinilai cerdas dalam mengambil hati dan pandai memainkan relasi sosial di tengah masyarakat, sehingga ada beberapa tempat ibadah mendapat izin renovasi untuk menampung jumlah jemaatnya.<sup>63</sup>

Namun Hal tersebut dapat ditangani lebih dini dari kemungkinan munculnya aksi intoleran, reaksi provokatif mayoritas sebab relasi terbangun melalui komunikasi antar koneksi dan inter koneksi umat beragama. Tokoh lintas agama dapat bertindak kooperatif ditunjang oleh progresivitas kebijakan pemerintah dalam membangun kerukunan yang dinamis.

Lazimnya konflik dipicu dari perbedaan ajaran agama yang memahami agama secara parsial tanpa memahami pesan substansial. Kerukunan umat beragama yang didialogkan dengan pendekatan budaya oleh antar pemeluk agama atau sesama pemeluk agama mampu mengurai konflik atau mengantisipasi konflik. Upaya yang dilakukan dengan mengedepankan empati sosial dan memunculkan sepenanggungan dalam berbuat dan berpikir untuk mewujudkan keselarasan hidup antar sesama manusia.<sup>64</sup>

Dinamika kerukunan beragama di Palopo terbangun secara intensif sehingga akselerasi penyesuaian dan pembauran umat lintas agama berjalan

---

<sup>63</sup>Lambang Mandi Tandi Pare, Ketua Sinode Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL) Tana Luwu dan Sekretaris Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Palopo, *Wawancara*, Palopo, 4 November 2015.

<sup>64</sup>Benny Wijaya, Anggota Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat PAKEM Palopo dan Tokoh Agama, *Wawancara*, Palopo, 25 Mei 2016.

semestinya. Konstruksi hidup rukun memberi peluang pada hasil yang diinginkan dan bersifat mendukung terwujudnya harmoni walau pada kondisi keberagaman, Kompetensi pemerintah daerah ikut menentukan dan mengakselerasi terbangunnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis.

Beberapa indikator yang menunjukkan kondisi toleran dalam kerukunan umat beragama di Palopo adalah sebagai berikut:

1. *Celebrate*, secara umum penganut lintas agama di Palopo menikmati keragaman agama hanya ada sekelompok komunitas penganut agama tertentu yang menyebarkan *misinformation* tentang agama lainnya seperti konflik antara Baha'i dengan Kristen.
2. *Value*, adanya sikap yang mengapresiasi kesamaan dan perbedaan antar umat beragama sehingga kondisi Palopo sebagai wilayah terbuka bagi siapapun dikatakan zero konflik yang bernuansa agama dan ras.
3. *Learn*, belajar mendalami agama lain pada aspek teologis normatifnya dan bukan pada teologi dogmatis.
4. *Tolerate*, mengakui hak yang sama antar umat beragama.
5. *Examine*, mempelajari agama lain secara sepintas.
6. *Respect*, mengakui kontribusi setiap penganut agama lain, utamanya di kalangan pemuka agama sehingga dapat merekatkan spirit umat yang dibawahnya.

Said Mahmud dalam suatu wawancara menjelaskan bahwa agama merupakan sarana pengendalian sosial. Eksistensi agama dapat menjadi dorongan integratif bagi masyarakat. Agama juga berperan menciptakan ikatan kooperatif antara masyarakat maupun aksi-aksi sosial yang membantu mempersatukan.<sup>65</sup> Perlindungan agama menjadi konsensus yang fungsinya integratif sosial dalam

---

<sup>65</sup>Said Mahmud (68 tahun), Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palopo, Guru Besar dan Mudir Ma'had Aly IAIN Palopo, *Wawancara*, Palopo, 10 Juni 2016.

konteks membina umat beragama dalam keyakinan masing-masing dan berperan sebagai faktor pemantapan keseimbangan dan stabilitas.

### 3. Realitas Kerukunan Umat Beragama di Kab. Luwu Utara

Luwu Utara terbentuk tahun 1999 berdasarkan UU No. 19 tahun 1999 dengan ibukota Masamba sebagai pecahan dari Luwu. Luwu Utara memiliki luas wilayah 7.502,58 km<sup>2</sup> dengan 12 kecamatan dan 23 desa dengan penyebaran penduduk mencapai 302.687 jiwa pada tahun 2015.<sup>66</sup> Berikut tabel jumlah data penduduk menurut kecamatan dan agama yang dianut sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Sabbang	25996	9350	2038	0	0
2	Bacbunta	37317	7002	660	171	0
3	Malangke	26424	520	251	340	0
4	Malangke Barat	22700	1365	50	20	0
5	Sukamaju	35445	2275	290	3610	0
6	Bonc-Bonc	23445	1882	350	560	12
7	Tanalili	18106	3409	330	400	0
8	Masamba	34540	592	74	41	0
9	Mappedeceng	17657	1804	53	3575	0
10	Rampi	441	2693	0	0	0
11	Limbong	3339	555	0	0	0
12	Seko	2750	10250	0	5	0

Sumber; Dokumentasi data penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Luwu Utara, tahun 2015.

<sup>66</sup>Lihat, Dokumentasi data dari Dukcapil dan Kemenag Luwu Utara, tahun 2015.

Adapun jumlah penduduk Luwu Utara adalah 302.687 menurut BPS tahun 2015. Adapun jumlah rumah ibadah tiap agama sebagai berikut:

No	Kecamatan	Masjid	Muṣallā	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura
1	Sabbang	68	14	41	8	0
2	Bacbunta	89	4	39	5	4
3	Malangke	63	7	4	3	6
4	Malangke Barat	60	11	15	1	0
5	Sukamaju	61	64	17	5	32
6	Bone-Bone	63	45	24	4	9
7	Tanalili	28	2	20	2	1
8	Masamba	87	18	4	1	0
9	Mappedeceng	53	19	14	1	20
10	Rampi	4	1	15	0	0
11	Limbong	11	1	5	0	0
12	Seko	11	1	59	0	0

Sumber; Jumlah rumah ibadah berdasarkan data Kementerian Agama Luwu Utara di Masamba tahun 2015.

Berdasarkan data tersebut maka Seko dan Rampi merupakan daerah kantong komunitas Kristiani, dengan jumlah gereja terbanyak di daerah tersebut. Budaya dan adat istiadat di Seko merupakan akulturasi adat istiadat Tana Toraja dan masyarakat asli Seko. Bahasa Seko mirip dengan bahasa Toraja namun memiliki intonasi yang lebih lembut dan menganut prinsip-prinsip kearifan tradisional.<sup>67</sup>

<sup>67</sup>Yohan Taruk, Kepala Desa Malimongan Kec. Seko Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 11 Desember 2015.



Secara sosiologis Rampi digolongkan dalam kehidupan masyarakat yang homogen, baik dalam hal suku, agama, adat istiadat, dengan ciri khas kekentalan peran lembaga adat sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam proses penyelesaian berbagai persoalan sosial kemasyarakatan.<sup>68</sup> Begitu juga penganut Hindu terlokalisasi di beberapa desa seperti Desa Mappedeceng, Sukamaju, Malangke, Bone-Bone, Baebunta. Berbeda dengan penganut Kristiani yang populasinya tersebar hampir di semua kecamatan, dan mayoritas mereka bermukim di Rampi dan Seko.<sup>69</sup>

Luwu Utara dipresentasikan sebagai miniatur dengan keberagaman agama, suku dan adat istiadat. Populasi penduduknya yang heterogen dan terbiasa dengan perbedaan, menunjukkan bahwa religiusitas tidak mesti dengan satu keyakinan tertentu tapi dengan ragamnya agama. Keadaan masyarakat ditandai dengan nuansa agamawi, dinamis serta saling memahami dan menghargai perbedaan menurut aturan yang berlaku.<sup>70</sup>

Pemekaran Luwu Utara pada awal 1998-1999 bukanlah tanpa masalah. Benturan demi benturan dan konflik turut mewarnai didalamnya. Dapat dikatakan pemicunya “zero” konflik agama. Solidaritas kerukunan umat beragama kental terlihat namun yang terjadi adalah konflik sosial komunal (rakyat) yang justru mempengaruhi relasi umat beragama.

Awalnya konflik komunal tersebut sulit dideteksi penyebabnya, dari sekian banyak kasus pemicunya adalah perkelahian antar pemuda yang bermula dari perkara individual namun atas dasar kedaerahan, maka eskalasinya

---

<sup>68</sup>Martinus Dumpala, Kepala Desa Todeboe Kec. Rampi Luwu Utara, *Wawancara di Mess Pemda Lutra*, Masamba, 11 Desember 2015.

<sup>69</sup>Muh. Alwi, Kasi Pendis Kementerian Agama Luwu Utara di Masamba, *Wawancara*, Masamba, 10 Desember 2015.

<sup>70</sup>Sudarmin, Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kab. Luwu Utara, *Dokumentasi & Wawancara*, Masamba, 12 Desember 2015.

meningkat menjadi konflik antar daerah. Bukan hanya kerugian materi namun juga korban jiwa. Masalah tersebut cukup memprihatinkan dan sangat serius sebab potensi meledaknya konflik sewaktu-waktu bisa saja terulang. Inilah konflik-konflik yang tercatat pernah terjadi di Luwu Utara:

a. Selayang Pandang Realitas Konflik di Luwu Utara

Konflik adalah gejala sosial yang akan selalu hadir dalam kehidupan karena sifatnya yang *inheren* artinya akan selalu ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Masyarakat merupakan arena konflik atau pertentangan yang senantiasa berlangsung dan gejala yang akan selalu mengisi setiap kehidupan sosial.

Setiap konflik ada yang dapat diselesaikan dan ada yang tidak mampu diselesaikan sehingga menimbulkan aksi kekerasan. Kekerasan tersebut tentunya merupakan gejala tidak dapat diselesaikannya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan, baik kekerasan terkecil hingga peperangan. Konflik diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan lainnya dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, sosial, politik, budaya) yang relatif terbatas.

Konflik yang mewarnai Luwu Utara tahun 1999-2002 bernuansa etnis antara penduduk asli dan pendatang dan sekitar 2011-2015 dipandang secara kriminologis. Konflik yang terjadi di Luwu Utara pasca pemekaran dianggap konflik destruktif karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang atau kelompok terhadap pihak lain. Apalagi didalamnya terjadi berbagai bentrokan fisik yang mengakibatkan jatuhnya korban dan hilangnya harta benda. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, baik secara vertikal, horisontal dan diagonal, maka horisontal dan diagonal lebih banyak daripada vertikal dalam dinamika kerukunan di Luwu Utara.

Konflik horisontal merupakan konflik yang terjadi antara kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama sebagaimana konflik yang terjadi antar kalangan pemuda yang juga melibatkan masyarakat luas sekitarnya. Adapun konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan ekstrim seperti penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTA, penguasaan lahan wilayah tambang oleh masyarakat di bawah naungan perjanjian eksplorasi PT Kalla Arebamma di Rampi.

Beberapa faktor penyebabnya seperti ketersinggungan anggota kelompok, kesalahpahaman, minuman keras, kesenjangan sosial-ekonomi, perluasan lahan, pilkada dan hal-hal yang memicu keresahan masyarakat sekitar. Konflik yang berkelanjutan menunjukkan kinerja pemerintah saat itu dinilai tidak profesional dan proporsional karena berbagai sumber konflik yang berkelanjutan muaranya adalah konflik nilai tentang prinsip dan pedoman, komunikasi buruk, kepemimpinan kurang efektif, ketidakcocokan peran sehingga kebersamaan dalam satu komunitas dan kelompok masyarakat semakin tidak bermakna.

Terjadinya konflik dinilai dengan merosotnya kesejahteraan yang ditandai kesenjangan sosial bahkan dengan eskalasi ketersinggungan yang meningkat dan adanya pemicu provokasi.<sup>71</sup> Konsistensi kebersamaan dari berbagai pihak terutama pihak keamanan mengedepankan aksi represif seperti tembak di tempat bagi pelaku onar, provokator, residivis dan otak kerusuhan.<sup>72</sup>

Penyelesaian konflik antar pemuda di beberapa desa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai pihak

---

<sup>71</sup>Irmawanti, Staff Desa Mukti Tama Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Baebunta, 15 Desember 2016.

<sup>72</sup>Sulsen Patabang, Kepala Desa Mukti Tama Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Mukti Tama Baebunta, 15 Desember 2016.

pemerintah dalam mengambil kebijakan. Meskipun penanganan dari pemerintah tergolong dianggap lemah, namun setidaknya telah bersikap netral tanpa membedakan satu sama lainnya. Beberapa konflik lama yang belum terselesaikan akibat tidak ada proses maaf memaafkan dan saling mengampuni menjadi salah satu indikator “api dalam sekam” yang sewaktu-waktu meledak.<sup>73</sup>

Konflik yang kerap terjadi beberapa tahun sebelumnya tidak lain akibat *mind set* dan *culture set* yang tidak ditangani sejak dini sehingga konflik antar pemuda berkembang hingga melibatkan orang tua di salah satu desa seperti Kalotok-Pongko, Buangin-Dandang. Kekhawatiran orang tua pada keselamatan anaknya dan rasa empati sanak saudara menjadi pendorong kuat untuk terlibat ke dalam konflik tersebut. Selanjutnya 5 April 2015 konflik ini dapat didamaikan melalui beberapa tindakan upaya antisipatif.<sup>74</sup>

Tindakan antisipatif dilakukan melalui kegiatan rutin patroli, penyuluhan sadar hukum, razia khususnya bagi tempat yang diduga tempat persembunyian dan penyimpanan senjata rakitan. Pengamanan dan penegakan kamtibmas diintensifkan dengan penempatan personil di tempat yang rawan konflik dengan memberikan informasi berkala, apalagi bentrokan susulan antar warga desa sewaktu-waktu terjadi sehingga membuat khawatir warga setempat.<sup>75</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi konflik menunjukkan penurunan statistik dengan strategi mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, meredam potensi konflik, konstruksi sistem peringatan dini, komitmen serta konsistensi keberpihakan pemerintah memelihara kondisi damai. Konsistensi

---

<sup>73</sup>Djahidin Patadari, Kepala Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Dandang Sabbang, 15 Desember 2016.

<sup>74</sup>Muhammad Taufik, Kepala Desa Sabbang Kec. Sabbang Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Sabbang, 15 Desember 2016.

<sup>75</sup>Nanan Subari, Sekretaris Desa Mukti Tama Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Baebunta, 15 Desember 2016.

keberpihakan pemerintah diiringi semangat membangun kerukunan umat beragama di Luwu Utara dengan *sumanga* dan *ininnawa* (semangat dan ketulusan) melahirkan kearifan lokal yang *lempu*, *getteng* dan *warani*.<sup>76</sup>

Bentrok yang kerap terjadi diminimalisir oleh dengan forum kerukunan antar pemuda sebagai bagian dari upaya membangun soliditas kerukunan umat beragama dengan usaha preventif dan penegakan hukum berkesinambungan. Asumsi miras yang dipasok oknum pemuda non muslim disetting sebagai trik mengkambinghitamkan pihak lain. Namun jika dibiarkan ada kekhawatiran menimbulkan potensi penyebaran kebencian antar penganut lintas agama dari arus bawah. Penanganan dilakukan tidak didasarkan dengan tendensi agama tapi pada usaha meminimalisir disfungsi sosial dan disorganisasi sosial.<sup>77</sup>

Konflik disfungsi sosial lebih mendominasi daripada potensi konflik antar umat beragama di Luwu Utara. Menangani bencana sosial dan pemulihannya tentu menghabiskan waktu yang tidak menentu daripada menangani bencana alam. Eksistensi FKUB lebih banyak dimaknai sebagai “pemadam kebakaran” yang artinya masalah akan ditangani ketika ada laporan masuk dan terbatas hanya permasalahan keagamaan. Padahal kebutuhan masyarakat yang paling utama ialah kerukunan, tidak sebatas internal tapi juga antar umat beragama.<sup>78</sup>

Kegiatan bela negara sebagai *tool* membangun *ukhuwah waṭāniyah* dan *basyariyah* dengan menanamkan nilai ideologi kebangsaan yang diterapkan di kalangan pemuda lintas agama dan suku yang bersinergi dengan pengembangan nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu *ḥifzu al-daulah* dan *ummah*. Meskipun pembinaan

---

<sup>76</sup>Muhammad Nurdin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Luwu Utara dan Mantan Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara Masa Pemerintahan Bupati Lutfi, *Wawancara*, Masamba, 13 Desember 2015.

<sup>77</sup>Nanan Subari, Sekretaris Desa Mukti Tama Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Baebunta, 15 Desember 2016.

<sup>78</sup>Muhammad Nurdin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Luwu Utara dan Mantan Sekretaris Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 9 September 2016.

kesadaran bela negara cuma alat namun tujuannya untuk melahirkan gagasan inovatif serta pemikiran masa depan yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberadaan pemuda sebagai agen perubahan.

Kegiatan bela negara melibatkan generasi muda yang wilayahnya sering mengalami konflik antar pemuda. Gagasan dan pemikiran masa depan memberikan kontribusi positif terhadap keberadaan pemuda sebagai agen perubahan. Sosialisasi bela negara tetap digalakkan supaya nasionalisme generasi muda dipupuk dan ditumbuhkembangkan secara intensif.

Sabbang di Luwu Utara dijadikan contoh kerukunan umat beragama dengan proyek gerakan remaja memakmurkan rumah ibadah. Pembinaan gerakan remaja dalam membina kerukunan umat beragama sebagai langkah dari Pemda dan FKUB dengan melibatkan Karang Taruna dalam menghadapi setiap konflik yang terjadi, bergandeng tangan dengan Kapolsek dan Danramil terutama menjelang perayaan keagamaan seperti Natal dan tahunbaru yang rawan terjadi.

Upaya tersebut tidak lain untuk mereduksi potensi konflik yang kerap terjadi antar pemudasehingga pembauran mutlak dilakukan. Maka secara berangsur-angsur pola pikir (*hifzu al-'aql*) dari egosentris dengan menampilkan eksistensi komunitas berubah menjadi kolaborasi dan kebersamaan antar remaja dan pemuda tanpa memandang agama dan suku.<sup>79</sup>

Kolaborasi pemerintah dan masyarakat senantiasa dijaga dan ditingkatkan dengan mengantisipasi konflik dan berperan aktif memberikan informasi jika terdapat indikasi konflik atau potensi konflik dalam suatu wilayah. Setidaknya ada 4 hal yang perlu disoroti dalam potensi terjadinya konflik sebagai berikut:

---

<sup>79</sup>Muhammad Nurdin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Luwu Utara dan Mantan Sekretaris Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 9 September 2016.

1. Perbedaan doktrin dan sikap mental. Adanya ketimpangan pada sikap mental yang perlu dibenahi atau dalam artian, *mind set* dan *culture set* di kalangan masyarakat dengan memperkuat sendi keagamaan (*ḥifẓu al-dīn*), membenahi *ḥifẓu al-aql* dengan jalan pendidikan dan *ḥifẓu al-māl* dengan perbaikan ekonomi serta *ḥifẓu al-nasl* dengan meminimalisir potensi kebencian yang generasi selanjutnya.
2. Perbedaan suku dan ras pemeluk agama dan korban keganasan massa yang umumnya pendatang. Dalam hal ini tidak lagi terjadi karena indikasinya lebih cenderung pada penyakit masyarakat serta perda miras yang tidak berjalan maksimal atau dinilai mandul.
3. Perbedaan tingkat budaya. Diperlukan keterampilan komunikasi yang efektif karena munculnya kesalahan berakibat terjadinya suasana yang tidak diharapkan bahkan menimbulkan pertikaian yang menjurus pada konflik sosial.
4. Masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Hal tersebut tidak terlihat karena rata-rata terlokalisasi di wilayah tertentu namun perlu dilakukan proses asimilasi dan pembauran antar komunitas umat lintas agama dan masyarakat sehingga kesannya menjadi inklusif (keterbukaan) dan tidak eksklusif.<sup>80</sup>

Mengenai hubungan antar umat beragama, sepiantas tidak ada konflik yang murni menjurus dan mengarah pada intoleransi antar umat beragama. Adanya warga non muslim yang pernah kedapatan buang air kecil didalam masjid sempat memicu emosi masyarakat muslimin setempat di salah satu desa di Baebunta padahal pelakunya dalam kondisi kejiwaan yang sakit alias sakit jiwa

---

<sup>80</sup> Muhammad Nurdin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Luwu Utara dan Mantan Sekretaris Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 9 September 2016.

dan perlu ditangani secara intensif oleh dinas sosial untuk ditangani dan direhabilitasi kejiwaannya.<sup>81</sup>

Selanjutnya peristiwa yang membuat gaduh dan dikhawatirkan akan memicu potensi konflik antar umat beragama yang berakibat pada bentrokan antar umat beragama sehingga pola pikir eksklusif dikikis dan dihilangkan dan perlu dibina dan pola pembinaanya diserahkan kepada pemuka agamanya untuk dibina secara intensif dan tidak perlu melibatkan komunitas agama lain karena penanganannya bisa dilakukan secara internal.

Konflik antar warga Luwu Utara dalam studi kasus tahun 2011-2014 lebih cenderung dilihat dari tinjauan kriminologis bukan agama dan suku dengan faktor penyebab terjadinya konflik seperti ketersinggungan warga/kelompok, kesalahpahaman, adanya dendam, minuman keras, kesenjangan sosial, perluasan lahan dan faktor ekonomi. Metode preventif dilakukan untuk mencegah dengan mengendalikan dan mengawasi dan menciptakan suasana kondusif.<sup>82</sup>

Beberapa kalangan pers nasional lebih sering memotret pertikaian antar pendatang Toraja dan pendatang Bugis dan Jawa atau penduduk asli yang mencerminkan pertikaian antar agama yang melibatkan muslim dan kristen. Padahal sebenarnya bukan persoalan agama tetapi lebih pada rumitnya perebutan lahan, kecemburuan ekonomi dan sosial.<sup>83</sup> Hal terpenting penyelesaian konflik adalah menyelesaikan perbedaan pendapat tentang isu penyebab konflik bukannya dengan mengalahkan lawannya atau menunjukkan superioritas kekuatan yang dominan.

---

<sup>81</sup>Muhammad Nurdin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Luwu Utara dan Mantan Sekretaris Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 13 Desember 2015.

<sup>82</sup>Isa Ansari, Pejabat di Kel. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, *Wawancara dan Dokumentasi*, Bone-Bone, 11Desember 2015.

<sup>83</sup>Muhammad Nurdin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Luwu Utara dan Mantan Sekretaris Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 13 Desember 2015.



Oleh karenanya metode manajemen konflik dengan melakukan agresi, kekerasan, kekuatan, dan paksaan serta dipicu oleh kebencian dan prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong pula melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya.

#### b. Daerah Potensi Konflik di Luwu Utara

Berdasarkan catatan Pemerintah Daerah tahun 2015, beberapa wilayahnya berpotensi konflik dengan persoalan yang seragam. Luwu Utara merupakan wilayah yang penduduknya heterogen seperti Sabbang, Baebunta, Masamba, Mappedeceng, Sukamaju, Bone-Bone, dan Tanalili. Motif insiden pada beberapa wilayah yang berpotensi konflik seperti akibat dendam lama, kenakalan remaja, pengaruh miras dan kecemburuan sosial.

Adapun wilayah lainnya seperti Malangke, Malangke Barat, Rampi dan Seko maka motif kejadian konflik mengarah pada sengketa tanah, lahan tambang, dan pembangunan PLTA yang melibatkan pihak korporasi, lembaga adat kedatuan Luwu dan masyarakat setempat. Biasanya tindakan yang ditempuh melalui mediasi pihak-pihak yang bersengketa, himbauan penghentian aktifitas diatas lahan yang dipersengketakan dan menunjukkan bukti keberadaaan lahan sengketa serta koordinasi dengan pihak pemerintah setempat.<sup>84</sup>

#### c. Konflik Baebunta – Sabbang

Konflik tersebut adalah konflik yang paling menyita perhatian sepanjang sejarah dinamika kerukunan di Tana Luwu. Konflik horizontal tersebut tidak hanya terlokalisir namun merambat ke beberapa wilayah lainnya seperti Desa Baebunta, Salassa, Kalotok, Dandang, Kampung Baru, Pompaniki, Pongko, Mari-Mari dan Tanete Rante Damai.

---

<sup>84</sup>Isa Ansari, Pejabat di Kel. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, *Wawancara dan Dokumentasi*, Bone-Bone, 11 Desember 2015.

Peristiwa bermula tahun 2000 antara masyarakat Suku Rongkong sebagai penganut Kristen dengan penduduk Baebunta yang mayoritas beragama Islam. Dalam konteks masalah konflik antara masyarakat Rongkong dan Baebunta ada lima akar masalah yang terdeteksi, yaitu: (1) masalah tanah, (2) kesenjangan sosial, (3) ekstremisme suku dan agama, (4) hilangnya simpul sosial, (5) merosotnya kewibawaan pemerintah dan penegakan hukum.<sup>85</sup>

Ditinjau dari aspek historisnya, tahun 1953 masyarakat Rongkong dipaksa oleh TNI pindah ke Palopo, Masamba, dan Sabbang dengan alasan stabilitas keamanan. Penduduk Rongkong yang diungsikan ke Baebunta awalnya hidup harmonis. Atas kebijakan Datu Luwu Andi Djemma, pengungsi dari Rongkong mendapat jatah tanah, dengan tingkat 75% dari pengolahan tanah yang dilakukan dengan giat berdampak positif pada tingkat pendapatan Rongkong yang semakin baik dan hal tersebut berakibat timbulnya kesenjangan ekonomi.<sup>86</sup>

Berdasarkan sensus 1998 di Baebunta terkhusus di Desa Salassa dan Baebunta, populasi penduduk yang beragama Kristen dan Islam cukup berimbang namun data sosial menunjukkan bahwa fasilitas keagamaan umat Islam lebih sedikit dibandingkan Kristen. Desa Salassa yang populasi muslimnya 1376 hanya memiliki satu masjid dan satu imam sedangkan Nasrani yang berjumlah 677 memiliki empat gereja.

Ketimpangan fasilitas agama di lokasi tersebut menampakkan gejala kekhawatiran penduduk asli yang mayoritas Islam sehingga mengemukakan isu agama saat itu. Sementara pola budaya orang Rongkong cenderung identik

---

<sup>85</sup>Muin Razmal, Dosen Purna Bakti IAIN Palopo dan Pengurus Masjid Alauddin Balandai Palopo, *Wawancara*, 1 Desember 2015.

<sup>86</sup>Muhammad Nurdin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Luwu Utara dan Mantan Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara Masa Pemerintahan Bupati Lutfi, *Wawancara*, Masamba, 13 Desember 2015.

dengan Toraja yang menjalankan ajaran agama Kristen. Orang Rongkong menjadikan gereja sebagai pusat aktifitas sosial sementara orang Baebunta yang mayoritas Islam menjadikan mesjid sebagai pusat aktifitas. Fenomena tersebut menyebabkan timbulnya identifikasi diri sebagai “penduduk asli” dan “penduduk pendatang”.<sup>87</sup>

#### d. Konflik Desa Banyuurip – Karang<sup>88</sup>

Pada 11-12 Oktober 2014 terjadi konflik antar kelompok di Dusun Bamba (Karang) kontra dengan warga Kopi-Kopi Desa Banyuurip di lingkungan Bone-Bone yang saling melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata rakitan. Akibat peristiwa tersebut berdampak hingga ke desa Sidomukti Bone-Bone yang disusul dengan pembakaran yang selanjutnya berdampak ke Patila Kec. Tanalili. Total keseluruhan rumah yang terbakar berjumlah 20 buah.<sup>89</sup>

Konflik antara kalangan pemuda tercatat tujuh kejadian sebelumnya yaitu kejadian pada 7 Juli 2010,<sup>90</sup> 9 Maret 2011, 13 Mei 2011, 4 Juli 2011,<sup>91</sup> 6 Nopember 2011,<sup>92</sup> 26 Oktober 2012, dan Oktober 2014.<sup>93</sup> Bentuk dan jenis konflik adalah tawuran dan perkelahian antar kelompok kalangan pemuda dengan motif dendam lama, kecemburuan sosial, dan belum adanya kesepakatan damai

<sup>87</sup>Nanan Subari, Sekretaris Desa Mukti Tama Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Baebunta, 15 Desember 2016.

<sup>88</sup>Budi Sutrisno, Staff di Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Bone-Bone, 11 Desember 2015.

<sup>89</sup>Isa Ansari, Pejabat di Kel. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, *Wawancara dan Dokumentasi*, Bone-Bone, 11 Desember 2015.

<sup>90</sup>Abdul Hakim Bukkara, Mantan Camat di Kec. Bone-Bone saat kejadian di Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, *Wawancara dan Dokumentasi*, Bone-Bone, 15 Desember 2015.

<sup>91</sup>Jahir, Mantan Camat di Kec. Bone-Bone saat kejadian di Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, *Dokumentasi*, Bone-Bone, 15 Desember 2015.

<sup>92</sup>Awaluddin Andi Paso, Sekretaris Camat di Kec. Bone-Bone saat kejadian di Kec. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, *Dokumentasi*, Bone-Bone, 17 Desember 2015.

<sup>93</sup>Isa Ansari, Pejabat di Kel. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, *Wawancara dan Dokumentasi*, Bone-Bone, 11 Desember 2015.

dari kedua pihak yang bertikai. Beberapa tindakan dilakukan untuk menyelesaikan konflik seperti mediasi antara pihak yang bertikai, koordinasi antar instansi, keterlibatan personil pengamanan terhadap lokasi yang dianggap sering menjadi tempat pertemuan kedua belah pihak dan penegakan hukum sesuai dengan UU dan KUH Pidana yang berlaku.<sup>94</sup>

e. Konflik Kalotok – Pongko

Konflik tersebut terjadi dalam internal umat beragama yang ditandai dengan kerusuhan antar pemuda akibat pengaruh miras dan dendam lama. Konflik desa yang masih serumpun tersebut mengakibatkan lima korban jiwa dan sebagian mengalami luka-luka pada insiden pertama. Akibat dendam yang tersimpan tanpa disertai langkah penyelesaian mengakibatkan permasalahan lama terus berlanjut. Begitu juga penyalahgunaan minuman keras dan penggunaan obat-obat terlarang diindikasikan sebagai penyebab perkelahian. Munculnya asumsi bahwa pemicu bentrokan fisik akibat miras yang dipasok oleh kalangan non muslim namun ini hanyalah “hoaks”, kabar bohong dengan tujuan menjatuhkan dan menghancurkan pihak non Islam.

Kedua belah pihak dari Kalotok di Kab. Luwu Utara dan Pongko di Kab. Luwu sama-sama menggunakan senjata rakitan jenis paporo. Insiden kedua bulan Agustus 2014 kembali pecah. Meskipun tidak ada korban jiwa namun sejumlah rumah warga mengalami kerusakan dan arus trans Sulawesi mengalami kelumpuhan total.

f. Konflik Desa Buangin – Dandang (1990-2012)

Kecamatan Sabbang adalah salah satu wilayah pemerintahan Kab. Luwu Utara yang terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Hingga tahun 2012 Sabbang sering diidentikkan dengan daerah rawan konflik dengan bentuk perkelahian dan

---

<sup>94</sup>Budi Sutrisno, Pejabat di Kcc. Bone-Bone Kab. Luwu Utara, *Wawancara dan Dokumentasi*, Bone-Bone, 11 Desember 2015.

tawuran antar pemuda. Kejadian Ramadhan tahun 2010 membuat macet kendaraan hampir 3 km akibat insiden tawuran.

Pemuda dari Terpedo Jaya (dibantu pemuda dari Dandang) bentrok dengan kalangan pemuda dari Buangin, yang tidak lain pemicunya adalah rasa dendam yang berkepanjangan. Pemuda Dandang merasa dendam dengan pemuda Buangin, lalu kemudian mencari sekutu yaitu dari Terpedo Jaya untuk menyerang pemuda Buangin. Tidak hanya sebatas disitu, pasca Ramadhan pemuda Dandang melakukan penyerangan dari arah Selatan kepada kalangan pemuda Buangin. Insiden mengakibatkan arus macet dan sekaligus menjadi tontonan gratis kalangan penumpang kendaraan yang melintas saat itu.

Fenomena konflik umat beragama menyita perhatian publik karena aksinya telah mengarah pada kekerasan dan meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Konflik akibat sentimen dan fanatik kedaerahan dengan mayoritas kalangan pemuda masih terjadi hingga tahun 2014 dan umumnya simbol etnis dan suku masih terbawa meskipun tidak kontras.<sup>95</sup> Akar masalah yang menjadi salah satu pemicu adalah kurangnya kegiatan positif, sehingga aktivitas masyarakat cenderung mengarah kepada kegiatan negatif dengan maraknya miras jenis Ballo yang murah dan mudah didapatkan serta kurang efektifnya petugas keamanan dalam menangani berbagai kasus.

Asimilasi sosial dalam berbagai insiden tersebut tidak berjalan dengan semestinya dan yang muncul malah disintegrasi sosial yang semakin mempertegas perbedaan yang seharusnya mengurangi perbedaan dan memperbanyak persamaan agar dapat mempertinggi persatuan dan kesatuan. Penanganan intensif oleh pemerintah, baik secara struktural maupun kultural mulai ditingkatkan. Penanganan struktural dilakukan dengan jalur preventif, jalur

---

<sup>95</sup>Lasenag, Sekretaris Badan Kesatuan Kebangsaan Politik dan Linmas Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 11Desember 2015.

hukum, optimalisasi fungsi semua lembaga dan mereduksi patologi sosial yang berupa judi dan miras dengan melibatkan pihak keamanan dan tokoh agama dan masyarakat. Sedang kultural dengan rekonsiliasi lewat upacara adat, bimbingan rohani dan kegiatan seni atau olah raga.<sup>96</sup>

Pendekatan teologis normatif secara intensif dilakukan pemuka lintas agama untuk mengedukasi umatnya mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan yang dibangun dengan semangat dan ketulusan. Supremasi penegakan hukum, aturan perundang-undangan, mentaati sistem budaya dan adat lingkungan oleh pemuka agama cara jitu memastikan kerukunan selalu digalakkan. Tirani mayoritas dan diktator minoritas tidak lagi terjadi, tapi yang ada mayoritas mengayomi dan melindungi minoritas, sebaliknya minoritas menghargai mayoritas. Kerukunan di tingkat elit sudah baik dan aman namun sosialisasinya ke tingkat *grassroot* (umat) belum sepenuhnya dilakukan secara intensif.<sup>97</sup>

#### **4. Realitas Kerukunan Umat Beragama di Kab. Luwu Timur**

Luwu Timur dijuluki "Bumi Batara Guru" yang dimekarkan dari Luwu Utara dan disahkan sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan berdasarkan UU No. 7 Tahun 2003. Tepat pada 25 Februari 2003, Malili menjadi ibukota Luwu Timur yang terletak di ujung utara Teluk Bone dengan luas 6.944,98 km<sup>2</sup> dan terdiri atas 11 kecamatan yakni Malili, Angkona, Tomoni,

---

<sup>96</sup>Muin Razmal, Dosen Purna Bakti IAIN Palopo dan Pengurus Masjid Alauddin Balandai Palopo, *Wawancara*, 1 Desember 2016.

<sup>97</sup>Muhammad Nurdin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Luwu Utara dan Mantan Sekretaris Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 13 Desember 2015.

Tomoni Timur, Kalaena, Towuti, Nuha, Wasuponda, Wotu, Burau dan Mangkutana.<sup>98</sup>

Seiring berlakunya otonomi tahun 2001 memungkinkan Luwu Timur atau Bumi Batara Guru untuk dimekarkan dengan wilayahnya yang begitu luas. Pemekaran dilakukan dalam rangka mendekatkan pelayanan pemerintahan, percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemandirian optimalisasi pengolahan sumber daya alam di Luwu Timur.<sup>99</sup>

Perjuangan selama 44 tahun membuahkan hasil yang selanjutnya disetujui DPR-RI dan Presiden RI dengan pengesahan UU No. 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 tentang Pembentukan Luwu Timur dan Mamuju Utara. Perbatasan bertempat di Lauwo antara Kec. Burau, Luwu Timur dan Kec. Tana Lili, Luwu Utara. Secara administratif memiliki kewenangan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Namun secara kultural, historis, dan hubungan emosional menjadi satu rumpun dengan Tana Luwu keseluruhan yang terus terjalin dalam kesatuan yang tak terpisahkan.<sup>100</sup>

Luwu Timur menjadi unit penempatan transmigrasi yang berasal dari beberapa daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Bali, Ambon, Poso, maupun Timor Timur (sekarang Timor Leste). Kemajemukan dan keragaman masyarakat meliputi hampir seluruh suku besar dan agama didalamnya. Heterogenitas dirajut dengan kebersamaan berjalan aman dan terkendali karena peran dan kontribusi pemuka agama dalam menjaga keutuhan daerah yang tetap kondusif. Persatuan dan kebersamaan senantiasa

---

<sup>98</sup>Dokumentasi Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Timur, diakses [luwutimurkab.bps.go.id](http://luwutimurkab.bps.go.id)

<sup>99</sup>Harun, Kasi Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Luwu Timur, *Wawancara*, Malili, 10 April 2016.

<sup>100</sup>Dokumentasi Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Timur, diakses [luwutimurkab.bps.go.id](http://luwutimurkab.bps.go.id)

dipertahankan karena kerukunan dan relasi umat beragama menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>101</sup>

Kerangka pembinaan umat beragama mempresentasikan wawasan multi kultural dengan berbagai penyelenggaraan seperti Jambore Sekolah Minggu dan Remaja dengan ribuan peserta dari seluruh gereja POUK anggota PGIW Sulselbar Tingkat Sul-Sel di Wasuponda. Meskipun kegiatan sifatnya internal namun menjadi bagian dari peningkatan sumber daya manusia terutama mempersiapkan masa depan anak-anak peserta menjadi tongkat estafet penerus pelayan dan abdi gereja dan pelayan di tengah masyarakat dalam arti luas.<sup>102</sup>

Aktifitas pembinaan melalui pendekatan agama dimaksudkan untuk menjaga generasi agar terhindar dari pergaulan bebas dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan baik antara sesama pemeluk agama dan lintas agama terlihat dengan intensnya bantuan dan yang dialokasikan. Sinergitas pemerintah setempat dan dukungan DPRD terhadap pembinaan ikut berkontribusi membangun terjalinnya kerukunan umat beragama dengan pemerintah.<sup>103</sup>

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akhir tahun 2015 menerangkan bahwa Islam sebagai mayoritas dengan prosentase 75.96% dari keseluruhan 291.031 jiwa, diikuti Kristen, Katholik dan Hindu.<sup>104</sup> Adapun penduduk beragama non Islam pada umumnya dari suku Padoe, Pamuna,

---

<sup>101</sup>Hasanuddin Bengngareng, Kepala Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Luwu Timur, *Wawancara*, Desa Puncak Indah Malili, 5 April 2016.

<sup>102</sup>Marsuki, Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Luwu Timur, *Wawancara*, Malili, 10 April 2016.

<sup>103</sup>Harun, Kasi Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Luwu Timur, *Wawancara*, Malili, 10 April 2016.

<sup>104</sup>Andi Amri, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Luwu Timur, *Wawancara& Dokumentasi*, Malili, 10 April 2016.



Karunsie, Toraja, dan transmigran Bali.<sup>105</sup> Berikut tabel jumlah penganut agama di Luwu Timur yang bersumber dari Kementerian Agama Luwu Timur di Malili.

Agama	Jumlah	Prosentase
Islam	220.989	75.94%
Kristen	47.172	16.21%
Katholik	6.435	2.21%
Hindu	16.406	5.60%
Khonghucu	1	0%
Kepercayaan	3	0%
Jumlah	291.013	100%

Adapun fasilitas peribadatan di Luwu Timur pada akhir 2015 yaitu masjid berjumlah 384 buah, gereja 284 buah dan pura sebanyak 129 buah. Kec. Malili tercatat sebagai wilayah dengan masjid terbanyak dengan jumlah 59 masjid, sedang gereja terbanyak berlokasi di Kec. Mangkutana dengan jumlah 52 gereja dan pura terbanyak berlokasi di Kec. Angkona dengan jumlah 54 buah.<sup>106</sup>

Adapun tabel jumlah rumah ibadah di Luwu Timur berdasarkan wilayah kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Masjid	Mushalla	Gereja	Pura
1	Burau	56	6	28	5
2	Wotu	49	9	24	16
3	Tomoni	47	15	24	0
4	Tomoni Timur	9	8	21	27
5	Angkona	40	9	41	54
6	Malili	59	4	14	7
7	Towuti	32	3	15	0
8	Nuha	21	2	9	1
9	Wasuponda	13	2	36	0
10	Mangkutana	42	14	52	0
11	Kalaena	16	17	20	19
	Jumlah	384	89	284	129

Sumber: Dokumentasi Kementerian Agama, Malili, Luwu Timur tahun 2015.

<sup>105</sup>Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Luwu Timur dan Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Timur tahun 2015.

<sup>106</sup>Dokumentasi Kementerian Agama Luwu Timur tahun 2015.

Berdasarkan data angka yang dipetakan, maka realitas kerukunan beragama perlu dianalisis lebih lanjut. Beberapa hal yang dapat dijadikan acuan seperti relasi antar umat beragama, aktifitas bakti sosial umat beragama, perayaan keagamaan serta adanya budaya dan adat istiadat yang terbawa dari daerah asalnya yang mencerminkan identitas kesukuan dan bahkan mempresentasikan corak keagamaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebut saja Kec. Tomoni Timur yang terdiri dari Alam Buana, Pattengko, Kertoraharjo, Margomulyo, Cendana Hitam, dan lainnya sebagai desa minoritas muslim. Mayoritas Hindu terpusat di Kertoraharjo dan umat Kristiani terpusat di desa Pattengko. Dari delapan desa tersebut, 6 desa diantaranya dipimpin oleh kepala desa non muslim. Tomoni Timur dalam pertimbangan penulis dianggap sebagai daerah dengan tingkat kemajemukan dan kerawanan yang berpotensi konflik.

a. Relasi Sosial Antar Umat Beragama di Tomoni Timur

Pada tiga tahun terakhir (2012 – 2015) jumlah pemeluk Islam di Tomoni Timur tidak lebih dari 100 orang dan ada desa yang tidak memiliki surau/mushalla untuk ibadah.<sup>107</sup> Jumlah muslim di Alam Buana ada 25 orang, Kristen 4 orang dan Hindu 565 orang. Sedang di Kertoraharjo dengan jumlah muslim 39 orang, Kristen 12 orang dan Hindu yang berjumlah 1782 orang.<sup>108</sup>

Kertoraharjo sebuah desa dengan mayoritas penduduknya adalah transmigran Bali. Aktivitas keagamaan yang paling menonjol adalah aktivitas ibadah Hindu ditandai adanya pura kelompok/pribadi yang ditempatkan di pekarangan depan rumah masing-masing dan beberapa pura desa. Desa Kertoraharjo dipimpin oleh kepala desa beragama Hindu.

---

<sup>107</sup>I Made Suarta, Kepala Desa Kertotaharjo Kecamatan Tomoni Timur, *Wawancara*, Tomoni Timur, 12 April 2016.

<sup>108</sup>Dokumentasi data penduduk dari Desa Alam Buana dan Kertoraharjo, tahun 2016.

Tidak jauh dari desa Kertoraharjo, terdapat mayoritas Muslim tepatnya di desa Margomulyo. Sebagian penduduk Margomulyo merupakan transmigran wilayah Jawa. Letak desa Margomulyo dan desa Kertoraharjo yang berdekatan menjadikan toleransi antar umat Islam Jawa dan umat Hindu Bali terjalin sangat baik. Hubungan toleransi dapat terlihat saat masyarakat Hindu ketika mengarak *ogoh-ogoh* keliling desa diiringi musik gamelan Bali yang khas dan mencolok. Rute arak-arakan yang biasanya berakhir di lapangan Tomoni Timur pada sore menjelang petang, maka gamelan yang tadinya dimainkan cukup keras kemudian dikurangi volume suaranya bahkan dihentikan karena mendengar suara adzan magrib, begitu pula masyarakat Muslim seringkali turut ikut meramaikan arak-arakan *ogoh-ogoh* umat beragama Hindu.

Toleransi juga terasa saat masyarakat muslim melakukan kunjungan atau bertamu kerumah salah seorang masyarakat penganut Hindu. Mereka tidak menyuguhkan makanan minuman buatan tangan sendiri melainkan makanan minuman produksi pasar atau kemasan saja untuk menghindari keragu-raguan masyarakat umat Islam akan kehalalan makanan yang disajikan. Di sisi lain tuan rumah akan merasa tersinggung apabila hidangan yang disajikan tidak disentuh atau disantap.

Namun demikian, masih ada aspek lain yang menunjukkan realitas intoleransi di dalam relasi sosial masyarakat Muslim-Hindu. Kesan antipati beberapa masyarakat Hindu di Kertoraharjo yang berasumsi bahwa anak muslimah berhijab lebih baik disekolahkan di Ibtidaiyyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Begitupun salat di masjid saat Nyepi juga dianggap tidak menghargai sebab suara speaker masjid saat adzan berkumandang dianggap mengganggu proses Nyepi.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup>I Made Suarta, Kepala Desa Kertoraharjo Kec. Tomoni Timur, *Wawancara*, Tomini, 12 April 2016.

Pada tataran ibadah ritual, interaksi umat Islam-Hindu terjebak pada masalah bagaimana menyampaikan kebenaran masing-masing agama yang tidak boleh dinilai hanya pada tataran nomatif. Permasalahan jilbab mungkin saja adalah unsur kesalahpahaman dan dianggap aksesoris atau sekadar identitas sehingga ulama dan tokoh masyarakat setempat sepatutnya memberikan pemahaman.

Sikap moderat yang ditampilkan umat Islam terlihat saat proses ritual ibadah Tapa Brata Penyepian oleh umat Hindu yang kala itu bertepatan hari Jumat. Pengeras suara masjid disetting tidak begitu keras dan penyampaian khutbah tidak menggunakan *loud speaker* agar suasana keheningan penyepian tetap khidmat. Kalangan muslim Margomulyo diminta tidak berbuat gaduh dengan tidak menggunakan kendaraan yang suara mesinnya nyaring, bahkan tidak jarang umat Islam tidak menyalakan lampu di rumah pada malam hari.

I Made Suarta dalam wawancara pada 12 april 2016 menyampaikan:

“Ada 4 pantangan dalam ritual Tapa Brata kehinduan yakni; *amati geni* (tidak menyalakan api), *amati karya* (tidak berkegiatan), *amati lelungan* (tidak bepergian) dan *amati lelanguan* (tidak mengumbar hawa nafsu atau mengadakan hiburan dan senang-senang). Oleh karena itu, pada kondisi-kondisi dimana pelaksanaan Tapa Brata bertepatan dengan hajatan/perayaan lintas agama yang sifatnya ramai dan senang-senang, maka dibicarakan agar tetap menjaga suasana peribadatan. Tahun 2016, perayaan nyepi bersamaan dengan pelaksanaan sholat gerhana, sehingga dimohon pada imam masjidnya agar tidak menggunakan pengeras suara supaya pelaksanaan Tapa Brata berjalan khidmat”.<sup>110</sup>

Lain halnya dengan kegiatan ibadah semacam baca Kitab Sloka Suci Weda (sejenis MTQ dalam Islam) dengan parade ogoh-ogoh maka umat lintas agamadapat melibatkan diri dalam pengamanan dan ikut menyemarakkan.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup>I Made Suarta, Kepala Desa Kertoraharjo Kec. Tomoni Timur, *Wawancara*, Tomini, 12 April 2016.

<sup>111</sup>I Made Sudarsana, Kepala Desa Cendana Hitam Kecamatan Tomoni Timur dan Pinandita Hindu, *Wawancara*, Tomoni, 12 April 2016.

#### b. Peliharaan Hewan Ternak

Dinamika kemajemukan yang kritis berujung kepada perbedaan pandangan, pola kehidupan, adat istiadat dan kebiasaan masing-masing umat beragama. Dalam adat dan kebiasaan masyarakat nonmuslim, keberadaan hewan peliharaan seperti anjing dan babi hampir dapat dipastikan ada di setiap desa yang masyarakatnya non Islam. Menelusuri desa Pattengko, Kertoraharjo dan Cendana Hitam yang mayoritas penduduknya non muslim, akan ditemukan hampir di sepanjang jalan desa anjing-anjing berlarian, berbaring di pinggir jalan ataupun duduk di teras rumah pemiliknya.

Keberadaan anjing sebagai hewan peliharaan bersifat liar dan tidak divaksin. Sementara hewan peliharaan babi dibuatkan kandang seadanya di belakang rumah masing-masing. Oleh sebab itu, pemerintah Kab. Luwu Timur menetapkan peraturan berkenaan dengan kebijakan dan penertiban hewan ternak. Dalam pasal 18-J mengatur tentang usaha peternakan babi dengan jumlah minimal 20 ekor harus mendapat surat izin usaha peternakan, dan pasal 24 (1) bahwa ternak yang berkeliaran secara bebas tanpa penggembalaan dianggap ternak liar (kecuali ternak unggas) dan dapat ditangkap oleh petugas Dinas Daerah atau petugas lain yang ditunjuk untuk itu.<sup>112</sup>

Hewan peliharaan seperti babi umumnya bersifat non ternak, hanya beberapa ekor saja yang dipelihara dan dikandangkan sebab hewan peliharaan ini bukan untuk dikomersilkan tetapi untuk konsumsi. Sementara untuk pemeliharaan anjing, pemerintah tidak menerapkan aturan khusus, padahal keberadaannya dianggap krusial dengan pertimbangan seringkali terjadi kasus masyarakat tergigit anjing. Diketahui rabies adalah virus mematikan dan

---

<sup>112</sup>Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur, Himpunan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur, Perda Kab. Luwu Timur No. 7 Tahun 2007 tentang Usaha Peternakan dan penertiban Ternak, *Dokumentasi*, 15 April 2017.

menyebarkan melalui air liur hewan yang terinfeksi dan paling mungkin menularkan virus rabies pada manusia. Jika seseorang menunjukkan gejala rabies maka kondisi tersebut hampir selalu berakibat buruk.<sup>113</sup>

Kasus masyarakat muslim digigit anjing pernah terjadi sehingga memancing warga muslim melakukan aksi meracuni hewan peliharaan atau ataupun liar. Ketegangan antar warga yang berbeda keyakinan di beberapa desa tak terelakkan dan terkesan lamban ditangani oleh aparat pemerintah setempat. Inisiatif tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat menggelar pertemuan untuk menemukan solusi dan merekonstruksi kerukunan umat. Solusi diwujudkan dengan meminimalisir kegiatan yang menempatkan seseorang dekat dengan binatang yang mungkin terinfeksi rabies dilanjutkan dengan perawatan untuk mencegah infeksi bertambah parah.<sup>114</sup>

Limbah kotoran babi dan anjing (feses, urine, ceceran pakan, dan air cucian) mengandung virus dan bakteri parasit dan potensial mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat sekitarnya, baik dari aroma yang menyengat bahkan apabila terinjak, sebab merupakan najis berat dalam Islam. Pemerintah perlu memainkan perannya dengan pembinaan, pengawasan, penertiban usaha ternak serta sanitasi dan amdal (analisis dampak lingkungan).

Beberapa kepala desa seperti Tomoni Timur, Angkona, dan lain-lainya perlu meyakini serius berupa arahan dan aturan kepada masyarakatnya yang memelihara babi agar kotorannya tidak dibuang ke sungai atau saluran irigasi persawahan, melainkan harus dibuatkan lubang timbunan dengan kedalaman

---

<sup>113</sup>Tamyiz Dwianto, Kades Purwosari di Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, Purwosari, 12 April 2016.

<sup>114</sup>Suwanto, Kades Margomulyo Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, Margomulyo, 12 April 2016.

minimal  $\frac{1}{2}$  meter, dan untuk menetralsir aroma tidak sedap kotoran babi tersebut, dianjurkan menggunakan obat penghilang aroma.<sup>115</sup>

Adapun limbah kotoran ternak yang dulunya dibuang ke sungai atau saluran irigasi persawahan tidak lagi dilakukan namun dibuatkan lubang untuk ditimbun kembali atau dimanfaatkan dengan inovasi tertentu sehingga tidak lagi mencemari arus air yang melintas sepanjang wilayah yang dilaluinya. Pertimbangan sanitasi dan dampak lingkungan menjadi acuan agar tidak mempengaruhi kualitas sumber air sebab mayoritas warga setempat masih menggunakan sungai untuk kebutuhan tertentu meskipun telah dihimbau untuk menggunakan sumur (gali dan bor) untuk kebutuhan makan minum dan kegiatan sehari-hari.<sup>116</sup>

Jika tidak disikapi dengan pembinaan, pengawasan, penertiban dipastikan akan memicu konflik. Deteksi dini terhadap kebiasaan tersebut dapat diselesaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai pola pikir inklusif, toleran, pluralis dan pro-aktif. Namun dalam realitasnya masih ditemukan beberapa individu dari umat beragama yang terkesan masih ber-*mindset* apatis, eksklusif, fanatik, intoleran bahkan arogan. Namun jika dibiarkan maka berpotensi menimbulkan konflik antar umat beragama. Terlebih lagi arogansi dikemas dengan unsur premanisme dan provokasi yang tentu akan memicu benturan sehingga kerap pelaku dan komunitasnya disebut *problem maker*.

Penyelesaian perkara tersebut bukan tidak mungkin harus dipolitisasi, ditindaklanjuti secara persuasif dan represi. Meskipun terkesan sepele namun harus tetap ditindaki dengan cermat dan hati-hati. Keterlibatan wakil dari Islam

---

<sup>115</sup>Tamyiz Dwianto, Kades Purwosari di Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, Purwosari, 12 April 2016.

<sup>116</sup>Bambang Sutrisno, Kades Manunggal, Tomoni Timur Kab. Lutim, *Wawancara*, Tomoni Timur, 12 April 2016. Lihat, Perda di Luwu Timur tentang Regulasi Memelihara Hewan Ternak dan Usaha Pemotongan Hewan.

dalam lingkup legislatif dan eksekutif biasanya dilibatkan, baik sebagai *problem solver* atau sebagai pelaku yang mengintervensi penyelesaian konflik.<sup>117</sup>

Keberadaan hewan ternak diatur dalam peraturan daerah khususnya ternak yang dikelola oleh masyarakat non muslim diatur dalam Perda Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2007 Pasal 28<sup>118</sup> yang menyatakan bahwa pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa dengan tetap mempertimbangkan sanitasi (usaha untuk membina suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan masyarakat) dan analisis dampak lingkungan.<sup>119</sup> Beberapa kepala desa non muslim masih memperlihatkan apatis dan mengabaikan kebijakan Perda Luwu Timur No. 6 tahun 2007 tersebut.

Berikut petikan wawancara dari informan selaku Ketua FKAB Lutim:  
 “Problem tersebut terkait tradisi atau budaya masyarakat non muslim, adanya kemungkinan berpotensi konflik dan apabila dibiarkan berlarut maka cenderung menimbulkan sikap kebencian sehingga perlu ditangani secara komprehensif. Tindakan penanganan dilakukan dengan cara persuasif dan represif tergantung bagaimana keadaan di lapangan dan selama penanganan dilakukan pendampingan dari pihak keamanan sebagai langkah antisipatif. Ketika terjadi kebuntuan dalam menemukan solusi, kami akan meminta pihak Legislatif dan Eksekutif untuk turun tangan membantu langkah penyelesaian masalah. Begitu juga halnya bentrok kalangan pemuda antar desa (biasanya beda agama), sebenarnya yang dapat saja ditangani oleh tokoh masyarakat setempat namun tidak jarang keberadaan pemuka agama dalam FKUB harus ikut dilibatkan karena adanya permintaan dari pemerintah setempat, baik itu menegosiasi, mengawasi atau memediasi terwujudnya penyelesaian.”<sup>120</sup>

---

<sup>117</sup> Ardias Bara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Guru SMA Yayasan Pendidikan Sorowako, *Wawancara*, Sorowako, 13 Agustus 2016.

<sup>118</sup> Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Luwu Timur, Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006-2007, *Arsip dan Dokumentasi Luwu Timur*, h. 157

<sup>119</sup> Suardi Ismail, Kabid Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Luwu Timur, Ketua Fraksi DPRD Luwu Timur dari Partai Keadilan Sejahtera, Pembina Pesantren Ittihadul Ummah di Ussu, Kec. Malili, Luwu Timur, *Wawancara, Malili*, 13 Maret 2016.

<sup>120</sup> Ardias Bara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Guru SMA Yayasan Pendidikan Sorowako, *Wawancara*, Sorowako, 13 Agustus 2016.



c. Realitas Benturan Kultural dalam Umat Lintas Agama.

Permasalahan pada pembangunan/pendirian rumah ibadah menjadi penting karena adanya perbedaan pada konsep keumatan bagi masing-masing agama. Bagi umat Islam yang berasal dari organisasi yang berbeda-beda dapat melakukan ibadah salat secara berjamaah di mesjid, musalla tanpa melihat perbedaan ras, suku, bahasa maupun organisasi. Jadi motivasi pendirian rumah ibadah pada umat Islam dilatarbelakangi oleh kapasitas yang bisa ditampung oleh sebuah mesjid.<sup>121</sup> Sebaliknya di kalangan agama Kristen yang terbentuk diatas berbagai sekte, aliran, maupun suku menjadi pendorong kuat membangun sebuah gereja untuk tempat ibadah.<sup>122</sup> Oleh karena itu semangat pendirian rumah ibadah pada setiap sekte seringkali menimbulkan gesekan-gesekan sosial akibat perbedaan pandangan dalam proses pendirian rumah ibadah. Namun perbedaan tersebut tidak berlarut hingga dapat memunculkan benturan apalagi pengrusakan rumah ibadah.

Sejarah terjadinya suatu gesekan sosial yang berujung pada benturan fisik salah satunya adalah insiden tahun 2013 yang menjadi bukti terjadinya konflik antar desa. Insiden tersebut melibatkan konflik antara Patengko (mayoritas Kristen) dan Kertoraharjo (mayoritas Hindu), bahkan desa tetangga Margomulyo (mayoritas Islam) terkena dampaknya akibat ketegangan antar warga.<sup>123</sup> Realitasnya bahwa konflik tersebut bukanlah konflik agama tetapi konflik antar umat beragama akibat aksi pemuda Kristen dari Patengko (diduga adiksi dan pengaruh miras) mengganggu ketentraman umat Hindu saat menjalankan ritual

---

<sup>121</sup>Suardi Ismail, Kabid Fatwa MUI Luwu Timur, Pembina Pesantren Ittihadul Ummah di Ussu Malili, *Wawancara*, Malili, 13 Maret 2016.

<sup>122</sup>Ardias Harun, Kasi Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Luwu Timur, *Wawancara*, Malili, 10 April 2016.

<sup>123</sup>Suwanto, Kepala Desa Margomulyo Tomoni Timur Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, Tomoni, 12 April 2016.

keagamaan. Upaya persuasif telah dilakukan namun realitasnya upaya represif lebih diprioritaskan sehingga berakibat hilangnya nyawa pemuda Patengko karena alasan membela diri dan telah mengusik ritual agama yang diyakininya.

Ketegangan tersebut berpotensi mengancam kerukunan yang telah dirawat sekian lama hanya disebabkan oleh aksi memobilisasi massa dengan alasan kesamaan etnis dan agama untuk melakukan aksi pembalasan. Konflik tersebut tidak hanya terbatas pada dua desa namun berdampak luas pada desa lainnya yaitu Margomulyo yang secara geografis bersebelahan dengan daerah potensi konflik.

Dengan pendekatan persuasif dan mengikuti mekanisme hukum serta mengedepankan kekeluargaan maka ketegangan tersebut tidak berkembang dan hanya terlokalisir antar kedua pihak yang berkonflik. Konflik yang terjadi bukan murni aksi SARA namun merupakan aksi intoleran dari oknum yang mengusik ritual agama tertentu. Dampak dari benturan tersebut adalah pengrusakan beberapa rumah warga namun tidak menimbulkan korban jiwa.

Ketegangan ditangani secara hukum namun dengan pendekatan persuasif dan mengedepankan kekeluargaan supaya masalahnya tidak semakin pelik dan semrawut yang juga berakibat mengusik keharmonisan hidup umat lintas agama. Konflik yang mengarah ke etnis dan agama ini berhasil didamaikan dengan langkah cepat sebab dampaknya akan menghambat distribusi logistik (ternak dan pangan) yang dikelola penduduk Kertoraharjo.<sup>124</sup> Ancaman lain yang potensial terjadi apabila keduanya tidak berdamai maka implikasinya bukan hanya permasalahan individual tapi masalah kolektif.<sup>125</sup>

---

<sup>124</sup>Suwanto, Kades Margomulyo di Kec. Tomoni Timur Kab. Luwu Timur, *Wawancara*, Tomoni Timur, 12 April 2016.

<sup>125</sup>Ardias Bara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Guru SMA Yayasan Pendidikan Sorowako, *Wawancara*, Sorowako, 13 Agustus 2016.

Konflik suku Bali – Toraja di Kertoraharjo, Tomoni Timur dimediasi oleh tokoh lintas agama. Pengawasan aparat keamanan untuk mengantisipasi keberadaan oknum yang bisa saja memperkeruh rekonsiliasi. Upaya damai ditempuh dengan mempertemukan kedua pihak dengan langkah berdiskusi dan mengedepankan pendekatan edukasi tanpa bermaksud mengagitasi konsep kerukunan melalui orasi.

Berikut petikan wawancara dari informan:

“Keberadaan Forum Pemuka Lintas Agama atau FKUB secara tertulis berfungsi mengawal regulasi keagamaan seperti PBM tentang rumah ibadah, menampung dan menyalurkan aspirasi umat beragama, memberdayakan, mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan regulasi keagamaan. FKUB yang terdiri dari tokoh agama juga ada tokoh masyarakat salah satu dari mereka merepresentasikan eksistensi mereka sebagai wakil adat, sehingga keberadaannya bukan hanya menangani masalah keagamaan melainkan juga menangani masalah sosial dan budaya.

Berhubungan dengan upaya rekonsiliasi pasca konflik diusahakan untuk mengembalikan suasana damai yang dilakukan antara dua pihak yang terlibat konflik. Meskipun sudah ada usaha damai namun kemungkinan potensi penyebaran kebencian bernuansa etnis masih terasa dengan adanya indikator penduduk dari Kertoraharjo yang enggan menjual hewan ternak dan hasil bumi kepada penduduk Patengko dan kalau pun harus dijual harganya seakan dilambungkan. Tradisi menternakkan babi lambat-laun beralih ke usaha ternak unggas dengan alasan ternak unggas lebih menjanjikan keuntungan sebab hasilnya juga dibeli oleh kalangan muslim. Begitupun jika harus melintasi desa Patengko atau Kertoraharjo sebaiknya tidak seorang diri untuk penjagaan keamanan diri. Di sisi lain, untuk meminimalisir kemungkinan konflik berulang, dibutuhkan kerjasama beberapa tokoh masyarakat setempat yang dapat memberikan informasi berkala guna memantau perkembangan kondisi daerah konflik.<sup>126</sup>

Pada eskalasi selanjutnya konflik tersebut berimplikasi pada buruknya hubungan antar komunitas etnis dan umat beragama yang justru diawali buruknya hubungan antar pemuda, ditambah lagi adanya pengalaman buruk masa

---

<sup>126</sup> Ardias Bara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Guru SMA Yayasan Pendidikan Sorowako, *Wawancara*, Sorowako, 13 Agustus 2016.

sebelumnya (sebelum pemekaran) muncul propaganda penyiaran agama, politisasi pendirian rumah ibadah serta penggalakan nikah campur atau beda agama yang menyebabkan rasa khawatir tokoh perekat umat akan populasi umatnya yang menyusut.

Begitu pula dampak pembagian wilayah pemukiman dan mata pencaharian yang terjadi secara alamiah di kalangan etnis yang pada dasarnya potensial menjadi sumber konflik. Selama ini pembagian wilayah tersebut bersifat eksklusif dan kurang membaur antar etnis yang berbeda. Penganut Hindu lebih menekuni bidang pertanian dan perkebunan, dan penganut Kristen Toraja lebih fokus pada bidang peternakan. Lambat laun hal ini mulai mengalami pergeseran diganti oleh etnis Jawa Kristen, Lombok Islam dan Luwu Islam.<sup>127</sup>

Kecamatan Tomoni Timur terdiri dari 8 desa, hanya ada dua desa diantaranya dipimpin oleh beragama Islam dan lainnya 3 Kepala Desa beragama Hindu dan 3 lainnya beragama Kristen.<sup>128</sup> Adapun data rumah ibadah di Desember 2015 terdiri atas; masjid 9 unit, gereja Kristen 15 unit, gereja Katholik 3 unit dan pura 13 unit (selain kelompok).<sup>129</sup> Masyarakat majemuk yang terdiri atas agama, suku dan ras di Tomoni Timur rentan dengan potensi ancaman dan konflik selain potensi kekuatan.

Berdasarkan data di atas, fakta bahwa beberapa penganut Islam masih berasumsi bahwa anak muslimah berjilbab sebaiknya menempuh pendidikan di madrasah dan bukan di sekolah umum negeri, sebab timbul kekhawatiran bahwa nantinya interaksi antar anak-anak yang berbeda keyakinan dapat membawa

---

<sup>127</sup>Yunus, Kasubag Administrasi Kementerian Agama Luwu Timur, *Dokumentasi*, Malili, 13 April 2016.

<sup>128</sup>Suedi Rustam, ASN Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Lutim, Tokoh Masyarakat di Tomoni Timur, *Wawancara dan Dokumentasi*, Malili, 13 April 2016.

<sup>129</sup>Yunus, Kasubag Administrasi Kementerian Agama Luwu Timur, *Dokumentasi*, Malili, 13 April 2016.

dampak buruk bagi anak-anak mereka. Bahkan biasanya disalahartikan oleh penganut agama tertentu bahwa interaksi tersebut dikemas untuk mempengaruhi akidah/keyakinan anak-anak mereka. Ini menjadi tugas bersama menjelaskan kebenaran yang tidak boleh terjebak pada cara yang tidak tepat.<sup>130</sup>

Realitas lainnya adalah insiden terbakarnya fasilitas gereja pada 1 Januari 2011 terjadi di desa Purwosari kecamatan Tomoni Timur dengan Kades Tukiyo saat itu. Pasca terbakarnya fasilitas Gereja Masehi Injili Indonesia (GMII) dan Gereja Katholik Santo Paulus, situasi daerah dinyatakan kondusif oleh pihak kepolisian dengan tetap melakukan pengamanan dan pertemuan bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat secara intensif.<sup>131</sup>

Hasil penelusuran Forum Lintas Agama mengungkap bahwa kejadian tersebut tidak lain adalah akibat dari konflik internal yang tidak terselesaikan.<sup>132</sup> Kejadian tersebut mengindikasikan adanya upaya mengeksplor konflik intra umat ke dalam konflik antar umat beragama. Sepatutnya peristiwa tersebut tidak dibesar-besarkan tokoh agama manapun melokalisir konflik intra umatnya ke balik ajarannya, hukum atau kekeluargaan demi mencegah menjalarnya yang dapat merusak tatanan kedamaian kehidupan antar umat beragama.<sup>133</sup>

Berbagai masalah yang terjadi di masyarakat, apakah itu sosial, kenakalan remaja, intoleransi lintas agama dan internal agama perlu melibatkan pihak keamanan dengan tetap menyertakan Forum Kerukunan Umat Beragama sebagai mitra pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia yang mengedepankan cara

---

<sup>130</sup> Abdul Hakim, Tokoh Masyarakat di Desa Kertotaharjo Kecamatan Tomoni Timur, *Wawancara*, Tomoni, 12 April 2016.

<sup>131</sup> Tamyiz Dwianto, Kades Purwosari di Kec. Tomoni Timur, *Wawancara*, Purwosari, 12 April 2016.

<sup>132</sup> Ardias Bara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Guru SMA Yayasan Pendidikan Sorowako, *Wawancara*, Sorowako, 13 Agustus 2016.

<sup>133</sup> Tamyiz Dwianto, Kades Purwosari di Kec. Tomoni Timur, *Wawancara*, Purwosari, 12 April 2016.

persuasif daripada represif yang terkesan negatif, serta mengagitasi massa dengan orasi konsep kerukunan diminimalisir dengan pendekatan edukasi.

Selain Tomoni Timur, Kec. Mangkutana dengan 11 desa dipimpin oleh 7 kades non muslim, 4 sisanya adalah kades muslim. Data rumah ibadah di Mangkutana dengan rincian:

No.	Desa	Masjid	Mushalla	Gereja	Pura
1	Balai Kembang	2	2	5	0
2	Manggala	1	0	4	0
3	Wonorejo	1	4	1	0
4	Maleku	1	2	15	0
5	Panca Karsa	1	1	11	0
6	Margolembo	3	2	2	0
7	Kasintuwu	4	1	12	0
8	Teromu	2	1	6	0
9	Wonorejo Timur	2	2	0	0
10	Sindu Agung	5	4	1	0
11	Koroncia	0	1	4	0
	Jumlah	22	20	61	0

Mayoritas penduduk di Mangkutana beragama Islam yaitu 217.929 dengan jumlah 42 unit masjid dan musalla sedang komunitas masyarakat yang beragama Kristen yaitu 46.527 dan Katolik 6.187 dan mempunyai 61 unit gereja, pemeluk Hindu berjumlah 16.231 dan kepercayaan lainnya 20 jiwa.<sup>134</sup> Dengan masyarakat yang majemuk, bisa dikatakan bahwa masyarakat setempat terlihat harmoni meskipun kesannya *top down* dan bukan *bottom up*.

Meskipun jumlah pemeluk Islam di Mangkutana terbilang mayoritas dengan jumlah rumah ibadahnya kalah banyak dari jumlah sarana ibadah Kristen, tidak berarti ada kekeliruan dalam prosedur pendirian rumah ibadah dan keberadaan kuantitas sarana ibadah Kristen yang lebih banyak tersebut tidak menunjukkan superioritas minoritas. Akan tetapi jumlah sarana peribadatan umat Kristen memang sudah ada sebelum adanya regulasi Peraturan Bersama Menteri

<sup>134</sup>Badan Pusat Statistik Luwu Timur, Luwu Timur dalam Angka 2015, Dokumentasi.

Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 tentang Pendirian Rumah Ibadah tahun 2006.<sup>135</sup>

Dalam realitas lainnya berkaitan dengan pola relasi sosial untuk etnis Tana Toraja di Luwu Timur adalah adat istiadatnya yang sangat sulit dilepaskan dalam kehidupan dan kepribadian sebagaimana yang dilihat dalam kehidupan dan tata cara pemakaman jenazah. Pola relasi sosial tersebut meliputi hubungan kekerabatan, ketergantungan ekonomi, dan patron-klien. Harun mengatakan bahwa pola relasi tersebut tetap eksis hingga kini hanya saja mengalami distorsi, (pemutarbalikan suatu fakta, penyimpangan, atau perubahan bentuk yang tidak diinginkan).<sup>136</sup>

Hubungan kekerabatan dalam etnis Toraja berakar pada kedekatan hubungan kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya. Sejumlah kasus pertengkaran yang menimpa etnis Tana Toraja lebih disebabkan oleh persoalan yang berkaitan dengan perkelahian remaja kadang-kadang menimbulkan ketersinggungan di kalangan orang tua mereka. Fakta tersebut membuktikan kasus antara Patengko dan Kertoraharjo tahun 2014 yang lalu.

Adapun pola lainnya yaitu ketergantungan ekonomi, seharusnya memberikan pengaruh kuat dalam mendukung proses hubungan sosial dalam masyarakat Tana Toraja utamanya dalam melestarikan kultur atau adat istiadat. Namun dalam realitasnya pola tersebut diputarbalikan dari bentuk yang idealnya dengan menunjukkan ketersinggungan jika ada dari kalangan mereka yang beralih keyakinan baik individu atau kolektif maka memunculkan kekhawatiran adat istiadat mereka jaga akan hilang akibat transformasi keyakinan. Begitupun

---

<sup>135</sup> Ardias Bara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Guru SMA Yayasan Pendidikan Sorowako, *Wawancara*, Sorowako, 13 Agustus 2016.

<sup>136</sup> Harun, Kasi Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Luwu Timur, *Wawancara*, Malili, 10 April 2016.

dengan pola patron-klien, kedudukan istimewanya dalam masyarakat berpeluang tereduksi dengan sendirinya.<sup>137</sup>

Pada hari raya Idul Adha dimana kaum muslimin menyembelih hewan kurban maka pembagian daging kurban dibagikan kepada kaum muslimin yang membutuhkan dan diprioritaskan juga dibagikan ke komunitas non muslim seperti Kristen dan Hindu yang tentunya harus sepengetahuan dari pemuka agama masing-masing karena adanya pengalaman dari asumsi yang pernah berkembang tahun-tahun sebelumnya bahwa pemberian daging kurban tidak lain adalah upaya melemahkan eksistensi penganut Kristen dan Hindu serta menarik simpati mereka.<sup>138</sup>

Hanya saja bagi penganut non-Hindu supaya tidak memberikan atau membagikan daging sapi karena dalam beberapa sekte Hindu di Luwu Timur masih ada yang memposisikan ternak sapi sebagai hewan suci meskipun aliran tersebut terbilang sedikit dan mayoritas sekte dalam Hindu yang berkembang memposisikan sapi sebagai hewan yang seharusnya dihargai dan diistimewakan karena memakannya dianggap sebagai sebuah dosa.

Ajaran teologis dogmatis dalam Hindu seharusnya memang diketahui bagi masyarakat sekitar yang berbeda keyakinan karena berdasarkan pengalaman sebelumnya dimana seorang muslim membagikan masakannya dari olahan sapi kepada tetangganya yang beragama Hindu justru memicu ketersinggungan dan terkesan melecehkan sehingga berakibat atau berdampak pada intoleransi,

---

<sup>137</sup> Ardias Bara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Guru SMA Yayasan Pendidikan Sorowako, *Wawancara*, Sorowako, 13 Agustus 2016.

<sup>138</sup> Suardi Ismail, Kabid Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Luwu Timur, Ketua Fraksi DPRD Luwu Timur dari Partai Keadilan Sejahtera, Pembina Pesantren Ittihadul Ummah di Ussu, Kec. Malili, Luwu Timur, *Wawancara*, *Malili*, 13 Maret 2016.



kesenjangan yang memancing potensi konflik antar umat beragama padahal maksudnya adalah baik hanya karena ketidaktahuan dari yang bersangkutan.<sup>139</sup>

## 5. Analisis Realitas Kerukunan Umat Beragama di Tana Luwu.

Masyarakat Tana Luwu sebagai masyarakat majemuk ditandai dengan berbagai perbedaan, baik perbedaan horizontal maupun vertikal. Perbedaan horizontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku, bahasa, adat istiadat, dan agama. Sedangkan perbedaan vertikal berkaitan dengan perbedaan-perbedaan lapisan atas dan bawah dalam masyarakatsaat ini begitu tajam, baik di bidang sosial, politik, ekonomi maupun budaya.

Hubungan sosial umat beragama di Tana Luwu senantiasa diwarnai beragam oleh dinamika, ketegangan, dan bahkan konflik. Wacana pluralisme secara umum tidak hanya disebabkan oleh adanya kemajemukan (pluralitas) masyarakat, keanekaragaman dalam bidang kehidupan serta struktur masyarakat yang terdiri atas berbagai suku dan agama. Lebih dari itu, dalam realitas keragaman tersebut yang lebih penting adalah membangun pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban yang diantaranya dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan di antara kelompok masyarakat.

Pluralisme secara substansial termanifestasi dalam sikap untuk saling mengakui sekaligus menghargai, menghormati, memelihara, dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural, jamak, atau banyak. Konflik bukan hanya terjadi dalam masyarakat majemuk tapi juga dalam masyarakat homogen.

---

<sup>139</sup>I Made Suarta, Kepala Desa Kertotaharjo Kec. Tomoni Timur, *Wawancara*, Tomoni Timur, 12 April 2016.

Realitas adanya konflik yang mewarnai Luwu Utara seperti konflik Baebunta – Rongkong pada awal pemekaran menunjukkan disharmoni antara penduduk asli dan pendatang. Selanjutnya Banyuurip – Karangan tahun 2014, Kalotok – Pongko hingga 2015, Buangin – Dandang 1990-2012, atau secara umum konflik antar warga di Luwu Utara 2011-2014 lebih tepat ditinjau secara kriminologis.<sup>140</sup> Penyebab pemicu konflik dianggap seragam yang dipicu dengan adanya ketersinggungan anggota kelompok, kesalahpahaman, dendam, minuman keras, rasa solidaritas, kesenjangan sosial/faktor ekonomi, dan hal-hal yang dapat memicu perpecahan.

Tahun 2011 sampai tahun 2014, terjadi 52 kasus konflik antar warga dengan rincian tahun 2011 terjadi 9 kasus, tahun 2012 terjadi 8 kasus, tahun 2013 terjadi 11 kasus, dan tahun 2014 terjadi 24 kasus.<sup>141</sup> Realitas yang sungguh memprihatinkan adalah para pelaku masih relatif muda yang semestinya merupakan tumpuan harapan di masa mendatang. Solidaritas diposisikan sebagai dukungan yang membabi buta terhadap orang-orang yang menjadi anggota persaudaraan. Solidaritas diwujudkan dengan melupakan norma-norma kebenaran dan hal tersebut tentu menyimpang dari idealitas.

Situasi konflik berubah dengan cara-cara kekerasan dan pengrusakan sehingga sulit terkontrol dan upaya penyelesaian hanya memungkinkan dengan intervensi kekuasaan (*top-down*). Keikutsertaan pemerintah tidak lain agar kekerasan yang terjadi dapat diredam sebelum dampak konflik semakin luas dan parah. Penyelesaian ditempuh dengan memprioritaskan cara represif daripada langkah persuasif. Insiden tersebut dilakukan karena pranata yang ada sudah tidak memungkinkan untuk mengatasi kekeruhan konflik.

---

<sup>140</sup>Muh. Alwi, Kasi Pendis Kementerian Agama Luwu Utara di Masamba, *Wawancara*, Masamba, 10 Desember 2015.

<sup>141</sup>Sumber Data: Polres Luwu Utara 2015.

Dalam mengurai konflik saat itu maka kecenderungan yang ditempuh dengan mencari model penyelesaian yang datang dari luar dan cenderung seragam. Diawali dengan pemaksaan oleh pihak keamanan dan selanjutnya dengan penetapan serangkaian aturan dan sanksi bagi kedua belah pihak agar tidak mengulangi konflik. Faktor penyebab terjadinya konflik dari ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan sukuisme/promordealisme diidentifikasi sebagai pemicu konflik yang timbul secara spontan dan dipicu pula dorongan-dorongan sesaat yang kerap kali ditandai dengan sebab-sebab yang kurang rasional.<sup>142</sup>

Berbagai usaha dilakukan dalam menangani konflik yang destruktif dengan memberikan ancaman (peringatan) kepada pihak-pihak yang bertikai dan melumpuhkan kekuatan mereka, dengan tujuan menghentikan pihak-pihak yang bertikai. Langkah tersebut menjadi pilihan karena upaya-upaya preventif melalui negoisasi dan perundingan dianggap kurang efektif. Langkah pengelolaan konflik selanjutnya ditempuh pemecahan masalah terpadu dengan memadukan segala kebutuhan kelompok-kelompok yang berselisih. Segenap kemampuan para elite melakukan berbagai cara yang tepat dengan melibatkan berbagai pendekatan politik, ekonomi dan sosial secara komprehensif meminimalisir dan mengurai konflik secara tuntas.

Adapun insiden konflik dalam **masyarakat heterogen** dalam realitas kerukunan umat beragama di Tana Luwu bersinggungan dengan agama, budaya dan etnis. Budaya dan etnis kerap lebih mendominasi karena agama bukanlah pemicu utama tetapi hanya memboncengi dan pelengkap dalam realitas konflik yang pernah ada. Realitas kemajemukan seperti ini ditunggangi oleh kesenjangan sosial, ekonomi dan tidak optimalnya kesadaran budaya multikultural yang lebih

---

<sup>142</sup>Muhammad Nurdin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Luwu Utara dan Mantan Sekretaris Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 13 Desember 2015.

memungkinkan terbangunnya masyarakat yang berbasis kerjasama dan kemitraan secara tulus dan bukan kerjasama semu yang dipaksakan.

Intermediasi tidak berjalan simultan sehingga kemajemukan menjadi sumber konflik dan perpecahan namun juga berpotensi sebagai sumber kekuatan jika dapat dikelola dan dikembangkan ke arah percepatan kesejahteraan dan persatuan bangsa. Berbagai kasus dengan konflik di Tana Luwu yang melibatkan antar umat beragama, baik insiden tersebut mencuat ke media atau berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, baik sebelum atau pasca pemekaran.

Konflik sosial bernuansa SARA di Luwu terjadi sejak tahun 1994. Kerusuhan di daerah ini terjadi sebelum kerusuhan meletus di daerah lain di Indonesia. Konflik yang terjadi saat itu belum dapat ditangani secara tuntas karena kompleksitas permasalahan dan bentuk penanganan belum menyentuh seluruh segmen konflik yang esensial dan sensitif serta tidak melibatkan segenap masyarakat yang bertikai.

Salah satu wilayah yang turut dilanda konflik adalah Padang Sappa. Konflik lainnya di beberapa wilayah seperti Sabbangparu di Wara Utara, Tompotikka di Wara Selatan, Cimpu di Suli, Battang di Telluwanua dan Belopa. Berbagai faktor yang terkait dipicu oleh penyimpangan dan gangguan pada proses penghayatan dan pengamalan nilai dan norma yang dianut.<sup>143</sup> Berbagai kasus rumah ibadah di Palopo, Masamba Luwu Utara dan Luwu Timur juga konflik di Tomoni Timur pada tahun 2014.

Berbagai analisis tentang konflik antar umat beragama di Tana Luwu dilihat dari aspek teologis tidak begitu tajam ketimpangannya. Dari aspek historis, fakta harmoni lebih cenderung ditorehkan daripada disharmoninya.

---

<sup>143</sup>Syarifuddin Daud, Ketua Majelis Ulama Indonesia Palopo, Ketua Yayasan Masjid Agung Palopo, Pembina Pesantren Datuk Sulaiman Palopo dan Mantan Ketua STAIN Palopo, *Wawancara*, Palopo, 1 Juni 2016.

Perkembangan agama-agama di Tana Luwu berjalan secara damai dan evolutif. Bias historis politis antar agama-agama yang ada di Tana Luwu maka oleh pemerintah secara kreatif telah melakukan peran strategik dengan pembentukan forum dialog antar agama sebagai aset terbangunnya harmoni lintas agama.<sup>144</sup>

Adapun aspek sosial-budaya, politik dan ekonomi lebih dominan terjadi seperti konflik Sabbang, Baebunta-Rongkong Luwu Utara tahun 1998-2000, Tomoni Timur di Purwosari, Patengko, Kertoraharjo, Margomulyo tahun 2014. Berbagai konflik dan kerusuhan disimbolisasikan dengan atribut agama yang pada hakikatnya merupakan representasi dari problema sosial-budaya, politik dan ekonomi.

Menurut Abdul Aziz R, bahwa eksistensi Islam di Tana Luwu telah menyerap tradisi lokal meskipun kulitnya Islam namun didalamnya masih ada akidah keyakinan lokal. Proses terjadinya racikan tradisi lokal ke dalam Islam berimbas dengan pengaruh budaya lokal yang kuat terhadap Islam. Fakta tersebut masih mengakar dalam internal umat seperti beberapa daerah di Luwu Timur dan Luwu Utara.<sup>145</sup>

Umat lintas agama di Tana Luwu sudah lama hidup berdampingan, baik sebelum atau pasca pemekaran. Namun pada masa pasca pemekaran setidaknya pernah terjadi konflik yang dipicu oleh kesenjangan sosial dan ekonomi dan berimbas terjadinya konflik antar etnis. Penyebab konflik disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan kesukuan dan identitas budaya masing-masing.

---

<sup>144</sup>Said Mahmud, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Palopo, Guru Besar IAIN Palopo dan Mantan Ketua STAIN Palopo, *Wawancara*, Palopo, 10 Juni 2016.

<sup>145</sup>Abdul Aziz R, Ketua Majelis Ulama Indonesia Luwu Timur, Pimpinan Pesantren di Desa Lauwo Burau Luwu Timur, *Wawancara*, Burau, 13 Agustus 2016.

Ada dua hal pokok yang mengganggu pada saat konflik dan pasca konflik. **Pertama**, terganggunya pelaksanaan ibadah masing-masing kelompok. Menurut Nurdin, selama berlangsung konflik antar warga, kegiatan ibadah umat Islam terganggu karena anak-anak mereka yang ingin belajar mengaji di desa tetangganya merasa tidak aman sehingga kegiatan belajar mengaji otomatis terhenti. Demikian pula etnis penduduk beragama Kristen tidak tenang melaksanakan kebaktian karena isu serangan pihak lawan yang selalu dihembuskan dari pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya.<sup>146</sup>

**Kedua**, menurunnya volume toleransi beragama, padahal sebelumnya kehidupan sosial antar penganut agama berlangsung sangat baik. Jaringan sosial kemasyarakatan bukan hanya soal-soal yang berhubungan aktifitas pertanian tetapi juga keagamaan. Banyak tidaknya hubungan mempengaruhi juga kualitas interaksi tetapi tidak menjamin kualitas keterikatan emosional. Kenyataan yang ada di lapangan menunjukkan bahwa hubungan yang dibentuk lewat interaksi berdasarkan masing-masing individu yang dikaitkan dengan profesinya.

Realitas kerukunan di Tana Luwu sempat terkontaminasi menjadi daerah yang anti toleransi dan berbagai konflik yang mewarnai pada umumnya dilatarbelakangi faktor ekonomi, fanatisme organisasi serta alasan-alasan non religius lainnya. Perbedaan pemahaman dalam hal budaya dinilai sebagai penyimpangan dan berseberangan dengan Islam.

Tradisi sabung ayam dan minum *ballo* (arak) dalam upacara *rambusolo*’ bagi masyarakat Toraja dan Rongkong (Kristen) tidak bisa dihargai dan dihormati pelaksanaannya karena tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut mayoritas. Pelaksanaan tradisi secara eksklusif mungkin bisa diterima namun karena dilakukan secara “demonstratif” dan mengajak pemuda

---

<sup>146</sup> Muhammad Nurdin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Luwu Utara dan Mantan Sekretaris Kab. Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 13 Desember 2015.

beda agama untuk berpartisipasi tentu mengusik penganut lainnya dan dianggap meracuni akal pikirannya.

Pasca konflik, berbagai kegiatan yang mengarah pada usaha mengganggu umat lain masih tampak meskipun sudah berkurang. Masih ditemukannya orang-orang tersebut yang mempertontonkan minum *ballo* di pinggir jalan berakibat sering mengganggu kekhusyukan ibadah dan orang-orang yang lalu lalang di depannya. Sebaliknya masih ada penganut Islam yang mengganggu kebaktian dengan cara berteriak-teriak atau mengejek dengan ujaran yang kurang sopan. Bagi anak-anak remaja, ujaran tidak estetik dilontarkan misalnya *Toraja Pakkande babi* dan sebagainya.

Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, konflik destruktif mengalami penurunan namun aksi yang rentan terjadi dinilai sebagai “tindak perlukosi” yaitu tindak ujar yang memiliki daya dorong serta pengaruh kuat bagi yang menerimanya atau yang mendengarnya untuk melakukan sesuatu. Perbedaan pemahaman terhadap eksistensi umat berbeda suku, agama dan budaya dipahami secara konvensional. Menerima eksistensi Kristen (Toraja, Rongkong, Pamona) adalah realitas sekaligus konsekuensi logis yang harus diterima namun tradisi yang dilakukan tidak sampai berbenturan dengan lingkungan mayoritas Islam.

Dari beberapa insiden yang pernah ada, penanganan konflik oleh aparat yang kurang memadai patut untuk diapresiasi karena diantara konflik ada yang bisa diantisipasi yang tampaknya lebih sigap. Pihak keamanan bertindak koersif dengan memberikan ancaman keras kepada siapapun yang melakukan penganiayaan dan kekerasan. Ancaman tersebut terbukti efektif karena dapat direduksi

Hampir semua kasus di Tana Luwu (Padang Sappa, Baebunta-Rongkong, Bone-Bone, Tomoni Timur) pemerintah dari berbagai unsur berusaha

mengantisipasi konflik melalui mediasi dan perlindungan. Keputusan yang diambil terkesan sepihak, kalangan minoritas mengalah dan mengikuti kemauan pihak mayoritas. Pola semacam ini efektif tetapi tidak menjamin adanya konflik di kemudian hari dan terbukti sejumlah konflik masih terjadi hingga kini.

Menciptakan perdamaian tidak cukup dengan penegakan hukum dan lebih jauh dari itu dibutuhkan pendekatan struktural yang bersifat *top down* dan kultural yang bersifat *bottom up*. Perdamaian yang terwujud lebih cenderung negatif dimana orang-orang tidak terancam, tidak mengalami luka-luka, atau tidak ada aksi menghilangkan nyawa oleh orang dan kelompok lain.

Sementara perdamaian positif diwujudkan dengan terpenuhinya rasa aman dan keadilan dari sistem yang berlaku sampai tergerusnya diskriminasi ras, etnis dan agama oleh struktur sosial. Dibutuhkan berbagai upaya komprehensif yang menimbulkan sikap saling toleran, saling menghormati, sehingga tidak ada lagi sikap apatis, diskriminasi, dan arogansi.

Kebutuhan tersebut cukup menjadi landasan karena umat lintas agama di Tana Luwu adalah masyarakat yang rentan, baik dalam hal budaya, pendidikan, ekonomi, dan politik, maka konflik akan mudah disulut pada hal destruktif, seperti persekusi, kekerasan, dan perang. Namun dalam masyarakat yang memiliki kapasitas tinggi maka akan sangat mungkin konflik dapat mendinamisasi perubahan yang konstruktif dan positif.

Maka dengan berbagai alasan dan pertimbangan tersebut, salah satu upaya yang mendesak dengan sosialisasi intens membangun dan menginternalisasikan nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* dalam dinamika kerukunan umat beragama. Nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* tersebut tidak lagi sebatas transenden tapi juga profan, tidak hanya bersifat hubungan individu tapi juga kemasyarakatan.



### ***B. Penerapan Solusi Konflik dalam Realitas Kerukunan Umat Beragama***

Berkaitan dengan realitas kerukunan beragama di Tana Luwu sebagaimana yang telah disampaikan maka terdapat beberapa hal berhubungan dengan aspek ibadah, relasi umat beragama dan toleransi umat beragama. Pembahasan ditekankan pada aspek kerukunan beragama sebagaimana tema yang diangkat dalam tulisan tersebut.

Solusi yang semestinya diimplementasikan dalam realitas kerukunan umat beragama perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang diantaranya adalah:

- a. Personal atau orangnya. Dalam hal tersebut maka egosentris menjadi faktor yang berpotensi mengusik realitas kerukunan beragama. Perkembangan dinamika kerukunan pernah mengalami penyalahgunaan fungsi bangunan di Palopo dan Masamba yang seharusnya untuk tempat tinggal tapi digunakan untuk sarana ibadah sehingga mengusik ketenangan sekitar. Penanganan dilakukan dalam hal tersebut adalah sistem pengawasan berlapis yang melibatkan tokoh masyarakat serta koordinasi antar tokoh agama sebagai perekat lintas umat beragama perlu dilakukan sehingga tindakan yang ditempuh tidak mengarah kepada hal-hal yang destruktif atau anarkis dan memprioritaskan pendekatan persuasif daripada represif.
- b. Konsep agama dan keyakinan dengan muatan misi didalamnya. Islam (demikian pula Kristen) sebagai agama misi tidak memaksakan akidahnya yang meneguhkan keesaan Allah dan syariatnya yang memuliakan manusia. Konsep *amar ma'rūf* dianalogikan sebagai pendekatan persuasif lebih diprioritaskan karena terkesan bebas aktif alias pilih aman dan kurang beresiko. Sedang *nāhi mungkar* yang bersifat represif dan beresiko tidak diprioritaskan karena hanya akan memobilisasi umat yang dikhawatirkan jika

tidak terkendali akan mengarah pada aksi destruktif meskipun orientasinya untuk kedamaian.

- c. Penyebaran damai dari penyiaran agama dikembalikan pada isi pokok atau substansi agama masing-masing. Penyiaran agama dikemas dengan untaian, pernyataan, dan aksi sosial nan damai. Berbagai modus perlu dipertautkan pada pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada penganut agama lainnya. Penyiaran dengan modus tertentu memang tidak secara massif dilakukan atau terselubung namun harus tetap diantisipasi dengan kolaborasi tokoh agama sebagai perekat umat yang berwawasan moderat karena selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem serta berkecenderungan ke arah dimensi jalan tengah. Untuk hal tersebut maka seharusnya penguatan pada sendi keagamaan dan teologis dogmatis intra agama sebagai perisai keamanan agama perlu dilakukan secara intensif.
- d. Peribadatan. Perlu implementasi pemahaman pola ibadah penganut agama lain dan batas toleransi bagi penganut lainnya. Pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* dieksplorasi secara mendalam tentang bagaimana memahami kewajiban asasi manusia dan hak asasi manusia. Materi ceramah yang disampaikan tidak bermuatan provokasi, SARA, dan radikalisme karena berpotensi memecah belah antar umat beragama. Justru sebaliknya nilai-nilai kebhinekaan diprioritaskan dengan berbasis pada substansi ajaran agama Islam atau dogma agama masing-masing.

Keaneragaman wajah sosial budaya di Tana Luwu memberi arti penting bahwa penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* membawa berbagai konsekuensi bahwa eksistensi Islam bisa diterima. Dalam realitasnya mampu menampilkan kearifan yang ditandai dengan multi pendekatan secara damai dan bertahap dan bukan secara frontal, sporadis disertai kekerasan. Mampu berdialektika secara

harmoni dengan kemajemukan dan memberikan klarifikasi secara bijaksana terhadap unsur-unsur positif yang harus dipelihara sedang yang negatif perlu ditinggalkan.

Keberadaan adanya potensi konflik yang sewaktu-waktu terjadi dalam kerukunan tidak lain karena adanya penumpukan identitas dan konflik tidak akan pernah bisa berhenti namun bisa dikendalikan. Konstruksi kerukunan membutuhkan komitmen kebersamaan antar umat beragama, keterbukaan terhadap varian masalah yang dihadapi dapat menimbulkan gejolak serta tindakan antisipasi secara dini terhadap masalah yang dapat menimbulkan konflik.

Golongan mayoritas dan minoritas yang menerima keterbatasan tentu tidak akan arogan atau berlebihan dan adanya konflik dalam masyarakat tidak lain karena hubungan sebab akibat. Kekuatan mengundang tantangan, tantangan mengundang konflik dan konflik melahirkan bencana. Antisipasi dini diformulasikan dengan pengawasan sebagai ide yang tidak mengekang tapi merawat kebersamaan yang harmoni.

Dari sisi **kekuatan** terwujudnya kerukunan beragama ditandai adanya pengalaman sejarah secara umum dengan jaminan kebebasan beragama dan beribadah menurut keyakinannya serta terawatnya inklusifisme. Melibatkan agamawan dan tokoh masyarakat dapat meminimalisir ketegangan antar umat beragama yang didukung oleh pemerintah. Adapun kekuatan lainnya dengan sinergitas kearifan lokal sebagai pilar pembangunan kerukunan beragama diiringi dengan bangkitnya sikap yang moderat.

Adapun **kelemahan** ditandai dengan meredupnya agama sebagai pemersatu, kekuatan moral dan disfungsi pengawasan sehingga kegaduhan dan konflik umat beragama sering terulang seperti konflik pemuda, konflik antar

etnis yang terpenjara oleh eksklusivisme dan berakibat pada timbulnya potensi amarah kebencian sehingga bisa meledak dalam bentuk kegaduhan. Sebagian tokoh agama dengan pemahaman eksklusif, sikap *intolerance*, dan berwawasan liberal, serta adanya sebagian yang memiliki ideologi trans-nasional yang cenderung berhadapan dengan wawasan kebangsaan.

Sedang **peluang** kerukunan memerlukan keterikatan masyarakat dengan popularitas agamawan dan tokoh masyarakat disertai keterlibatan untuk meredakan kegaduhan. Peluang tersebut perlu melibatkan pihak keamanan sebagai pendamping yang berorientasi melakukan tindakan menjaga diri dan mengutamakan langkah persuasif daripada represif. Sinergitas pemerintah setempat dengan forum tokoh agama seintensif mungkin digalakkan untuk membangun kerukunan internal dan eksternal umat beragama.

Adapun **ancaman** dalam merealisasikan kerukunan beragama dengan upaya membentengi paham bukannya membangun komunikasi antar umat beragama dari beberapa penganut agama yang bersifat reaksioner dengan upaya mengembalikan seseorang kepada keyakinan lamanya sehingga cenderung diasumsikan sebagai usaha memperjuangkan sesuatu secara radikal dan fundamental (bersifat dasar).

Sejumlah kerusuhan dan potensi konflik yang ada dalam umat beragama, khususnya internal umat beragama sempat mewarnai Luwu Utara dan potensi konflik antar umat beragama di Luwu, menunjukkan ada usaha meskipun belum begitu massif dari tokoh lintas agama melakukan trans agama atau keyakinan kepada umat agama lain.<sup>147</sup> Kondisi tersebut dianggap sebagai sebuah **tantangan** merealisasikan kerukunan intra umat beragama.

---

<sup>147</sup> Muh. Nurdin, Tokoh Masyarakat, Ketua FKUB Luwu Utara dan Mantan Sekda Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 7 September 2016.

Realitas kerukunan umat beragama merupakan dinamika dimana didalamnya ada konflik, rekonsiliasi dan kebersamaan. Dinamika adalah sosial gerak umat beragama secara terus menerus menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan umat lintas agama yang bersangkutan. Nilai-nilai yang terdapat dalam *maqāṣid al-khamsah* harus ada efeknya dari akibat, pengaruh, dan kesan sehingga menjadi *tool* untuk terapi solusi konflik dalam realitas tata kerukunan umat beragama.

Hierarki yang terdapat dalam *maqāṣid al-khamsah* dilakukan sesuai dengan tingkatannya dan *ḥifẓ al-dīn* sebagai prioritas utama dan komitmen menyertakan nilai kemanusiaan dan mengintensifikannya dalam realitas kerukunan umat beragama. Adapun *maqāṣid al-khamsah* lainnya seperti *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl* tetap harus bersinergi satu sama lainnya. Intervensi hukum Islam bukan terkait sebagai *tool* yang mengintimidasi internal umat dan lintas umat beragama. Namun intervensi yang mempertimbangkan kemanusiaan dan nilai edukasi yang bertujuan merangkul umat beragama karena “memakmurkan” rumah ibadah akan mewujudkan harmoni.

Konsep tata kelola konflik terbukti efektif tetapi tidak menjamin adanya konflik di kemudian hari. Terbukti sejumlah konflik berpotensi terjadi meskipun skalanya tidak sebesar sebelumnya karena konsep tata kelola konflik meminimalisir resiko konflik dan melokalisir sehingga tidak berdampak luas. Konsep tersebut dianggap belum ideal namun bukan berarti tidak ditempuh. Hal tersebut tidak lain karena sifatnya yang terkesan top down dan menciptakan pola hubungan berbasis pada kekuatan. Jika dilandaskan pada kekuatan maka diartikan bahwa kekuatan tersebut dicirikan dengan pendekatan *bargaining*.

Pendekatan *bargaining* didominasi kekuasaan seperti ancaman dan tekanan seperti ancaman dan tekanan politis dan lebih bersifat top down.

Pengurangan resiko konflik dalam hal ini bisa menjadi pola alternatif yang dipergunakan untuk mengurangi resiko konflik dengan cara mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas individu, rumah tangga, dan komunitas dalam menghadapi dampak dari konflik tidak realistis. Pola tersebut sebagai upaya mendinamisasi hubungan antar berbagai aktor, kelompok atau lembaga serta unsur-unsur konflik dalam ruang inklusif demi terealisasinya harmoni dan perdamaian.

### ***C. Implementasi Nilai-nilai Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Realitas Kerukunan Beragama di Tana Luwu***

Kemajemukan sosial dari Yang Kuasa telah menjadi taman diskusi sepanjang hayat. Pluralisme dimaksudkan dengan tujuan agar manusia saling memberi kebermaknaan akan pentingnya menjaga kerukunan. Ruang perbedaan dengan kehadiran agama untuk menjembatani esensi takdir dan visi kemanusiaan penganut agama yang senantiasa menjadi tali ikat dalam kehidupan. Agama adalah ketata-aturan sosial yang dasarnya memfilosofi kerukunan beragama.

Kedinamikaan dalam kerukunan beragama rentan terhadap pengaruh global dengan berbagai aspek kehidupan yang idealnya dipelihara secara berkesinambungan dan terarah. Eksistensi pemegang kekuasaan patut meningkatkan kinerja dalam memenuhi tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya karena agama dan keberagamaan adalah dua hal yang harus selalu diperhatikan.

Membahas tentang agama dianggap rawan dengan sifat sakralnya sehingga terhindar dari *mafsadah* dan diperoleh kemaslahatan sesuai dengan

tujuan penetapan hukum Islam. Pemaknaan nalar *zari'ah*, baik *sadd al-zari'ah* dan *fath al-zari'ah* bisa mewujudkan maslahat dan terhindar dari mafsadat. Metode *sadd al-zari'ah* sebagai upaya preventif dan deteksi dini agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif sehingga metode penalaran hukum yang ada didalamnya menimbulkan kecenderungan sikap defensif di kalangan umat Islam dan membangun sikap khawatir terjerumus dalam *mafsadah*.

Keberagaman cara beragama dari masing-masing penganut agama direpresentasikan dengan perilaku dalam kehidupan nyata. Keberagaman tersebut sebagai kata kunci merealisasikan kerukunan umat beragama dalam NKRI. Agama apapun selama legalitas dan formalitasnya diakui dan sejalan dengan aturan dalam wilayah NKRI dipastikan tidak akan terjadi konflik. Berbeda halnya jika tidak sejalan dengan negara maka tentu akan berakibat konflik.

Signifikansi penerapan nilai-nilai *maqāsid al-syarī'ah* dalam realitas kerukunan beragama diperlukan baik dalam tataran internal, lintas, dan umat beragama dengan pemerintah. Konsep yang terdapat dalam *maqāsid al-syarī'ah* dapat dilakukan dengan mentransformasikan paradigma klasiknya yang berorientasi *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) dalam kemasan yang baru yang menekankan *development* (pembangunan/pengembangan) dan *right* (hak-hak).

Bisa juga dengan tetap mempertahankan paradigma klasiknya namun dilakukan inovasi dengan mengintegrasikan atau membaurkan aspek *development* (pembangunan/pengembangan) dan *right* (hak-hak) menjadi kesatuan yang utuh. Dengan **dua model** tersebut maka implementasi nilai-nilai yang terdapat dalam *maqāsid al-syarī'ah* bukan hanya diterapkan dalam internal

umat tapi juga antar umat beragama meskipun penerapannya dijadikan sebagai spirit dan motivasi.

Kondisi tersebut selaras dan sepadan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah satu yaitu maslahat atau kebaikan dan kesejahteraan umat beragama. Muatan filosofi dasar dalam *maqāṣid al-syarī'ah* mempresentasikan pesan utama yang bermuara pada perwujudan keadilan, kemaslahatan, dan kebajikan bersama yang komitmennya bukan sebatas individu tapi berlaku umum dengan menjamin hak-hak dasar dan kehormatan umat manusia. Lima hal pokok didalamnya meliputi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta diformulasikan serta dieksplorasi secara mendalam.

Merealisasikan kerukunan umat beragama sama halnya mewujudkan cita-cita spiritual *maqāṣid al-syarī'ah* yang bermuara pada pemberlakuan umum dengan menjamin hak-hak dasar dan kehormatan manusia. Eksistensi masyarakat Tana Luwu yang multikultural dengan kondisi sosial-budaya dan geografisnya yang beragam sehingga dianggap multi etnis, ras, budaya, dan multi agama. Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persamaan hak, dan mengakui keragaman budaya dan kemajemukan.

Formulasi *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai struktur mewujudkan kerukunan beragama dengan melihat substansinya serta manfaat *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya terbatas pada ijtihad fikih akan tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Persatuan yang konteksnya sesama umat Islam dan kerukunan dengan konteksnya hubungan antar umat beragama diformulasikan dalam bentuk *hifẓ al-ummah* dan *hifẓ al-daulah* (menjaga persatuan umat dan keutuhan negara).

Berikut dirumuskan implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam realitas kerukunan beragama di Tana Luwu sebagai berikut:



## 1. Implementasi Nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Realitas Kerukunan Umat Beragama di Kab. Luwu

Signifikansi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* ditempuh dengan **pola integrasi** dimana nilai-nilai dan manfaat *maqāṣid al-syarī'ah* pada konteksnya dijadikan pilihan tepat mempersatukan masyarakat dibawah suatu tatanan yang inklusif dan demokratis. **Pola penerapan** wacana *maqāṣid al-syarī'ah* bukan pada teksnya tetapi pada konteksnya, bukan pada formalitasnya tetapi pada aktualisasinya sehingga kerukunan dimaknakan sebagai sebuah proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidakrukunan dan kebersamaan serta kemampuan hidup berdampingan dengan damai dan tenteram.

Konflik komunal dan berdampak destruktif yang pernah dialami ditempuh dengan membangun interaksi sosial pasca konflik destruktif yang sejalan dengan *ḥifzu al-‘aql*, *ḥifzu al-nafs*, *ḥifzu al-nasl*, dan *ḥifzu al-māl*. Adapun *ḥifzu al-‘aql* tidak lain dengan transformasi pola pikir eksklusif menjadi inklusif sehingga mampu meminimalisir benturan fisik antara komunitas usia produktif apalagi dipertajam atas nama mayoritas dan minoritas.

Kondisi tersebut sejalan dengan *ḥifzu al-nasl* supaya tidak meninggalkan potensi amarah kebencian yang dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan aksi yang berkonotasi negatif. Apalagi jika berbenturan dengan *ḥifzu al-nafs* dimana kondisi tersebut berakibat pada patologi sosial karena mencederai fisik dan *ḥifzu al-māl* yang berdampak terbelenggunya seseorang untuk mencari penghidupan sebagaimana kemajuan ekonomi yang dicapai penduduk pendatang yang mengundang rasa cemburu yang rawan konflik.

Transformasi keyakinan menampilkan krisis bina akidah yang memerlukan penguatan *ḥifzu al-dīn* sehingga dangkalnya pemahaman ajaran agama perlu dirumuskan dengan bina akidah secara intensif disamping bina

ibadah dan ekonominya. Toleransi beragama dalam hal penyiaran agama jangan dibenturkan dengan upaya mengembalikan keyakinan muallaf ke agama yang lama meskipun kasusnya bersifat internal keluarga. Rivalitas perebutan penganut baik sebelum pemekaran dan pasca pemekaran meskipun tidak dilakukan secara massif dan agresif tetap saja patut ditangkal karena berpotensi menimbulkan konflik.

Kab. Luwu dengan beberapa wilayah didalamnya seperti Walenrang Lamasi dengan posisi *enclave* dilakukan gerakan pagar akidah, ibadah, dan ekonomi karena pertumbuhan masyarakat muslim yang dulunya hanya belasan dan sekarang mencapai ratusan dengan kuantitasnya semakin bertambah karena transformasi keyakinan seperti di Pelalan, To'lema, Salupao di Lamasi Timur.

Implementasi nilai dari *ḥifẓu al-dīn* atau menjaga keyakinan muallaf dilakukan dengan gerakan pagar akidah dan usaha intensif pembinaan serta *ḥifẓu al-māl* dengan pagar ekonomi seperti penguatan dan pemberdayaan. Adapun *ḥifẓu al-nasl* dengan mereduksi dan menghilangkan terjadinya nikah beda agama karena biasanya berakibat pada kecenderungan anak-anak yang mengikuti keyakinan ibu yang melahirkan dan kembali pada keyakinan sebelumnya.<sup>148</sup> Usaha mentransformasikan keyakinan muallaf ke agama yang sebelumnya sedikit mengusik kerukunan namun tidak disikapi dengan frontal tapi disikapi dan dihadapi secara defensif.

Sikap defensif setidaknya tetap menjaga kerukunan umat beragama di di Kab. Luwu dengan mengintensifkan gerakan pagar akidah, kebebasan beribadah dan juga pagar ekonomi. Pola hidup seorang muallaf ditransformasikan lebih produktif dan tidak konsumtif dengan pemberdayaan ekonomi. Seorang muallaf bisa tetap menternakkan babi yang sudah menjadi tradisi keluarganya tetapi

---

<sup>148</sup>Husain, Imam Desa Pelalan dan Pembina Muallaf Kec. Lamasi Timur, *Wawancara*, Lamasi, 10 Mei 2016.

direduksi secara bertahap yang nantinya beralih ke ternak lainnya semacam unggas, sapi atau kambing.

Pemuda muslim yang menikahi seorang wanita yang keluarganya beragama non Islam dan mendapat restu dari orang tuanya, tetap bisa menjalankan pernikahan dengan pengislaman calon isterinya terlebih dahulu namun dalam prosesnya diharuskan menyediakan ternak babi sebagai mahar. Kasus tersebut memang sempat terjadi meskipun dalam hadis ada ketentuan bahwa kaum muslimin tetap dalam syarat-syaratnya selama tidak masuk dalam syarat yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya.<sup>149</sup>

Kejadian tersebut melabrak ketentuan agama sehingga perlu dibenahi dengan format yang lebih bijak dengan cara memberikan nilainya saja daripada bentuk fisiknya selama masih bisa dinegosiasikan antara dua pihak apalagi mengusik ajaran Islam. Kejadian nikah pemuda muslim dengan isterinya yang muallaf meskipun ruang lingkupnya keluarga dan tidak masuk ranah kerukunan beragama, tetap sarat dengan adanya asumsi konflik kepentingan dengan alasan eksistensi etnis atau agama. Deteksi dini dengan pagar akidah, ibadah dan ekonomi senantiasa diintensifkan supaya potensi konflik bisa direduksi semaksimal mungkin dengan soliditas kebersamaan umat beragama.

Kerukunan umat beragama idealnya harus dibangun dengan penerapan nilai-nilai dari *maqāṣid al-syarī'ah* dengan berbagai variannya seperti menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Menjaga akidah atau *ḥifẓu al-dīn* seorang muallaf dilakukan secara intensif dengan pagar akidah dan *ḥifẓu al-māl* atau memagari dan menopang ekonomi dengan pemberdayaan zakat serta memberdayakan ekonominya lebih produktif yang dulunya buruh menjadi pemilik lahan.

---

<sup>149</sup>Husain, Imam Desa Pelalan dan Pembina Muallaf Kec. Lamasi Timur Kab. Luwu, *Wawancara*, Lamasi, 10 Mei 2016.

Adapun *ḥifẓ al-nas* dengan menjaga generasi muda tidak terkontaminasi dengan pola hidup yang menderitakan dan berkelanjutan seperti perkelahian antar pemuda karena komunitas seperti ini rentan digiring ke konflik etnis, suku dan agama sehingga perlu dikreasikan kegiatan yang membangun hubungan emosional dengan komunikasi yang baik dan memutus potensi amarah kebencian yang berkelanjutan.

Ukhuwah Islamiyyah yang berarti hubungan persaudaraan dan dalam konteks keindonesiaan adalah seluruh umat Islam di Indonesia dengan unsur iman karena *ḥifẓ al-dīn* atau menjaga akidah paling kuat dibanding dengan ikatan darah atau keturunan. Partisipasi nyata dalam pembangunan manusia seutuhnya untuk mengejar kemajuan, menghilangkan keterbelakangan, mengikis kebodohan, dan mengurangi kemiskinan baik itu miskin materi, miskin ilmu, miskin amoral dan miskin iman.

Instrumen bela negara yang disepadankan dengan implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam realitas kerukunan umat beragama, baik intra umat, antar umat dan pemerintah dengan umat beragama.<sup>150</sup> Orientasi bela negara dalam perspektif Islam diformulasikan dalam berbagai bentuk seperti *jihād fī sabīlillah*, mencegah disintegrasi dengan tidak membiarkan potensi perselisihan yang berakibat destruktif, proteksi masyarakat dari berbagai ide destruktif, mencegah makar yang destruktif, mencegah intervensi penumpang gelap, mensejahterakan masyarakat dan mengoreksi penguasa yang zalim.

---

<sup>150</sup> Muh. Nurdin, Tokoh Masyarakat, Ketua FKUB Luwu Utara dan Mantan Sekda Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 7 September 2016.

## 2. Implementasi Nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Realitas Kerukunan Beragama di Kota Palopo

Pola penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam realitas kerukunan beragama di Palopo tidak lagi pada teksnya tetapi pada konteksnya, bukan pada formalitasnya tetapi pada aktualisasinya sehingga kerukunan dimaknakan sebagai sebuah proses untuk menjadi rukun.

Kesetaraan, kerjasama, dan toleransi sebagai indikator terwujudnya kerukunan beragama. Pendekatan edukatif produktif dimaknai sebagai pembinaan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dari pemuka agama, birokrat, dan tokoh masyarakat yang senantiasa berupaya meminimalisir sikap fanatisme dan paham agama eksklusif. Komunikasi antar pemuka agama diintensifkan dalam bidang sosio-kultural atau bidang-bidang lain secara longgar disebut non-agama untuk membangun kedamaian lintas umat.

Potensi ancaman timbulnya konflik cenderung dari akibat egosentris dan kepentingan tertentu saja sehingga konflik makro yang berakibat intoleransi hingga sekarang belum pernah terjadi baik sebelum pemekaran maupun pasca pemekaran. Tindakan pemuka agama tertentu yang memberikan rekomendasi sebagai prosedur keabsahan pencatatan nikah dari pasangan beda agama tentunya mengusik intoleransi. Secara prosedur dianggap sah namun realitasnya tetap pada agama masing-masing tentu melabrak struktur ajaran Islam.

Implementasi nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dari *ḥifẓ al-dīn* dilakukan secara intensif dan totalitas karena berdampak pada *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'aql*. Pendekatan persuasif lebih diutamakan daripada represif atau *amar ma'rūf* dipilih sebagai langkah aman ketimbang *nahi mungkar* yang cenderung menyelesaikan masalah namun menimbulkan masalah lain. Aktualisasi *ḥifẓ al-dīn*

diformulasikan dengan aksi massif pemahaman ajaran secara komprehensif dengan masalahat atau mafsadat didalamnya.

Adapun implementasi nilai *maqāṣid al-syarī'ah* lainnya dalam dinamika kerukunan beragama di Palopo diintensifkan dengan mengakselerasi penyesuaian dan pembauran umat lintas agama. Suasana toleransi beragama ditunjukkan dengan adanya *celebrate* (menikmati keragaman), *value* (mengapresiasi kesamaan dan perbedaan yang ada), *learn* (memahami teologis normatifnya daripada dogmatisnya), *tolerate* (pengakuan hak), dan *respect* (mengakui kontribusi pemeluk agama lain).

### 3. Implementasi Nilai-nilai *Maqāṣidal-Syarī'ah* dalam Realitas Kerukunan Umat beragama di Kab. Luwu Utara

Implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* tidak dibatasi pada dimensi ilahi-nya saja namun juga pada dimensi insaninya. Nilai kemanusiaan tidak mungkin bertentangan dengan nilai syari'ah, demikian pula nilai syari'ah mustahil berlawanan dengan nilai kemanusiaan. Eksistensi syari'ah tidak dibuat sebagai penghalang bagi kemanusiaan.

Stigma Luwu Utara sebagai daerah yang akrab dilanda konflik beberapa tahun sebelumnya telah berubah. Beberapa tahun sebelumnya tercatat mengalami konflik dengan frekuensi yang cukup tinggi. Pengrusakan berakibat pada kerugian seperti pengrusakan rumah penduduk, fasilitas umum, lahan pertanian, lahan perkebunan dan sebagainya. Perkelahian komunitas antar pemuda berimbas pada kegaduhan bernuansa etnis.

Konflik yang mengusik kerukunan di Luwu Utara mengarah ke isu etnis dan tidak murni berindikasi agama. Dalam beberapa tahun sebelumnya konflik yang terjadi karena minimnya kesetaraan dan kerjasama, baik sebelum atau pasca

pemekaran. Eskalasi konflik dan pertikaian yang terjadi bukan antara kelompok agama tapi disebabkan perebutan tanah, masalah sosial, dan lemahnya institusi dalam melakukan langkah preventif untuk mendeteksi dini potensi konflik.

Bencana sosial jauh lebih akut dengan tingkat penanganan dan pemulihannya yang memakan waktu yang lebih lama daripada bencana alam. Pemulihan konflik dengan solusi yang dilakukan masih rentan diiringi dengan konflik yang berkelanjutan karena adanya potensi amarah kebencian yang tidak ditindaklanjuti secara intensif. Beragam tuduhan dialamatkan kepada pihak-pihak tertentu tidak sebagai *problem solver* tapi *problem maker* karena minimnya peran pasca pemulihan.<sup>151</sup>

Konflik pasca pemekaran seperti perebutan lahan menjadi dominan yang disebabkan warga imigran dari Toraja yang membuka lahan untuk menanam kakao. Seiring dengan naiknya harga kakao sehingga mulai dipersoalkan penduduk asli. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak lengkapnya bukti kepemilikan sehingga klaim tanah menjadi pendahuluan dengan eskalasi cukup besar dan terkesan seperti pertikaian antar etnis dan mengarah ke isu agama.<sup>152</sup>

Pemicu lain seperti budaya membentuk geng antar pemuda dengan kebiasaan minum miras yang rentan memicu eskalasi konflik antar warga dengan dasar loyalitas terhadap etnis dan kampung yang sangat tinggi. Ditambah lagi dengan perbedaan ekonomi yang sangat mencolok antara pendatang dengan penduduk asli. Faktor konflik berawal dari masyarakat dan menjadi lahan subur adanya konflik sebagaimana diisyaratkan dalam berbagai teori konflik.

---

<sup>151</sup>Muh. Nurdin, Tokoh Masyarakat, Ketua FKUB Luwu Utara dan Mantan Sekda Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 7 September 2016.

<sup>152</sup>Arifin Djunaidi, Tokoh Masyarakat dan Mantan Bupati Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 7 September 2016.

Realitas masyarakat di Luwu Utara mengindikasikan kecenderungan agama disejajarkan dengan persoalan kesukuan dan rasisme yang keduanya mengandung kerawanan dan kepekaan yang selanjutnya menimbulkan sektarianisme. Keberadaan agama berupa daya pemersatu belum sepenuhnya terbangun sehingga perlu terobosan inovatif yang lebih harmonis dan penuh toleransi. Beberapa kiat diantaranya; menonjolkan segi-segi persamaan, kegiatan sosial yang melibatkan umat lintas agama, orientasi pendidikan bukan sebatas sektor *fiqhiyyah* tapi dikembangkan dalam aspek *universal-rabbaniyyah*, meminimalisir sikap egoisme dalam beragama sampai mengklaim dirinya paling benar.<sup>153</sup>

Menguatnya pragmatisme politik, ekonomi, dan mengendurnya spirit kohesi (perpaduan) sosial kecuali ada “bayaran”, kurang butuh kerjasama, kerjasama berdasarkan kepentingan alias diiringi modus bukan tulus serta saling telingkung serta menguatkan identitas tertentu seperti identitas politik, etnik, suku dan agama semakin kuat.<sup>154</sup>

Perkembangan parokialisme (berkaitan agama biasanya penegakan *nahimungkar* bagi pelaku miras, pandangan picik) dan eksklusifisme menjadi momok (menakutkan karena berbahaya) di beberapa wilayah Luwu Utara pasca konflik internal semacam bentrok antar pemuda bahkan bentrok antar warga desa seperti Sabbang, Mappedeceng, Bone-Bone sebagai zona merah. Penguatan identitas etnis, kultur, agama, menjadi satu dalam tubuh umat beragama yang menjadi semakin ruwet dan akut tatkala proses pemulihan konflik dilukai.

---

<sup>153</sup> Arifin Djunaidi, Tokoh Masyarakat dan Mantan Bupati Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 7 September 2016.

<sup>154</sup> Muh. Nurdin, Tokoh Masyarakat, Ketua FKUB Luwu Utara dan Mantan Sekda Luwu Utara, *Wawancara*, Masamba, 7 September 2016.



Pemulihan konflik diakui lebih banyak mengedepankan langkah represif daripada persuasif sehingga potensi terulangnya konflik rentan terjadi terulang karena upaya damai tidak sepenuhnya diiringi secara intensif dengan membenahi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteksnya. Penguatan identitas menjadi ancaman yang perlu diantisipasi seperti etnis, suku, agama berdampak pada pola *mind set* dan *culture set*. Proses pemulihan pasca konflik semestinya diiringi dengan *hifzu al-dīn* yang diformulasikan dengan pembinaan teologis dogmatis dan normatif secara intensif.

Implementasi nilai *maqāṣid al-syarī'ah* lainnya seperti *hifzu al-aql* dengan mereduksi potensi amarah kebencian pasca konflik dalam masyarakat dengan aktifitas yang bisa membangun kebersamaan dan meminimalisir peredaran miras lokal apalagi ada tuduhan bahwa hal tersebut bersumber dari non muslim. Meskipun tidak bersinggungan dengan kerukunan lintas umat beragama dan hanya sebatas pada lahan penghidupan serta tindak pidana namun menimbulkan potensi kebencian akibat terpinggirnya *hifzu al-aql* dan *hifzu al-nasl* di kalangan pemuda lintas agama sehingga cenderung memiliki emosi tidak stabil, berani, dan agresif serta menimbulkan gangguan yang merusak paradigma *hifzu al-nafs*, *hifzu al-nasl* dan *hifzu al-māl*.

Mengantisipasi kemungkinan munculnya konflik destruktif maka konsep pengelolaan konflik tidak sepenuhnya dijadikan andalan utama karena sifatnya terkesan top down, sehingga masih menciptakan pola hubungan berbasis pada kekuatan. Negosiasi yang berlandas pada kekuatan dicirikan sebagai pendekatan bargaining. Alternatif lainnya dengan pendekatan yang berbasis pemecahan masalah melalui upaya yang disebut pengurangan resiko konflik.

Pengurangan resiko konflik diilhami dari proses pengurangan resiko bencana yang dikembangkan dalam program-program penanggulangan bencana

dan bisa dijadikan acuan otoritatif tentang makna pengurangan resiko konflik, yakni sebuah kerangka konseptual dari elemen-elemen yang mengandung kemungkinan dalam mereduksi kerentanan dan konflik dalam masyarakat dan umat beragama. Adapun konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dijadikan sebagai esensi dalam pengurangan resiko konflik guna mewujudkan harmoni.

Pengembangan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam gagasan pengurangan resiko konflik tidak terlepas dari dimensi insani dengan asumsi bahwa syariah Islam bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Bukan dimensi kemanusiaan yang berdiri sendiri melainkan *ḥabl min al-nās* yang memancar dari *ḥabl min Allah*. Dalam arti yang luas konsep hukum dalam Alquran bukan saja bernilai transenden tetapi juga bernilai profan dengan kata lain integrasi antara nilai ilahiah dan humanis.

#### 4. Implementasi Nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Realitas Kerukunan Umat beragama di Kab. Luwu Timur

Nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* diintegrasikan pada konteksnya sebagai pilihan yang tepat mempersatukan masyarakat dibawah suatu tatanan yang inklusif dan demokratis. **Pola penerapan** wacana *maqāṣid al-syarī'ah* bukan pada teksnya tetapi pada konteksnya, bukan pada formalitasnya tetapi pada aktualisasinya sehingga kerukunan menjadi sebuah harapan.

Kesetaraan, kerjasama, dan toleransi mengindikasikan terwujudnya kerukunan berbasis nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang berdimensi ilahi dan humanis. Perihal tentang kerukunan antar umat, sebagaimana peristiwa antara Bali dan Toraja di Kertoraharjo, Tomoni Timur yang terselesaikan dengan adanya upaya koopertif dan partisipasi tokoh lintas agama sebagai perekat umat. Penghargaan *honorary police* kepada pemuka agama menunjukkan adanya

kontribusi merukunkan pihak yang bertikai dan berjasa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri pada Juni 2016 serta menjadi bukti adanya kerjasama dan partisipasi tokoh masyarakat. Sekilas konflik yang terjadi bernuansa sosial namun bias konflik berpotensi mengarah ke agama sehingga perlu keterlibatan berbagai pihak.<sup>155</sup>

Konflik bernuansa etnis terselesaikan secara formal dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengawasan serta rekonsiliasi yang mengarah pada kebersamaan yang harmoni. Penempatan posko keamanan sebagai langkah preventif karena Tomoni Timur adalah pemekaran dari Mangkutana yang masih mengikut padainduknya. Meskipun hingga kini belum terbangun posko tersebut karena dianggap bahwa konflik terselesaikan dengan pulihnya kebersamaan seperti semula (rekonsiliasi) dan hingga kini kerukunan dua pihak terjalin harmoni.<sup>156</sup>

Meskipun kebersamaan yang terbina bersifat struktural (dibangun dengan pola tertentu) namun upaya konstruksi kebersamaan secara kultural tetap harus mengiringi dan diintensifkan semaksimal mungkin sehingga potensi konflik bisa diminimalisir. Indikasi adanya ujaran yang berkonotasi negatif yang berpotensi menimbulkan amarah kebencian masih terjadi antara dua pihak yang pernah berkonflik maka kondisi tersebut patut dikhawatirkan karena memunculkan stigma dari keluarga masing-masing. Kebersamaan pragmatis dari perekat umat, masyarakat serta pemerintah mempresentasikan sebagai *problem solver* dengan

---

<sup>155</sup> Ardias Bara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Tokoh Masyarakat dan Guru Agama Islam SMA Yayasan Pendidikan Sorowako, *Wawancara*, Sorowako, 13 Agustus 2016.

<sup>156</sup> I Made Suarta, Kepala Desa Kertotaharjo dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tomoni Timur, *Wawancara*, Tomoni, 12 April 2016.

memelihara kerukunan umat beragama di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan yang sifatnya struktural dan kultural.<sup>157</sup>

Kegiatan seni dan budaya menjadi *tool* untuk menciptakan suasana kejiwaan dan hubungan emosional lintas umat beragama. Mengarahkan dalam bentuk kegiatan yang positif dan dilakukan secara intensif tidak lain untuk mengikis potensi amarah kebencian sehingga bisa mengeliminasi pola pikir eksklusif dari komunitasnya dan bahkan turunannya atau anak-anaknya. Tentunya selaras dengan formulasi yang terdapat dalam *ḥifẓ al-‘aql* dengan mengikis potensi amarah kebencian yang berlanjut pada generasi selanjutnya sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“Umat lintas agama seharusnya jangan ditempatkan sebagai pelanggan yang harus dilayani melainkan diposisikan sebagai pemilik yang ikut berbuat sama-sama. Kebaruan kepemimpinan yang dimiliki kalangan tokoh lintas agama dan masyarakat dalam hal tersebut dianggap mampu merealisasikan kerukunan umat beragama yang tugasnya bukan hanya dalam bidang keagamaan tapi juga dalam hal-hal yang terkait sosial, politik dan budaya. Mengembangkan forum lintas agama bukan dalam posisi sebagai “pemadam kebakaran” yang dalam artian ketika terjadi konflik yang dilaporkan masyarakat baru bertindak”.<sup>158</sup>

Keharmonisan beragama utamanya bagi pemeluk Hindu dipraktikkan saat hari qurban di masjid tertentu, terkesan tertutup dengan penyembelihan sapi dan diutamakan ternak kambing dan kerbau. Dilakukan untuk menjaga kesucian agama tertentu yang menghormati sapi dan bukan memuja serta adanya doktrin orang tua beragama Hindu (dogma dipahami secara tekstual) yang selalu mengajarkan secara turun temurun bahwa apabila ada seseorang yang makan sapi

---

<sup>157</sup> Ardias Bara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Guru Agama SMA Yayasan Pendidikan Sorowako, *Wawancara*, Sorowako, 13 Agustus 2016.

<sup>158</sup> Ardias Bara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Guru SMA Yayasan Pendidikan Sorowako, *Wawancara*, Sorowako, 13 Agustus 2016.

maka orang tersebut dilarang untuk datang dan masuk dalam pura dan dinyatakan telah berbuat dosa.<sup>159</sup>

Perihal pembinaan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* di kalangan internal umat beragama semestinya diterapkan bukan lagi pada tatanan teksnya tapi pada konteksnya, bukan juga formalitas tetapi mengarah kepada aktualisasinya. Realitas seorang muslim muallaf yang menjual barang haram di Towuti perlu dianalisis karena yang bersangkutan agak kesulitan meninggalkan tradisi apalagi kebiasaan tersebut dianggap telah menopang ekonomi keluarganya sebelum berpindah keyakinan.

Adanya kebiasaan dari beberapa minoritas muslim (biasanya muallaf) di daerah yang mayoritas non muslim seperti di Towuti yang dalam hal ini harus bekerja menternakkan babi milik penganut agama selain Islam perlu kiranya dituangkan dalam fikih karena pandangan fikih yang sangat formalistik dalam konteks sosial yang ada, sehingga ajaran syari'at yang tertuang dalam fikih terkadang terlihat tidak searah dengan bentuk kehidupan praktis sehari-hari.<sup>160</sup>

Secara metodologis tradisi menternakkan babi dari kalangan penganut yang baru masuk Islam tidak serta merta dihentikan namun dilakukan dengan *tadrīj* (secara bertahap dan perlahan-lahan) apalagi beternak babi sudah menjadi kultur bahkan menjadi sumber yang menopang hidup. Maka ketika yang bersangkutan masuk Islam maka yang dikedepankan bina akidahnya yang selanjutnya bina pemahaman Islam yaitu teknis ajaran Islam yang tertuang dalam fikih.

---

<sup>159</sup>I Made Suarta, Kepala Desa Kertotaharjo dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Tomoni Timur, *Wawancara*, Tomoni Timur, 12April 2016.

<sup>160</sup>Ardias Bara, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama, Guru SMA Yayasan Pendidikan Sorowako, *Wawancara*, Sorowako, 13Agustus 2016.

Dengan kata lain mengintegrasikan pola pemahaman *qiyāsi* murni dengan pola-pola pemahaman yang berorientasi pada *maqāṣid al-syarī'ah*. Inilah yang dimaksudkan dengan ciri Islam yang mencoba menghadirkan fikih sebagai etika sosial dan bukan sebagai hukum formal. Jadi seorang muallaf dengan kebiasaan beternak babi selanjutnya secara perlahan dibina untuk beralih ke usaha yang baik dan halal. Pola fikih dengan watak formalistik memicu dilakukannya manipulasi dan semangat ajaran Islam untuk menciptakan keadilan sosial ekonomi yang perlu mengintegrasikan hikmah hukum ke dalam *'illat* hukum.

Dalam hal tersebut memang masih terdapat sekelompok masyarakat yang teguh dengan keislamannya dan dipastikan memilah-milah kehidupannya untuk disesuaikan mana yang tetap dirujuk pada petunjuk Islam, dan mana yang harus dengan berat hati mesti disikapi sebagai dimensi hidup yang bersifat duniawi murni. Tentu dengan alasan jika seorang muallaf secara langsung disuruh meninggalkan kebiasaannya yang sudah dilakoninya secara kultural maka berakibat *masyaqqah*.

Perubahan paradigmatis dalam memandang fikih yang diintegrasikan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan keharusan. Eksistensi hukum Islam tidak lagi dilihat sebagai alat untuk mengukur kebenaran ortodoksi tetapi juga harus diartikan sebagai alat untuk membaca realitas sosial untuk selanjutnya mengambil sikap dan tindakan tertentu atas realitas sosial. Sehingga fikih bukan lagi dengan mono-fungsi tetapi memiliki fungsi ganda, yaitu alat untuk mengukur realitas sosial dengan ideal-ideal syari'at yang berujung pada halal dan haram, boleh dan tidak dan sekaligus pada saat yang sama menjadi alat rekayasa sosial. Kedua fungsi tersebut diwujudkan jika produk dan perangkat penalaran dikembangkan secara kontekstual.

Komitmen dari muallaf untuk tidak mengkonsumsi makanan yang diharamkan dalam ajaran Islam sudah diikrarkan. Namun untuk beralih ke usaha ternak hewan lainnya atau halal dirasa sulit jika dilakukan dalam waktu yang begitu cepat karena pemahaman Islam yang tidak menghalalkan segala cara untuk meraih rizki berdasarkan Alquran dan riwayat hadis Bukhari no. 2236 dan Muslim no. 4132 tentang barang haram yang diperdagangkan. Maka cara benar harus ditempuh dan menghindarkan diri dari barang yang haram demi mendapatkan rizki yang barakah.

Konsep *maqāsid al-syarī'ah* untuk *ḥifzu al-dīn* yaitu menjaga agamanya menjadi prioritas dalam tingkatan *maqāsid al-khamsah*. Sedang *ḥifzu al-māl* yang terkait dengan ketahanan ekonomi tetap harus mendapat perhatian meski urutannya bukan yang pertama. Beralih ke usaha halal spontan tidak bisa dilakukan namun harus dengan *tadriḡ* (bertahap) karena pertimbangan nilai kemanusiaan dalam Islam.

Nilai kemanusiaan otomatis disertakan karena kesulitan mendatangkan kemudahan (المشقة تجلب التيسير) dan adanya kemudahan tidak hilang karena adanya kesukaran (الميسور لا يبطل بالمعسر). Tahapan nilai *maqāsid al-syarī'ah* diaktualisasikan dengan bina pagar akidah yang selanjutnya bina diikuti dengan bina paham hukum dan bina akhlaknya.

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

Bertitik tolak dari berbagai pembahasan dan uraian-uraian yang dikemukakan dalam pemaparan di atas maka diambillah beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Realitas kerukunan umat beragama di Tana Luwu secara umum sepiantas berlangsung baik, terjalin secara harmoni, dan dibangun dengan pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Realitas kemajemukan disadari bukan halangan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemajemukan adalah *sunnatullah* yang diterima lapang dada dan dihargai termasuk didalamnya perbedaan keyakinan keagamaan. Realitas kerukunan umat beragama senantiasa oleh diwarnai dinamika, ketegangan bahkan konflik atau berbagai potensi yang memungkinkan terjadinya konflik, baik yang sifatnya fisik dan non-fisik, atau konflik yang disebabkan dari faktor non-keagamaan dan keagamaan, dalam artian agama tidak sepenuhnya menjadi pemicu konflik karena isu agama tidak pernah dimunculkan secara totalitas. Adapun faktor keagamaan yang secara langsung adanya kemungkinan mengusik dan menimbulkan potensi konflik di antara umat beragama seperti perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, pengangkatan anak untuk diasuh dan disekolahkan, prosedur pendirian rumah ibadah, dan masalah sosio-religi dengan adanya peternakan babi di kawasan penduduk yang banyak muslim dan menjadi resisten terhadap adanya peternakan tersebut. Adapun faktor yang terkait dengan perkawinan pada mulanya memang diselenggarakan dengan masuknya calon pasangan pengantin ke agama atau keyakinan pasangannya yang sudah memenuhi syarat dalam regulasi



perkawinan yang ditetapkan negara dan secara agama. Namun dalam hal mengarungi perkawinan selanjutnya setelah disahkan secara administratif dan sesuai dengan regulasi agama dan negara menjadi salah satu alat untuk mengajak pasangan berpindah agama dan walaupun tidak terealisasi maka biasanya mengikuti hasil produk dalam perkawinan yang sudah berlangsung. Adapun faktor non-keagamaan yang kiranya bisa diidentifikasi dari hal-hal yang bisa mengusik dan memicu potensi konflik dalam kerukunan umat beragama seperti perbedaan nilai sosial budaya dan kepentingan politik serta kesenjangan ekonomi. Terkait dengan kesenjangan ekonomi biasanya berhubungan dengan kemampuan kalangan pendatang dengan keuletan dan kemampuannya serta keterampilan kerjanya dibandingkan dengan penduduk asli yang rentan memicu potensi konflik dan menimbulkan kecemburuan sosial. Ketersinggungan dalam hal-hal yang berhubungan hal adat istiadat yang kebetulan berbeda keyakinan akibat adanya ketidakpahaman atau ketidaktahuan mengenai adat istiadat masyarakat tertentu yang berbeda keyakinan bahkan adanya kemungkinan tindakan sengaja yang tidak menghargai kultur yang ada. Tindakan usil atau sengaja merecoki ketenangan hingga memunculkan kekisruhan dari hal-hal yang sifatnya politis di antara elit politik dalam kontestasi politis yang pada gilirannya memicu potensi terjadinya konflik dengan melancarkan kampanye negatif atau menampilkan penafsiran keagamaan terhadap komunitas agama tertentu.

2. Realitas kerukunan umat beragama adalah kehidupan dinamis yang diwarnai dengan adanya potensi konflik, rekonsiliasi dan kebersamaan yang harmoni. Dalam realitasnya kerukunan umat beragama membawa konsekuensi bahwa eksistensi Islam bukan hanya sebagai penganut mayoritas tetapi juga kemampuan berdialektika secara harmoni dalam kemajemukan dengan

memposisikan kekuatan terwujudnya dan terawatnya kerukunan umat beragama yang bersinergi dengan kearifan lokal seperti *patuppu q ri ada'e pasanre q ri syara'e* (sandarkan pada tradisi dengan tetap berlandaskan pada syariah). Sedangkan kelemahannya bahwa eksistensi ragamnya agama yang idealnya sebagai pemersatu menjadi redup karena disfungsi perilaku masyarakat dengan adanya pembiaran potensi konflik seperti konflik antar pemuda, konflik antar etnis dan tidak adanya upaya mereduksi paham keagamaan yang eksklusif dan berwawasan liberal. Adapun peluangnya tidak lain karena komitmen keberpihakan pemerintah, agamawan dan tokoh masyarakat yang selalu berorientasi pada upaya intensif terbangunnya kerukunan yang berbalut harmoni baik secara kultural maupun secara struktural. Sedangkan ancaman ditandai dengan masih adanya pola pikir yang bernuansa egosentris dan dekonstruksi komunikasi yang cenderung diasumsikan sebagai usaha memperjuangkan sesuatu secara radikal dan fundamental (bersifat dasar). Deteksi terhadap potensi konflik dan menerapkan solusinya yang terjadi dalam realitas kerukunan umat beragama membutuhkan langkah antisipatif pemerintah dan ulama dengan mengupayakan berbagai pendekatan, baik yang sifatnya persuasif maupun represif.

3. Merealisasikan kerukunan umat beragama diperlukan pola aktualisasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* yang intensif dan efektif yang dilihat dari aspek pembangunan dan aspek sosial. Usaha dan strategi diarahkan untuk membangun kerukunan umat beragama yang diintegrasikan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dengan meningkatkan pemahaman ajaran dogma agama dalam internal umat, usaha penghayatan serta mengimplementasinya secara intensif sehingga relasi sosial yang harmoni. Optimalisasi dengan usaha

meningkatkan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang diarahkan kepada kalangan muallaf supaya tidak tergerus dan terusik pola pikirnya dengan mengintensifkan bina akidah, bina ibadah dan bina ekonomi yang bersinergi dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* seperti *hifẓu al-dīn*, *hifẓu al-nafs* dan *hifẓu al-māl*. Adapun yang berhubungan dengan antar umat beragama, diperlukan efektifitas pola komunikasi antar pemuka agama sebagai perekat umat secara intensif untuk mewujudkan nilai kebersamaan yang dicita-citakan. Sedangkan pembinaan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* antara pemerintah dengan umat beragama dijalankan dengan menggunakan instrumen program bela negara yang berwawasan kebangsaan yang tetap terintegrasi dengan *maqāṣid al-syarī'ah* pada konteksnya.

### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Implikasi penelitian ini dengan melihat nuansa kerukunan umat beragama di Tana Luwu dari tahun ke tahun yang menunjukkan kedinamikaannya dengan menganalisis gerak dan kekuatan yang ada didalamnya serta adanya berbagai perubahan dan pergerakan dalam tata kerukunan umat beragama di Tana Luwu. Dinamika umat lintas agama secara terus menerus dipastikan akan mengalami transformasi dari kerukunan yang sifatnya struktural menjadi kultural.
2. Adapun untuk kalangan tokoh agama dan masyarakat serta pihak pemerintah khususnya yang terlibat dalam forum lintas umat beragama dan majelis yang terhimpun didalamnya kalangan ulama agar lebih cermat dan melakukan usaha intensif secara berkelanjutan yang mengacu pada komitmen kebersamaan untuk merawat kerukunan umat beragama dan

meminimalisir berbagai potensi yang berujung pada terjadinya konflik dengan tetap berlandaskan ketentuan hukum dan kaidah-kaidah agama.

3. Kepada kalangan tokoh agama dan masyarakat memposisikan diri sebagai pengayom dan pemberi rasa aman, nyaman dan berkeadilan pada umat beragama dengan menampung aspirasi dan menyalurkannya kepada pihak pemerintah serta memberi masukan yang bertujuan dapat meningkatkan kerja sama pada umat lintas agama dan merealisasikan sebuah kerukunan umat beragama yang dibalut dengan ikatan yang penuh harmoni. Sosialisasi pentingnya menjaga kerukunan umat beragama dengan berbagai penyuluhan nilai-nilai agama yang normatif dan usaha mewujudkan kesadaran umat beragama tanpa harus melibatkan pihak keamanan dan cukup dengan transparansi dan jalinan komunikasi antar umat beragama secara intensif.
4. Usaha mengintegrasikan nilai-nilai dari tujuan hukum Islam dalam kerukunan umat beragama perlu dilakukan secara intensif dan efektif dengan pola pemahaman yang sederhana dan mudah dipahami sehingga konsep dari nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dapat berbau menjadi kesatuan yang utuh tanpa harus menunjukkan simbol agama tertentu yang ada kemungkinan bisa saja dianggap sebagai sebuah arogansi dari kalangan tertentu dalam umat lintas agama.

## DAFTAR PUSTAKA

*al-Qur'ān al-Karīm.*

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Qawa'id Fiqhiyyah dalam Perspektif Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.
- Abdulhameed, Sultan. *The Qur'an and The Life of Excellence*. Terj. Aisyah, *Al-Quran Menurut Hidupmu: Menyimak Ayat Suci untuk Perubahan Diri*. Cet. I; Jakarta: Zaman 2012.
- Abdullah, Hasbullah. "Interaksi Sosial dalam Perspektif Alquran". *Tesis* Makassar: Program PascaSarjana, 2004.
- al-Abrasy, Muḥammad 'Aṭiyyah 'Aḏamatu al-Islām Juz I & II. al-Qāhirah: Maktabah al-Usrah, 2002.
- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum, Kajian Hukum secara Sosiologis*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Agustono, Budi. *Hubungan Islam dan Orde Baru*, diakses <http://waspadamedan.com> pada tanggal 4 Juni 2016.
- Ahmad, Afrizal. "Reformulasi Konsep Maqasid al-Syari'ah: Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam dengan Pendekatan Psikologi". *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014.
- Ahmad, Haidlor Ali ed., *Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama*. Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.
- Aidid, Hasyim. *Studi Kritis Penegakan Hukum dan HAM pada Konflik Sosial*. Cet. II; Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- al-Albāni, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Ṣaḥīḥ Adab al-Mufrad*. Cet. II; Bairūt: Dār al-Siddiq, 1412 H.
- Alfian M, M. Alfian. *Indonesia Fenomena Negara Multi-Agama*. Harmoni Vol. III No. 12, 2004.
- Ali, Mursyid ed. *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama di Berbagai Daerah di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.
- Aminuddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. III; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.
- Arif, Muhammad. "Model Kerukunan Sosial pada Masyarakat Multikultural CinaBenteng: Kajian Historis dan Sosiologis". *Sosio Didaktika*: Vol. 1 No. 1 Mei 2014 dan via email: arifia555@yahoo.co.id
- al-'Aṣfāhāni, al-Rāḡib. *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān*, Miṣr: Muṣṭafa al-Bāb al-Ḥalabi, 1961.
- Ashri, Muhammad & Rapung Samuddin. *Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian*. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Hukum Antar Golongan Interaksi Fikih Islam dengan Syariat Agama Lain*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- al-Aṣīr, Ibnu. *al-Kāmil fī al-Tārikh*, Vol. VIII.
- al-‘Asqalāniy, Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajar. *Fathu al-Bārī*. Cet. I; Madīnah al-Munawwarah: Dār al-Hadis, 1996.
- Assiddiqie, Jimly. *Toleransi dan Intoleransi Beragama di Indonesia Pasca Reformasi*. Pidato disampaikan pada Dialog Kebangsaan tentang Toleransi Beragama oleh Ormas Gerakan Masyarakat Penerus Bung Karno, Hotel Borobudur Jakarta, 13 Februari 2014.
- Asy’arie, Musa. *Filsafat Islam tentang Kebudayaan*. Yogyakarta: LESFI, 1999.
- al-‘Asymāwi, Muḥammad Sa’id. *Uṣūl al-Syarī’ah*. Terj. Lutfi Tomafi, *Nalar Kritis Syari’ah*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS, 2004.
- ‘Asyūr, Muḥammad al-Ṭāhir Ibnu. *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*. Tūnis: Maktabah al-Istiḳāmah, 1366 H.
- Auda, Jasser. *Maqasid Syariah as a Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Terj. Marwan Bukhari bin A. Hamid, *Memahami Maqasid Syariah Peranan Maqasid dalam Pembaharuan Islam Kontemporeri*. Cet. I; Malaysia: PTS Islamika SDN. BHD, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Maqāṣid al-Syarī’ah Dalīl li al-Mubtadīn*. Cet. I; Doha: al-Ma’had al-‘Alamiy li al-Fikr al-Islāmiy, 2010.
- \_\_\_\_\_. ‘Abd al-Qādir. *al-Islām wa Auḍāunā al-Siyāsah*. tt.: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1951.
- \_\_\_\_\_. *al-Tasyri’ al-Jināiy al-Islāmi Muqāranah bi al-Qānūn al-Waḍ’i*. Cet. III; Miṣr: Maktabah al-‘Urubah, 1963.
- al-Ayyūbi, Muḥammad Sa’ad bin Aḥmad bin Mas’ūd. *Maqāṣid al-Syarī’ah wa ‘Ilāqatuhā bi al-Adillah al-Syar’iyyah*. Cet. I; Riyāḍ : Dār al-Hijrah, 1998.
- Azima, Fauzan. *Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, diakses <https://fauzanazima25071995.wordpress.com> pada tanggal 4 Juni 2016.
- Azra, Azyumardi. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antar Umat*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Kerukunan, Kekerasan dan Terorisme*, diakses <http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/> pada tanggal 28 Februari 2016.
- Badan Pusat Statistik. *Palopo Dalam Angka Tahun 2014*. Palopo: BPS Kota Palopo, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Kabupaten Luwu dalam Angka 2016 – Luwu in Figure 2016*, Luwu: BPS Luwu Regency, 2016.

- Badawi, Aḥmad Zaki. *Mu'jam Muṣṭalahāt al-'Ulūm al-Ijtimā'iyah*. Bairūt: Maktabah Lubnān, New Impression, 1982.
- al-Bāhiy, Muḥammad. *al-Ikhā al-Dīniyy wa Majma' al-Adyān wa Mawqifu al-Islām*. al-Qāhirah: Maktabah al-Wahbah, 1981.
- Bakri, Asafari Jaya. *Konsep Maqasid al-Syari'ah menurut Asy-Syatibi*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- al-Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abdu. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Cet. I; al-Qāhirah: Dār al-Hadis, 1996.
- al-Būṭi, Muḥammad Sa'īd Ramaḍān. *Dawābiṭ al-Maṣlahah fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Sūriah: al-Risālāh, 1973.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh al-Sīrah*. Bairut: Dār al-Fikr, 1440 H/1980 M.
- Dachlan, Muhammad. "Pelayanan Kementerian Agama terhadap Penganut Agama Hindu di Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan". *Jurnal al-Qalam*. Volume 20 Nomor 1 Juni 2014.
- Damanik, Jayadi. *Pemajuan Toleransi dan Akuntabilitas bagi Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Keyakinan, Belajar dari Pengalaman di Indonesia*. Pidatodisampaikan dalam kegiatan diskusi di ruang Theatre dan Aula Perpustakaan Negara Jl. Salemba Raya 28 A Jakarta Pusat, diakses Indonesia.ucanews.com pada tanggal 9 Desember 2014.
- Darūzah, Muḥammad Izzat. *Sīrat al-Rasūl Ṣuwar Muqtabasah min al-Qur'ān al-Karīm* Juz II. Bairūt: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, t.th.
- Departemen Agama RI, *Terjemah Alquran al Karim*. Semarang: Toha Putra, 2002.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Dewrant, Will. *History of Civilization*. Terj. Muḥammad Badrān, *Qiṣṣatu al-Haḍārah al-Mujallad 13-14*. al-Qāhirah: Maktabah al-Usrah, 2001.
- al-Dimasyqi, Abu al-Fidā Ismā'il bin Umar bin Kaṣir al-Qursyi. *Tafsīr al-Qurān al-Azīm*. Cet. II; Riyāḍ: Dār Tiba li al-Nasyr wa al-Tauzī', 1999.
- Djalil et.all., Abdul. *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh dengan kekuasaan*. Cet. II; Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2011.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet. III; Jakarta: Prenada Media, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Hifzu al-Ummah; Tujuan Hukum Islam*. Intisari pidato dari penyampaian makalah pada Sidang Senat Terbuka UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 29 April 2009. Diakses arsip.badilag.net pada tanggal 10 Mei 2016.
- Duraib, Sa'ūd ibn Sa'd 'Ali *al-Tanzīm al-Qaḍā'i fi al-Mamlakah al-'Arabiyyah*. Riyāḍ: Maṭābi' al-Ḥanīfah li al-Uṣit, 1973.



- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani, Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.
- al-Farrā', Abū Ya'lā Muḥammad bin Ḥusain. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- al-Fāsi, 'Allāl. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. Cet. V; Rabāt : Dār al-Garb al-Islāmiy, 1993.
- Fawaid, Imam. "Konsep Pemikiran at-Tufi tentang Masalah sebagai Metode Istinbat Hukum Islam". *Jurnal Lisan al-Hal*. Situbondo, Volume 6, No. 2 Desember 2014.
- al-Fayūmi. *al-Miṣbāḥ al-Munīr* Juz II. Beirut: Dār al-Nadwah, 1990.
- Firdaus, Risa. *Sejarah Agama Konghucu di Indonesia*. Artikel dari [www.taoklp5.blogspot.com](http://www.taoklp5.blogspot.com) diakses pada tanggal 10 Mei 2015.
- Firmansyah, Teguh. *Umat Islam Memiliki Tanggung Jawab Menjaga Bangsa*, diakses <http://khazanah.republika.co.id> pada tanggal 01 Januari 2016.
- Gularnic, David G. *Webster's World Dictionary of American Language*. New York: The World Publishing Company, 1959.
- Ḥabib, Muḥammad Bakr Ismā'il. *Maqāṣid al-Islāmiyyah Ta'ṣīlan wa Taf'īlan*. Makkah: Dār al-Ṭibā' al-Khadra, 2006.
- Ḥabīb, Sa'di Abu. *Al-Qāmūs al-Fiqhiy*, Juz I dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM]. Shamela.ws Cet. II; Sūriah: Dār al-Fikr, 1993.
- Ḥaidar, 'Ali. *Durar al-Ḥukkām, Syarah Majallah al-Aḥkām*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- al-Ḥajjāj, Abū Ḥusain Muslim bin. *Ṣaḥīḥ Muslim*, dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM].
- al-Ḥamawī, Aḥmad bin Muḥammad. *Gamzu 'Uyun al-Baṣāir Syarh al-Asybah wa al-Naṣāir, al-Mujallad al-Awwal*. t.t.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1405 H.
- Hamid, Abu. *Siri' dan Pesse' Harga Diri Orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi Mks, 2003.
- Hapsin, Abu. Komaruddin, M. Arjan Imroni. "Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama". *Walisongo* Volume 22, Nomor 2, November 2014.
- Haq, Hamka. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*. Makassar: Yayasan Al-Ahkam, 2003.
- Harahap, Rachmad Faisal. *Mahasiswa UGM Raih Doktor dengan Disertasi tentang Keragaman Beragama*. Berita diakses okezone.com pada tanggal 17 Februari 2015.
- Ḥasan, Ḥusein Ḥamid. *Naẓariyyah al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmi*. Miṣr: Dār al-Nahḍah al-'Ilmiyyah, 1971.



- Hayat, Bahrul. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Cet. I; Jakarta: Saadah Cipta Mandiri, 2012.
- Heryanto, Ariel. “Wacana Kekerasan Rasial: “Pisau” Teori Wacana “ dalam Sukandi A.K., *Politik Kekerasan Orde Baru Akankah Terus Berlanjut ?* Cet. I; Bandung: Pustaka Mizan, 1999.
- Hidayah, Anis. & Ruby Kholifah. *10 Agenda Politik Perempuan Mewujudkan Indonesia Beragam*. Jakarta: AMAN Indonesia, 2014.
- Hidayat, Komaruddin & Muhammad Wahyudi Nafis. *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- \_\_\_\_\_, Syamsul. “Hubungan Pancasila dengan Nilai Ajaran Islam”, *Majalah Tablig*, Rajab-Sya’ban 1433 H.
- Hidayatullah, Syarif. *Qawa’id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer: Mu’amalāt-Māliyah Islamiyyah-Mu’āshirah*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- al-Hirrāni, Abu al-Abbās Aḥmad bin ‘Abdul Ḥalīm bin Taimiyah. *Minḥāj al-Sunnah al-Nabawiyah* Jilid VI. Sūriah: Muassasah Qurṭuba, 1406 H.
- Hikam, Muhammad A.S. “Membedah Kekerasan-Kerusuhan Sosial dan Arus Bawah: “Pisau” Politik, “ dalam Sukandi A.K., *Politik Kekerasan Orde Baru Akankah Terus Berlanjut ?* Cet. I; Bandung: Pustaka Mizan, 1999.
- Humamuddin. *Perjanjian-perjanjian yang Diikuti Rasulullah Muhammad Ṣallahu ‘Alaihi wa Sallam*. Diakses alexalhamd.blogspot.co.id pada tanggal 20 Mei 2016.
- Idrus, Achmad Musyahid. *Perkembangan Penalaran Filosofis dalam Hukum Islam*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Ismail, Faisal. *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama, Konflik-Rekonsiliasi-Harmoni*. Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ismatullah, Dedi. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- al-Ju’fi, Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismāil bin Ibrāhīm bin al-Mughirah bin Bardiza’bah. *al-Jāmi al-Ṣaḥih, Bāb al-Buyu’*, dalam Maktabah al-Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM], Shamela Company.
- al-Jurjāni, ‘Ali Muḥammad. *al-Ta’rīfāt*, Miṣr: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalabi wa Aulāduhu, 1938.
- al-Kafawy, Abu al-Baqā’. *al-Kullīyyāt*. Sūriah: Mansyūrāt Wuzārah al-Ṣaqāfah wa al-Irsyād al-Qaumiyy, 1974.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Cet. II; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

- Kasir, Imam Abu al-Fidā Ismā'īl bin. *al-Sirah al-Nabawiyyah* Juz II. Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1976, dalam Maktabah al-Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM], Shamela Company.
- Kawu, Shadiq dkk., *Spirit Konghucu Modal Sosial dalam Merenda Kebangsaan*. Cet. I; Jakarta: Orbit Publishing, 2011.
- Kawung, Jiffry. "Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama". Makalah disajikan dalam Sosialisasi Peningkatan Kualitas Kerukunan Umat Beragama di Sulawesi Utara di Aula Kemenag Kota Tomohon, Tomohon 1 Desember 2010.
- al-Khail, Muḥammad bin Ibrāhīm bin Ṣālih Aba. *Tārīkh al-Khulafā al-Rāsyidin*. Cet. I; al-Saūdiyyah 'Arabiyyah: Dār al-Faḍīlah, 2009.
- Khallāf, Abdul Wahab. *Ilmu Uṣūl Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- Khoiruddin, Irwan. *Potret Wujud Indahnya Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, diakses brilio.net pada tanggal 25 Desember 2015.
- al-Kīlāni, 'Abd al-Raḥmān Ibrāhīm. *Qawā'id al-Maqāṣid 'inda al-Imām al-Syāṭibi 'Araḍan wa Dirāsatan wa Tahfīlan*. Sūriah: Dār al-Fikr, 2000.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Fikih*. Jakarta: DIPERTA, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Menag, PBM Lahir untuk Mengatur Pendirian Rumah Ibadah*, diakses <http://www.kemenag.go.id/> pada tanggal 10 Februari 2016.
- Kementeraian Wakaf Saudi Arabia, *Alquran dan Terjemahnya*. Saudi Arabia: Penerbit Mushaf al-Syarif, 1990.
- Kurdi, Abdurrahman Abdulkadir. *The Islamic State A Study in The Islamic Holy Constitution*. Terj. Ilzanuddin Ma'mur, *Tatanan Sosial Islam, Studi Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- La Jamaa. "Dimensi Iahi dan Dimensi Insani dalam Maqasid al-Syari'ah". *Asy-Syirkah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 45 No. II, Juli-Desember 2011.
- Machasin. *Islam Dinamis Islam Harmonis Lokalitas pluralisme dan Terorisme*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Agama Sumber Nilai Penting dalam Bernegara*. Pidato disampaikan dalam pertemuan saat menerima kunjungan 20 delegasi dari Kementerian Wakaf, Pendidikan dan Kebudayaan, Majelis Ulama Afghanistan di Gedung Kementerian Agama 30 April 2015, diakses [www.kementerianagama.co.id](http://www.kementerianagama.co.id) pada tanggal 1 Mei 2015.
- Madjid, Nurcholis. *Kerukunan Umat Beragama Sebuah Tinjauan Normatif Islam*, diakses via madinaonline.com pada tanggal 10 Mei 2016.

- \_\_\_\_\_. *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat Kolom-Kolom di Tabloid Tekad*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1999.
- \_\_\_\_\_. “Cita-cita Politik Kita” dalam Bosco Carvallo dan Dasrial (penyunting), *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Leppenas: Jakarta, 1983.
- al-Maglus, Sāmi bin ‘Abdullah. *Aṭlas Sīratu Rasūlillah*. Terj.Dewi Kourniasari et.al., *Atlas Perjalanan Nabi Muhammad*. Jakarta: al-Mahira, 2008.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqh Sosial*. Cet. IV; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.
- Mahmaṣāni, Ṣubhi. *Falsafatu al-Tasyrī’ fī al-Islām*. Cet. II; Ṣūriah: Dār al-Kasysyāf, 1952.
- Mahmud, M. Irfan. *Kota Kuno Palopo. Dimensi Fisik, Sosial, dan Kosmologi*. Cet. I; Makassar: Masagena Press, 2003.
- Maimun. “Konsep Supremasi Maslahat al-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaruan Pemikiran Hukum Islam”. *Asas*, Vol. 6 No. 1, Januari 2014.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*. Cet. I; Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2014.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mangkosasmito, Prawoto. *Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Sebuah Proyeksi*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Manẓūr, Ibnu. *Lisān al-‘Arab*. t.t. : Dār al-Ma’arif, Jilid IV. t.th. .
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. VI; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- al-Maṣriy, Muḥammad bin Maḥram bin Manẓūr al-Afriqiyyi. *Lisān al-Arab*. Juz II Cet. I; Bairūt: Dār Ṣadir, t.th.
- Matta, Anis. *Tiga Jenis Konflik di Indonesia*, diakses <http://nasional.sindonews.com> pada tanggal 21 Mei 2016.
- al-Mawardi, Abū Ḥasan ‘Ali bin Muḥammad bin Ḥabīb. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1380 H/1960 M.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas. Fiqh al-‘Aqalliyāt dan Evolusi Maqāṣid al-Syarī’ah dari Konsep ke Pendekatan*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2010.
- Misrawi, Zuhairi. *Membumikan Toleransi al-Qur’an; Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*. Jakarta: Moslem Moderate Society, 2010.
- al-Miṣriyyah, Ibnu Manẓūr al-Afriqiyyah. *Lisān al-Arab*, Juz V. Bairūt:Dār al-Fikr, 1972.
- al-Mu’āfiri, Muḥammad ‘Abdu al-Mālik bin Hisyām. *Mukhtaṣar Sīratu Ibni Hisyām* Juz I. Cet. IV; al-Qāhirah: Wizārah al-Awqāf al-Miṣriyyah, 2000.

- al-Mubārakfūrī, Şafiyu al-Dīn. *al-Rahiq al-Makhtūm*. Qaṭar: Wizārah al-Syu'ūn al-Islamiyyah, 2007.
- Mubarok, Jaih. & Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2008.
- al-Mudhar, Yunus Ali. *Toleransi Kaum Muslimin dan Musuh-musuhnya*. Cet. I; Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1990.
- Mudzhar, Atho'. "Memelihara Kerukunan Umat Beragama: Jalan Landai atau Mendaki." Dalam Abdurrahman Mas'ud dkk (ed), *Kerukunan Umat Beragama dalam Sorotan: Refleksi dan Evaluasi 10 Tahun Kebijakan dan Program Pusat Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Lingkungan dan Peran Strategis FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Persatuan Nasional*, makalah disajikan dalam acara Fasilitas Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan FKUB Propinsi dan Kabupaten Kota diselenggarakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri tanggal 3-4 September 2013 di Hotel Jayakarta, Jakarta.
- Muḥammad 'Ali, Muḥammad 'Abd al-'Āti. *al-Maqāṣid al-Syar'iyyah wa Asāruḥā fi al-Fiqh al-Islāmiy*. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadis, 2007.
- \_\_\_\_\_, 'Abbās Ḥusni. *al-Fiqh al-Islāmiy: Āfāquhu wa Taṭawwuruḥu*. Makkah: Rābiṭah al-'Ālām al-Islāmiy, 1402 H.
- \_\_\_\_\_. Yahyā. *Naẓariyyah al-Ṭūfi wa Tarjīhi al-Maṣlahah 'alā al-Naṣ*, diakses [www.fahmaldin.com](http://www.fahmaldin.com)
- Muhshi, Adam. *Teologi Konstitusi Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang, 2015.
- al-Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mulia, Musdah. *Islam & Hak Asasi Manusia, Konsep dan Implementasi*. Cet. II; Jakarta: Naufal Pustaka, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Problem Pengakuan Agama di Indonesia*. Artikel [www.megawatiinstitute.org](http://www.megawatiinstitute.org) diakses pada tanggal 12 Mei 2015
- al-Munawar, Said Agil Husin. *Fikih Hubungan AntarAgama*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwar Kamus Arab – Indonesia*. Cet. XXV; Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.
- Mu'nis, Husain. *Dustūr Ummati al-Islām Dirāsatu Usūl al-Hukmi wa tabi'atihi wa Gāyatihi 'Inda al-Muslimin*. Cet. I; al-Qāhirah: Maktabah al-Ushrah, 1998.

- Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law*. Terj. Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.
- Muslimāni, Mālik. *al-Islām wa al-Tāsamuh al-Dīniy*, diakses [www.muhammadanism.org](http://www.muhammadanism.org) pada tanggal 1 Januari 2017.
- Mustafa, Mujtaba. *Toleransi Beragama dalam Perspektif Alquran*. Tasamuh, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014: 1-9.
- al-Nabhān, Muḥammad Fāruq. *al-Madkhal li al-Tasyrī' al-Islāmiy*. Cet. II; Bairūt: Dār al-Qalam, 1981.
- Nadjamuddin, Muchlis. "Umat dalam Wawasan Alquran: Kajian Sosiologis Historis", *Disertasi* Makassar: Program Pascasarjana, 2011.
- al-Nadwi, 'Ali Aḥmad. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Sūriah: Dār al-Qalam, 1986.
- Naim, Ngainun. *Islam dan Pluralisme Agama. Dinamika Perebutan Makna*. Yogyakarta: Aura Pustaka, 2014.
- al-Najjār, Abd al-Majīd. *Maqāsid al-Syari'ah bi Ab'ad al-Jadīdah*. Tūnis: Dār al-Gharb al-Islāmiy, 2012.
- Nugroho, Fajar. "Toleransi dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Indonesia", *Blog Fajar Nugroho*. <http://ajanknugroho.blogspot.co.id/2012/05/toleransi-dan-kerukunanantar-umat.html> (21 Mei 2016).
- Nuryani. *Pola Hubungan Lintas Agama di Tana Toraja*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2015.
- Nursidin, Ghilman. "Konstruksi Pemikiran Maqasid al-Syari'ah Imam al-Haramain al-Juwaini: Kajian Sosio-Historis" *Tesis*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.
- Opwis, Felicitas. *Maslahah and The Purpose of The Law, Studies in Islamic Law and Society. Islamic Discourse on Legal Change from the 4<sup>th</sup>/10<sup>th</sup> to 8<sup>th</sup>/14<sup>th</sup> Century*. Leiden The Netherlands: Brill Publisher, 2010.
- Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tesis dan Disertasi Edisi Revisi*. Makassar: UIN Alauddin Makasar, 2015.
- Pawiloy, Sarita. *Ringkasan Sejarah Luwu*. Makassar: CV. Telaga Zamzam, 2002.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat yang diterbitkan tanggal 21 Maret 2006.
- Perkasa, Surya. *Toleransi Keberagaman Semu*, diakses metronews.com pada tanggal 1 Juni 2016.



- Putranto, Hendar dan Mudji Sutrisno (ed). *Teori-Teori Kebudayaan*. Cet. V; Yogyakarta: 2009.
- al-Qādir, ‘Abdu. *al-Islām wa Auḍāunā al-Siyāsiyah*. tt.: Dār al-Kitāb al-‘Arabiyy, 1951.
- Qadir, Zuly. *Sosiologi Agama*. Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011.
- Qamar, Nurul. *Hukum Itu Ada Tapi Harus Ditemukan*. Cet. I; Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- al-Qaraḍāwī, Muḥammad Yūsuf. *Zāhirah al-Guluww fī al-Takfīr*. Cet. III; al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1990.
- \_\_\_\_\_. *Syari’atu al-Islām Ṣālihah li al-Taṭbīq fī Kullī Zamān wa Makān*. Cet. V; al-Qāhirah: Maktabah Wahbah, 1997.
- al-Qursyiy, Abu al-Fidā Ismāil bin ‘Umar bin Kasīr. *Tafsir al-Qur’ān al-Azīm*. Cet. II; al-Sa’ūdiyyah al-‘Arabiyyah: Dār Ṭība’ li al-Nasyri wa al-Tawzi’, 1999.
- Rachmadsyah, Shanti. *HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. Artikel diambil dari klinik hukum via hukumonline.com diakses pada tanggal 16 Desember 2014.
- Rachman, Budhy Munawar. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Radjab, Syamsuddin. *Syariat Islam dalam Negara Hukum*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Raharusun, Agus Suyadi. “Komunikasi Antar Umat Beragama dalam Perspektif Hadis”. *Disertasi* Makassar: Program Pascasarjana, 2014.
- Rahman, Amri. “Pluralisme dalam Perspektif Alquran”. *Disertasi*, Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2013.
- Rahman, Asymuni. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahmat, M. Imdaduddin. *Arus Baru Islam Radikal, Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Islam dan Pluralisme, Akhlaq al-Qur’an Menyikapi Perbedaan*. Jakarta: Serambi, 2006.
- al-Rāzi, Muḥammad bin Abi Bakar. *Mukhtār al-Ṣaḥḥāh*. Miṣr: Dār al-Nahḍah, t.th.
- Razmal, Muin. *Konflik Sosial Studi Kasus Antara Masyarakat Rongkong dan Masyarakat Baebunta Kabupaten Luwu Utara*. Cet. I; Palopo: Lembaga Penerbitan STAIN Palopo, 2009.
- Redaksi Dewan Masjid Indonesia. *JK Meneguhkan Kerukunan Umat Beragama*, diakses <http://dmi.or.id/jk-meneguhkan-kerukunan-umat-beragama/> pada tanggal 30 Mei 2016.
- Republik Indonesia. *Undang Undang Dasar 1945*. Bab X Pasal 28 dan 29.

- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Rosmini. "Ekstremisme Keberagamaan Perspektif Alquran". *Disertasi* (Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin, 2015).
- Ruhana, Akmal Salim. "Peran dan Hubungan LSM dengan Pemerintah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia," dalam Haidlor Ali Ahmad ed., *Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi*. Cet. I; Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Safriadi. "Kontribusi Ibnu 'Āsyūr dalam Kajian Maqāṣid al-Syārī'ah". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Volume XIII No. 2, Februari 2014.
- Said, Nurman. *Merawat Persaudaraan Sejati di atas Keberagamaan Agama*. Cet. I; Makassar Alauddin Press, 2012.
- Sairin, Weinata. *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa Butir-Butir Pemikiran*. Cet. II; Jakarta: Gunung Mulia, 2006.
- al-Salami, Iyād bin Nāmi. *Maqāṣid al-Syārī'ah*, dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM]. al-Akadimiyyah al-Islamiyyah al-Maftuhah.
- Samin, Sabri. *Menguak Konsep dan Implementasi Ketatanegaraan dalam Islam, Fiqih Dusturi*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Samuddin, Rapung. *Fiqih Demokrasi Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Cet. I; Jakarta: Gozian Press, 2013.
- Sayyid al-Nās, Muḥammad bin Abdullah bin Yahyā bin. *'Uyūn al-Asar* Jilid I. Bairūt: Muassasah 'Izzu al-Dīn, 1986.
- Setiyani, Nunung. *Menag: 2002 Tahun Rekonsiliasi Kerukunan Beragama*, pada acara dialog Kerukunan Umat Beragama di Studio SCTV dengan Menteri Agama Said Agil Husein al Munawar pada tanggal 31 Desember 2001.
- Setyawan, Eko Huda. *Sukarno, Gus Dur dan Imlek*, diakses <http://news.liputan6.com/> pada tanggal 10 Juni 2016.
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqasid al-Syari'ah dalam Hukum Islam*. Sultan Agung Vol. XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Dia Dimana-mana Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena*. Cet. XI; Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2007.
- al-Sibā'i, Mustafā. *al-Sīrah an-Nabawiyyah Durūs wa 'Ibar*. Bairūt: Maktab Islāmi, t.th.

- Singgih, Emanuel Gerrit. *Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia*. Jakarta: Gubung Mulia, 1999.
- Soelhi, Muhammad (ed). *Demokrasi Madinah Model Demokrasi Cara Rasulullah*. Jakarta: Republika, 2003.
- Sudarta. *Konflik Islam Kristen, Menguak Akar Masalah Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia*. Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cet. VI; Bandung: Alfabet, 2009.
- Suhayli, Muhammad Amin. *Qāidah Dar'u al-Mafāsīd Awlā min Jalbi al-Maṣālih Dirasāh Tahfīliyyah* Mesir: Dār al-Salām, 2010.
- Sukanto, Amos. “Ketegangan Antar Kelompok Agama pada Masa Orde Lama sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik”, *Jurnal Teologi Indonesia* VI (Juli 2013).
- Sukandi, eds., *Politik Kekerasan ORBA Akankah Terus Berlanjut ?*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1999.
- Suwariyanti, Titik eds. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Cet. I; Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- Suyūṭi. *Tarīkh al-Khulafā*, dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM] alwarraq.com
- al-Syahrastāni, Abu al-Fath Muḥammad bin ‘Abdul Karīm. *al-Milal wa al-Nihal*. Bairūt: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- al-Syaibāni, Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abdul Wāḥid. *al-Kāmil fi al-Tārikh*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- \_\_\_\_\_, Abū ‘Abdullah Aḥmad bin Muḥammad al-Zuhli. *Musnad al-Kabīr aw Musnad Ahmad*, dalam Maktabah al-Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM], Shamela Company, hadis no. 2003.
- Syalaby, Achmad. *Menag: Kekosongan Regulasi Jadi Celah Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, diakses <http://khazanah.republika.co.id/> pada tanggal 1 Juni 2016.
- Syaṭṭ, ‘Abbās Maḥmūd. *al-Islām ‘Aqīdah wa Syarī’ah*. t.t.: Dār al-Qalam, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet. V; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- al-Syāṭibi, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī’ah* Juz I. Bairūt: Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2003 M/1423 H.
- al-Subki, Imām Tājuddin ‘Abd al-Wahāb. *al-Asybah wa al-Nazāir*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.



- al-Ṭabari, Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr. *Tārīkh al-Ṭabari al-Umam wa al-Mulūk* Juz III dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM] alwarraq.com
- al-Taftazāny. *al-Talwīh 'alā al-Tauḍīh*. Mesir: Maṭba'ah al-Sya'n al-Ḥurriyyah, t.th.), Jilid I.
- al-Ṭahānawī. *al-Talwīh 'alā al-Tauḍīh*. Miṣr: Maṭba'ah Sya'n al-Ḥurriyyah, t.th.
- Taimiyah, Ibnu. *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Islāhi al-Rā'i wa al-Ra'iyyah*. Bairūt: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1988.
- Thalhah & Achmad Mufid, *Fiqh Ekologi Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci: Jawaban Islam atas Permasalahan Lingkungan dan Global Warning*. Cet. I; Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Tim Penulis Naskah Konferensi Rajab 1432 H, *Hidup Sejahtera di bawah Naungan Khilafah. Membangun Kesejahteraan Umat*. Medan: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Tim Penyusun. *Ensiklopedi Islam*. Cet. V; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2004.
- Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural*. Jakarta: Tim Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2010.
- Tobroni dan Syamsul Arifin. *Islam Pluralism dan Politik; Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan*. Cet. I; Yogyakarta: SIPPESS, 1994.
- Trisnadibrata, Ismira Lutfia & Elisabeth Oktofani. *Intoleransi Agama Masih Tinggi Menurut Kelompok*. Diakses khabarsoutheastasia.com pada tanggal 20 Januari 2015.
- Ubaedillah & Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- 'Umar, 'Umar bin Ṣālih bin. *Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda al-Imām al-'Izz bin 'Abd al-Salām*. Bairūt: Dār al-Nafāis li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2003.
- Wahab, Abdul Jamil. *Manajemen Konflik Keagamaan Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual*. Cet. I; Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Wahid, Marzuki & Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.
- al-Wāḥidiy. *Asbāb Nuzūl al-Qur'an*, dalam Maktabah Syāmilah ver. 3.64 [CD-ROM].
- Wardah, Fathiyah. *Pemerintah Susun RUU Perlindungan Umat Beragama*. Artikel diakses voaindonesia.com pada tanggal 21 Mei 2016.
- Yewangoe. *Agama dan Kerukunan*. Cet. IV; Jakarta: Gunung Mulia, 2009.

- Yūsuf, Muḥammad. *Nizām al-Ḥukmi fī al-Islām*. al-Qāhirah: Dār al-Kitāb al-‘Arabiyy, 1963.
- Zaid, Muṣṭafā. *al-Maṣlaḥah fī al-Tasyri’ al-Islāmiy*. al-Qāhirah: Dār al-Fikr, 1964.
- Zain, Satria Efendi M. *Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005.
- Zakaria, Abū al-Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin. *Mu’jam Maqāyis al-Lughah*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1979.
- Zar, Sirajuddin. “Kerukunan Hidup Umat Beragama dalam Perspektif Islam”. *Toleransi*, Vol. 5 No. 2 Juli – Desember 2013.
- al-Zarqā, Aḥmad bin Muḥammad. *Syarh al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*. Cet. II; Dimasqiy: Dār al-‘Ilmi, 1938
- , Muṣṭafā Aḥmad. *al-Fiqh al-Islām fī Ṣaubihī al- Jadīd*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1965.
- Zoelva, Hamdan dkk., *Prosiding Kongres Pancasila IV Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Yogyakarta: PSP UGM, 2012.
- Zubir, Ismail. *Kebijakan Reformasi tentang Pengembangan Kerukunan Umat Beragama (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 (FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah)*, diakses via kompasiana.com pada tanggal 12 Juni 2016.

**TABEL DATA POTENSI KONFLIK DI TANA LUWU  
LUWU – PALOPO – LUTRA – LUTIM**

No.	Lokasi Konflik/Kecamatan	Jenis & Bentuk Konflik	Motif Kejadian	Tindakan	Ket.		
	Konflik Padang Sappa, Kab. Luwu	Pendatang dan asli	Kesenjangan ekonomi, budaya yang berbenturan nilai agama, mengandung SARA, tersulut dengan adanya tindak pidana penganiayaan dan aksi balas dendam dengan aroma agama	Represif menjadi prioritas dan selanjutnya persuasif, mediasi, koordinasi pemerintah setempat	2001-2002		
	Rongkong – Baebunta, melibatkan beberapa desa berbasis suku-agama sebagai aksi solidaritas	Gesekan penduduk asli vs pendatang Pendatang asli beragama Islam dan pendatang Kristen	Konflik Horizontal, masalah tanah, ektremisme suku dan agama, hilangnya simpul sosial Kecemburuan sosial, bermuansa SARA	Secara represif dan persuasif, mediasi,	1999 s/d 2002		
	Sampoddo, Wara, Palopo	Insiden Bom di Kafe	Serangan teror bermotif jihad.	Memperketat penjagaan, pendekatan represif dan persuasif	Januari 2004		
	Masyarakat adat uri Rongkong dengan masyarakat Adat Batu, Mancani, Palopo	Pertikaian dan meresahkan warga	Pertikaian akibat dendam lama, bentrok antar kalangan pemuda	Penyelesaian dengan mediasi Datu Luwu, rekonsiliasi menyasar tokoh dan kalangan pemuda.. solusi dengan prosesi adat dan pendekatan kultur kekeluargaan.	2016		
	Dandang VS Kampung Baru, Sabbang, Lutra	Konflik antar warga	Gangguan keamanan dan ketertiban, kenakan remaja,	Operasi Cipta Kondisi, Represif dan Mediasi	2016		
	Dsn. Salulaiyya Ds. Terpedo Jaya, Sabbang	Tawuran Perkelahian Kelompok	1. Dendam lama 2. Kenakalan remaja 3. Pengaruh Miras 4. Kecemburuan sosial	1. Operasi cipta kondisi Brimob Baebunta dan TNI-AD (penyisiran ke wilayah konflik) 2. Penegakan hukum 3. Sudah pernah dilakukan giat perdamaian bersama dengantokoh masyarakat dan Pemkab Lutra	2011-2014		
	Dsn. Pondan Ds. Buangin , Sabbang	Sda					
	Dsn. Tarue Ds. Buangin, Sabbang	Sda					
	Ds. Pompaniki, Sabbang	Sda					
	Ds. Mari-Mari, Sabbang	Sda	Kenakalan remaja akibat miras dan obat terlarang				
	Ds. Kalotok, Sabbang	Sda					
	Dsn. Salu Karondang, Sabbang	Sda					

	Dsn. Mariri Ds. Salulemo, Sabbang	Sda	1. Dendam atas tindak pidana penganiayaan 2. Kenakalan remaja 3. Pengaruh miras	1. penegakan hukum/penangkapan pelaku aniaya 2. operasi miras bersama pihak keamanan 3. pendekatan secara persuasive 4. operasi cipta kondisi 5. mediasi kedua belah pihak	2015
	Dsn. Salulemo Ds. Salulemo, Sabbang	Sda			
	Ds. Palandan, Sabbang	Sda			
	Ds. Lara, Sabbang	Sda			
	Dsn. Rantebelue Ds. Bumi Harapan	Sda			
	Dsn. Laba-Laba Ds. Salulemo, Sabbang	Sda	1. Dendam atas tindak pidana penganiayaan. 2. kenakalan remaja 3. Pengaruh miras	1. penegakan hukum 2. pernah dilakukan upaya damai bersama pemkab Lutra 3. giat patroli pada waktu-waktu tertentu	
	Dsn. Padang Ds. Salulemo, Sabbang	Sda			
	Ds. Kariango, Sabbang	Sda			
	Ds. Mario, Sabbang	Sda			
	Ds. Pandak, Masamba	Tawuran & Perkelahian antar kalangan pemuda	Dendam atas pembunuhan pemuda Ds. Pandak oleh pemuda Ds. Rompu	1. operasi cipta kondisi Brimob & TNI-AD 2. pengejaran pelaku sebagai sumber konflik 3. menurunkan personil terhadap batas wilayah konflik 4. optimlisasi giat patrol pada jam rawan 5. koordinasi dengan pemerintah setempat	2016
	Ds. Rompu, Masamba	Sda	Dendam atas pembunuhan pemuda Ds. Laba oleh pemuda Ds. Rompu	Penegakan hukum Operasi Cipta Kondisi	2015
	Ds. Laba Masamba	Sda	Sda		
	Kel. Baliase, Masamba	Sda	Kenakalan remaja, kecemburuan social, pengaruh Miras		
	Lingk. Kurri-kurri Kel. Kasimbong, Masamba	Sda			
	Lingk. Indokoro Kel. Kasimbong, Masamba	Sda	Dendam lama peristiwa konflik tahun 1999, tindak pidana penikaman tahun 2012		
	Ds. Baloli, Masamba	Sda			
	Dsn. Nanna, Mappedeceng	Tawuran, perkelahian antar pemuda	Kenakalan remaja, kecemburuan social, pengaruh Miras		

	Dsn. Tabulo, Mappedeceng	Sda	Kenakalan remaja Dendam atas tindak penganiayaan Pengaruh miras	Penegakan hukum Operasi Cipta Kondisi	
	Dsn. Tanarata, Mappedeceng	Sda			
	Ds. Uraso, Mappedeceng	Sengketa lahan PTPN XIV Cab. Burau, Kec. Burau, Lutim	Penguasaan lahan secara sepihak	1. Mediasi 2. Pihak yang bersengketa menunjukkan bukti keberadaan lahan yang dipersengketakan 3. Himabauan penghentian diatas lahan konflik 4. koordinasi Pemkab dengan Badan Pertanahan	
	Ds. Harapan, Mappedeceng	Sda			
	Ds. Kapidi, Mappedeceng	Tawuran, perkelahian antar pemuda	Dendam lama Minuman keras Pengaruh obat terlarang	Penegakan hukum Operasi Cipta Kondisi	
	Ds. Pombakka, Malangke Barat	Sengketa tanah (lahan empang)	Penguasaan lahan sepihak	Mediasi, menunjukkan bukti keberadaan yang dipersengketaan Himbauan dan koordinasi	2015
	Ds. Salekko, Malangke	Sengketa lahan TNI-AI, Lembaga adat Kedatuan Luwu dan masyarakat	Penguasaan lahan sepihak	Mediasi, himbauan, bukti keberadaan lahan sengketa, koordinasi	
	Ds. Minanga Tallu, Sukamaju	Tawuran		Operasi cipta kondisi Upaya damai kedua pihak	
	Ds. Kaluku, Sukamaju	Tawuran	Dendam penganiayaan, pengaruh miras	Mediasi, koordinasi, adanya personil keamanan	
	Bamba, karangan VS Kopi- Kopi, Banyuurip, Bone-Bone	Tawuran	Dendam lama, kecemburuan social, kesepakatan damai rawan dimanipulasi		
	Dsn. Karondang – ds. Munte, Tana Lili	Tawuran	Dendam lama, kecemburuan sosial, miras	Mediasi, koordinasi, adanya personil keamanan	
	Ds. Tedeboe, onondowa, Rampi	Pro kontra Tambang Emas	Penguasaan lahan sepihak dgn PT Kalla Arebamma	Koordinasi tokoh ada, pendataan penambang, koordinasi, himbauan penghentian aktifitas sebelum adanya keputusan	2015
	Seko Padang Seko Tengah Seko Lemo, Kec. Seko	Pro kontra pembangunan PLTA	Penolakan masyarakat atas pembangunan PLTA	Mediasi dan koordinasi	2015
	Tarengge VS Bawalipu, Wotu, Lutim	Konflik antar pemuda	Aksi pelemparan dan selanjutnya memicu emosi komunitas tertentu	Mediasi Pemkab dengan pihak yang bertikai, represif dan penegakan hukum	2016

	Patengko – Kertoraharjo, Tomoni Timur Lutim	Perkelahian antar warga desa	Tindakan penganiayaan, balas dendam, beraroma SARA	Mediasi Pemkab dengan tokoh agama dan masyarakat, himbauan pihak keamanan, penegakan keadilan,	2014
	Kampung Dongi Lutim	Masyarakat adat dengan PT Vale	Ketidakberpihakan dengan masyarakat adat, klaim tanah adat dengan lahan kontrak karya	Relokasi, Mediasi kedua pihak, Himbauan serta penegakan keadilan	2014
	Teromu, Mangkutana, Lutim	Konflik lahan warga adat Pamona VS SINDOKA	Pembiaran lahan sejak 1987 sedang HGU sampai 2017, selanjutnya digarap oleh 300 warga untuk berkebun, bercocok tanam, berbuntut amarah warga karena akses warga memanen hasil ditutup sepihak, kedoknya bio-etanol buat babat hutan.	Himbauan tidak menggunakan lahan sengketa, penegakan keadilan, mediasi antara tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah setempat	2014
	Karoncia, Mangkutana, Lutim	Konflik lahan warga dengan SINDOKA	Terlantarnya lahan sejak 1998 sehingga dimanfaatkan warga setempat., hak masyarakat diabaikan, provokasi kepada pendatang	Mediasi, himbauan tidak beraktifitas di lahan sengketa, meminimalisir provokasi yang berujung pada intoleransi warga pendatang, supremasi hukum	2014

## BIODATA PENULIS

### Keluarga

Nama : Firman Muhammad Arif

Lahir : Sinjai, 1 Februari 1977

Istri : Fauziah Amrah, S.EI

Anak : Zaimah Firman

### Riwayat Pendidikan:

Mahasiswa Universitas Azhar Kairo Mesir pada tahun 1998 Fakultas Syari'ah wa al-Qanun, dan selesai tahun 2002. Pada tahun 2004 mendaftar program Magister pada IAIN Alauddin Makassar Konsentrasi Hukum Islam dan selesai tahun 2007. Pada tahun 2014 kembali mendaftar sebagai mahasiswa program Doktor konsentrasi Syari'ah Hukum Islam ke UIN Alauddin Makassar sebagai peserta BS Kemenag Diktis anggaran angkatan 2014.

### Kiprah dan Pengalaman Mengajar

- Sebagai karyawan di Ma'had al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dari tahun 2006-2010
- Dosen LB UNISMUH Makassar, 2008-2009
- Dosen LB di UIN Alauddin Makassar tahun 2007-2010
- Sebagai Tenaga Pengajar di STAIN Palopo tahun 2010 hingga sekarang
- Sebagai Staff Pusat Lembaga Bahasa STAIN Palopo, tahun 2011-2013
- Sebagai Sekretaris Unit Ma'had al-Jami'ah, Februari – April 2017
- Sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah IAIN Palopo hingga kini

### Kegiatan dan Karya Ilmiah

- Modul Ajar Pembelajaran Bahasa Arab Program Matrikulasi, tahun 2012, IAIN Palopo
- Perbandingan Mazhab dalam Lintasan Sejarah, (terbitan Guna Darma Ilmu: Makassar)
- Peran dan Efektifitas Pengelolaan Zakat di Kab. Bulukumba, Studi Kasus 12 Desa Muslim di Kabupaten Bulukumba, (Tesis)
- Kontribusi Umar bin Khattab dalam Mengembangkan Hukum Islam (Jurnal Kajian Hukum Islam, IAIN Palopo, Nopember 2013)
- Relevansi Nilai Hukum Islam dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Kepemilikan Tanah (Jurnal Kajian Hukum Islam, IAIN Palopo, Oktober 2013)
- Pengembangan Metode Ijtihad Istislahi dalam Maqasid al-Syari'ah (Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah, Fak. Syariah, IAIN Palopo, April 2014)
- Konstruksi Kekuatan Ekonomi Umat di Desa dengan Konsep Muzara'ah (Jurnal Ekonomi Muamalah, IAIN Palopo, April 2014)
- Spirit dan Nilai-nilai Ma'had al-Jami'ah dalam Membangun Mahasiswa Beriman dan Berakhlak, pada Program Mabit Ma'had al-Jami'ah Angkatan I Maret 2017.